



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 269/A/2025
TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO TAHUN 2025-2029

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang perlu ditanggulangi melalui pemenuhan hak dasar masyarakat secara layak berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat;
 - b. bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Daerah perlu disusun langkah yang strategis, menyeluruh, efisien, dan efektif serta terkoordinasi dan terpadu melalui penyusunan rencana penggulangan kemiskinan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana penanggulangan kemiskinan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

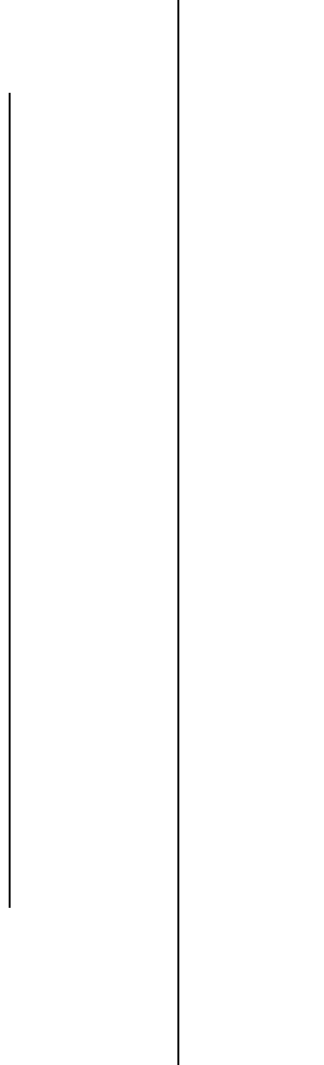
R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo;
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 269/A/2025
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO TAHUN 2025-2029

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO TAHUN 2025-2029



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO



RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)

KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025-2029



Source: Diklat, KP



Source: Diklat, KP



Kata Pengantar

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 berhasil diselesaikan. Dokumen ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk terus berupaya menanggulangi kemiskinan dengan perencanaan yang sistematis. Selain itu, dokumen ini juga merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja, Penyelarasan, serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Dokumen ini dirancang untuk selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai salah satu bentuk komitmen politik dalam menangani persoalan kemiskinan. Dokumen RPKD ini disusun sebagai pedoman kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara terarah, terencana, dan sinergis dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, perguruan tinggi, filantropi dan Masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

RPKD Kabupaten Kulon Progo memuat gambaran umum wilayah, profil kemiskinan, prioritas program, strategi penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem serta lokasi prioritas, untuk kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dokumen ini juga menjadi bagian integral dari RPJMD yang berlaku selama 5 tahun.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Harapan kami, RPKD Kabupaten Kulon Progo dapat dijadikan landasan dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan, selaras dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo.

Kulon Progo, 19 Desember 2024



Mubandis Nugroho, MMA,

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR GRAFIK	V
DAFTAR TABEL	XIII
DAFTAR GAMBAR	XVII
DAFTAR SINGKATAN	XVIII
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.3. Dasar Hukum dan Kebijakan Operasional	4
1.4. Hubungan Dokumen RPKD dengan Dokumen Perencanaan Daerah	5
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II. KONDISI UMUM DAERAH	9
2.1. Geografis dan Demografis Wilayah	9
2.1.1. Geografis	9
2.1.2. Demografis	25
2.2. Kesejahteraan Masyarakat	30
2.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi	34
2.4. Daya Saing SDM	36
2.5. Kesehatan	39
2.6. Pertanian	40
2.7. Pariwisata	42
BAB II. PROFIL KEMISKINAN DAERAH	49
3.1. Kondisi Umum Kemiskinan Kulon Progo	49
3.1.1. Kondisi Kemiskinan Makro.....	49
3.1.2. Kondisi Kemiskinan Mikro.....	57
3.2. Analisis Karakteristik Masalah Kemiskinan Konsumsi	66
3.2.1. Persentase Penduduk Miskin	66
3.2.2. Tingkat Kedalaman Kemiskinan	71
3.2.1. Tingkat Keparahan Kemiskinan	76

3.3. Analisis Karakteristik Masalah Pendidikan.....	82
3.3.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	83
3.3.2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	87
3.3.3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD	92
3.3.4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP.....	96
3.3.5. Harapan Lama Sekolah	100
3.3.6. Rata-Rata Lama Sekolah	104
3.4. Analisis Karakteristik Masalah Kesehatan.....	109
3.4.1. Angka Kematian Ibu (AKI)	109
3.4.2. Angka Kematian Bayi (AKB)	113
3.4.3. Angka Harapan Hidup.....	122
3.4.4. Angka Morbiditas	125
3.5. Analisis Karakteristik Masalah Ketenagakerjaan.....	130
3.5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	130
3.5.2. Tingkat Pengangguran Terbuka	135
3.6. Analisis Karakteristik Masalah Kesetaraan Gender	139
3.6.1. Indeks Pembangunan Gender	140
3.6.2. Indeks Pemberdayaan Gender	145
3.6.3. Indeks Ketimpangan Gender.....	149
3.7. Analisis Karakteristik Masalah Kesejahteraan Sosial	154
3.7.1. Jumlah Penduduk Disabilitas.....	154
3.7.2. Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar	158
3.7.3. Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	162
3.8. Analisis Karakteristik Masalah Infrastruktur Dasar	171
3.8.1. Proporsi Rumah dengan Sanitasi Layak	171
3.8.2. Proporsi Rumah dengan Air Minum Layak.....	175
3.8.3. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik.....	180
BAB IV. PRIORITAS PROGRAM	185
4.1. Analisis Determinan, Theory of Change dan Casual Attribution.....	185
4.1.1. Prioritas Intervensi Kemiskinan Konsumsi	185
4.1.2. Prioritas Intervensi Bidang Pendidikan.....	190
4.1.3. Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan.....	194
4.1.4. Prioritas Intervensi Bidang Ketenagakerjaan	200
4.1.5. Prioritas Intervensi Bidang Kesetaraan Gender	207
4.1.6. Prioritas Intervensi Bidang Kesejahteraan Sosial	211
4.1.7. Prioritas Intervensi Bidang Infrastruktur Dasar	217
4.2. Analisis Kondisi Fiskal	221
4.3. Faktor Pendorong dan Penghambat	228
4.4. Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan	233
4.5. Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem	235

BAB V. LOKASI PRIORITAS.....	238
5.1. Penentuan Lokasi Priortas Kapanewon	238
5.1.1. Lokasi Prioritas Kemiskinan Konsumsi	238
5.1.2. Lokasi Prioritas Bidang Pendidikan	241
5.1.3. Lokasi Prioritas Bidang Kesehatan	244
5.1.4. Lokasi Prioritas Bidang Ketenagakerjaan	246
5.1.5. Lokasi Prioritas Bidang Kesetaraan Gender	249
5.1.6. Lokasi Prioritas Bidang Kesejahteraan Sosial	256
5.1.7. Lokasi Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar	263
5.1.8. Lokus Penanggulangan Kemiskinan Kapanewon	266
5.2. Penentuan Lokasi Priortas Kalurahan	267
5.2.1. Lokasi Prioritas Kemiskinan Konsumsi	267
5.2.2. Lokasi Prioritas Bidang Pendidikan	270
5.2.3. Lokasi Prioritas Bidang Kesehatan	268
5.2.4. Lokasi Prioritas Bidang Ketenagakerjaan	275
5.2.5. Lokasi Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar	277
5.2.9. Lokus Penanggulangan Kemiskinan Kalurahan	279
5.3. Rekomendasi	281
5.4. Target Penurunan Kemiskinan.....	284
BAB VI. PENUTUP	285
6.1. Matriks Prioritas Bidang Pendidikan.....	286
6.2. Matriks Prioritas Bidang Ketenagakerjaan	289
6.3. Matriks Prioritas Bidang Kesejahteraan Sosial	292
6.4. Matriks Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar	294
6.5. Matriks Prioritas Bidang Kesetaraan Gender.....	298
6.6. Matriks Prioritas Bidang Kesehatan	301

Daftar Grafik

1.1	Posisi Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi DIY tahun 2024	2
1.2	Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2015 – 2024	3
2.1	Piramida Penduduk Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023	28
2.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY, dan Nasional, 2019-2023	38
3.1	Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dan Indonesia, 2020-2024 (persen)	49
3.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dan Indonesia, 2020-2024	53
3.3	Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dan Indonesia, 2020-2024	54
3.4	Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dan Indonesia, 2020 – 2024 (rupiah/kapita/bulan)	56
3.5	Jumlah Kepala Keluarga Perempuan dan Kepala Keluarga Perempuan Tidak Bekerja per Kapanewon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024	62
3.6	Individu Desil 1-4 berdasarkan kelompok usia Per Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024	64
3.7	Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024	67
3.8	Perkembangan Persentase Jumlah Penduduk Miskin (%) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 – 2024	68
3.9	Grafik Efektivitas Persentase Penduduk Miskin (%) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 – 2024	69
3.10	Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020 – 2024	70
3.11	Posisi Relatif Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Provinsi D.I Yogyakarta, Tahun 2024	72
3.12	Perkembangan Antar Waktu Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020 – 2024	73
3.13	Analisis Efektivitas Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020 – 2024	74
3.14	Analisis Relevansi Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020 - 2024	75

3.15	Posisi Relatif Indeks Keparahan kemiskinan (P2) Provinsi D.I Yogyakarta, Tahun 2024	76
3.16	Analisis Perkembangan Antar Waktu Indeks Keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020 - 2024	77
3.17	Analisis Efektivitas Indeks Keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020 - 2024	78
3.18	Analisis Relevansi Indeks Keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020 - 2024	79
3.19	Presentase Penduduk Miskin Ekstrem di D.I Yogyakarta dan Nasional Tahun 2021-2024	80
3.20	Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2021-2024	81
3.21	Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2023	84
3.22	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2019 - 2023	85
3.23	Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2019 - 2023	86
3.24	Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2019 - 2023	87
3.25	Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2023	88
3.26	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2019 - 2023	89
3.27	Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2019 - 2023	90
3.28	Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2019 - 2023	91
3.29	Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2023	92
3.30	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2019 - 2023	93
3.31	Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2019 - 2023	94
3.32	Relevansi Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kabupaten Kulon	95

	Progo, Tahun 2019 – 2023	
3.33	Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2023	96
3.34	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2019 – 2023	97
3.35	Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2019-2023	98
3.36	Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2019 – 2023	99
3.37	Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Provinsi DIY (%) Tahun 2024	100
3.38	Perkembangan Antar Waktu Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024	101
3.39	Analisis Efektivitas Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024	102
3.40	Analisis Relevansi Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024	103
3.41	Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024	104
3.42	Perkembangan Antar Waktu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024	105
3.43	Analisis Efektivitas Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024	106
3.44	Analisis Relevansi Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024	107
3.45	Posisi Relatif Angka Kematian Ibu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023	109
3.46	Perkembangan Angka Kematian Ibu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023	110
3.47	Analisis Efektivitas Angka Kematian Ibu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023	111
3.48	Analisis Relevansi Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kulon Progo, DIY dan Nasional Tahun 2019-2023	112
3.49	Posisi Relatif Angka Kematian Bayi Kabupaten/Kota DIY Tahun 2023	114
3.50	Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Bayi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023	115
3.51	Analisis Efektivitas Angka Kematian Bayi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023	116
3.52	Analisis Relevansi Angka Kematian Bayi Kabupaten Kulon Progo dengan DIY Tahun	117

	2019-2023	
3.53	Posisi Relatif Prevalensi Stunting Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2023	118
3.54	Perkembangan Antar Waktu Prevalensi Stunting Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023	119
3.55	Analisis Efektivitas Prevalensi Stunting Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023	120
3.56	Analisis Relevansi Prevalensi Stunting Kabupaten Kulon Progo dengan DIY dan Nasional Tahun 2019-2023	121
3.57	Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023	122
3.58	Perkembangan Antar Waktu Angka Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023	123
3.59	Analisis Angka Harapan Hidup Kulon Progo Tahun 2019-2023	124
3.60	Analisis Relevansi Angka Harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Kulon Progo dengan DIY dan Nasional Tahun 2019-2023	125
3.61	Posisi Relatif Angka Morbiditas (%) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023	126
3.62	Perkembangan Antar Waktu Angka Morbiditas (%) Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2019-2023	127
3.63	Analisis Efektivitas Angka Morbiditas (%) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023	128
3.64	Analisis Relevansi Angka Morbiditas (%) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023	129
3.65	Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2023	131
3.66	Perkembangan Antar Waktu TPAK Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023	132
3.67	Analisis Efektifitas TPAK Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023	133
3.68	Analisis Relevansi TPKA Kabupaten Kulon Progo dengan Provinsi DIY dan Nasional Tahun 2019-2023	134
3.69	Posisi Relatif TPT Provinsi DIY Tahun 2023	135
3.70	Perkembangan Antar Waktu TPT Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023	136
3.71	Analisis Efektivitas TPT Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023	137
3.72	Analisis Relevansi TPT Kabupaten Kulon Progo dengan Provinsi DIY dan Nasional Tahun 2019-2023	138
3.73	Grafik Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi DI. Yogyakarta Tahun 2023	141
3.74	Perkembangan Antar Waktu Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 – 2023	142

3.75	Analisis Efektivitas Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 – 2023	143
3.76	Relevansi Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kulon Progo dan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2019 – 2023	144
3.77	Relatif Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2023	145
3.78	Perkembangan Antar Waktu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 – 2023	146
3.79	Analisis Efektivitas Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 – 2023	147
3.80	Relevansi Indeks Pemberdayaan Gender (IDP) di Kabupaten Kulon Progo dengan Provinsi D.I. Yogyakarta dan Nasional Tahun 2019 – 2023	148
3.81	Posisi Relatif Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2023	150
3.82	Perkembangan Antar Waktu Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 – 2023	151
3.83	Analisis Efektivitas Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 – 2023	152
3.84	Relevansi Indeks Ketimpangan Gender (IKP) Kabupaten Kulon Progo dan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2019 – 2023	153
3.85	Posisi Relatif Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2023	155
3.86	Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023	156
3.87	Analisis Efektivitas Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023	157
3.88	Analisis Relevansi Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten Kulon Progo dengan DIY Tahun 2019-2023	158
3.89	Posisi Relatif Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2023	159
3.90	Analisis Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023	160
3.91	Analisis Efektivitas Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023	161
3.92	Analisis Relevansi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Kabupaten Kulon Progo dengan DIY Tahun 2019-2023	162

3.93	Posisi Relatif Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi DIY Tahun 2023	163
3.94	Perkembangan Antar Waktu Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023	164
3.95	Analisis Efektivitas Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023	165
3.96	Analisis Relevansi Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023	166
3.97	Posisi Relatif Jumlah Anak Terlantar Kabupaten/Kota Provinsi DIY Tahun 2023	167
3.98	Analisis Perkembangan Antar Waktu Jumlah Anak Terlantar Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023	168
3.99	Analisis Efektivitas Jumlah Anak Terlantar Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023	169
3.100	Analisis Relevansi Jumlah Anak Terlantar Kabupaten Kulon Progo dengan DIY Tahun 2019-2023	170
3.101	Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2023	172
3.102	Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2019 - 2023	173
3.103	Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2019 - 2023	174
3.104	Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2019 - 2023	175
3.105	Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2023	176
3.106	Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2019 - 2023	177
3.107	Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2019 - 2023	178
3.108	Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2019 - 2023	179
3.109	Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023	180
3.110	Perkembangan Antar Waktu Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023	181

3.111	Analisis Efektivitas Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023	182
3.112	Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023	183
4.1	Analisis Identifikasi Masalah Indeks Keperahan Kemiskinan (P2)	186
4.2	Casual Attribution Bidang Kemiskinan Konsumsi	187
4.3	Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Kasar	191
4.4	Casual Attribution Bidang Pendidikan	192
4.5	Analisis Identifikasi Masalah Prevalensi Stunting	196
4.6	Casual Attribution Bidang Kesehatan	197
4.7	Analisis Identifikasi Masalah Tingkat Pengangguran Terbuka	201
4.8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Pendidikan di Kabupaten Kulon Progo, 2023	203
4.9	Casual Attribution Bidang Ketenagakerjaan	204
4.10	Analisis Masalah Bidang Kesetaraan Gender Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2019-2023`	208
4.11	Casual Attribution Bidang Kesetaraan Gender	209
4.12	Analisis Masalah Jumlah Penduduk Disabilitas	212
4.13	Analisis Masalah Jumlah Anak Terlantar	213
4.14	Casual Attribution Bidang Sosial	214
4.15	Analisis Identifikasi Masalah Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 - 2023	218
4.16	Casual Attribution Bidang Infrastruktur Dasar	219
4.17	Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 - 2023	224
4.18	Proporsi Pendapatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 - 2023	226
5.1	Analisis Kuadran Jumlah Penduduk Miskin Desil 1 dan 2 Terhadap Jumlah Kepala Keluarga Perempuan tidak Bekerja	238
5.2	analisis kuadran Lokasi prioritas bidang pendidikan	241
5.3	Analisis Kuadran Lokasi Prioritas Bidang Kesehatan	244
5.4	analisis kuadran lokasi prioritas bidang ketenagakerjaan	247
5.5	Analisis Kuadran Lokasi Prioritas Bidang Kesetaraan Gender	250
5.6	Analisis Kuadran Lokasi Prioritas Bidang Kesetaraan Gender	252
5.7	Analisis Kuadran Lokasi Prioritas Bidang Kesetaraan Gender	254
5.8	Analisis Kuadran Lokasi Prioritas Bidang Sosial (Indikator Jumlah Disabilitas)	256

5.9	Analisis Kuadran Lokasi Prioritas Bidang Sosial (Indikator Jumlah Disabilitas dengan Jumlah Jumlah Penduduk Miskin Desil 1-2)	258
5.10	Analisis Kuadran Lokasi Prioritas Bidang Sosial (Indikator Jumlah Anak Terlantar)	260
5.11	Analisis Kuadran Lokasi Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar	263
5.12	Kuadran Jumlah Penduduk Miskin Desil 1 dan 2 dan Jumlah KK Perempuan Tidak Bekerja Desil 1 dan 2 per Kalurahan , Kabupaten Kulon Progo	267
5.13	Kuadran Jumlah Pengelompokan Jumlah Anak Usia 12 - 17 Tahun Tidak Sekolah dan Persentase Penduduk Miskin Desil 1 dan 2 per Kalurahan, Kabupaten Kulon Progo	270
5.14	Kuadran Prevalensi Stunting Desil 1-2 dan Gizi Buruk Desil 1-2 per Kalurahan Kabupaten Kulon Progo	272
5.15	Kuadran Pengelompokan Jumlah Usia 15 - 65 Tahun yang Tidak Bekerja dan Persentase Penduduk Miskin Desil Desil 1-2 per Kalurahan Kabupaten Kulon Progo	275
5.16	Kuadran Pengelompokan Sanitasi Tidak Layak dan Penduduk Miskin Desil Desil 1-2 per Kalurahan Kabupaten Kulon Progo	277
5.17	Target Penurunan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo 2025-2029	284

Daftar Tabel

1.1	Target Penurunan Angka Kemiskinan Nasional. Provinsi DIY, dan Kabupaten Kulon	1
-----	---	----------

Progo Tahun 2029		
2.1	Luas Wilayah dan Persentase menurut Kapanewon Kabupaten Kulon Progo	10
2.2	Luas Wilayah berdasarkan Kemiringan Lereng Kabupaten Kulon Progo	13
2.3	Pembagian Wilayah Berdasar Ketinggian Lahan Kabupaten Kulon Progo	14
2.4	Pengelompokan Batuan Berdasarkan Jenis Batuan Kabupaten Kulon Progo	16
2.5	Stratigrafi Formasi Geologi Kabupaten Kulon Progo	17
2.6	Sumber Mata Air di Kabupaten Kulon Progo dan Cekungan Air Tanah Wates	18
2.7	Potensi Energi Baru dan Terbarukan Kabupaten Kulon Progo	19
2.8	Nama DAS, Sub DAS dan Luasan Kabupaten Kulon Progo	20
2.9	Inventarisasi Sungai di Kabupaten Kulon Progo	22
2.10	Curah Hujan dan Hari Hujan Per Bulan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2023	24
2.11	Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023	26
2.12	Jumlah Penduduk Menurut Batasan Umur di Kabupaten Kulon Progo (jiwa) Tahun 2019-2023	27
2.13	Data Sex Ratio Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023	28
2.14	Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Per Kapanewon Tahun 2019-2023	29
2.15	Kepadatan Penduduk Dirinci Per Kapanewon Tahun 2017-2021 (jiwa/ km ²)	30
2.16	PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (dalam Juta Rupiah)	32
2.17	PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan (=2010) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (dalam Juta Rupiah)	33
2.18	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (=2010) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023 (persen)	35
2.19	Indikator Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, 2019-2023	37
2.20	Sarana kesehatan dan tenaga medis Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023	39
2.21	Kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023	40
2.22	Sebaran Peruntukan Ruang berdasarkan Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo (Bagian Kawasan Budidaya)	41
2.23	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar, 2019-2023	42
2.24	Perkembangan Kunjungan Wisatawan ke Destinasi Wisata yang Dikelola Pemerintah (Dinas Pariwisata) Kabupaten Kulon Progo, 2019-2023	43
2.25	Perkembangan Pendapatan Retribusi Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, 2019-	44

	2023	
2.26	Kunjungan Wisatawan Pada Destinasi Wisata di Kabupaten Se-DIY (Jumlah Pengunjung Per Orang) Tahun 2019-2023	45
2.27	Perkembangan Wisatawan ke Obyek Wisata Non Bertribusi Kabupaten Kulon Progo, 2019-2023	46
2.28	Data Pemandu Wisata Kabupaten Kulon Progo, 2019-2023	46
2.29	Perkembangan Usaha Jasa Pariwisata Berizin Kabupaten Kulon Progo, 2019-2022	47
3.1	Persentase Penduduk Miskin (P ₀) Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dan Indonesia, 2020-2024 (persen)	50
3.2	Angka Kemiskinan (P ₀) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta, 2020 - 2024 (persen)	51
3.3	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dan Indonesia, 2020 - 2024 (000 jiwa)	51
3.4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P ₁) Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dan Indonesia, 2020 - 2024	53
3.5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P ₂) Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dan Indonesia, 2019 - 2023	55
3.6	Garis Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta, dan Indonesia, 2020 - 2024 (rupiah/kapita/bulan)	57
3.7	Jumlah penduduk miskin desil 1 - 4 per Kapanewon Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024	59
3.8	Jumlah Kepala Keluarga Perempuan dan Kepala Keluarga Perempuan tidak bekerja per Kapanewon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024	61
3.9	Individu Desil 1-4 berdasarkan kelompok usia Per Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024	63
3.10	Jumlah Penduduk Miskin Desil 1 dan 2 per Kapanewon, Kabupaten Kulon Progo	65
3.11	Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2021-2024	80
3.12	Masalah Kemiskinan Konsumsi	82
3.13	Masalah Bidang Pendidikan	108
3.14	Analisis Masalah Bidang Kesehatan	130
3.15	Masalah Bidang Ketenagakerjaan	139
3.16	Masalah Bidang Kesetaraan Gender	154
3.17	Analisis Masalah Sosial	171

3.18	Masalah Bidang Infrastruktur Dasar	184
4.1	Masalah Kemiskinan Konsumsi	185
4.2	Identifikasi Modus Intervensi	189
4.3	Masalah Bidang Pendidikan	190
4.4	Identifikasi Modus Intervensi Bidang Pendidikan	194
4.5	Masalah Bidang Kesehatan	195
4.6	Identifikasi Modus Intervensi Bidang Kesehatan	199
4.7	Masalah Bidang Ketenagakerjaan	200
4.8	Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Kulon Progo, Agustus 2023	201
4.9	Presentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Kulon Progo, Agustus 2021-2023	202
4.10	Identifikasi Modus Intervensi Bidang Ketenagakerjaan	206
4.11	Masalah Bidang Kesetaraan Gender	207
4.12	Masalah Bidang Sosial	211
4.13	Identifikasi Modus Intervensi Bidang Sosial	216
4.14	Masalah Bidang Infrastruktur	217
4.15	Identifikasi Modus Intervensi Bidang Infrastruktur Dasar	220
4.16	APBD Kulon Progo Tahun 2019-2023	222
4.17	Belanja Daerah pada APBD Kulon Progo tahun 2019-2023	223
4.18	Pendapatan Daerah Kabupaten Kulon Progo 2019-2023	226
4.19	Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2019-2023	227
4.20	Faktor Pendorong dan Penghambat Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo	228
5.1	lokasi prioritas bidang konsumsi	239
5.2	Lokasi prioritas bidang pendidikan	242
5.3	Lokasi prioritas bidang kesehatan	244
5.4	lokasi priortas bidang ketenagakerjaan	248
5.5	Lokasi Prioritas Bidang Kesetaraan Gender	251
5.6	Lokasi Prioritas Bidang Kesetaraan Gender	252
5.7	Lokasi Prioritas Bidang Kesetaraan Gender	254
5.8	Lokasi Prioritas Sosial	257
5.9	Lokasi Prioritas Sosial	259

5.10	Lokasi Prioritas Sosial	261
5.11	Lokasi Priortas Bidang Insfrastruktur Dasar	264
5.12	Komposit Penentuan Prioritas Kapanewon	266
5.13	Daftar Lokasi Prioritas Kalurahan Bidang Konsumsi, Kabupaten Kulon Progo	268
5.14	Daftar Lokasi Prioritas Kalurahan Bidang Pendidikan, Kabupaten Kulon Progo	270
5.15	Daftar Lokasi Prioritas Kalurahan Bidang Kesehatan, Kabupaten Kulon Progo	273
5.16	Daftar Lokasi Prioritas Kalurahan Bidang Ketenagakerjaan, Kabupaten Kulon Progo	275
5.17	Daftar Lokasi Prioritas Kalurahan Bidang Infrastruktur Dasar, Kabupaten Kulon Progo	278
5.18	Komposit Penentuan Prioritas Kapanewon	280
5.19	Rekomendasi untuk Faktor Permasalahan tiap Bidang	281
5.20	Target Penurunan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo 2025-2029	284
6.1	Matriks Prioritas Bidang Pendidikan	286
6.2	Matriks Prioritas Bidang Ketenagakerjaan	289
6.3	Matriks Prioritas Bidang Kesejahteraan Sosial	292
6.4	Matriks Prioritas Bidang Insfrastruktur Dasar	294
6.5	Matriks Prioritas Bidang Kesetaraan Gender	298
6.6	Matriks Prioritas Bidang Kesehatan	301

Daftar Gambar

2.1	Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo	11
-----	---	----

2.2	Posisi Geostrategic Kabupaten Kulon Progo	12
2.3	Peta Ketinggian Lahan Kabupaten Kulon Progo	14
2.4	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kulon Progo	25
4.1	Teori Perubahan (ToC) Bidang Konsumsi	188
4.2	Teori Perubahan (ToC) Bidang Pendidikan	193
4.3	Teori Perubahan (ToC) Bidang Kesehatan	198
4.4	Teori Perubahan (ToC) Bidang Ketenagakerjaan	205
4.5	Teori Perubahan (ToC) Bidang Kesetaraan Gender	210
4.6	Teori Perubahan (ToC) Bidang Sosial	215
4.7	Teori Perubahan (TOC) Bidang Infrastruktur Dasar	220
5.1	Peta Lokasi Prioritas Bidang Kemiskinan Konsumsi	240
5.2	Peta Lokasi prioritas bidang pendidikan	243
5.3	Peta Lokasi Prioritas Bidang Kesehatan	246
5.4	Peta lokasi prioritas bidang ketenagakerjaan	249
5.5	Peta lokasi prioritas bidang kesetaraan gender	251
5.6	Peta lokasi prioritas bidang kesetaraan gender	253
5.7	Peta lokasi prioritas bidang kesetaraan gender	255
5.8	Peta Lokasi Prioritas Bidang Sosial (Jumlah Disabilitas)	258
5.9	Peta Lokasi Prioritas	260
5.10	Peta Lokasi Prioritas Bidang Sosial (Jumlah Anak Terlantar)	262
5.11	Peta Lokasi Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar	265

Daftar Singkatan

ADHK

Atas Dasar Harga Konstan

AFLP	Acute Faty Liver of Pregnancy
AHH	Angka Harapan Hidup
AKB	Angka Kematian Bayi
AKI	Angka Kematian Ibu
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
ASI	Air Susu Ibu
BANSOS	Bantuan Sosial
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBLR	Berat Badan Lahir Rendah
BIY	Bandara Internasional Yogyakarta
BKB	Bina Keluarga Balita
BKR	Bina Keluarga Remaja
BLK	Balai Latihan Kerja
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPS	Badan Pusat Statistik
CAT	Cekungan Air Tanah
DAK	Dana Alokasi Khusus
DAS	Daerah Aliran Sungai
DAU	Dana Alokasi Umum
DD	Dana Desa
DINKES	Dinas Kesehatan
DINKOP UKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro
DINSOS	Dinas Sosial
Disnaker	Dinas Ketenagakerjaan
DISPERINDAG	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DIY	Daerah Istimewa Yogyakarta
DPU	Dinas Pekerjaan Umum
DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
ESDM	Energi Sumber Daya Mineral
GK	Garis Kemiskinan
HA	Hektar

HET	Harga Eceran Tertinggi
HLS	Harapan Lama Sekolah
HPK	Hari Pertama Kelahiran
IDG	Indeks Pemberdayaan Gender
IKFD	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
IKG	Indeks Ketimpangan Gender
IPG	Indeks Pembangunan Gender
IPLT	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
JJLS	Jalur Jalan Lintas Selatan
KAB	Kabupaten
KB	Keluarga Berencana
KEMENKES	Kementerian Kesehatan
KEMENKEU	Kementerian Keuangan
KEPRES	Keputusan Presiden
KFD	Kapasitas Fiskal Daerah
KIP	Kartu Indonesia Pintar
KIS	Kartu Indonesia Sehat
KP2B	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
KRTP	Kepala Rumah Tangga Perempuan
KSPN	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
KUBE	Kelompok Usaha Bersama
LP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
LP2KD	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
MDGS	Milenium Development Goals
MDPL	Meter Diatas Permukaan Laut
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MODS	Multi Organ Dysfunction Syndrome
MPASI	Makanan Pendamping ASI
MRMN	Manual Rujukan Maternal Neonatal
MTS	Madrasah Tsanawiyah
NYIA	New Yogyakarta Airport
P3KE	Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa

PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PERBUP	Peraturan Bupati
PERDA	Peraturan Daerah
PERMENDAGRI	Peraturan Menteri Dalam Negeri
PERPRES	Peraturan Presiden
PHA	Program Pemenuhan Hak Anak
PIP	Program Indonesia Pintar
PKHA	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
PMA	Penanaman Modal Asing
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PMKS	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PMT	Pemberian Makanan Tambahan
Posyandu	Pos Pelayanan Terpadu
PP	Peraturan Pemerintah
REGSOSEK	Registrasi Sosial Ekonomi
RINDU KIA	Jejaring Peduli Kesehatan Ibu dan Anak
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RLS	Rata-Rata Lama Sekolah
RP	Rupiah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPKD	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
SD	Sekolah Dasar
SDGS	Sustainable Development Goals
SDM	Sumber Daya Manusia
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SPAL	Sistem Pengolahan Air Limbah
SPALD	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
SPAM	Sistem Penyediaan Air Minum
SPM	Standar Pelayanan Minimal

SSGI	Survei Status Gizi Indonesia
SUSENAS	Survey Sosial Ekonomi Nasional
TB	Tuberkulosis
TDUP	Tanda Daftar Usaha Pariwisata
TKDD	Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
TOC	Theory of Change
TP PKK	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
UKM	Kesehatan Masyarakat
UKP	Upaya Kesehatan Perorangan
UMKM	Usaha Menengah Kecil Mikro
UPT	Unit Pelayanan Terpadu
USD	Dollar Amerika Serikat
UU	Undang-Undang
WHO	World Health Organization

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu penanggulangan kemiskinan masih menjadi target dan sekaligus tantangan di tingkat global, nasional, hingga daerah. Di tingkat Global, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2000 menyepakati tujuan pembangunan global (MDGs) yang salah satu tujuannya adalah pengurangan kemiskinan dengan target mengurangi separuh proporsi penduduk yang hidup dengan pendapatan kurang dari USD 1,25 per hari pada tahun 2015¹. Target tersebut kembali disepakati negara-negara PBB melalui Sustainable Development Goals (SDGs) yang salah satu tujuan dan targetnya adalah penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada tahun 2030².

Di tingkat nasional, penanggulangan kemiskinan sudah menjadi perhatian khusus pemerintah lintas periode, termasuk periode saat ini. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Teknokratik tahun 2005-2025 dan RPJP tahun 2025-2045 penanggulangan kemiskinan ditetapkan sebagai sasaran utama. Bahkan pada tahun 2045, sebagaimana ditetapkan dalam sasaran kedua RPJP, pemerintah menargetkan kemiskinan di Indonesia berada pada angka 0,5-0,8%. Target jangka panjang tersebut juga dituangkan dalam target jangka menengah nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024-2029 pemerintah menargetkan pada tahun 2029 kemiskinan di Indonesia berada pada angka 4,5%.

Tabel 1.1 Target Penurunan Angka Kemiskinan Nasional, Provinsi DIY dan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2029

Tingkat Pemerintah	Angka Kemiskinan Tahun 2024 (%)	Target Penurunan Tahun 2029 (%)
Nasional	9,03	4,5
Provinsi DIY	10,83	6,36 - 6,86
Kab. Kulon Progo	15,62	12,40 - 13,40

Sumber:

1. Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025 - 2029
2. Rancangan Teknokratik RPJMD Kulon Progo Tahun 2025 - 2029

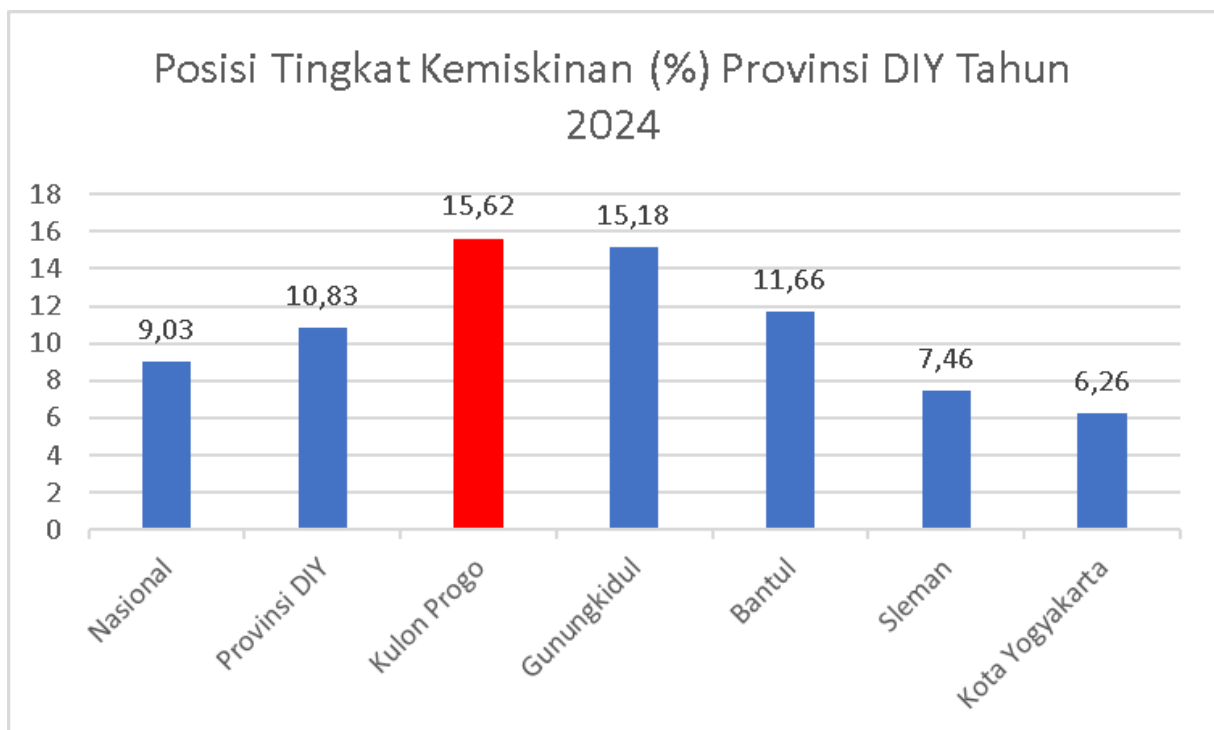
¹ <https://sdgs.un.org/documents/ares552-united-nations-millennium-declaration-19202>

² <https://sdgs.un.org/2030agenda>

Di tingkat Provinsi, penanggulangan kemiskinan juga menjadi agenda utama pemerintah. Posisi DIY yang menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di pulau jawa dan menjadi salah satu dari 15 Provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan dua digit membuat kebijakan dan fokus utama pembangunan di Provinsi DIY juga diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2029, pemerintah DIY menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6,11%. Dalam tema pembangunan Provinsi, salah satu wilayah yang menjadi sasaran utama ialah Kabupaten Kulon Progo.

Sementara di Kabupaten Kulon Progo, penanggulangan kemiskinan memang menjadi keniscayaan. Hingga tahun 2024, berdasarkan data Susenas Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan di Kulon Progo menjadi berada di angka 15,62%. Bersama Kabupaten Gunungkidul dan Bantul, pada tahun 2024, Kabupaten Kulon Progo memiliki tingkat kemiskinan di bawah rata-rata Provinsi dan Nasional. Oleh karena itu, pada tahun 2029, pemerintah Kulon Progo menargetkan kemiskinan turun menjadi 12,40 - 13,40%.

Grafik 1.1 Posisi Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi DIY Tahun 2024

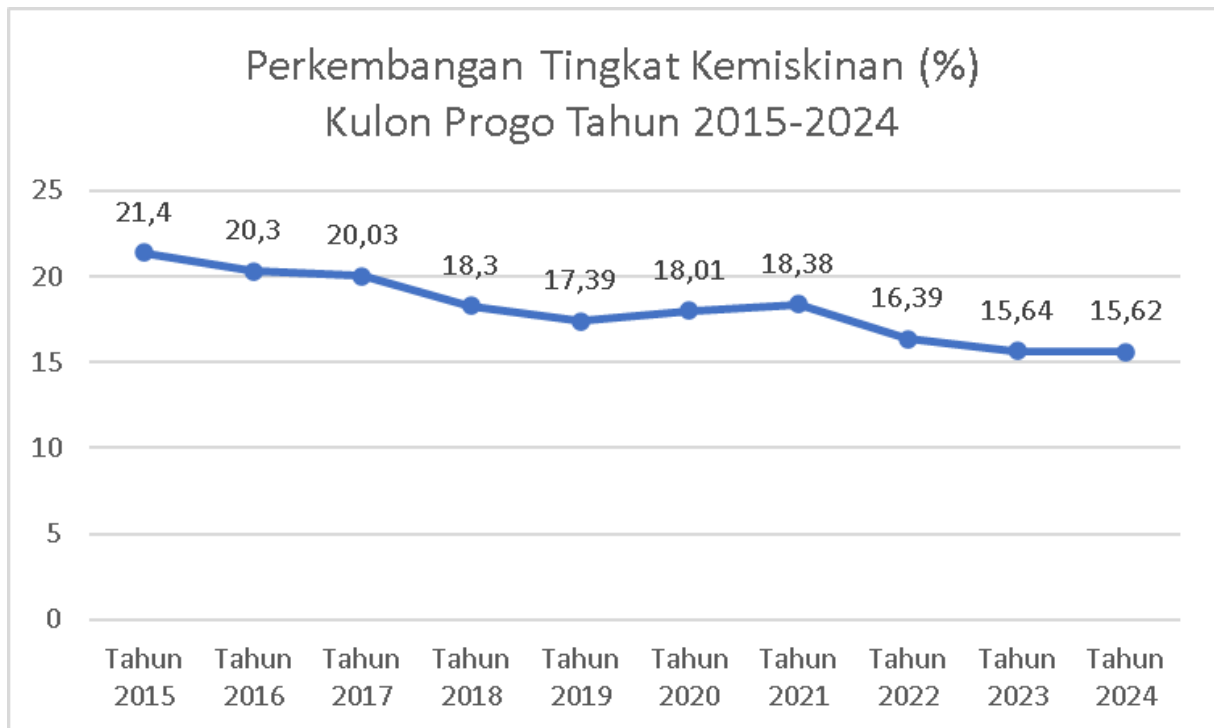


Sumber: BPS (Susenas), 2024.

Target tersebut tentu tidak akan mudah dicapai, apalagi jika melihat tren penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo yang cenderung melambat. Dalam 10 tahun terakhir, sejak tahun 2015 hingga tahun 2024, total penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo hanya 5,78%. Artinya rata-rata penurunannya sebesar 0,57%. Kabupaten Kulon Progo

juga sempat mengalami periode kenaikan angka kemiskinan pada tahun 2021 dan 2022 imbas pandemi covid-19 yang membuat kontraksi di segala sektor, khususnya sektor ekonomi. Hal tersebut berimplikasi terhadap tidak tercapainya target penurunan kemiskinan yang sudah dicanangkan dalam RPJP Daerah dan RPJM Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Grafik 1.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2015 - 2024



Untuk menanggulangi kemiskinan, ada banyak upaya yang bisa dilakukan. Salah satunya ialah perencanaan program yang terukur, baik dari sisi analisis penyebab, strategi program dan wilayah serta perbaikan kualitas data sasaran. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota memberikan mandat kepada pemerintah daerah melalui TKPK untuk menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Dokumen perencanaan ini dapat menjadi acuan multipihak untuk mengintervensi penanggulangan kemiskinan di daerah. Selain itu, melalui RPKD, pemerintah dapat melihat kondisi existing karakteristik kemiskinan di daerah, baik kemiskinan konsumsi maupun non konsumsi.

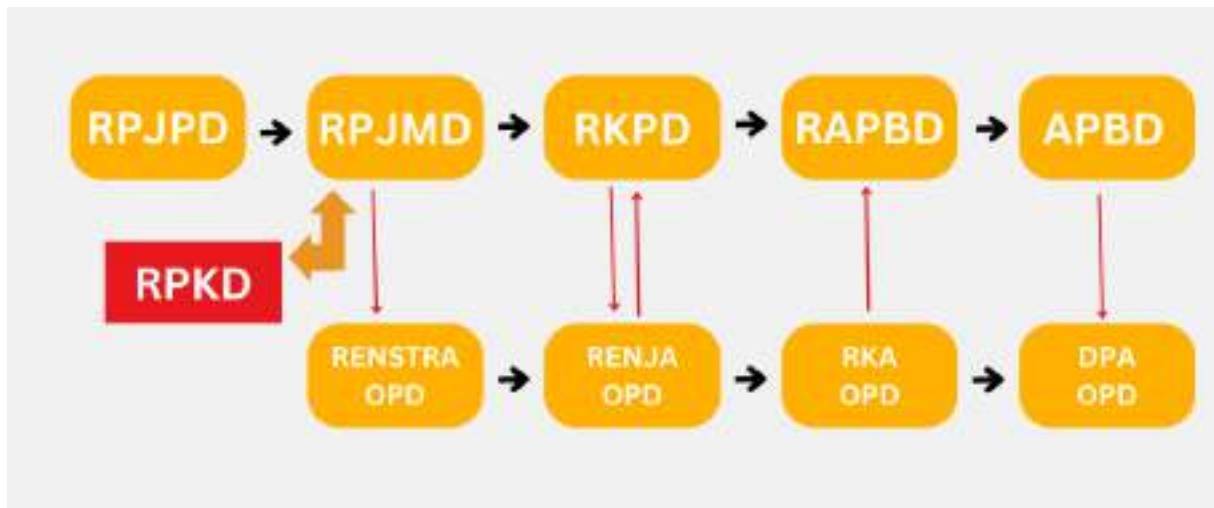
1.2 Maksud dan Tujuan

1. Memetakan profil dan kondisi kemiskinan Kabupaten Kulon Progo, baik dari sisi posisi relatif, perkembangan, efektivitas, dan relevansi dengan tingkat provinsi dan nasional.
2. Memetakan tantangan dan faktor determinan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo.
3. Merumuskan intervensi kebijakan dan program untuk menanggulangi kemiskinan.
4. Mendorong sinergi, konvergensi dan kolaborasi dalam pensasaran prioritas program dan wilayah kantong-kantong kemiskinan.

1.3 Dasar Hukum dan Kebijakan Operasional

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan penanggulangan kemiskinan yang mendelegasikan pembentukan tugas pokok dan fungsi TKPK di daerah;
4. Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan sebagai arah implementasi program-program percepatan penanggulangan kemiskinan;
5. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengatur fungsi TKPL dalam koordinasi dan pengendalian;
7. Keputusan Presiden No. 10 tahun 2011 tentang koordinasi peningkatan dan perluasan program-program rakyat;
8. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo tahun 19 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

1.4. Hubungan Dokumen RPKD dengan Dokumen Perencanaan Daerah



Dokumen RPKD disusun untuk memberikan kontribusi terhadap target RPJPD dan RPJMD, khususnya terkait penanggulangan kemiskinan. Selain itu, RPKD tahun 2025-2029 juga memiliki keterkaitan erat dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045. Dokumen RPKD merupakan bagian dari dokumen perencanaan yang mendukung visi dan misi RPJPD dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

RPJPD Kulon Progo tahun 2025-2045 memiliki visi “Kulon Progo yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya dan Berkelanjutan (SEMARAK)”. Visi tersebut menggambarkan bahwa penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan menjadi salah satu sasaran utama dengan target tingkat kemiskinan pada tahun 2025 turun menjadi 14,12%-15, 12%. RPJPD juga memiliki target penurunan tingkat kemiskinan hingga mencapai angka 5,52%-6,52% pada tahun 2045. Dalam konteks ini, posisi RPKD untuk mendukung target RPJPD sangat penting, di mana dalam target tahunan RPKD, penanggulangan kemiskinan disusun dengan pendekatan program, sasaran dan lokasi prioritas. Pendekatan ini, selain mempermudah dalam penyusunan perencanaan program, juga dapat menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Selain itu, RPKD juga dapat dijadikan dokumen praktis dalam membangun kemitraan dan komplementaritas program daerah dengan program nasional dan sektor swasta, sehingga dapat mengakselerasi target dalam RPJPD.

Misi 1 RPJPD pada periode 2025-2029 adalah fokus pada pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, serta penguatan karakter lokal untuk membentuk masyarakat yang maju dan berbudaya. Dalam konteks ini, kontribusi dokumen RPKD ialah memberikan gambaran dan analisis mendalam tentang kondisi kemiskinan makro dan mikro terhadap indikator bidang pendidikan, kesehatan dan sosial. Dokumen

RPKD juga memberikan rekomendasi strategi dan pengembangan program-program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kulon Progo yang sejalan dengan target Pembangunan RPJPD.

1.5.Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB Sub Bahasan

- BAB 1 A. Latar Belakang
 B. Dasar Hukum dan Kebijakan Operasional
 C. Tujuan
 D. Hubungan Dokumen RPKD dengan Dokumen Perencanaan Daerah
 E. Sistematika Penulisan

BAB II Kondisi Umum Daerah

1. Geografi
2. Demografi
3. Perekonomian
4. Pemerintahan
5. Kesehatan
6. Pendidikan
7. Pariwisata

BAB III Profil Kemiskinan Daerah

3.1 Kondisi Umum Kemiskinan (Makro/Mikro)

3.2. Analisis Kemiskinan Konsumsi (P0, P1, dan P2)

- Persentase Penduduk Miskin
- Jumlah Penduduk Miskin
- Tingkat Kedalaman Kemiskinan
- Tingkat Keparahan Kemiskinan

3.3 Pendidikan

- Angka Partisipasi Kasar SD
- Angka Partisipasi Kasar SMP
- Angka Partisipasi Murni SD

- Angka Partisipasi Murni SMP
- Harapan Lama Sekolah
- Rata-Rata Lama Sekolah

3.4 Kesehatan

- Angka Kematian Ibu
- Angka Kematian Bayi
- Angka Harapan Hidup
- Prevalensi Stunting
- Angka Morbiditas

3.5 Ketenagakerjaan

- Tingkat Pengangguran Terbuka
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

3.6. Kesetaraan Gender

- Indeks Pembangunan Gender
- Indeks Pemberdayaan Gender
- Indeks Ketimpangan Gender

3.7. Kesejahteraan Sosial

- Jumlah Penduduk Disabilitas
- Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar
- Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
- Jumlah Anak Terlantar

3.8. Infrastruktur Dasar

- Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi layak
- Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak
- Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik

BAB IV Prioritas Program

A. Analisis Prioritas Masalah (Determinan Kemiskinan)

1. Konsumsi (PO, P1, P2)
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Ketenagakerjaan
5. Kesetaraan Gender
6. Kesejahteraan Sosial
7. Infrastruktur Dasar

B. Casual Attribution

C. Analisis Kondisi Fiskal

D. Pendorong dan Penghambat Penanggulangan Kemiskinan (SWOT)

E. Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan

F. Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

BAB V A. Lokasi Program Prioritas Kapanewon

1. Konsumsi (PO, P1, P2)
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Ketenagakerjaan
5. Kesetaraan Gender
6. Kesejahteraan Sosial
7. Infrastruktur Dasar

B. Lokasi Program Prioritas Kalurahan

C. Rekomendasi

D. Target Penanggulangan Kemiskinan

BAB VI Penutup

Matriks Program Prioritas Bidang

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Ketenagakerjaan
4. Kesetaraan Gender
5. Kesejahteraan Sosial
6. Infrastruktur Dasar

BAB II. KONDISI UMUM DAERAH

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat DIY. Kabupaten Kulon Progo tidak bersinggungan langsung dengan Kota Yogyakarta dan harus menempuh jarak kurang lebih 25 km untuk mencapainya. Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 12 kapanewon, setiap kapanewon memiliki kondisi yang berbeda-beda baik kondisi fisik maupun non fisiknya. Berdasarkan karakteristik topografinya, wilayah Kabupaten Kulon Progo dibagi menjadi 3 zona yakni wilayah utara, tengah dan selatan. Dengan karakteristik topografi demikian menyebabkan perbedaan karakteristik kegiatan ekonomi yang berbeda di tiap zona. Uraian kondisi umum kondisi daerah akan lebih rinci dijelaskan dalam sub-sub bab selanjutnya.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah mencakup karakteristik fisik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, serta luas wilayah menurut batas administrasi pemerintah kabupaten. Aspek geografi dan demografi merupakan informasi dasar untuk mengidentifikasi potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia untuk memetakan pengembangan wilayah dalam menunjang kemajuan pembangunan daerah.

2.1.1. Kondisi Geografi Daerah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat dengan ibukota Kabupaten di Kota Wates. Terdiri dari 12 kapanewon, 87 Kalurahan, 1 kelurahan, 918 pedukuhan, 1.825 Rukun Warga (RW) dan 4.469 Rukun Tetangga (RT). Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan luas keseluruhan wilayah Kulon Progo adalah 577,22 km². Jumlah luasan berdasarkan Kepmendagri tersebut belum dirinci untuk setiap Kapanewon. Menurut data dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo luas wilayah Kabupaten Kulon Progo adalah 76,88 km². Perbedaan luasan ini kemudian akan menjadi bahan yang akan disinkronkan dalam penyusunan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kulon Progo yang masih berproses. Secara rinci nama kapanewon dan persentase luas wilayahnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Persentase menurut Kapanewon
Kabupaten Kulon Progo**

No	Kapanewon	Persentase Luasan
1	Temon	6,32
2	Wates	5,66
3	Panjatan	7,65
4	Galur	5,61
5	Lendah	6,51
6	Sentolo	9,33
7	Pengasih	10,04
8	Kokap	12,16
9	Girimulyo	9,58
10	Nanggulan	6,78
11	Kalibawang	8,88
12	Samigaluh	11,49
Jumlah (%)		100

Sumber data : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Kulon Progo, 2024

Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

- Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah di bagian utara.
- Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman di bagian timur.
- Samudera Hindia di bagian selatan.
- Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah di bagian barat.

Untuk lebih jelasnya batas administrasi Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo



Sumber: RKPД Kulon Progo, 2025

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis Kabupaten Kulon Progo terletak di antara $7^{\circ}38'30''$ – $7^{\circ}58'3''$ LS dan $110^{\circ}1'37''$ – $110^{\circ}16'26''$ BT. Lokasi Kabupaten Kulon Progo dilihat secara posisi *geostrategis* mempunyai posisi yang menguntungkan. Kabupaten Kulon Progo yang terletak di bagian barat Daerah Istimewa Yogyakarta dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah yaitu dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang, merupakan 'pintu gerbang' Daerah Istimewa Yogyakarta yang menghubungkan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan yang terletak di bagian barat Pulau Jawa (Kabupaten Purworejo) dan bagian utara Pulau Jawa (Kabupaten Magelang, KSPN Borobudur). Selain itu posisi Kabupaten Kulon Progo yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia juga dapat menghubungkan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan negara tetangga yang terletak di bagian selatan Indonesia seperti Australia. Posisi geostrategis dari Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.2 Posisi Geostrategis Kabupaten Kulon Progo



Sumber: RKPD Kulon Progo 2025

Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) yang dibangun di Kapanewon Temon dan telah ditetapkannya KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Borobudur, tentunya akan banyak wisatawan yang akan menggunakan bandara baru tersebut. Jalur wisata dari bandara baru menuju Borobudur akan menjadi suatu koridor pertumbuhan ekonomi baru di Kulon Progo. Keberadaan BIY dapat memberikan nilai tambah/*global value chain* bagi Kabupaten Kulon Progo dalam hal penyediaan transportasi dan akomodasi. Adanya Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di sepanjang pantai di Kulon Progo juga membuka akses atau jalur baru bagi distribusi barang maupun jasa khususnya untuk Pulau Jawa bagian selatan.

Posisi *geostrategis* tersebut dapat memberikan keuntungan bagi perkembangan wilayah kabupaten maupun perkembangan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan kondisi fisik wilayahnya, wilayah Kabupaten Kulon Progo dapat dibagi menjadi tiga kawasan yaitu:

a) Kawasan pesisir

Merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0–100 meter dari permukaan air laut, meliputi Kapanewon Temon, Kapanewon Wates, Kapanewon Panjatan, Kapanewon Galur, Kapanewon Lendah, sebagian Kapanewon Sentolo, dan sebagian Kapanewon Pengasih.

Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki lereng 0–2 persen, merupakan wilayah pantai dengan garis Pantai sepanjang kurang lebih 24,8 km.

b) Kawasan dataran

Merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 – 500 meter dari permukaan air laut, meliputi Kapanewon Nanggulan, sebagian Kapanewon Sentolo, Kapanewon Pengasih dan Sebagian Kapanewon Kalibawang. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki lereng antara 2–15 persen, tergolong berombak dan bergelombang merupakan peralihan dataran rendah dan perbukitan.

c) Kawasan pegunungan

Merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500 – 1000 meter dari permukaan air laut, meliputi wilayah Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Kokap, Kapanewon Samigaluh, Kapanewon Kalibawang.

2.1.1.3. Topografis

a) Kemiringan Lahan

Sebagian besar wilayah Kabupaten Kulon Progo masuk dalam wilayah dengan kemiringan lereng <20 (40,11%) dan 18,73% wilayah dengan kemiringan >40%. Untuk lebih jelasnya, wilayah Kabupaten Kulon Progo menurut kemiringan lerengnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Luas Wilayah berdasarkan Kemiringan Lereng Kabupaten Kulon Progo

No	Kemiringan Lereng	Persentase (%)
1	< 2 °	40,11
2	3°-15°	18,70
3	16°-40°	22,46
4	>40°	18,73
Kabupaten Kulon Progo		100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Kulon Progo, 2020, diolah

Dilihat dalam skala kapanewon wilayah dengan kemiringan lereng >400 (daerah pegunungan) berada pada kawasan barat Kulon Progo yang membentang dari Kapanewon Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang dan sebagian Nanggulan. Sedangkan Kapanewon yang tidak mempunyai wilayah dengan kemiringan lereng >400 meliputi Kapanewon Wates,

Kapanewon Panjatan, Kapanewon Galur, Kapanewon Lendah, dan Kapanewon Sentolo. Kelima Kapanewon tersebut terletak di daerah dataran rendah sehingga tidak mempunyai wilayah dengan karakteristik fisiografi pegunungan.

Kapanewon yang mempunyai wilayah dengan kemiringan lereng <20 terluas adalah Kapanewon Panjatan. Sedangkan Kapanewon Samigaluh merupakan kapanewon yang hampir tidak mempunyai wilayah dengan karakteristik fisiografi dataran. Kondisi topografi ini sangat berpengaruh dalam perkembangan wilayah, aktivitas ekonomi maupun konektivitas antar daerah.

b) Ketinggian Lahan

Berdasarkan ketinggian lahan, persentase luas tanah di Kabupaten Kulon Progo menurut ketinggiannya dari permukaan air laut, meliputi: 17,58% berada pada ketinggian <7 meter di atas permukaan laut (dpal), 15,20% berada pada ketinggian 8-25 meter dpal, 22,84% berada pada ketinggian 26-100 meter dpal, 33,0% berada pada ketinggian 101-500 meter dpal, dan 11,37% berada pada ketinggian >500 meter dpal. Kabupaten Kulon Progo dapat dibagi menjadi 3 wilayah menurut ketinggian lahan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2.3 Pembagian Wilayah Berdasar Ketinggian Lahan Kabupaten Kulon Progo

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Kulon Progo, 2020 diolah

No	Ketinggian	Cakupan Kapanewon
1	500-1000 m dpal	Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Kokap, Kapanewon Samigaluh, Kapanewon Kalibawang
2	100-500 m dpl	Kapanewon Sentolo, Kapanewon Pengasih, Kapanewon Nanggulan, dan Kapanewon Kokap
3	0-100 m dpl	Kapanewon Temon, Kapanewon Wates, Kapanewon Panjatan, Kapanewon Galur dan Kapanewon Lendah

Gambar 2.3 Peta Ketinggian Lahan Kabupaten Kulon Progo



2.1.1.4. Geologi

Struktur dan Karakteristik

1. Karakteristik dan Struktur

Karakteristik Kabupaten Kulon Progo secara umum berupa kubah atau menyerupai kubah (Dome), dengan struktur geologi daerah terdiri atas :

- a) Struktur Geologi berupa Perlipatan Batuan (Fold), merupakan deformasi lapisan batuan yang terjadi akibat dari gaya tegasan sehingga batuan bergerak dari kedudukan semula membentuk lengkungan. Perlipatan ini terdapat di bagian perbukitan Formasi Sentolo di daerah Pengasih, Sentolo, Panjatan, Lendah dan Galur.
- b) Struktur Geologi Patahan/Sesar (Fault), merupakan bagian dari batuan yang saling bergerak antara bagian blok batuan satu dengan blok batuan yang lain yang dipisahkan oleh zona patahan atau dapat diistilahkan pecahan batuan yang disertai gerakan massa batuan. Patahan di wilayah Kulon Progo dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu :
 - Patahan Regional, merupakan satu kesatuan patahan Yogyakarta. Patahan ini merupakan Patahan Graben Yogyakarta. Patahan Graben Yogyakarta adalah Patahan Opak dan Patahan Progo yang menyebabkan wilayah Kulon Progo dan Wonosari menjadi daerah dataran Tinggi dan di Kota Yogyakarta menjadi dataran rendah. Patahan Opak berarah barat daya - Timur Laut, sedangkan patahan Progo berarah Utara Selatan. Patahan ini terletak di bagian timur Kulon Progo meliputi wilayah Kalibawang bagian timur, Nanggulan bagian timur, Sentolo, Panjatan, Galur dan Lendah.
 - Patahan Lokal, merupakan patahan yang hanya terjadi di Kulon Progo. Patahan ini banyak terjadi di bagian pegunungan atau kubah di Kulon Progo utara bagian barat, dimana patahan berbentuk relatif radial yaitu berarah barat laut – tenggara, barat – timur dan barat daya – timur laut. Patahan ini terdapat di wilayah Kapanewon Kokap, Temon bagian utara, Pengasih, Nanggulan bagian barat.
- c) Struktur Kekar (joint) yaitu pecahan batuan yang tidak mengalami pergerakan. Struktur kekar ini sangat intensif terdapat di formasi batuan andesit dan formasi andesit tua.

2. Formasi Batuan

Formasi batuan dan sebarannya dibedakan menjadi endapan gunung api (40,37%), batuan sedimen (47,81%), batuan gunung api (7,48%) dan batuan terobosan (4,43%). Lebih detail dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.4 Pengelompokan Batuan Berdasarkan Jenis Batuan Kabupaten Kulon Progo

No	Kapanewon	Luas Satuan Batuan (Ha)				Jumlah
		Endapan Gunung Api	Batuan Sedimen	Batuan Gunung Api	Batuan Intrusi	
1	Temon	3,688	-	-	-	3,688
2	Wates	3,063	138	-	-	3,197
3	Panjatan	3,872	588	-	-	4,454
4	Galur	2,229	-	1,063	-	3,288
5	Lendah	2,009	1,075	475	-	3,555
6	Sentolo	3,165	1,175	925	-	5,259
7	Pengasih	4.342	1,825	-	-	6,161
8	Kokap	550	4.230	-	2,600	7,372
9	Girimulyo	125	5.366	-	-	5,485
10	Nanggulan	250	2.736	975	-	3,957
11	Kalibawang	375	3,971	950	-	5,290
12	Samigaluh	-	6,929	-	-	6,922
	TOTAL	23,667	28,032	4,388	2,600	58,628
	Persentase	40,37 %	47,81%	7,48%	4,43%	100%

Sumber : RKPД Kulon Progo 2025 (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2007)

Untuk lebih jelasnya stratigrafi formasi geologi Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 2.5 Stratigrafi Formasi Geologi Kabupaten Kulon Progo

Umur	Formasi	Deskripsi Litologi	Ketebalan (m)
Kuarter	Aluvium	Kerikil, pasir, lanau, dan lempung sepanjang sungai dan daratan Pantai	100
Pliosen-Pleistosen	Endapan Vulkanik Kuartar	Breksi sisipan lava dan endapan lahar	20
Miosen Bawah	Sentolo	Bagian atas batugamping berlapis baik kaya foraminifera Bagian bawah konglomerat alas di atasnya napal tufaan bersalangan dengan vitriks tuf	950
Miosen Bawah	Jonggrangan	Bagian atas batugamping berlapis ke arah atas menjadi batu gamping koral Bagian bawah konglomerat di atasnya napal tufaan dan batupasir gampingan berselang-seling dengan lignit	250
Oligo-Miosen	Dukuh	Perselang Selingan antara breksi, batu pasir, kerikilan, batu gamping, dan batu lempung	660
Oligosen	Kaligesing	Breksi laharik dengan sisipan lava andesit, batu pasir tufaan	600
Oligo-Miosen	Andesit Tua	Breksi andesit, tuf, lapili tuf, aglomerat dan berselingan dengan lava andesit. Terdapat fragmen batuan lebih tua	660
Eosen Atas – Oligosen	Nanggulang	Batu pasir seling-seling dengan lignit, napal pasiran, batu lempung gampingan struktur konkresi selang-seling napal dan batugamping, batupasir dan tur, kaya foraminifera dan moluska foraminifera dan moluska	300

Sumber : RKPD 2025 (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2012)

2.1.1.1.5. Potensi

a) Potensi Air Tanah

Kabupaten Kulon Progo mempunyai potensi air tanah yaitu Cekungan Air Tanah (CAT) tersendiri yang tidak melampaui ke wilayah kabupaten lain yaitu Cekungan Wates. CAT Wates telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2017. Menurut Hendrayana (2020) selain CAT Wates, terdapat pula CAT Menoreh yang saat ini masih dalam tahap pengkajian. Berdasarkan kalkulasi pada penelitian tersebut, CAT Wates memiliki potensi air tanah bebas sejumlah 34.650.385 m³/tahun sedangkan CAT Menoreh sebesar 56.889.340 m³/tahun. Pemanfaatan CAT pada umumnya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan domestik, pertanian, industri dan non industri lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan perkantoran. Berdasarkan perhitungan, proyeksi pemanfaatan air tanah bebas pada CAT Wates pada tahun 2021 mencapai 7.721.376 m³. Selain Cekungan Air Tanah (Cekungan Wates), sumber mata air yang ada di Kabupaten Kulon Progo lainnya dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 2.6 Sumber Mata Air di Kabupaten Kulon Progo dan Cekungan Air Tanah Wates

No	Sumber	Lokasi (Kepanewon)	Debit (l/det)	Pemanfaatan
1	Mata air Clereng	Pengasih	125	Sudah/PDAM
2	Tuk Mudal	Girimulyo	5-15	Sudah
3	Tuk Gua Kiskendo	Girimulyo	24-60	Sudah
4	Tuk Grembul	Kalibawang	5-10	Sudah/PDAM
5	Tuk Gua Upas	Samigaluh	1,5-3,5	Sudah/PDAM
6	Mata air Sekepyar dan Kayangan	Samigaluh	-	Belum
7	Tuk Mudal Anjir	Pengasih	3-11	MCK
8	Cekungan Air Tanah Wates	Pengasih, Girimulyo, Kalibawang, Samigaluh, Nanggulan	24,6 juta m ³ /th	Sudah

Sumber data :

- Bappeda, DPU, Disperindag ESDM, PDAM Kab. Kulon Progo, 2018, *) Hendrayana, Heru.dkk. 2020. Neraca Air Tanah Cekungan Air tanah (CAT) Menoreh dan Wates Kabupaten Kulon Progo. Geomedia Vol.18 No.2 Tahun 2020.Hal 10-29

b) Potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

Selain potensi geologi serta potensi air tanah, Kabupaten Kulon Progo juga mempunyai potensi Energi Baru dan Terbarukan yang tersebar di beberapa Kapanewon. Untuk lebih lengkapnya sebaran potensi energi alternatif di Kabupaten Kulon Progo diperlihatkan di

Tabel sebagai berikut.

Tabel 2.7 Potensi Energi Baru dan Terbarukan Kabupaten Kulon Progo

No	Kluster	Bahan	Lokasi	Pemanfaatan*
1.	Biofuel, Biokerosene, Bioethanol	Ketela rambat, jarak pagar, nyamplung	Seluruh Kapanewon	n.a
2.	Biogas	Limbah tahu, limbah ternak	122 unit usaha tahu, 51.405 populasi ternak bisa dikembangkan biogas 15 ribu	Memenuhi kebutuhan rumah tangga
3.	Briket	Limbah kayu	Seluruh Kapanewon	na.
4.	Energi Tenaga Surya	Sinar matahari	Seluruh Kapanewon	na.
5.	Mikrohidro	Air	Semawung, Kedungrong, Kalisanga, Sermo	Semawung (kapasitas 600 kwh) dikelola oleh PT. Energy Puritama
6.	Energi Tenaga Angin	Angin	Sepanjang pantai dan pegunungan	n.a.
7.	Energi Limbah Sampah	Limbah sampah	TPA Sampah 70-75 m ³	n.a.

Sumber : Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022, diolah

2.1.1.6. Hidrologi

a) Daerah Aliran Sungai

Menurut data dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo, sebagian besar wilayah Kabupaten Kulon Progo masuk dalam DAS Progo, DAS Serang dan sebagian kecil yang masuk dalam DAS Bogowonto. Sedangkan menurut Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Kabupaten Kulon Progo masuk dalam Wilayah Sungai Serang-Bogowonto, dan Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang. Adapun nama DAS dan sub DAS tersebut beserta luasannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8 Nama DAS, Sub DAS dan Luasan Kabupaten Kulon Progo

No.	DA S	Luas DA S (ha)	Sub DA S
1.	Bogowonto	2.509,931	Dekso
			Gesing
			Keduren
			Kodil
			Ngasinan
			Plamping
			Semanggung
2.	Serang	23.532,85	Nagung
			Ngracah
			Serang Hilir
			Serang Sekiyep
			Sidatan
			Sumitro
3.	Progo	30.141,92	Batang
			Bedog
			Blokeng
			Diro
			Gandri
			Jenes
			Krawang
			Mlinting Putih
			Penter
			Progo Hilir
			Sileng
			Sindon Salak
			Sudu
			Tangsi
			Tinalah

Sumber data: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo, 2017

Daerah Aliran Sungai Progo dengan sungai utama Kali Progo memiliki daerah pengaliran seluas 8.894 hektar, dengan debit maksimum 381,90 m³/detik dan debit minimum 13,00 m³/detik. Daerah Aliran Sungai Serang dengan sungai utama Kali Serang dengan anak-anak sungainya, memiliki daerah pengaliran seluas 3.635,75 hektar, dengan debit maksimum 153,6 m³/detik dan debit minimum 0,03 m³/detik. Kedua sungai tersebut telah dimanfaatkan

untuk irigasi persawahan seluas 9.351 ha.

Kabupaten Kulon Progo memiliki danau buatan yaitu Waduk Sermo yang terletak di Kapanewon Kokap dengan luas genangan waduk sebesar 157 Ha. Waduk ini dibuat dengan membendung Kali Menguri dan anak-anak cabangnya, Kali Pantaran, Kali Kembang, Kali Papon dan sungai-sungai kecil yang bermuara di Kali Ngrancah. Waduk Sermo berfungsi sebagai suplesi irigasi sawah yang berada di Kapanewon Temon, Wates dan Pengasih dan sebagian suplesi kebutuhan air minum.

b) Sungai

Beberapa sungai yang melintas di wilayah Kulon Progo memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pengembangan wilayah antara lain karena memiliki potensi ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan domestik, perkotaan, industri maupun untuk irigasi pertanian. Secara umum sungai utama di Kulon Progo adalah Sungai Progo dan Sungai Serang. Sungai Progo memiliki peran yang sangat besar dalam pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat Kulon Progo. Sungai Progo menjadi sumber air bersih yang dikelola oleh PDAM Kulon Progo untuk pemenuhan kebutuhan domestik dan industri khususnya pada kawasan perkotaan. Sungai Progo juga menjadi penyokong utama air irigasi lahan pertanian pada Daerah Irigasi Kalibawang dan Daerah Irigasi Sapon yang merupakan area pertanian irigasi teknis terluas yang berada di Kulon Progo. Berdasarkan dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air (RPSDA) Wilayah Sungai Progo Opak Serang 2015-2035 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/KPTS/M/2016, Debit maksimum yang tercatat di stasiun Kalibawang adalah sebesar 331 m³/detik dan debit minimum sebesar 12 m³/detik.

Sungai Serang meliputi daerah tangkapan air seluas 280 kilometer persegi dengan debit rerata bulanan yang tercatat di stasiun Durungan sebesar 10,83 m³/detik dengan debit maksimum sebesar 61,10 m³/detik dan debit minimum sebesar 0,28 m³/detik. Sungai Serang memiliki anak Sungai Ngrancah yang dibendung untuk mengoperasikan Waduk Sermo untuk pemenuhan kebutuhan air minum dan suplesi irigasi pada sistem Daerah Irigasi Kalibawang. Secara umum kondisi morfologi sungai di Kulon Progo sebagaimana disajikan pada Tabel 2.10 yang menyajikan data inventarisasi sungai di Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 2.9 Inventarisasi Sungai di Kabupaten Kulon Progo

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Kedalaman (m)
1	Progo	56,70	650	6
2	Serang	23,16	60	8
3	Ngarancah	9,12	50	10
4	Gede	11,17	50	10
5	Nagung	10,97	20	8
6	Seling	7,75	15	4
7	Pening	7,63	15	6
8	Sidatan	3,86	8	2
9	Sari	3,31	6	3
10	Bogem	2,60	6	3
11	Kopat	1,69	8	3
12	Papah	21,94	30	5
13	Tinalah	6,70	50	15
14	Kamal/Sudu	11,60	20	12
15	Salak	5,64	10	6
16	Dunggong	5,45	10	7
17	Klegung	6,48	15	6
18	Rowo Jembangan	8,30	12	3
19	Banyu Meneng	5,03	8	5

Sumber data: Neraca Sumber Daya Alam Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2018.

2.1.1.7. Klimatologi

a) Iklim

Kabupaten Kulon Progo yang merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada wilayah yang dipengaruhi oleh tiga jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim tropika, dan iklim laut. Iklim musim sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Biasanya satu periode perubahan angin adalah 6 (enam) bulan. Iklim musim terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu angin musim barat daya (Muson Barat) dan angin musim timur laut (Muson Timur). Angin muson barat bertiup sekitar bulan Oktober hingga April yang basah sehingga menyebabkan hujan. Angin muson timur bertiup sekitar bulan April hingga bulan Oktober yang sifatnya kering yang mengakibatkan wilayah mengalami musim kering/kemarau. Sebagai daerah yang berada pada iklim tropis, kondisi iklim di Kabupaten Kulon Progo juga dipengaruhi oleh iklim tropis yang bersifat panas sehingga menyebabkan

curah hujan tinggi. Di samping itu, karena letaknya yang sangat dekat dengan Samudera Indonesia maka terjadi penguapan air laut menjadi udara lembab dan mengakibatkan curah hujan tinggi. Sedangkan klasifikasi iklim dengan menggunakan deskripsi tipe iklim menurut F. H. Schmidt dan J. H. A Ferguson yang didasarkan atas nisbah antara jumlah bulan kering dengan jumlah bulan basah. Bulan basah adalah bulan dengan total curah hujan kumulatif >100 mm, bulan kering adalah bulan dengan total curah hujan kumulatif <60 mm dan bulan lembab adalah bulan dengan curah hujan rata-rata antara 60-100 mm.

Terdapat delapan kelompok iklim yang didasarkan pada nisbah bulan kering ke bulan basah yang disimbolkan dengan Q (dalam persen), yaitu iklim A, $Q < 14,3$, daerah sangat basah, hutan hujan tropis; iklim B, $14,3 \leq Q < 33,3$, daerah basah, hutan hujan tropis; iklim C, $33,3 \leq Q < 60,0$, daerah agak basah, hutan rimba peluruh (daun gugur pada musim kemarau); iklim D, $60,0 \leq Q < 100,0$, daerah sedang, hutan peluruh; iklim E, $100,0 \leq Q < 167,0$, daerah agak kering, padang sabana; iklim F, $167,0 \leq Q < 300,0$, daerah kering, padang sabana; iklim G $300,0 \leq Q < 700,0$, daerah sangat kering, padang ilalang; dan iklim H, $Q \geq 700,0$ daerah ekstrim kering, padang ilalang.

Berdasarkan data curah hujan yang diperoleh selama 5 tahun (2015-2019) dalam Buku Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka yang diterbitkan BPS Tahun 2020, maka Kabupaten Kulon Progo mempunyai rata-rata bulan kering sebanyak 3,83 dan rata-rata bulan basah sebanyak 7,17, sehingga akan didapatkan nilai Q sebesar 53,49%. Dengan demikian menurut klasifikasi Schmidt-Ferguson Kulon Progo termasuk dalam tipe iklim C kategori daerah agak basah.

b) Curah Hujan

Curah hujan dan hari hujan diukur menurut 5 stasiun hujan (Gejagan, Singkung, Gembongan, Beji, Brosot) di Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo termasuk dalam sub DAS Progo Hilir dengan tipe iklim Am, Aw, dengan curah hujan Tahun 2013-2018 sebesar 153 mm/hari sampai 271 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan berkisar dari 8-14 hari dalam sebulan. Secara umum curah hujan dan hari hujan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan kecenderungan mengalami naik turun dalam tiap tahun. Curah Hujan dan Hari Hujan tinggi terjadi pada bulan Januari - April dan November - Desember tiap tahunnya. Hal ini terjadi karena bulan-bulan tersebut merupakan musim penghujan.

Berikut secara rinci Curah Hujan dan Hari Hujan menurut bulan dan rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan Tahun 2022-2023 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut ini

Tabel 2.10 Curah Hujan dan Hari Hujan Per Bulan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2023

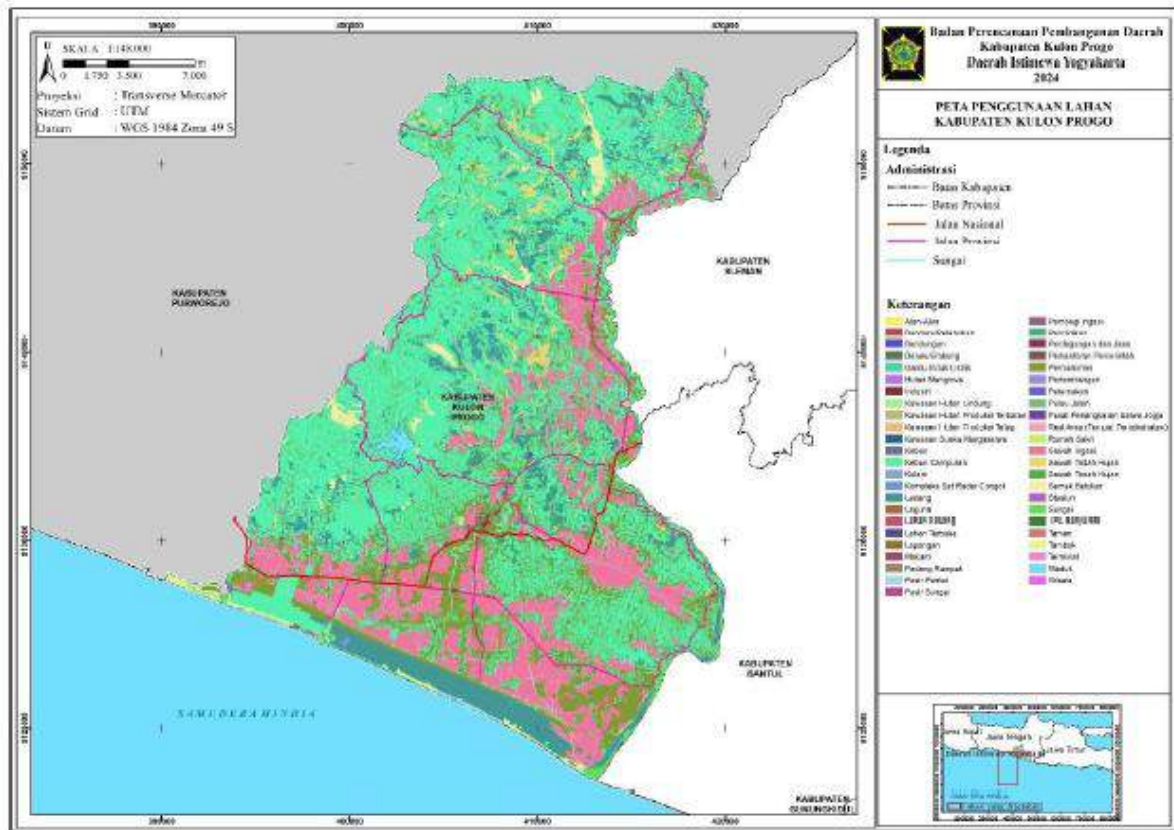
No	Bulan	2022		2023	
		CH	HH	CH	HH
1	Januari	397	20	199,4	27
2	Februari	251	11	232,1	24
3	Maret	289	18	203	19
4	April	176	8	115,9	14
5	Mei	178	13	85,2	5
6	Juni	191	10	53,4	8
7	Juli	32	3	49,4	9
8	Agustus	76	7	6	2
9	September	41	6	-	1
10	Oktober	700	22	-	-
11	November	803	21	8	8
12	Desember	438	16	36,4	6
Jumlah		3,572	155	988,8	123
Rata-rata		297,67	12,92	98,88	11,18

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2024

2.1.1.1.8. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan dapat dikategorikan menggunakan pendekatan klasifikasi penutup lahan sesuai dengan SNI 7654:2010 terdiri atas daerah bervegetasi dan daerah tak bervegetasi. Daerah bervegetasi terdiri atas lahan pertanian dan lahan non pertanian. Sedangkan daerah tak bervegetasi terdiri dari lahan terbuka, permukiman serta perairan. Mendasar pada hal tersebut, penggunaan lahan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2023 terdiri atas daerah bervegetasi sebesar 77% dan daerah tak bervegetasi sebesar 23%. Adapun pada daerah bervegetasi terdiri dari 73,5% lahan pertanian dan 3,1% lahan non pertanian. Sedangkan pada daerah tak bervegetasi terdiri dari 20,5% permukiman, 2,5% perairan dan 0,4% lahan terbuka. Penggunaan lahan yang masih didominasi oleh lahan pertanian menunjukkan karakteristik masyarakat Kulon Progo yang agraris. Sebaran penggunaan lahan diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 2.4 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kulon Progo



Sumber data : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandhala lan Niti Sasana) Kab.Kulon Progo,2024 (diolah)

Penggunaan lahan pada data Tahun 2021 – 2023 sebagaimana diuraikan pada tabel diatas, masih didominasi oleh lahan kebun campuran yang kemudian disusul oleh permukiman dan sawah irigasi. Lahan kebun campuran secara perlahan mengalami penurunan begitu pula dengan lahan sawah irigasi. Hal tersebut diikuti dengan meningkatnya persentase lahan permukiman.

2.1.2. Kondisi Demografi Daerah

2.1.2.1. Komposisi dan Jumlah Penduduk

Berdasarkan data terbaru diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2023 adalah 446.192 jiwa yang terdiri atas laki-laki sebanyak 221.249 jiwa dan perempuan sebanyak 224.943 jiwa dengan jumlah keluarga sebesar 156.775. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2019-2021 cenderung mengalami penurunan.

Penurunan jumlah penduduk paling besar terjadi pada Tahun 2020 yaitu sebesar -0,95 persen. Kemudian pada tahun 2022 pertumbuhan penduduk mulai naik sebesar 0,16 persen dan kembali meningkat menjadi 0,58 persen di Tahun 2023. Pertumbuhan penduduk mengalami fluktuasi disebabkan karena adanya kelahiran, kematian dan pindah datang penduduk. Pada data jumlah keluarga memiliki tren meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2019 jumlah keluarga adalah 149.976, dan konsisten meningkat hingga mencapai 156.775 keluarga pada tahun 2023.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 7 Ayat g disebutkan: penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri oleh karena itu masih ditemukan data ganda (data ganda dapat terjadi karena elemen data nama sama atau bisa diartikan punya kependudukan lebih dari satu, data ganda karena perekaman KTP Elektronik di lebih dari satu tempat, juga data kematian umpan balik kerja sama dari lembaga lain misalnya BPS, dan PT. Taspen), selain itu kematian belum dilaporkan dan anomali lain yang kemudian dilakukan pembersihan data di level nasional, hal ini menyebabkan fluktuasi data penduduk. Secara rinci perkembangan penduduk disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11 Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Penduduk				Jumlah Kepala keluarga
		Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Pertumbuhan (%)	
1	2019	221.299	225.947	447.246	-0.19	149.976
2	2020	219.505	223.498	443.003	-0.95	152.251
3	2021	219.347	223.527	442.874	-0.03	153.404
4	2022	219.776	223.815	443.591	0.16	155.219
5	2023	221.249	224.943	446.192	0.58	156.775

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2023 (diolah)

Berdasarkan data penduduk menurut komposisi umur dapat diketahui pada tahun 2023 jumlah penduduk berusia 0-4 tahun mengalami peningkatan jumlah terbesar dibandingkan kelompok umur lain, yakni 19.970 pada Tahun 2022 menjadi 24.546 jiwa pada Tahun 2023. Sedangkan penurunan jumlah penduduk terbesar terjadi pada kelompok umur >75 tahun dari semula 23.516 jiwa pada tahun 2022 menjadi 21.645 jiwa pada tahun 2023.

Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir dimana pada tahun 2021 ada 300.743 jiwa. Kemudian naik menjadi 303.633 jiwa pada tahun 2022. Pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan menjadi 303.846 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk menurut batasan umur disajikan pada tabel berikut.

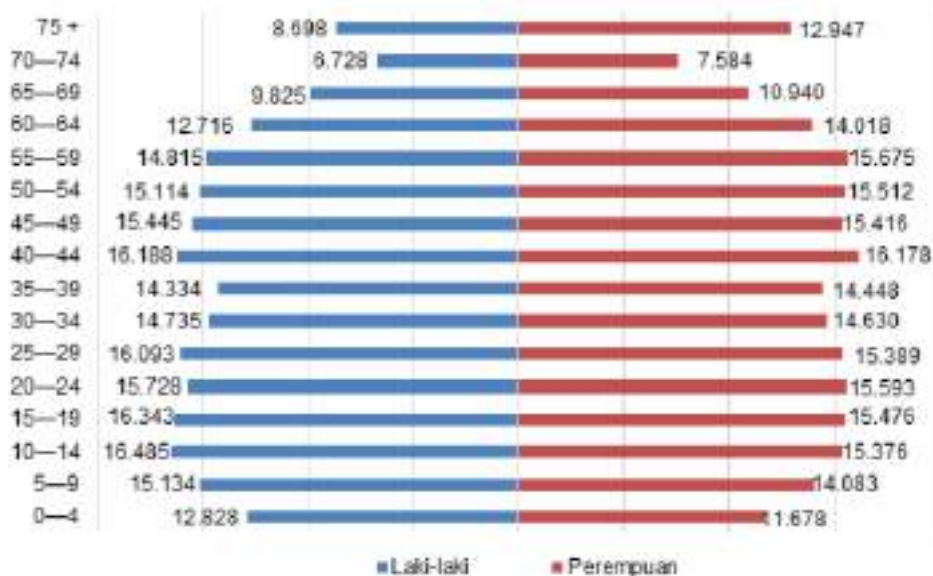
Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Menurut Batasan Umur di Kabupaten Kulon Progo (jiwa) Tahun 2019-2023

No.	Kelompok Umur	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	0 – 4	26.869	26.372	25.506	19.970	34.546
2.	5 – 9	31.193	30.322	29.933	29.111	29.217
3.	10 – 14	32.301	32.377	32.561	31.616	31.861
4.	15 – 19	32.909	31.299	31.065	31.574	31.819
5.	20 – 24	32.060	32.480	32.196	31.822	31.321
6.	25 – 29	29.631	30.860	31.666	31.574	31.482
7.	30 – 34	27.126	27.403	27.656	29.312	29.365
8.	35 – 39	31.849	31.787	30.829	28.578	28.782
9.	40 – 44	31.057	31.412	31.665	32.065	32.366
10.	45 – 49	30.671	30.280	30.589	30.703	20.861
11.	50 – 54	31.690	31.457	31.153	30.533	30.626
12.	55 – 59	28.530	28.167	28.725	30.553	30.490
13.	60 – 64	23.265	24.949	25.199	26.919	26.734
14.	65 – 69	17.744	18.366	19.049	21.088	20.765
15.	70 – 74	13.434	12.984	13.261	14.780	14.312
16.	>75	25.678	22.4888	21.821	23.516	21.645
TOTAL		447.007	443.003	442.874	443.591	446.192

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2024

Sedangkan jumlah penduduk tahun 2023 berdasarkan kelompok umur serta jenis kelamin ditampilkan dalam piramida penduduk seperti pada gambar berikut ini. Piramida ini menggambarkan pertumbuhan penduduk yang rendah. Dalam piramida penduduk dewasa, angka kelahiran (natalitas) dan angka kematian (mortalitas) cenderung seimbang, jumlah penduduk muda dengan jumlah penduduk tua seimbang.

Grafik 2.1 Piramida Penduduk Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023



Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kulon Progo, 2024 diolah

Dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, pada tahun 2022 jumlah penduduk perempuan Kulon Progo sebesar 50,41%, lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki yaitu sebesar 49,59%. Kondisi ini tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2022. Sex ratio pada tahun 2023 sebesar 98,4 yang berarti terdapat sekitar 98 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan. Secara rinci jumlah penduduk menurut sex ratio disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.13 Data Sex Ratio Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

Tahun	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)	Sex Ratio
2019	221.299	225.947	447.246	97,94
2020	219.505	223.498	443.003	98,21
2021	219.347	223.527	442.874	98,12
2022	219.776	223.815	443.591	98,19
2023	221.249	224.943	446.192	98,4

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2024

2.1.2.2. Distribusi dan kepadatan penduduk

Distribusi penduduk Kabupaten Kulon Progo di tahun 2023 tidak berbeda signifikan dengan tahun 2022. Jumlah penduduk terbesar secara berurutan berada di Kapanewon Pengasih dengan jumlah 53.237 jiwa, Kapanewon Sentolo dengan jumlah 50.346 jiwa, kemudian Kapanewon Wates dengan jumlah 50.041 jiwa. Di tahun 2023, terjadi pertumbuhan penduduk di seluruh Kapanewon di Kulon Progo pada rentang 0,22-1,9 persen, kecuali Kapanewon Samigaluh dan Kapanewon Kalibawang.

Tabel 2.14 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Per Kapanewon Tahun 2019-2023

No	Kapanewon	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan (%)
1	Temon	29.340	29.116	29.125	29.148	29.442	0,99
2	Wates	49.292	48.949	48.948	49.088	50.041	1,90
3	Panjatan	39.073	38.745	38.784	38.939	39.203	0,67
4	Galur	33.120	32.742	32.749	32.751	32.869	0,35
5	Lendah	41.453	41.083	41.108	41.241	41.385	0,34
6	Sentolo	50.497	49.959	50.042	50.150	50.346	0,38
7	Pengasih	52.174	52.457	52.529	52.784	53.237	0,85
8	Kokap	36.587	36.214	36.115	36.016	36.094	0,22
9	Girimulyo	25.140	24.689	24.621	24.647	24.712	0,26
10	Nanggulan	30.969	30.874	30.883	31.044	31.286	0,78
11	Samigaluh	28.579	28.143	28.093	27.959	27.848	-0,40
12	Kalibawang	30.783	30.032	29.877	29.824	29.729	-0,32
Jumlah		447.007	443.003	442.874	442.874	443.591	0,58

4

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2024 diolah

Kepadatan penduduk Kulon Progo tertinggi berada di Kapanewon Wates dengan angka 1.563,78 jiwa/km² atau setara dengan 3,89 kali lebih padat dibandingkan dengan Kapanewon Samigaluh yang memiliki kepadatan terendah yaitu 401,91 jiwa/km². Hal ini dikarenakan Kapanewon Wates merupakan pusat perkantoran, pelayanan, perbelanjaan dan hiburan di lingkup Kabupaten Kulon Progo. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2023,

kepadatan penduduk tertinggi selalu berada di Kapanewon Wates, kemudian Kapanewon Lendah dan Kapanewon Galur.

Tabel 2.15 Kepadatan Penduduk Dirinci Per Kapanewon Tahun 2017-2021 (jiwa/ km²)

No	Kapanewon	Luas Wilayah (Km ²)	2019	2020	2021	2022	2023
1	Temon	36,30	811,21	802,09	802,34	802,98	811,07
2	Wates	32,00	1539,85	1.529,66	1.529,63	1.534	1.563,78
3	Panjatan	44,59	876,79	868,92	869,79	873,27	879,19
4	Galur	32,91	1.004,88	994,90	995,11	995,17	998,75
5	Lendah	35,59	1.166,89	1.154,34	1.155,04	1.158,78	1.162,83
6	Sentolo	52,65	959,03	948,89	950,47	952,52	956,24
7	Pengasih	61,66	849,81	850,75	851,91	856,05	863,40
8	Kokap	73,80	497,16	490,70	489,36	488,02	489,08
9	Girimulyo	54,90	457,31	449,71	448,47	448,94	450,13
10	Nanggulan	39,61	782,44	779,45	779,68	783,74	789,85
11	Samigaluh	69,29	410,99	406,16	405,44	403,51	401,91
12	Kalibawang	52,96	578,74	567,07	564,14	563,14	561,35
Jumlah		586,26	762,85	755,64	755,42	756,65	761,08

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2024 (diolah)

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, aspek pembangunan yang penting untuk diperhatikan dan dilakukan analisis adalah mencakup aspek pemerataan ekonomi serta sosial budaya. Di bidang pembangunan perekonomian indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian diantaranya penilaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, kemiskinan. Sedangkan indikator sosial budaya diantaranya angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, jumlah grup kesenian dan sarana olah raga. Penjelasan terinci aspek kesejahteraan masyarakat akan diuraikan dalam sub bab berikut ini.

Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktivitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen (BPS 2016). Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarnya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi Kabupaten Kulon Progo dicerminkan dengan PDRB, baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga berlaku.

Analisis ekonomi suatu wilayah meliputi: PDRB atas dasar harga konstan (riil) yang dapat dipergunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, PDRB harga berlaku (nominal) yang menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah, distribusi PDRB untuk menggambarkan struktur perekonomian atau menunjukkan peranan kategori ekonomi suatu wilayah, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang menunjukkan nilai PDB per satu orang penduduk dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu 2019-2023 secara umum mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, PDRB ADHB mencapai 11,99 triliun rupiah, kemudian di tahun 2020 menurun menjadi 11,66 triliun rupiah. Kondisi Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia yang dimulai di akhir Triwulan I 2020 turut mempengaruhi pencapaian PDRB Kabupaten Kulon Progo. Hampir semua sektor mengalami penurunan, diakibatkan Pandemi Covid-19 ini, namun beberapa diantaranya justru naik dan dapat bertahan yaitu: sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor informasi dan komunikasi, sektor real estate, sektor jasa pendidikan dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Di tahun 2021, PDRB meningkat menjadi 12,64 triliun rupiah dan tahun 2022 kembali meningkat menjadi 14,3 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2023 PDRB mencapai 15,84 triliun Rupiah. Nilai PDRB berdasar ADHB 2019-2023 dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel 2.16 PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (dalam Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	PRDB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan usaha (Juta Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.906,26	1.959,54	2.039,61	2.223,48	2.444,81
Pertambangan dan Penggalian	117,13	167,51	167,39	178,30	205,75
Industri Pengolahan	1.321,33	1.304,83	1.367,02	1.464,83	1.577,00
Pengadaan Listrik dan Gas	10,02	9,83	10,08	11,08	12,36
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,92	14,31	15,46	16,51	17,41
Konstruksi	2.388,77	1.962,14	2.146,80	2.279,42	2.365,63
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepedah	1.483,24	1.485,15	1.544,66	1.750,48	1.871,58
Transportasi dan Pergudangan	906,193	902,88	1.151,84	1.760,35	2.374,62
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	413,19	393,21	453,00	542,97	597,42
Informasi dan Komunikasi	514,09	601,32	721,86	781,71	829,18
Jasa Keuangan dan Asuransi	348,69	329,35	352,14	406,90	455,93
Real Estate	362,48	368,22	395,80	420,56	444,05
Jasa Perusahaan	30,25	31,69	34,71	38,75	43,46
Administrasi, Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	959,94	949,83	963,22	1.030,73	1.071,59
Jasa Pendidikan	612,04	633,96	680,72	716,48	772,42
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	154,74	189,18	204,17	222,16	248,28
Jasa lainnya	393,49	331,35	394,07	470,66	515,70
Produk Domestik Regional Bruto	11.995,77	11.654,32	12.642,58	14.315,38	15.847,21

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kab. Kulon Progo Tahun 2021: Angka Revisi; Tahun 2022: Angka Sementara; Tahun 2023 : Angka sangat Sementara

PDRB berdasarkan harga konstan (penghitungan menggunakan tahun dasar 2010) secara umum menunjukkan peningkatan pada periode 2019-2023. Pada tahun 2019, PDRB ADHK mencapai 8,77 triliun Rupiah. Kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan

dampak pandemi Covid-19 menjadi sebesar 8,41 triliun Rupiah, namun pada tahun 2021 berhasil naik menjadi 8,77 triliun Rupiah. Di tahun 2022, PDRB ADHK kembali naik menjadi 9,41 triliun Rupiah, dan di tahun 2023 meningkat kembali menjadi 9,95 triliun Rupiah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17 PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan (=2010) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (dalam Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	PRDB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan usaha (Juta Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.217.361,44	1.224.798,82	21.244.659,68	1.267.434,36	1.283.513,17
Pertambangan dan Penggalian	138.945,76	127.047,16	124.138,35	125.784,25	134.026,88
Industri Pengolahan	1.014.224,15	978.196,42	994.973,76	1.009.184,32	1.051.747,64
Pengadaan Listrik dan Gas	8.303,15	8.197,79	8.349,40	8.954,80	9.597,33
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.470,54	10.687,13	11.102,52	11.842,84	12.224,86
Konstruksi	1.704.371,62	1.390.052,96	1.433.221,13	1.491.300,10	1.565.354,38
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepedah Motor	1.099.456,71	1.081.956,29	1.098.825,80	1.169.494,77	1.215.412,22
Transportasi dan Pergudangan	668.049,09	651.567,49	693.723,00	1.017.891,32	1.207.621,99
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	296.822,72	281.608,50	311.059,94	351.872,13	378.148,11
Informasi dan Komunikasi	516.723,85	605.440,28	735.781,09	747.103,90	780.944,30
Jasa Keuangan dan Asuransi	230.093,40	218.869,56	221.835,50	233.938,71	257.892,43
Real Estate	284.164,30	297.389,32	300.477,79	307.735,05	317.209,90
Jasa Perusahaan	25.873,21	26.541,10	28.637,29	30.633,30	33.060,91

Administrasi, Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	616.525,93	596.453,98	584.765,37	601.682,66	613.820,27
Jasa Pendidikan	495.437,51	501.576,54	523.426,68	529.605,49	548.759,73
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	122.336,66	144.683,25	150.893,09	157.662,00	165.990,05
Jasa lainnya	321.590,44	269.249,50	312.929,90	357.235,82	376.630,47
Produk Domestik Regional Bruto	8.770.750,46	8.414.316,11	8.778.800,29	9.419.355,82	9.951.954,64

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab, Kulon Progo Tahun 2021 : Angka Revisi; Tahun 2022 : Angka Sementara; Tahun 2023 : Angka sangat Sementara

2.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Menurut BPS Kulon Progo, pada Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo masih mengalami peningkatan hingga mencapai angka 13,49%. Angka ini relatif sangat tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten kota, provinsi bahkan angka pertumbuhan nasional. Bila dicermati secara rinci, pertumbuhan terbesar masih berasal dari sektor konstruksi yang masih mengalami peningkatan sebesar 68,64 % naik sekitar 10% bila dibandingkan tahun 2018. Kenaikan sektor konstruksi ini sejalan dengan aktivitas penyelesaian BIY yang ditargetkan beroperasi penuh pada 29 Maret 2020 serta pembangunan underpass JJLS yang diselesaikan pada Tahun 2019. Sektor lain yang mengalami peningkatan cukup signifikan adalah pengadaan listrik dan gas, transportasi dan pergudangan. Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan drastis dari 26,64% pada tahun 2018 menjadi 3,26% pada tahun 2019.

Pada tahun 2020, dengan adanya Pandemi Covid-19, perekonomian hampir di seluruh dunia mengalami perubahan yang cukup drastis. Berdasarkan hasil analisis sementara, pada Tahun 2020, perekonomian di Kulon Progo mengalami penurunan pertumbuhan yang sangat tajam menjadi -3,45%. Hampir seluruh sektor mengalami penurunan bahkan hingga level negatif seperti yang terjadi pada sektor konstruksi yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi. Sektor yang tumbuh pesat pada kondisi pandemi ini adalah jasa kesehatan, komunikasi dan informasi serta layanan transportasi dan pergudangan. Hal ini merupakan hasil refocusing anggaran pemerintah serta perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap jasa kesehatan serta berkembangnya aktivitas work from home yang membutuhkan media komunikasi dan informasi serta belanja online yang mendorong tumbuhnya sektor logistik yang melibatkan transportasi dan pergudangan.

Pada tahun 2021 perekonomian Kabupaten Kulon Progo sudah menunjukkan peningkatan yang berarti terbukti dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami rebound dari -3,45% di tahun 2020 menjadi 4,37% di tahun 2021 dengan penyumbang terbesar adalah sektor Informasi dan komunikasi. Di tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo kembali mengalami peningkatan mencapai 6,57% dengan penyumbang terbesar adalah sektor transportasi dan pergudangan dengan persentase mencapai 31,76%.

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,65% pada kategori pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha, Transportasi dan Pergudangan memiliki pertumbuhan PDRB tertinggi, yaitu sebesar 18,64%. Pertumbuhan tertinggi kedua terdapat pada lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi yaitu sebesar 10,24%, disusul oleh jasa perusahaan sebesar 7,92%. Rincian laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2019-2023 dapat dicermati pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.18 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (=2010) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023 (persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.73	0.62	1.61	1.84	1.27
Pertambangan dan Penggalian	3.26	-8.56	-2.29	1.33	6.55
Industri Pengolahan	5.26	-349	0.95	2.13	4.22
Pengadaan Listrik dan Gas	8.06	-1.27	2.46	6.61	7.18
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	8.88	2.07	6.23	4.32	3.23
Konstruksi	68.64	-18.44	4.03	3.13	4.97
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepedah Motor	5.19	-1.59	1.54	6.45	3.93
Transportasi dan Pergudangan	10.61	5.48	9.65	31.74	18.64
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.22	-5.13	10.59	12.99	7.47

Informasi dan Komunikasi	5.56	17.17	17.40	5.11	4.53
Jasa Keuangan dan Asuransi	8.02	-4.88	1.38	5.43	10.24
Real Estate	6.00	4.65	0.53	2.93	3.08
Jasa Perusahaan	7.75	2.58	7.90	6.97	7.92
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.42	-3.26	-1.96	2.89	2.02
Jasa Pendidikan	4.56	1.24	4.36	1.18	3.62
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.61	18.27	4.22	4.56	5.28
Jasa Lainnya	6.56	-16.28	16.45	13.94	5.43
Produk Domestik Regional Bruto	13.49	-3.45	4.37	6.58	5.65

Sumber: RKPD Kulon Progo 2025

2.4. Daya Saing SDM

2.4.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam meningkatkan kualitas individu. Pengembangan sektor pendidikan harus memastikan kesetaraan akses dan perluasan cakupan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, serta daya saing hasil pendidikan. Selain itu, perlu diperkuat manajemen, akuntabilitas, dan citra pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengelola potensi yang ada, termasuk mengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan non-formal/kesetaraan, serta mengelola manajemen pendidikan dasar dan menengah.

Data mengenai pendidikan merupakan komponen yang sangat penting untuk menilai kualitas penduduk. Tingkat pendidikan yang tinggi atau rendah di suatu daerah dapat diukur melalui beberapa indikator pendidikan yang relevan.

Tabel 2.19 Indikator Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan					
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,86	9,02	9,17	9,18	9,20
2	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,26	14,27	14,38	14,48	
3	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Persen	n.a	56,67	61,06	69.13	n.a
4	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	Persen	n.a	67,69	71,64	51.46	n.a
5	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Persen	n.a	37,55	44,24	77.33	n.a
6	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	Persen	n.a	56,2	58,69	67.53	n.a

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2024

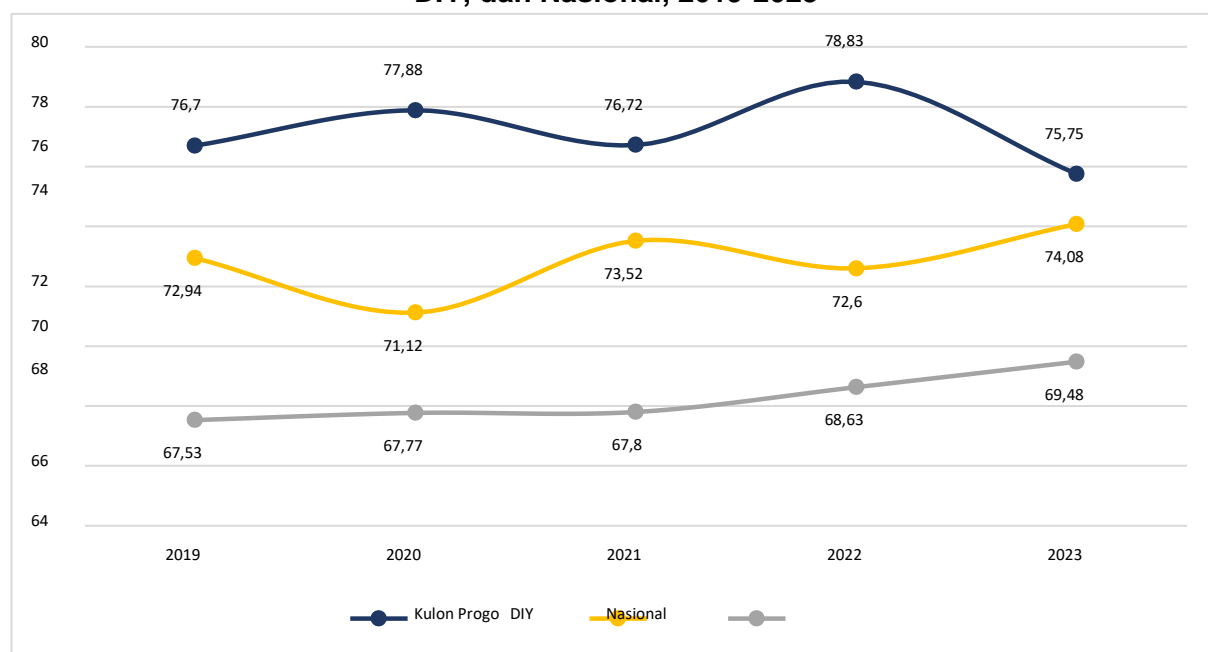
Antara tahun 2019 hingga 2023, Kabupaten Kulon Progo menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam berbagai indikator kinerja pendidikan. Rata-rata lama sekolah meningkat dari 8,86 tahun pada 2020 menjadi 9,20 tahun pada 2024, menandakan peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan. Angka harapan lama sekolah juga naik dari 14,25 tahun menjadi 14,48 tahun dalam periode yang sama, mencerminkan optimisme masyarakat terhadap pendidikan yang lebih panjang. Kemampuan literasi siswa SD berdasarkan asesmen nasional mengalami peningkatan dari 56,67% pada 2021 menjadi 69,13% pada 2023, sementara kemampuan numerasi siswa SD meningkat tajam dari 37,55% menjadi 77,33%. Di tingkat SMP, kemampuan literasi awalnya meningkat dari 67,69% pada 2021 ke 71,64% pada 2022, tetapi kemudian menurun tajam menjadi 51,46% pada 2023, menunjukkan perlunya perhatian khusus. Sebaliknya, kemampuan numerasi siswa SMP meningkat dari 56,2% pada 2021 menjadi 67,53% pada 2023. Secara keseluruhan, Kabupaten Kulon Progo telah mencapai kemajuan signifikan dalam kualitas pendidikan, meskipun ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam kemampuan literasi di tingkat SMP.

2.4.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator yang mengukur persentase populasi usia kerja yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi, termasuk mereka yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. TPAK dapat dihitung dengan membagi jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Tujuan perhitungan TPAK adalah untuk menilai proporsi penduduk yang aktif dalam kegiatan ekonomi di dalam kelompok usia kerja. Semakin tinggi nilai TPAK, semakin besar proporsi angkatan kerja relatif terhadap jumlah penduduk usia kerja di suatu wilayah.

Indikator tersebut mencerminkan ukuran relatif partisipasi tenaga kerja dalam produksi barang dan jasa. Data TPAK untuk Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023 tersedia dalam grafik berikut ini.

Grafik 2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY, dan Nasional, 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan informasi tersebut, data dari BPS Kabupaten Kulon Progo menunjukkan bahwa selama periode 2019-2023, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kulon Progo selalu lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK nasional maupun TPAK Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Salah satu faktor yang mendukung tingginya TPAK di Kulon Progo adalah statusnya sebagai daerah agraris, yang membuat banyak penduduk aktif dalam kegiatan ekonomi terutama di sektor pertanian. Meskipun demikian, Kabupaten ini juga menghadapi tantangan sebagai kantong kemiskinan dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah.

Dalam konteks Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, untuk memberikan jaminan bagi pekerja,

pemerintah menyelenggarakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Program ini bertujuan untuk melindungi pekerja dari berbagai risiko seperti kecelakaan kerja, kematian, serta untuk persiapan hari tua dan pensiun. Namun, cakupan kepesertaan Jamsostek di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2023 mencapai hanya 35,93 persen, menunjukkan bahwa masih banyak tenaga kerja yang belum tercakup dalam program ini. Hal ini menunjukkan perlunya program Jamsostek menjadi lebih inklusif dan universal untuk seluruh tenaga kerja.

Selain itu, dalam upaya menciptakan lapangan kerja yang inklusif, perlu perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas. Penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas di sektor formal di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2023 hanya mencapai 0,679 persen dari total penyandang disabilitas yang termasuk dalam angkatan kerja dan usia produktif. Hal ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan inklusi penyandang disabilitas dalam lapangan kerja formal di masa mendatang, sesuai dengan prinsip kesetaraan hak bagi semua warga negara, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

2.5. Aspek Kesehatan

Kesehatan merupakan hak dan kebutuhan dasar bagi setiap individu. Dengan kondisi kesehatan yang baik maka setiap individu memiliki fondasi yang kuat untuk menjalankan kehidupan yang baik dan layak. Pemerintah sebagai penyelenggara negara berkewajiban dan bertanggung jawab atas pemenuhan layanan hak dasar kesehatan kepada seluruh warga negaranya. Akses layanan kesehatan yang berkualitas dan ketersediaan fasilitas medis yang layak menjadi keharusan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan bagi setiap individu. Berikut ini jumlah sarana dan tenaga kesehatan di Kabupaten Kulon progo

Tabel 2.20 Sarana kesehatan dan tenaga medis Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

Sarana kesehatan	Jumlah
Puskesmas	21 unit
Posyandu	957 unit
RSUD	2 unit
RSU Swasta	7 unit
Tenaga medis	Jumlah
Dokter Umum	174 orang

Dokter Spesialis	112 orang
Dokter Gigi	58 orang
Perawat	922 orang
Bidan	402 orang
Ahli penyehatan lingkungan	62 orang
Kefarmasian	257 orang
Ahli Kesehatan Masyarakat	48 orang
Ahli Gizi	62 orang
Analisis Laboratorium	126 orang
Ahli Rontgen	34 orang
Bidan Praktik Mandiri	30 orang

Sumber: Dinas kesehatan Kulon Progo

Fasilitas sarana kesehatan dan tenaga medis yang berkualitas dan layak mampu mendukung upaya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. Kondisi kesehatan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator kesehatan masyarakat antara lain Usia Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Prevalensi Stunting dan lainnya.

Tabel 2.21 Kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

Indikator	Tahun 2023
Usia Harapan Hidup (tahun)	75,28 tahun
Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran)	25,30
Kasus Kematian Ibu	1 kasus
Angka Kematian Bayi (AKB)	9,61
Kasus Kematian Bayi	38 kasus
Prevalensi stunting	9,55

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo

2.6. Aspek Pertanian

Di Aspek pertanian secara lahan yang digunakan sebagai peruntukan pertanian terdiri atas

kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, dan kawasan perkebunan

a) Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan tanaman pangan adalah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan luas kurang lebih 10.886 ha dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 13.522 ha terdapat di seluruh kapanewon.

b) Kawasan Hortikultura

Kawasan hortikultura ditetapkan pengelolaannya untuk kegiatan pertanian lahan kering dalam meningkatkan produksi pangan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Lokasi kawasan peruntukan pertanian hortikultura seluas kurang lebih 3.321 ha tersebar di seluruh kapanewon.

c) Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan adalah kawasan pertanian yang sesuai untuk komoditas tanaman tahunan dengan memperhatikan asas-asas konservasi dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan perkebunan dalam meningkatkan produksi perkebunan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Kawasan atau lokasi perkebunan tersebar di seluruh wilayah di Kabupaten Kulon Progo dan tidak diatur berdasarkan komoditi tertentu namun disesuaikan dengan potensi/kesesuaian lahan, terdiri atas komoditas kakao, kopi, kelapa, cengkeh, tembakau, nilam, lada, teh, gebang, jambu mete. Kawasan perkebunan meliputi luasan kurang lebih 180 ha yang tersebar di seluruh kapanewon.

Tabel 2.22 Sebaran Peruntukan Ruang berdasarkan Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo (Bagian Kawasan Budidaya)

Kawasan Budidaya	Ha
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	10.886
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	13.552
Kawasan Hortikultura	3.321
Kawasan Perkebunan	180

Sumber: Substansi Revisi RTRW Kulon Progo Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

(Kundha Nlti Mandhala sarta Tata Sasana) Kab.Kulon Progo, 2024

Pada hasil pertanian, tahun 2023, Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam jumlah kasus penyakit hewan dibandingkan dengan tahun 2022. Pada tahun tersebut, tercatat sebanyak 13.606 kasus penyakit hewan, sedangkan tahun 2022 hanya mencatat 5.981 kasus, mengalami peningkatan sebanyak 7.625 kasus atau 127,49%. Sebaran penyakit hewan terbanyak terjadi di Kapanewon Panjatan, Temon, dan Pengasih.

Tabel 2.23 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar, 2019-2023

No.	Keterangan	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Produktivitas Padi	65,15 ku/ha	66,21 ku/ha	66,26 ku/ha	67,15 ku/ha	69,22 ku/ha
2	Produktivitas Jagung	59,28 ku/ha	62,85 ku/ha	64,36 ku/ha	66,83 ku/ha	67,86 ku/ha
3	Produktivitas Kedelai	14,37 ku/ha	14,40 ku/ha	15,75 ku/ha	10,85 ku/ha	16,35 ku/ha
4	Produktivitas Ubi Kayu	219,1 ku/ha	254,18 ku/ha	256,59 ku/ha	257,21 ku/ha	211,74 ku/ha
5	Produktivitas Kacang Tanah	14,48 ku/ha	14,52 ku/ha	14,78 ku/ha	14,88 ku/ha	15,23 ku/ha

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2024

Berdasarkan data tabel, produktivitas komoditas utama tanaman pangan mengalami peningkatan. Kenaikan produktivitas paling signifikan terjadi pada kedelai, mencapai 50,69%, diikuti oleh kacang tanah dengan kenaikan sebesar 2,35%. Selain itu, padi dan jagung juga mengalami peningkatan produktivitas. Peningkatan ini didorong oleh intensifikasi dalam pertanaman dengan bantuan fasilitas seperti pupuk dan benih, serta pengendalian hama penyakit tanaman yang rutin dilakukan untuk mencegah penurunan produksi akibat serangan hama dan penyakit.

2.7. Aspek Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan potensi untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap kemakmuran lokal. Oleh karena itu, pengembangan sektor pariwisata bertujuan untuk menciptakan dampak positif secara sosial, budaya, dan ekonomi bagi penduduk setempat.

Keberhasilan dalam mengembangkan sektor pariwisata dapat dilihat dari peningkatan secara konsisten jumlah wisatawan yang berkunjung setiap tahunnya. Kenaikan jumlah kunjungan wisatawan ini tidak hanya berpengaruh pada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga meningkatkan pendapatan individu di komunitas serta membuka peluang kerja lebih luas di sektor-sektor seperti perhotelan, restoran, dan agen perjalanan. Tingkat keberhasilan pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Kulon Progo tercermin dari pola perkembangan kunjungan wisatawan yang tercatat.

Tabel 2.24 Perkembangan Kunjungan Wisatawan ke Destinasi Wisata yang Dikelola Pemerintah (Dinas Pariwisata) Kabupaten Kulon Progo, 2019-2023

No.	Obyek Wisata	Jumlah Pengunjung (orang)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pantai Glagah	485.804	332.360	352.010	606.500	682.322
2	Pantai Congot	70.159	60.577	48.725	78.873	115.075
3	Pantai Trisik	31.732	8.739	6.901	12.234	23.133
4	Waduk Sermo	124.026	91.875	76.034	101.340	75.799
5	Goa Kiskendo	14.346	4.925	4.166	7.474	6.998
6	Puncak Suroloyo	13.671	9.992	7.484	9.461	10.649
7	WA Nglinggo	62.060	30.551	44.568	25.934	200
8	WA Tritis	5.000	4.407	3.496	2.329	641
9	Kawasan Menoreh Barat	72.439	26.215	7.103	6.698	5.733
10	Kawasan Jatimulyo	7.802	21.324	28.734	41.793	22.817
	Jumlah	887.039	590.965	579.221	892.636	943.367

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, 2024

Pada tahun 2019, jumlah kunjungan wisatawan mencapai 887.039 orang. Pada tahun 2020, terjadi penurunan signifikan jumlah kunjungan wisatawan menjadi 590.965 orang, mengalami penurunan sebesar 33,38 persen. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak dari Pandemi Covid-19 yang mengharuskan penutupan obyek wisata untuk membatasi mobilitas manusia, termasuk para wisatawan. Meskipun demikian, pada tahun 2021, meskipun dengan pembatasan tertentu, pembukaan kembali obyek wisata memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk berlibur, meskipun jumlah kunjungan tetap menurun menjadi 579.221 orang. Data dalam tabel menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada tahun 2022, dengan jumlah kunjungan wisatawan meningkat sebesar 54,11% dari tahun sebelumnya.

Berikutnya, data mengenai pertumbuhan pendapatan daerah dari retribusi pariwisata dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.25 Perkembangan Pendapatan Retribusi Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, 2019- 2023

No	Uraian	Pendapatan Per Tahun (Rp.000)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendapatan Retribusi Pariwisata	4.683.049	3.340.090	3.304.329	5.126.499	5.581.290
2	Lain-lain PAD yang Sah	59.813	4.800	4.800	5.000	6.000
3	Total Pendapatan Retribusi Pariwisata	4.742.862	3.344.890	3.304.329	5.131.499	5.587.290
4	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	237.876.805	161.400.585	103.828.354	308.158.513	324.058.666
	Persentase (%)	1,99	2,07	3,18	1,66	1,72

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, 2024

Penerimaan retribusi dari Sektor Pariwisata menunjukkan variasi yang signifikan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, jumlahnya mencapai Rp 4.742.862.000,00, naik 17,42% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2020, angkanya turun menjadi Rp 3.344.890.000,00, mengalami penurunan sebesar 29,48%. Meskipun secara keseluruhan pendapatan asli daerah (PAD) menurun pada tahun 2021, proporsi pendapatan dari retribusi Sektor Pariwisata meningkat menjadi 3,18%. Meskipun pendapatan ini merupakan yang terendah dalam lima tahun, namun jika dibandingkan dengan total PAD Kabupaten Kulon Progo, persentasenya mencapai puncak tertinggi sebesar 3,18%.

Pada tahun 2022, pendapatan dari retribusi Sektor Pariwisata berhasil melampaui target yang ditetapkan, yang didominasi oleh kontribusi signifikan dari retribusi wisata di Pantai Glagah, mencapai Rp3.639.402.000,00 atau sekitar 70,92% dari total PAD.

**Tabel 2.26 Kunjungan Wisatawan Pada Destinasi Wisata di Kabupaten Se-DIY
(Jumlah Pengunjung Per Orang) Tahun 2019-2023**

No	Kab/Kota	2019		2020		2021		2022		2023	
		Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus
1.	Kulon Progo	41.753	1.994.417	0	966.432	9	906,292	2,014	1,559,424	11.459	1.912.147
2.	Bantul	4.871	8.007.795	252	2.265.171	57	2,819,691	129	5,419,499	2.360	5.772.527
3.	Gunung Kidul	19.191	3.661.612	3.453	1.978.146	42	1,937,627	709	3,106,063	4.680	3.713.142
4.	Sleman	233.005	10.145.104	24.044	4.226.075	41	5,162	65,302	7,105,769	179.543	7.826.400
5.	Yogyakarta	252.682	3.963.919	37.008	1.329.562	26	827	62,261	2,658,606	n/a	n/a
	Total	551.502	27.772.847	64.757	10.765.386	175	5,669,599	130,415	19,849,361	198,042	19,224,217

Sumber: Statistik Kepariwisata DIY 2019-2023. Dinas Pariwisata DIY

Jumlah kunjungan wisata tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Khususnya untuk wisatawan mancanegara, terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2022, tercatat 2.014 wisatawan mancanegara, sementara pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi 11.459 atau naik sebesar 468,96%. Peningkatan ini disebabkan oleh penyelenggaraan beberapa atraksi wisata budaya di destinasi wisata serta inovasi dalam paket wisata di Kalurahan wisata yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Selain objek wisata yang berbayar, di Kabupaten Kulon Progo juga terdapat perkembangan wisata non-berbayar, seperti Kalurahan wisata dan objek wisata yang dikelola oleh masyarakat. Wisata non-berbayar ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi alam dan budaya setempat.

Perkembangan jumlah pengunjung pada Kalurahan wisata dan obyek-obyek wisata yang dikelola masyarakat terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.27 Perkembangan Wisatawan ke Obyek Wisata Non Bertribusi Kabupaten Kulon Progo, 2019-2023

No	Obyek Wisata	Jumlah Pengunjung (orang)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Desa Wisata	411.296	-	-	97.746	140.587
2	Non Desa Wisata	797.506	375.467	330.680	571.056	839.652
	Jumlah	1.208.802	375.467	330.680	668.802	980.239

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, 2024

Jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi yang dikelola oleh masyarakat pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 46,56% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan berhasilnya upaya masyarakat dalam mempromosikan pariwisata dan meningkatkan daya tarik wisata di Kulon Progo. Desa-Kalurahan wisata berhasil menawarkan paket- paket wisata yang menarik minat wisatawan, baik melalui destinasi wisata maupun melalui kearifan lokal seperti seni budaya dan tradisi masyarakat setempat.

Pelayanan yang baik terhadap wisatawan sangat penting. Pemandu wisata menjadi kunci dalam memberikan informasi yang memenuhi kebutuhan wisatawan. Peningkatan kualitas SDM dilakukan dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi pemandu wisata, yang menjadi fokus utama di setiap objek wisata yang dikelola masyarakat. Berikut adalah data mengenai jumlah pemandu wisata yang aktif di Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 2.28. Data Pemandu Wisata Kabupaten Kulon Progo, 2019-2023

No	Pemandu Wisata	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pemandu Wisata Bersertifikat (orang)	62	72	91	90	90
2	Pemandu Wisata Non Sertifikat (orang)	65	16	39	40	40

	Total	127	88	130	130	130
--	-------	-----	----	-----	-----	-----

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, 2024

Selama masa pandemi, sektor pariwisata mengalami penurunan pertumbuhannya, namun tetap memberikan dampak positif yang signifikan bagi usaha-usaha jasa pariwisata yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Langkah ini menunjukkan komitmen untuk memberikan pelayanan yang terjamin kepada konsumen (wisatawan). Berikut adalah tabel yang memuat informasi mengenai usaha-usaha jasa pariwisata yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) di Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 2.29 Perkembangan Usaha Jasa Pariwisata Berizin Kabupaten Kulon Progo, 2019-2022

No	Jenis Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Jasa Perjalanan Wisata					
A.1	Biro Perjalanan Wisata	3	5	7	8	13
A.2	Agen Wisata	7	8	8	8	8
B	Jasa Makanan dan Minuman					
B.1	Restoran	1	1	5	7	30
B.2	Jasa Boga	10	12	15	15	15
B.3	Rumah Makan	10	14	14	15	74
C	Penyediaan Akomodasi					
C.1	Hotel non Bintang	3	4	6	6	15
D	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi					
D.1	Karaoke	1	1	1	1	0
D.2	Gelanggang Renang	1	1	1	1	1
D.3	Salon dan spa	-	1	1	1	0
E	Penyelenggaraan Pertemuan, Insentif, Konverensi dan Pameran					
E.1	MICE	7	8	8	9	9
	Total	43	55	66	71	165

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, 2024

Jumlah usaha jasa pariwisata yang memiliki izin mengalami pertumbuhan yang signifikan, dari 71 usaha pada tahun 2021 naik menjadi 165 usaha pada tahun 2022, menunjukkan peningkatan sebesar 132%. Peningkatan yang paling mencolok terjadi pada sektor jasa penyediaan makanan dan minuman serta akomodasi, yang terkait dengan konsep BIY (Beli

Itu Yuk).

Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata, berbagai upaya telah dilakukan, antara lain meningkatkan promosi dengan memanfaatkan teknologi informasi (IT), meningkatkan efektivitas atraksi wisata, memperbaiki sarana dan prasarana di objek wisata, meningkatkan pengelolaan daya tarik wisata, mengembangkan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia melalui pelatihan, serta memberikan dukungan dalam sertifikasi usaha jasa pariwisata. Salah satu prioritas utama dalam pengembangan destinasi wisata adalah Pantai Glagah, karena dekat dengan Bandara Internasional Yogyakarta. Diharapkan lokasi ini dapat menarik calon wisatawan yang tiba melalui bandara tersebut.

BAB III. PROFIL KEMISKINAN DAERAH

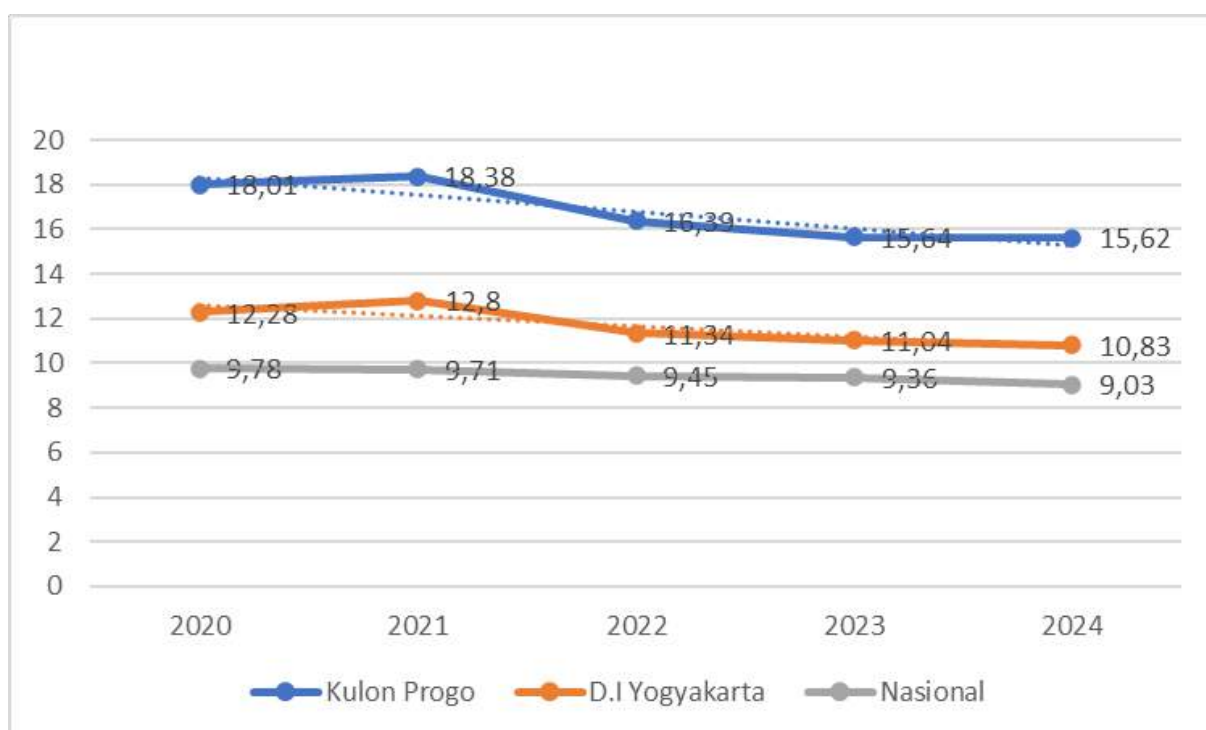
3.1. Kondisi Umum Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo

3.1.1. Kondisi Kemiskinan Makro

Kemiskinan makro menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Untuk mengukur kemiskinan makro, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dalam konsep ini, kemiskinan diukur dari pengeluaran, bukan pendapatan. Indikator kemiskinan makro meliputi: Persentase Penduduk Miskin (P0), Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1), Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2).

3.1.1.1. Persentase Penduduk Miskin (P0)

Grafik 3.1 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dan Indonesia, 2020-2024 (persen)



Sumber: BPS

Pada gambar grafik di atas menunjukkan bahwa, persentase penduduk miskin di Kulon Progo mempunyai pola yang sama dengan perkembangan jumlah penduduk miskin. Periode tahun 2020 – 2021 mengalami peningkatan, dan terjadi penurunan pada periode

tahun 2021 – 2024. Persentase penduduk miskin pada periode tahun 2021 – 2024 mengalami penurunan dari 18,38% pada tahun 2021 menjadi 16,39% pada tahun 2022. Kemudian di tahun 2023 persentase penduduk miskin kembali turun menjadi 15,64% dan kembali turun menjadi 15,62% di semester pertama tahun 2024. Hal yang sama juga terjadi pada tingkat provinsi dan nasional. Pada tingkat Provinsi D.I Yogyakarta, persentase penduduk miskin menurun dari 11,34% pada tahun 2022 menjadi 10,83% pada tahun 2024.

Tabel 3.1. Persentase Penduduk Miskin (P₀) Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dan Indonesia, 2020-2024 (persen)

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Kulon Progo	18,01	18,38	16,39	15,64	15,62
D.I Yogyakarta	12,28	12,80	11,34	11,04	10,83
Indonesia	9,78	10,14	9,54	9,36	9,03

Sumber: BPS

Dilihat dari tren data tahun 2019-2023, kondisi tahun 2022 dan 2023 merupakan angin segar setelah terjadinya Covid-19. Dilihat dari Tabel diatas, dari 2020 ke tahun 2021 angka kemiskinan di Kulon Progo terus meningkat bahkan mencapai 18,38 persen. Kemudian baru mulai menurun di tahun 2022.

Pada tingkat Provinsi DI Yogyakarta, pada periode tahun 2023-2024, persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,21% dari 11,04% pada tahun 2023 menjadi 10,83% pada tahun 2024. Untuk tingkat nasional, persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,33% dari 9,36% pada tahun 2023 menjadi 9,03% pada tahun 2024.

Tabel 3.2. Angka Kemiskinan Menurut Kab/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta, 2020-2024 (persen)

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Kulon Progo	18,01	18,38	16,39	15,64	15,62
Bantul	13,50	14,04	12,27	11,96	11,66
Gunungkidul	17,07	17,69	15,86	15,60	15,18
Sleman	8,12	8,64	7,74	7,52	7,46
Kota Yogyakarta	7,27	7,69	6,62	6,49	6,26

Sumber: BPS

Melihat tabel diatas, kondisi angka kemiskinan kabupaten/kota lain di Provinsi D.I Yogyakarta mengalami penurunan. Pada kurun waktu lima tahun, periode 2020 - 2024, angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan sebesar 2,39% atau salah satu wilayah yang mengalami penurunan angka kemiskinan terbesar, dan disusul Kabupaten Bantul yang mengalami penurunan sebesar 1,84%. Kabupaten Gunungkidul menempati urutan ketiga, dengan penurunan angka kemiskinan sebesar 1,89%. Selanjutnya disusul oleh Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta dengan penurunan angka kemiskinan masing-masing sebesar 0,66% dan 1,01%.

3.1.1.2. Jumlah Penduduk Miskin

Pasca pandemi Covid-19, secara umum kondisi perekonomian mulai membaik. Demikian pula dengan Kabupaten Kulon Progo yang juga mulai pulih perekonomiannya.

Tabel 3.3. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dan Indonesia, 2020 – 2024 (000 jiwa)

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Kulon Progo	78,06	81,14	73,21	70,74	71,49
D.I Yogyakarta	475,72	506,45	454,76	448,47	445,59
Indonesia	26.424,02	27.542,77	26.161,16	25.898,55	25.22 (Juta)

Sumber: BPS

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam periode Maret 2020 – 2021 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan akibat serangan pandemi Covid-19. Pada periode waktu tersebut, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan tiga ribuan jiwa dari 78,06 ribu jiwa pada Maret 2020 menjadi 81,14 ribu jiwa pada Maret 2021. Namun, kondisi sebaliknya terjadi pada periode Maret 2021 – 2022 yaitu jumlah penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan. Dalam periode Maret 2021 – 2022 telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin hampir delapan ribu jiwa menjadi 73,21 ribu jiwa. Di tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Kulon Progo kembali menurun sekitar tiga ribu jiwa menjadi 70,74 ribu jiwa.

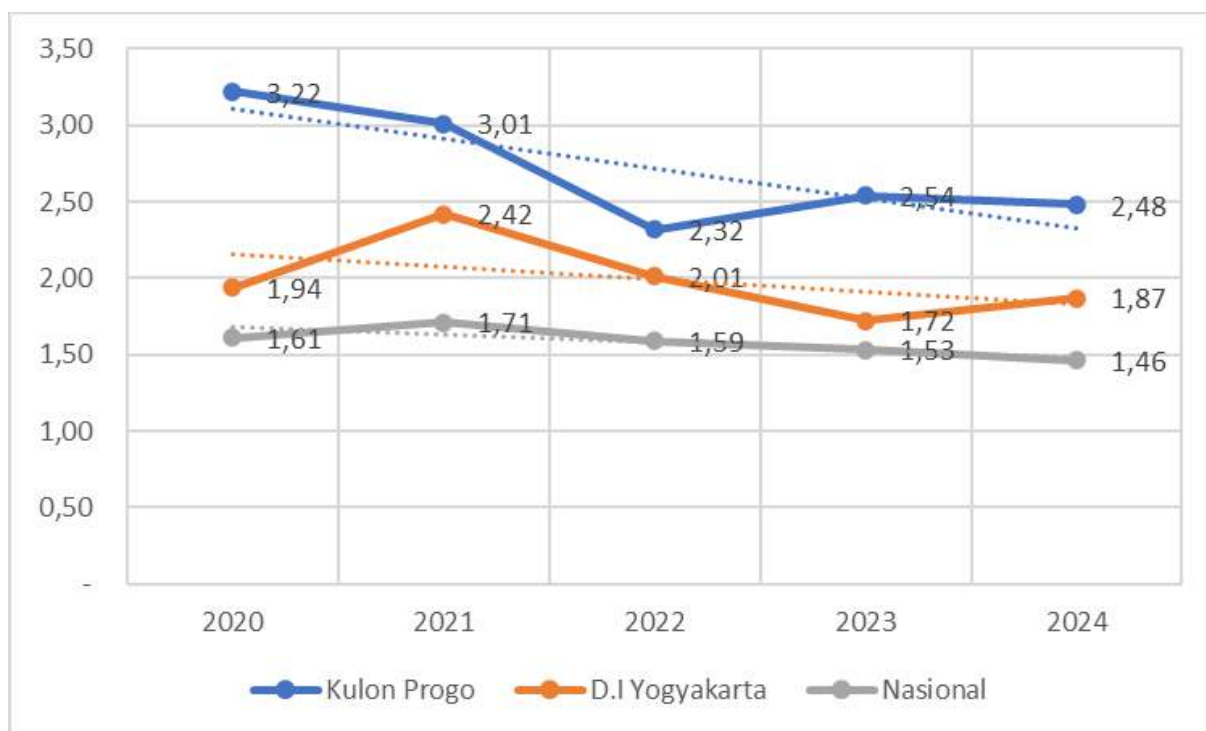
Dalam kurun waktu Maret 2020 – 2023, pola yang sama untuk jumlah penduduk miskin terjadi pada tingkat provinsi maupun nasional. Periode Maret 2020 – 2021 mengalami peningkatan karena efek pandemi, kemudian menurun pada Maret 2022 dan Maret 2023.

Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Provinsi D.I Yogyakarta dan Nasional terus mengalami penurunan, tetapi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo justru mengalami kenaikan dari 70,74 ribu jiwa di tahun 2023 menjadi 71,49 ribu jiwa atau mengalami kenaikan 750 jiwa dalam kurun waktu satu tahun.

3.1.1.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Untuk melihat kemiskinan secara holistik, selain persentase penduduk miskin (P0), dibutuhkan juga indikator lain yang dapat menggambarkan kualitas dari kemiskinan tersebut. Indikator tersebut adalah tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*, P1) dan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index*, P2). Ketiga indikator ini dapat diinterpretasi secara kolaboratif untuk dapat memberikan solusi kebijakan yang semakin pas terhadap kondisi kemiskinan di suatu daerah. Pada gambar 3.3 dibawah, dapat dilihat dari kualitas kemiskinannya, selama periode tahun 2019 – 2020, indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Kulon Progo mengalami kenaikan yang cukup tajam. Namun, membaik dalam periode tahun 2020 – 2022, dengan mengalami penurunan yang juga cukup jauh selama periode ini. Akan tetapi, di tahun 2023 nilai indeks kedalaman kemiskinan kembali meningkat. Nilai indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Kulon Progo, selalu berada diatas nilai indeks kedalaman kemiskinan level provinsi maupun nasional pada periode tahun 2019 – 2023. Hal ini menunjukkan bahwa secara wilayah Kabupaten Kulon Progo memiliki kendala kemiskinan yang lebih berat yaitu rata-rata pengeluaran perkapita penduduk miskinnya masih dibawah kondisi penduduk miskin level provinsi dan nasional.

Grafik 3.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dan Indonesia, 2020-2024



Sumber: BPS

Dalam gambar grafik diatas menunjukkan bahwa, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuatif dan mempunyai kecenderungan menurun. Begitu juga tren indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi dan Nasional juga cenderung mengalami penurunan.

Tabel 3.4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁) Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dan Indonesia, 2020 – 2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Kulon Progo	3,22	3,01	2,32	2,54	2,48
D.I Yogyakarta	1,94	2,42	2,01	1,72	1,87
Indonesia	1,61	1,71	1,59	1,53	1,46

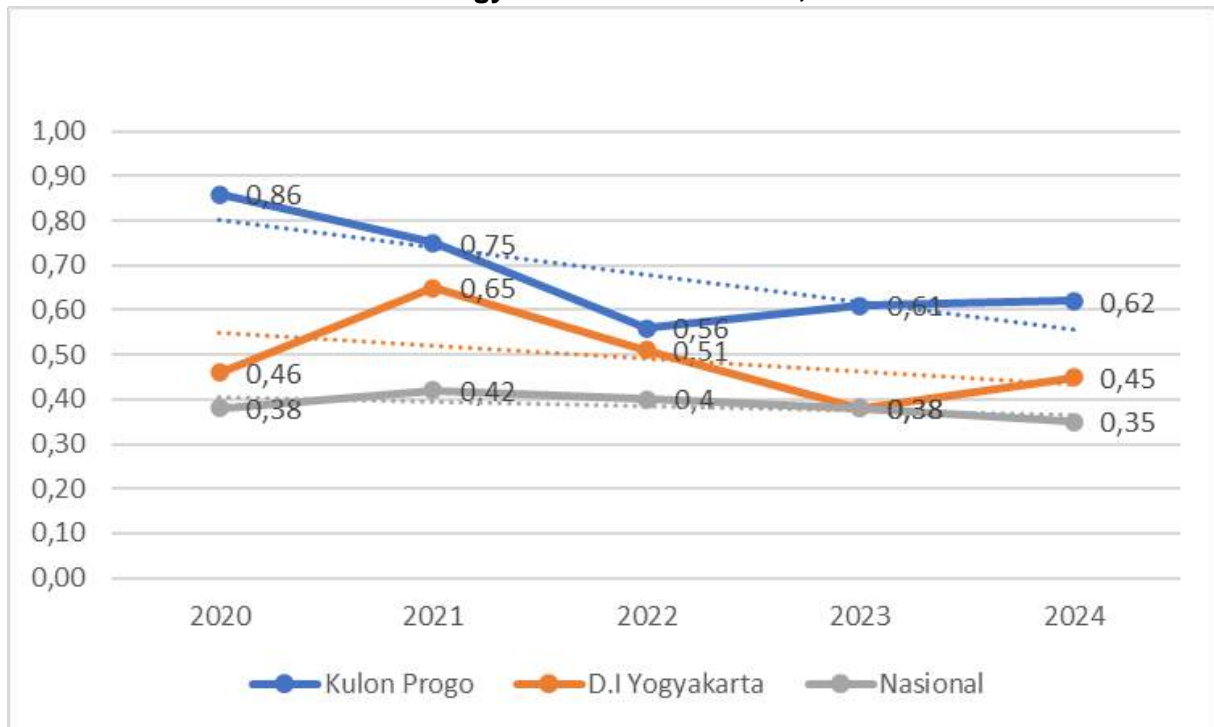
Sumber: BPS

Dalam tabel diatas menunjukkan bahwa, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan Kulon Progo pada tahun 2024 mengalami penurunan, justru di tingkat Provinsi D.I Yogyakarta mengalami kenaikan dari 1,72 di tahun 2023 menjadi 1,87 di tahun 2024.

Jika dilakukan perbandingan antara P0 dan P1 maka kita dapatkan bahwa kondisi kemiskinan di Kulon Progo membaik di tahun 2024 akan tetapi masih ada yang perlu diperhatikan terkait kualitas kemiskinannya. Persentase penduduk miskin mengalami penurunan, artinya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo turut menurun.

3.1.1.4. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Grafik 3.3. Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dan Indonesia, 2020-2024



Dalam gambar grafik diatas, dapat dilihat bahwa Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kulon Progo memiliki pola yang serupa dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan. Nilai indeks keparahan kemiskinan Kulon Progo di tahun 2020-2024 berkisar antara 0,86 hingga 0,62. Pada tahun 2020 - 2022, nilai Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo meningkat mengalami penurunan dari 0,85 menjadi 0,56. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, di tahun 2020 menjadi puncak nilai Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo. Setelah itu, ada titik balik sehingga pada tahun 2021 dan tahun 2022, nilai Indeks Keparahan Kemiskinan Kulon Progo Kembali menurun 0,19 poin menjadi 0,56. Tetapi pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 0,61 dan terus naik menjadi 0,62 di tahun 2024. Jika dibandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional, nilai Indeks Keparahan Kemiskinan di Kulon Progo juga masih lebih tinggi. Hal ini perlu menjadi perhatian bahwa

nilai P2 yang semakin meningkat menandakan bahwa ada sebagian penduduk yang pengeluarannya semakin jauh dibawah penduduk miskin yang lain.

Tabel 3.5. Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂) Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dan Indonesia, 2019 – 2023

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Kulon Progo	0,86	0,75	0,56	0,61	0,62
D.I Yogyakarta	0,46	0,65	0,51	0,38	0,45
Indonesia	0,38	0,42	0,40	0,38	0,35

Sumber: BPS

Ketiga indeks kemiskinan ini berperan penting dalam menentukan kebijakan yang akan diterapkan pada suatu daerah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Nilai angka kemiskinan di Kulon Progo masih terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi D.I Yogyakarta, walaupun penurunannya merupakan yang terbaik daripada kabupaten/kota lain di D.I Yogyakarta. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mengupayakan kebijakan yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat agar mereka dapat keluar dari kemiskinan.

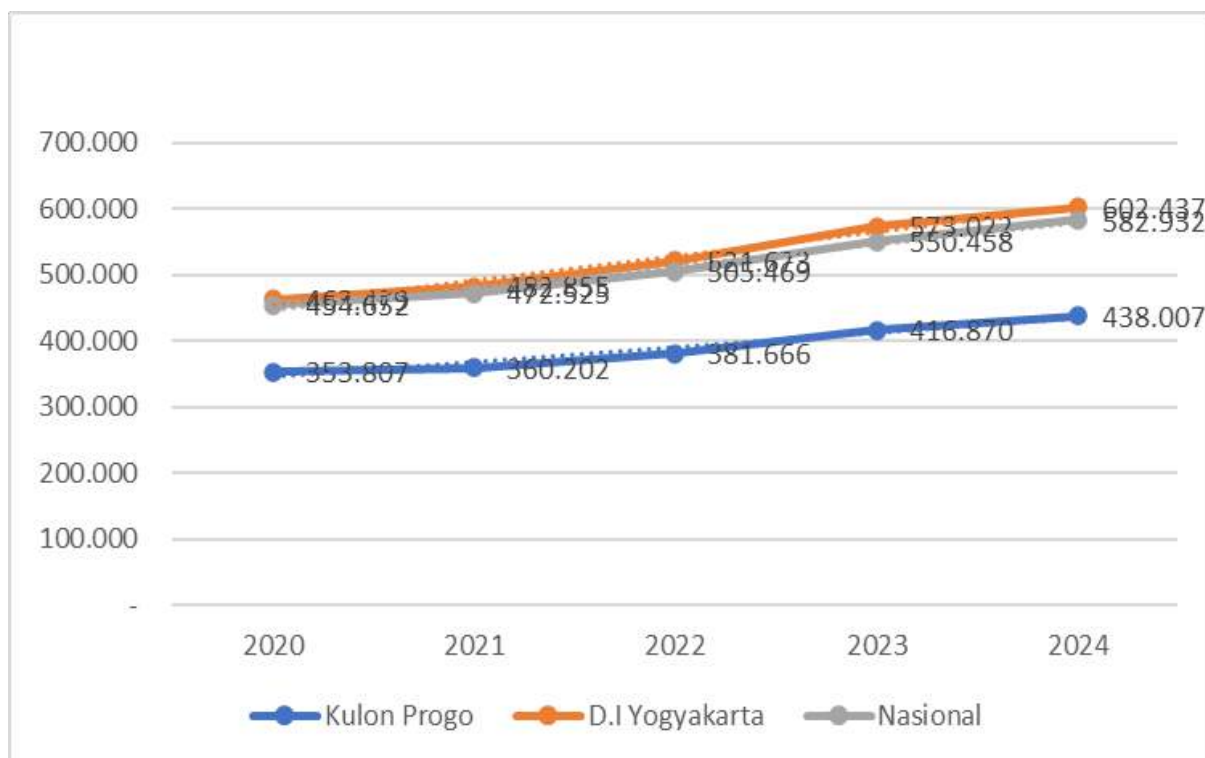
Tentunya hal ini bukanlah hal yang instan melainkan harus menjadi suatu program tersusun sedemikian hingga dapat membentuk pribadi masyarakat yang mandiri. Dilihat dari tiga indikator kemiskinan, hanya nilai P0 saja yang membaik. Akan tetapi dua indeks lainnya masih meningkat. Perlu adanya perhatian bagi penduduk miskin agar kualitas kemiskinan semakin membaik. Menilik dari sisi nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan, nilai ini menggambarkan jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Sehingga, jika semakin dalam jaraknya (nilai P1) semakin besar, maka akan semakin besar pula dana yang harus disuntikkan oleh pemerintah untuk mengangkat pengeluaran kelompok miskin. Di tahun 2024, nilainya semakin meningkat, sehingga jika untuk mengangkat seluruh penduduk miskin dari kemiskinannya akan memerlukan banyak biaya pula. Adapun nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) itu menunjukkan Tingkat ketimpangan antar penduduk miskin. Dengan nilai P2 yang semakin meningkat di tahun 2024, artinya penduduk miskin dengan pengeluaran yang sangat kecil itu semakin banyak atau bahkan semakin menjauh dari penduduk miskin yang lain.

Angka ini dapat digunakan sebagai pengukuran untuk pembentukan kebijakan bantuan langsung yang berperan sebagai 'jaring pengaman' bagi penduduk miskin yang berada di kerak kemiskinan agar dapat bertahan hidup memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dengan demikian, diharapkan penduduk miskin di Kulon Progo akan semakin menuju sejahtera.

3.1.1.5. Garis Kemiskinan

Kemiskinan di suatu daerah dapat diukur menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Nilai kebutuhan dasar minimum dapat digambarkan dengan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah suatu garis yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan di suatu negara atau wilayah. Garis kemiskinan biasanya ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab dalam menghitung tingkat kemiskinan. Garis kemiskinan ini merupakan batas minimal penghasilan atau konsumsi yang diperlukan oleh individu atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Orang yang penghasilan atau konsumsinya di bawah garis kemiskinan dianggap sebagai orang miskin. Garis kemiskinan juga digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan relatif dan absolut dalam suatu negara. Berikut Gambaran garis kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo, terdapat pada gambar berikut ini.

Grafik 3.4. Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dan Indonesia, 2020 – 2024 (rupiah/kapita/bulan)



Sumber: BPS

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa grafik tren garis kemiskinan menunjukkan bahwa garis kemiskinan di Kulon Progo terus mengalami peningkatan selama periode Maret 2020–2024. Dibandingkan dengan garis kemiskinan D.I Yogyakarta dan Indonesia, garis kemiskinan Kulon Progo selalu berada di bawah keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan di Kabupaten Kulon Progo masih lebih rendah daripada tingkat provinsi dan nasional. Pada tahun 2024, garis kemiskinan Kulon Progo sebesar Rp 438.007 per kapita per bulan. Dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp. 416.870,- , angka ini mengalami peningkatan sebesar 4,83%. Untuk tingkat provinsi DI Yogyakarta dan Indonesia, garis kemiskinan juga mempunyai tren selalu meningkat selama periode Maret 2020-2024. Garis kemiskinan Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2024 sebesar Rp 602.437,- atau meningkat sebesar 4,88% dari kondisi tahun 2023 sebesar Rp. 573.022,-. Untuk kondisi Indonesia, garis kemiskinan pada tahun 2024 sebesar Rp. 582.932,- atau mengalami peningkatan sebesar 5,57% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp. 550.458,-.

Tabel 3.6. Garis Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta, dan Indonesia, 2020 – 2024 (rupiah/kapita/bulan)

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Kulon Progo	353.807	360.202	381.666	416.870	438.007
D.I Yogyakarta	463.479	482.855	521.673	573.022	602.437
Indonesia	454.652	472.525	505.469	550.458	582.932

Sumber: BPS

3.1.2. Kondisi Kemiskinan Mikro

Kemiskinan mikro adalah bentuk kemiskinan yang berkaitan dengan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka seperti makanan, air bersih, tempat tinggal yang layak, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang stabil. Kemiskinan mikro dapat terjadi pada individu atau keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan mikro dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya akses ke sumber daya ekonomi dan sosial, seperti lahan pertanian atau pekerjaan yang layak, ketidakmampuan untuk mengakses modal atau kredit yang diperlukan untuk memulai usaha, dan keterbatasan dalam pendidikan dan keterampilan.

Kemiskinan mikro dapat memiliki dampak yang signifikan pada individu, keluarga, dan masyarakat. Individu yang hidup dalam kemiskinan mikro seringkali mengalami masalah kesehatan, nutrisi yang buruk, pendidikan yang terbatas, dan pengangguran yang tinggi.

Kemiskinan mikro juga dapat memperburuk masalah sosial, seperti kekerasan dan kejahatan. Upaya untuk mengatasi kemiskinan mikro biasanya melibatkan program-program pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat miskin melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal, dan akses ke pasar yang lebih luas. Tujuan akhir dari upaya ini adalah untuk memungkinkan masyarakat miskin keluar dari kemiskinan mikro dan membangun masa depan yang lebih baik.

Data kemiskinan mikro merupakan data kemiskinan yang pengumpulan datanya dilakukan dengan melakukan sensus, bukan sampel. Karena pengumpulan data dilakukan secara sensus, maka data kemiskinan mikro dapat diperoleh lebih detail berdasarkan nama dan alamat penduduk miskin tersebut, dengan demikian data tersebut dapat operasional untuk program penyaluran bantuan dan perlindungan sosial.

Data yang digunakan dalam proses analisis kemiskinan mikro terhadap penduduk desil 1-4 adalah data yang bersumber dari P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). Data P3KE merupakan data Terpadu Program Penanganan Kemiskinan dan Kesejahteraan Ekonomi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mendata, mengidentifikasi, dan memverifikasi kondisi sosial dan ekonomi keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan sosial.

3.1.2. Jumlah Penduduk Desil 1-4

Desil 1-4 adalah jumlah kelompok penduduk yang mengacu pada jumlah penduduk yang tinggal di keluarga dengan pendapatan per-kapita di antara 10% terbawah dari seluruh keluarga di suatu negara atau wilayah. Biasanya desil 1-4 dihitung berdasarkan urutan pendapatan rumah tangga dari yang terendah hingga yang tertinggi, lalu dibagi menjadi sepuluh (10) kelompok yang sama besar (desil), di mana desil 1-4 mencakup kelompok dengan pendapatan terendah hingga 40%.

Dalam konteks ini, penduduk yang dianggap memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lainnya masuk dalam kategori desil 1-4. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin biasanya difokuskan pada kelompok ini.

Gambaran tentang kondisi penduduk miskin desil 1-4 di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.7. Jumlah penduduk miskin desil 1 - 4 per Kapanewon
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024**

No	Kapanewon	Individu Desil 1	Individu Desil 2	Individu Desil 3	Individu Desil 4	Jumlah Desil 1-4
1	Galur	5879	3674	4086	3833	17432
2	Girimulyo	8576	3711	2871	2197	17355
3	Kalibawang	7535	4039	3538	3204	18316
4	Kokap	11207	5068	4225	3463	23963
5	Lendah	7155	5303	5304	5358	23120
6	Nanggulan	7839	4027	3571	3243	18680
7	Panjatan	5770	5057	5212	5173	21216
8	Pengasih	10119	6294	5958	5861	28232
9	Samigaluh	4949	3142	2904	3266	14261
10	Sentolo	10610	6403	6521	5530	29064
11	Temon	4432	3367	3500	3334	14633
12	Wates	4952	4222	4577	4766	18517
	Total	89023	54307	52267	49232	224829

Sumber: P3KE, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kulonprogo pada kelompok desil 1-4 sejumlah 224.829 jiwa. Dari jumlah tersebut, jumlah penduduk miskin paling banyak terletak pada kelompok desil 1 dengan jumlah 89.023 jiwa. Jika dilihat dari sebaran penduduk miskin, Wilayah dengan jumlah penduduk miskin kategori desil 1-4 terbanyak adalah Kapanewon Sentolo dengan jumlah 29.064 jiwa. Dengan demikian, kantong kemiskinan terbanyak terdapat di Kapanewon Sentolo.

3.1.3. Jumlah Rumah Tangga dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan Desil 1-4

Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi dimana perempuan memegang peran sebagai kepala keluarga, atau dalam arti lain, sebagai orang yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan pengaturan keuangan di dalam rumah tangga. Di banyak negara di dunia, khususnya di negara-negara berkembang, KRTP sering terkait dengan kemiskinan.

KRTP identik dengan kemiskinan karena dalam banyak kasus, KRTP menghadapi berbagai hambatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat memperburuk situasi kemiskinan mereka. Beberapa faktor yang menyebabkan KRTP lebih rentan mengalami kemiskinan antara lain:

1. Diskriminasi Gender: Di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang, perempuan sering mengalami diskriminasi gender dalam hal pendidikan, keterampilan, akses terhadap pekerjaan, serta hak atas properti dan warisan. Hal ini dapat menyebabkan KRTP kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak, penghasilan yang memadai, dan kepemilikan aset.
2. Beban Ganda: KRTP seringkali memiliki tanggung jawab ganda, yaitu sebagai pencari nafkah dan pengasuh anak sekaligus. Hal ini dapat menyebabkan KRTP harus bekerja keras dalam waktu yang lama dan mengorbankan waktu dan tenaga untuk merawat keluarga, yang dapat membatasi kesempatan mereka untuk bekerja dan menghasilkan uang.
3. Keterbatasan Akses: KRTP seringkali memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti kredit, pelatihan, dan jaringan sosial. Hal ini dapat membuat KRTP kesulitan dalam memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.
4. Tidak Adanya Hak Pemilikan Aset: KRTP seringkali tidak memiliki hak atas properti dan warisan, sehingga sulit untuk memperoleh aset yang dapat digunakan untuk menghasilkan uang, seperti lahan atau rumah.

KRTP mempunyai potensi lebih rentan terhadap kemiskinan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih besar dari pemerintah dan masyarakat untuk memperjuangkan hak dan kesetaraan gender bagi perempuan, serta memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk membantu KRTP keluar dari kemiskinan.

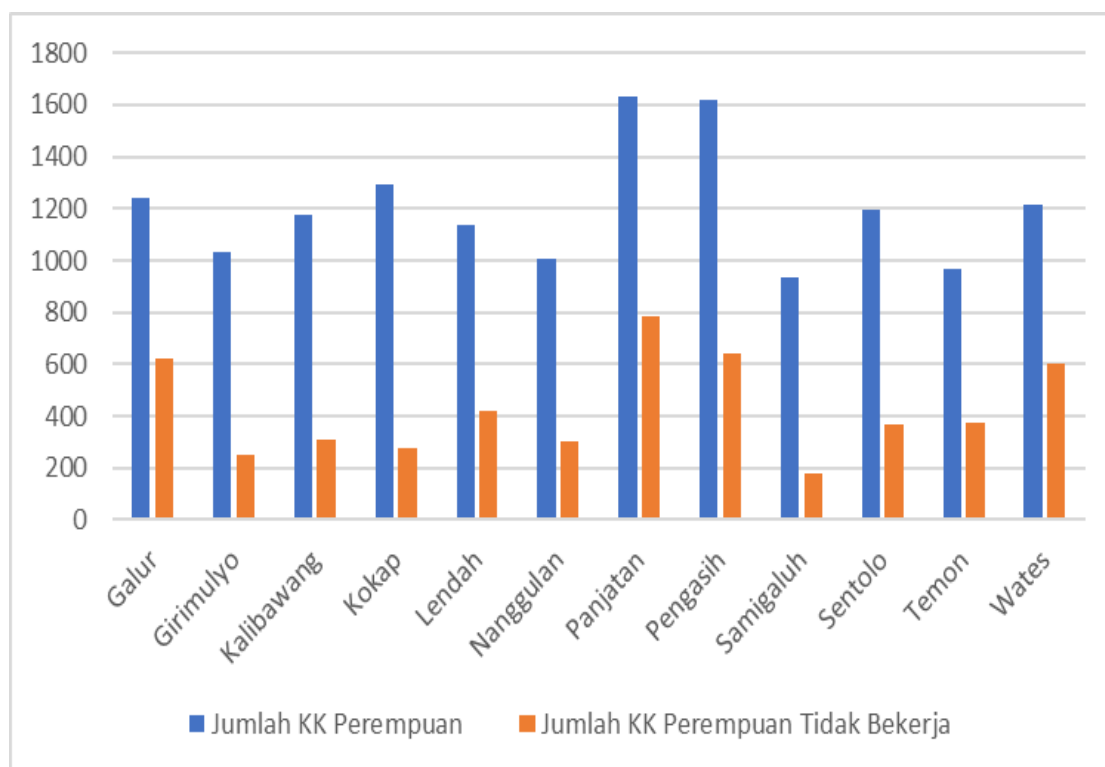
Tabel 3.8. Jumlah Kepala Keluarga Perempuan dan Kepala Keluarga Perempuan tidak bekerja per Kapanewon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No	Kapanewon	Jumlah KK Perempuan	Jumlah KK Perempuan yang tidak bekerja
1	Galur	1244	625
2	Girimulyo	1033	250
3	Kalibawang	1176	310
4	Kokap	1293	276
5	Lendah	1139	418
6	Nanggulan	1006	302
7	Panjatan	1632	785
8	Pengasih	1617	640
9	Samigaluh	937	181
10	Sentolo	1195	370
11	Temon	969	372
12	Wates	1212	600
	Total	14453	5129

Sumber: P3KE, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

Tabel diatas menggambarkan jumlah kepala keluarga perempuan dan kepala keluarga perempuan tidak bekerja per Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah Kepala Keluarga Perempuan di Kabupaten Kulon Progo sejumlah 14.453 jiwa. Sejumlah 14.453 jiwa Kepala Keluarga Perempuan tersebut terdapat 5.129 jiwa Kepala Keluarga Perempuan tidak bekerja.

Grafik 3.5 Jumlah Kepala Keluarga Perempuan dan Kepala Keluarga Perempuan Tidak Bekerja per Kapanewon, Kab. Kulon Progo Tahun 2024



Sumber: P3KE, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

Grafik diatas menunjukkan perbandingan jumlah kepala keluarga perempuan dan jumlah kepala keluarga perempuan tidak bekerja per Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo. Jika dilihat per Kapanewon, Kapanewon Panjatan mempunyai kepala keluarga perempuan terbanyak dengan jumlah 1632 jiwa. Dari 1632 jiwa kepala keluarga perempuan di wilayah tersebut terdapat 785 jiwa atau 48,10% yang tidak bekerja.

3.1.4. Jumlah Individu Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin pada Desil 1-4

Tingkat kemiskinan di suatu negara atau wilayah mempunyai keterkaitan dengan Jumlah Individu Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Desil 1 s/d Desil 4. Desil 1 hingga Desil 4 adalah kelompok penduduk dengan pendapatan rendah hingga menengah bawah yang sering kali berada dalam kondisi rawan kemiskinan. Jumlah individu dalam kelompok ini dapat menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat kemiskinan di suatu wilayah.

Tingkat kemiskinan akan semakin tinggi jika jumlah individu dalam kelompok Desil 1 hingga Desil 4 semakin besar. Hal ini disebabkan karena kelompok ini memiliki pendapatan yang relatif rendah sehingga mereka lebih rentan terhadap kemiskinan.

Kedua, tingkat kemiskinan juga dapat dipengaruhi oleh distribusi jumlah individu berdasarkan jenis kelamin dan usia. Misalnya, jika jumlah individu wanita dan anak-anak di kelompok Desil 1 hingga Desil 4 lebih besar daripada jumlah individu laki-laki, maka tingkat kemiskinan akan cenderung lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena wanita dan anak-anak seringkali memiliki kesempatan kerja yang lebih terbatas dan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Untuk kondisi wilayah Kabupaten Kulon Progo, total jumlah individu dengan usia 0-6 tahun yang masuk kategori Desil 1 s/d Desil 4 yaitu 11853 orang, dengan klasifikasi laki - laki berjumlah 6028 orang dan perempuan berjumlah 5825 orang. Lalu total jumlah individu berusia 7-14 tahun yang masuk kategori Desil 1 s/d Desil 4 yaitu 31169 orang, dengan klasifikasi laki-laki berjumlah 15615 orang dan perempuan berjumlah 15554 orang. Selanjutnya, total jumlah individu dengan usia 15-44 tahun yang masuk kategori Desil 1 s/d Desil 4 yaitu 96699 orang, dengan klasifikasi laki-laki berjumlah 48674 orang dan perempuan berjumlah 48025 orang. Lalu total jumlah individu berusia 45-59 tahun yang masuk kategori Desil 1 s/d Desil 4 yaitu 47709 orang, dengan klasifikasi laki-laki berjumlah 24558 orang dan perempuan berjumlah 23151 orang. Dan total jumlah individu berusia lebih dari 60 tahun yang masuk kategori Desil 1 s/d Desil 4 yaitu 57399 orang, dengan klasifikasi laki-laki berjumlah 24463 orang dan perempuan berjumlah 32936 orang. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

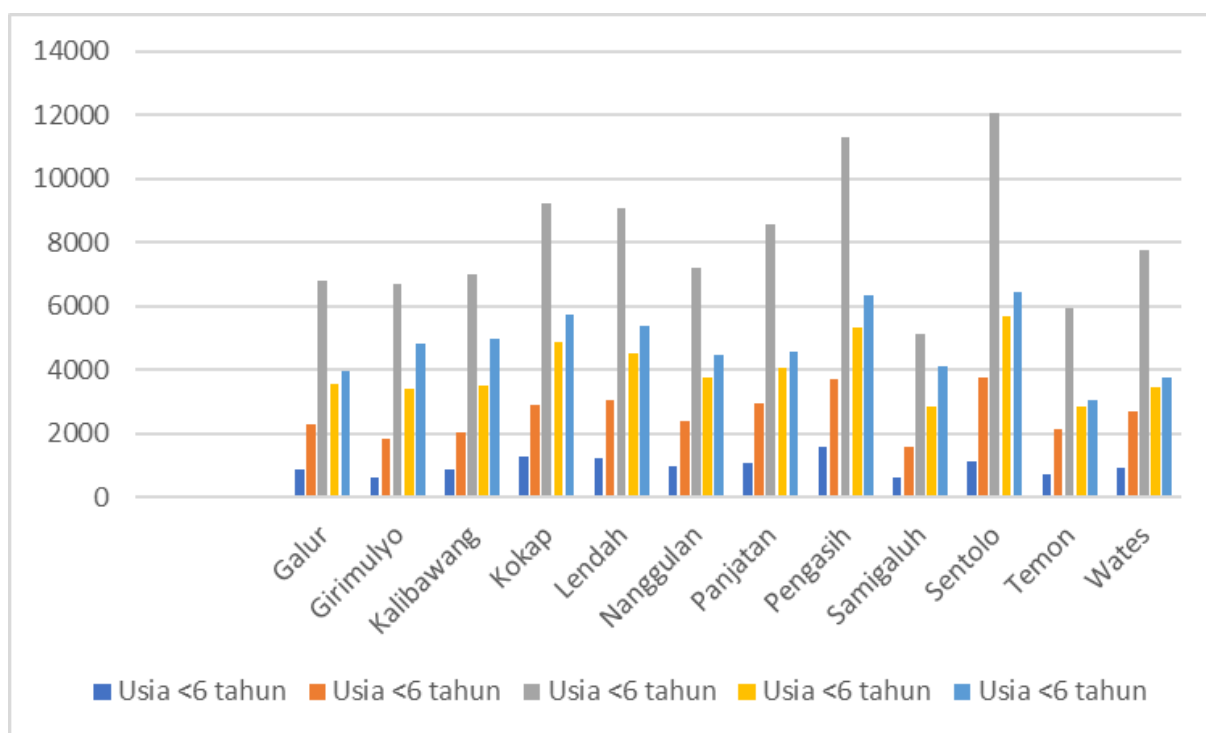
Tabel 3.9. Individu Desil 1-4 berdasarkan kelompok usia Per Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No	Kapanewon	Usia 0-6		Usia 7-14		Usia 15-44		Usia 45-59		Usia >60		Jumlah		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	Total
1	Galur	436	440	1102	1180	3457	3347	1854	1687	1678	2291	8527	8945	17472
2	Girimulyo	336	278	951	896	3416	3265	1691	1718	2104	2700	8498	8857	17355
3	Kalibawang	463	388	1013	1037	3495	3478	1753	1730	2127	2832	8851	9465	18316
4	Kokap	632	611	1465	1407	4789	4458	2432	2417	2464	3288	11782	12181	23963
5	Lendah	620	579	1523	1492	4553	4508	2401	2089	2279	3076	11376	11744	23120
6	Nanggulan	468	472	1187	1169	3612	3597	1907	1822	1958	2488	9132	9548	18680
7	Panjatan	565	509	1437	1478	4270	4308	2124	1948	1859	2718	10255	10961	21216

8	Pengasih	775	816	1820	1858	5623	5681	2726	2600	2702	3631	13646	14586	28232
9	Samigaluh	316	314	805	782	2603	2510	1451	1381	1783	2316	6958	7303	14261
10	Sentolo	614	599	1921	1852	6059	6014	2942	2751	2714	3598	14250	14814	29064
11	Temon	367	361	1069	1055	2905	3021	1472	1355	1257	1771	7070	7563	14633
12	Wates	436	458	1322	1348	3892	3838	1805	1653	1538	2227	8993	9524	18517
	Total	6028	5825	15615	15554	48674	48025	24558	23151	24463	32936	119338	125491	244829

Sumber: P3KE, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

Grafik 3.6 Individu Desil 1-4 berdasarkan kelompok usia Per Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024



Sumber: P3KE, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa, data Desil 1-4 menunjukkan bahwa di Kabupaten Kulon Progo mempunyai kantong kemiskinan di setiap Kapanewon. Kapanewon Sentolo menjadi wilayah yang memiliki total jumlah individu berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin yang paling banyak masuk kategori desil 1-4 di hampir semua kategori usia. Hal ini menjadi perhatian khusus dalam pengambilan dan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang menyasar Kapanewon Sentolo.

3.1.5. Jumlah Penduduk Miskin dan Rentan Miskin di Kab. Kulon Progo Desil 1 dan 2

Penduduk miskin merujuk pada kategori kelompok penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang umumnya diukur berdasarkan pendapatan atau konsumsi. Orang miskin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Penduduk miskin kategori desil 1 dan 2 merupakan kelompok penduduk yang memiliki pendapatan atau konsumsi yang berada pada dua desil pertama dalam distribusi pendapatan masyarakat.

Dalam proses analisis penduduk miskin dan rentan miskin menggunakan data desil 1 dan desil 2 yang bersumber dari data regsosek. Data Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) adalah data yang digunakan untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya yang terkait dengan keluarga miskin atau rentan. Sebaran jumlah penduduk yang masuk kategori desil 1 dan 2 per Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.10. Jumlah Penduduk Miskin Desil 1 dan 2 per Kapanewon, Kab. Kulon Progo

No	Kapanewon	Jumlah Penduduk	Penduduk Miskin	%
1	Temon	25.693	2.607	10,15
2	Wates	45.170	4.226	9,36
3	Panjatan	35.595	6.413	18,02
4	Galur	29.934	5.101	17,04
5	Lendah	38.721	7.259	18,75
6	Sentolo	47.476	9.780	20,6
7	Pengasih	50.026	6.833	13,66
8	Kokap	32.223	7.641	23,71
9	Girimulyo	22.470	6.524	29,03
10	Nanggulan	28.755	4.932	17,15
11	Kalibawang	27.125	5.734	21,14
12	Samigaluh	24.725	7.500	30,33

	Total	407.913	74.550	18,28
--	--------------	----------------	---------------	--------------

Sumber: Regsosek 2024

3.2. Analisis Karakteristik Masalah Kemiskinan Konsumsi

Masalah kemiskinan konsumsi adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pangan, sandang, dan papan. Kemiskinan juga dapat dipengaruhi dengan kualitas hidup penduduk yang rendah, keterbatasan dan rendahnya mutu pangan, keterbatasan dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak yang rendah, dan rendahnya mutu layanan pendidikan.

Faktor lain yang dapat menyebabkan kemiskinan, yaitu: Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, Meningkatnya pengangguran, Pendidikan yang rendah, Bencana alam, Distribusi pendapatan yang tidak merata.

Analisis karakteristik masalah kemiskinan konsumsi dilakukan terhadap tiga indikator kemiskinan, yaitu Persentase Penduduk Miskin (P0), Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2).

3.2.1. Persentase Penduduk Miskin

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah jumlah penduduk miskin, yaitu jumlah individu atau keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan biasanya ditentukan berdasarkan standar minimal pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jumlah penduduk miskin dapat dihitung dengan mengamati persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dalam suatu wilayah atau negara.

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau keluarga tidak memiliki cukup sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap infrastruktur dasar. Kemiskinan dapat menjadi permasalahan serius yang mempengaruhi kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk suatu wilayah.

Data jumlah penduduk miskin menjadi pengantar pembahasan yang penting dalam konteks kebijakan penanggulangan kemiskinan. Data tersebut memberikan gambaran tentang tingkat kemiskinan di suatu wilayah dan menjadi dasar untuk perencanaan dan pengambilan keputusan terkait program-program penanggulangan kemiskinan. Data ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok yang rentan terhadap kemiskinan,

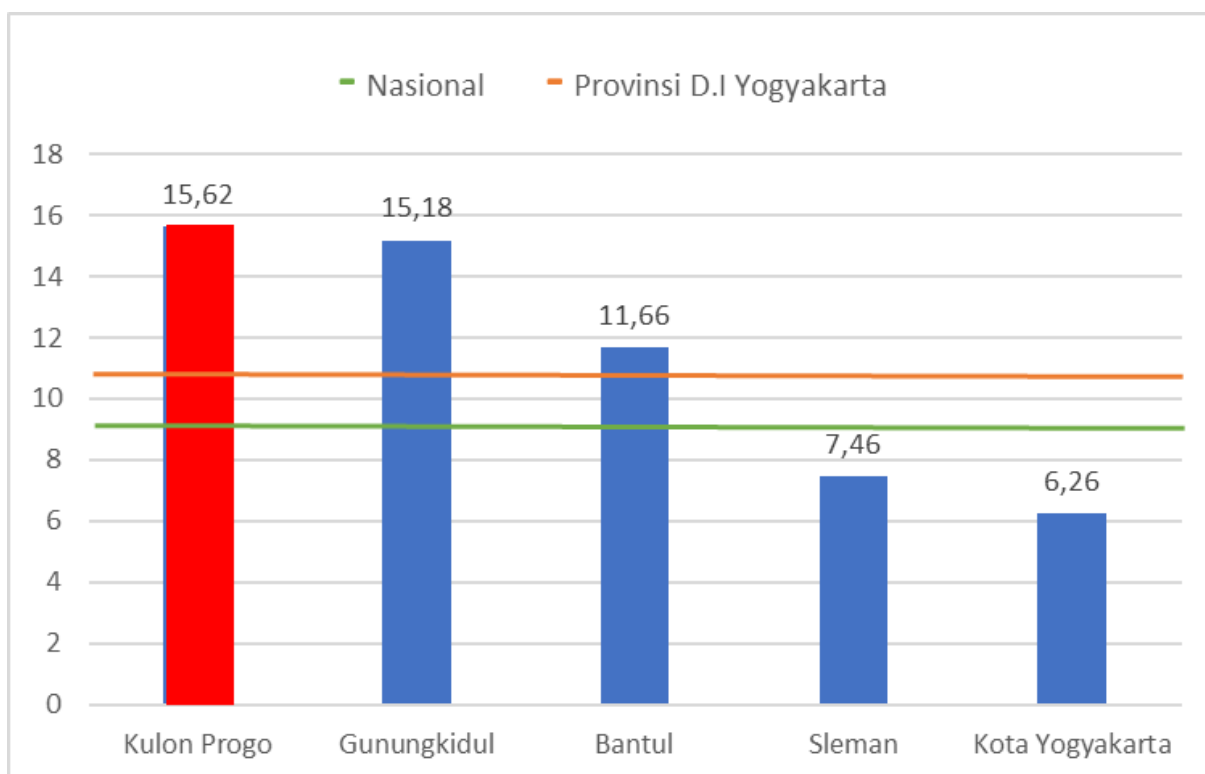
serta mengukur efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang telah diimplementasikan.

Selain itu, data jumlah penduduk miskin juga dapat menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan berkelanjutan dan redistribusi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada dalam kondisi miskin. Data ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi area atau wilayah yang membutuhkan prioritas dalam alokasi sumber daya dan kebijakan yang dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan.

Pentingnya data jumlah penduduk miskin sebagai pengantar pembahasan adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kondisi kemiskinan dalam suatu wilayah atau negara, dan menjadi dasar untuk merencanakan dan mengimplementasikan program penanggulangan kemiskinan yang efektif dan berkelanjutan. Data ini juga menjadi acuan bagi pemangku kepentingan, pemerintah, dan masyarakat untuk mengambil tindakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang hidup dalam kondisi miskin.

3.2.1.1 Posisi Relatif

**Grafik 3.7 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin (%)
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024**

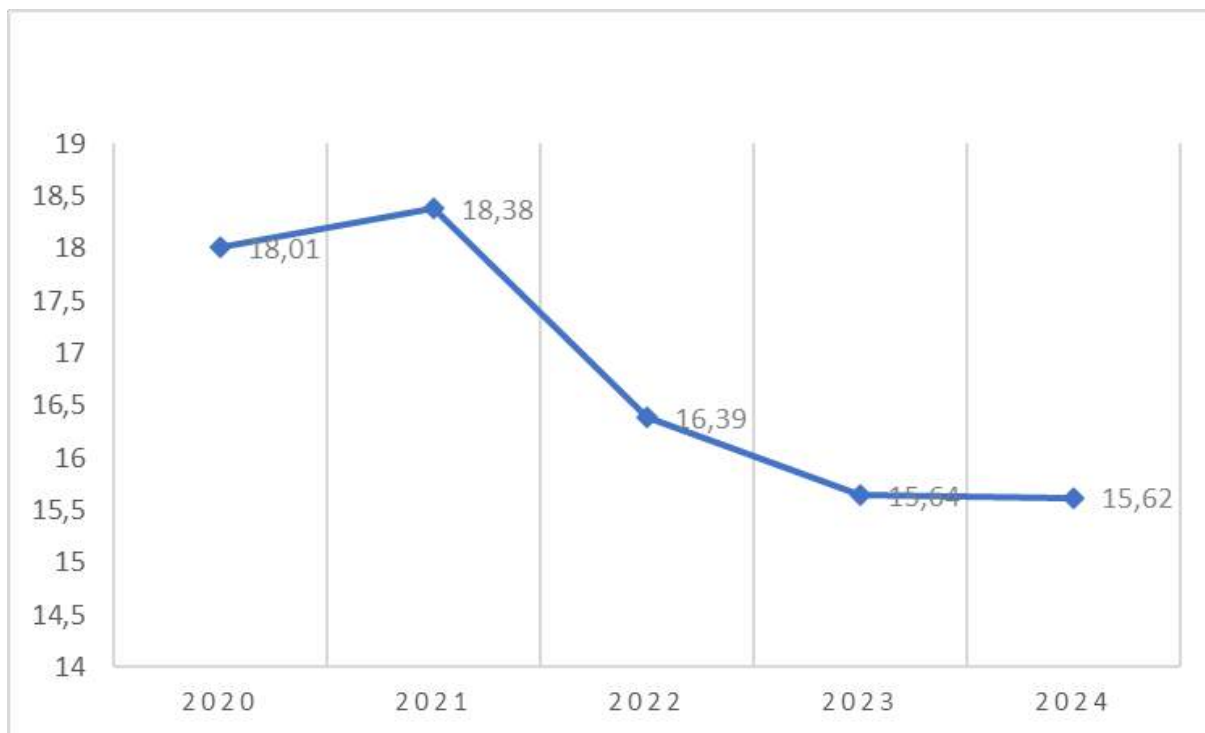


Sumber: BPS

Dari Grafik di atas Kabupaten Kulon Progo menunjukkan data persentase penduduk miskin sebesar 15,62%, jika dibandingkan dengan Kabupaten atau kota lain di wilayah D.I Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo menempati posisi paling atas. Artinya, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo lebih tinggi daripada persentase penduduk miskin di wilayah kabupaten atau kota lain di Provinsi D.I Yogyakarta secara keseluruhan. Dalam skala nasional, persentase penduduk miskin di Indonesia adalah 9,03%. Dengan demikian, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo jauh lebih tinggi daripada persentase penduduk miskin secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Kulon Progo memiliki posisi relatif yang cukup tinggi dalam hal tingkat kemiskinan dibandingkan dengan tingkat Provinsi D.I Yogyakarta secara keseluruhan dan tingkat nasional di Indonesia.

3.2.1.2 Perkembangan Antar Waktu

**Grafik 3.8 Perkembangan Persentase Jumlah Penduduk Miskin (%)
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 - 2024**



Sumber: BPS

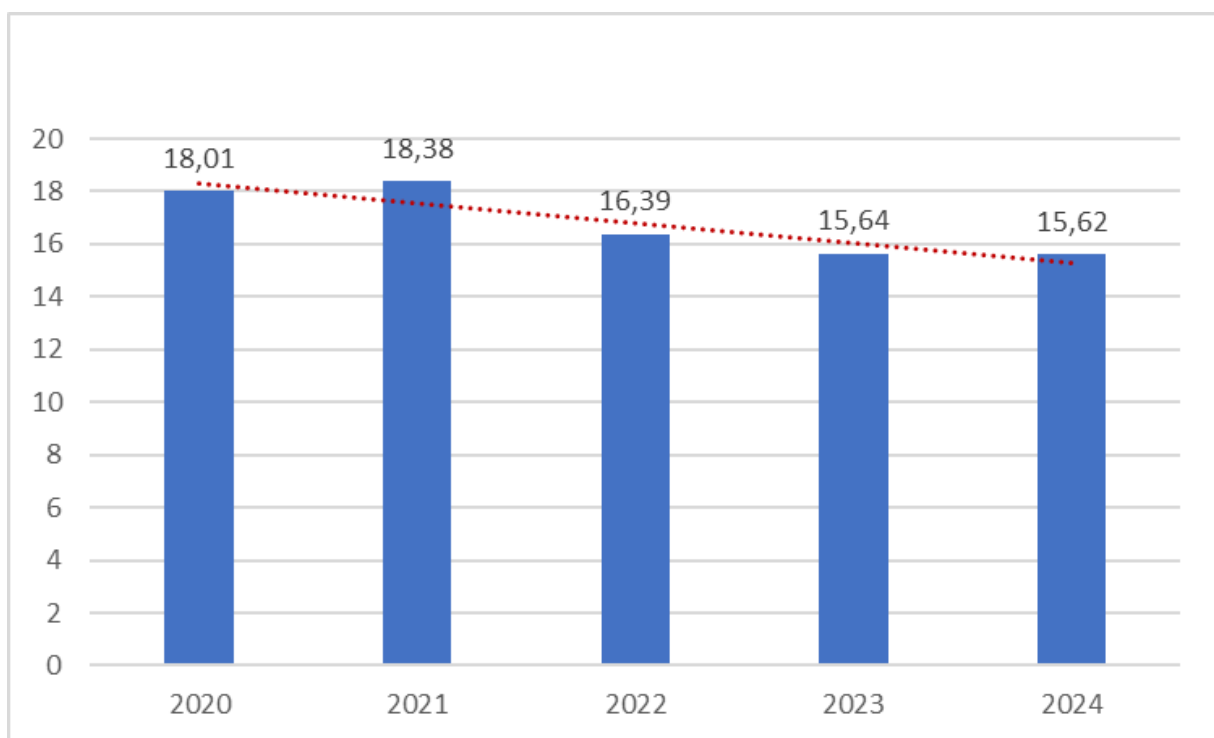
Dari grafik di atas menunjukkan adanya perubahan fluktuatif dalam tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo. Selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Terdapat kenaikan dan penurunan tingkat kemiskinan. Tahun 2020 tingkat kemiskinan Kabupaten

Kulon Progo sebesar 18,01% dan naik menjadi 18,38% di tahun 2021. Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terjadi penurunan yang signifikan, dari 18,38% di tahun 2021 menurun secara drastis menjadi 16,39% di tahun 2022 dan kembali turun menjadi 15,64% di tahun 2023 dan kembali turun di tahun 2024 menjadi 15,62%.

Perubahan persentase ini menunjukkan adanya dinamika yang kompleks dalam faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, seperti ekonomi lokal, akses terhadap pekerjaan, akses terhadap layanan sosial, dan kebijakan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan.

3.2.1.3 Analisis Efektivitas

**Grafik 3.9 Grafik Efektivitas Persentase Penduduk Miskin (%)
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 - 2024**



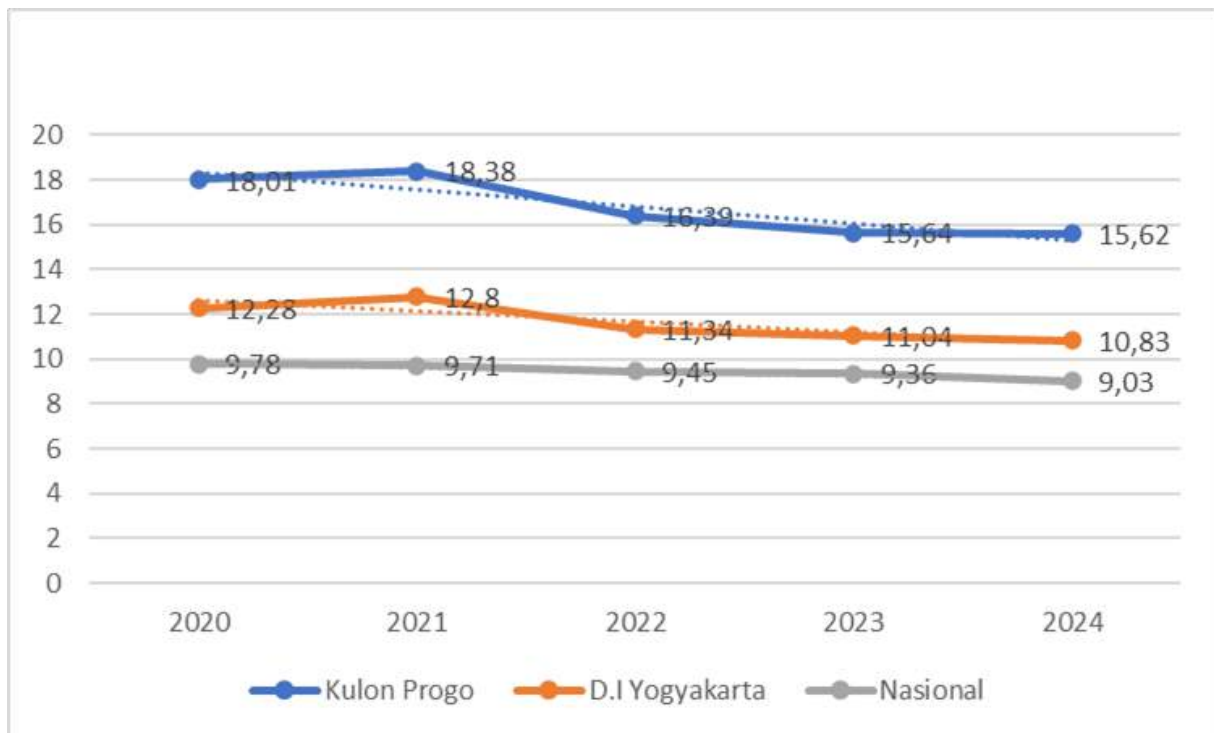
Sumber: BPS

Dilihat dari kecenderungan data pada grafik diatas, pada periode tahun 2020 - 2024 terdapat kenaikan dan penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan yang menunjukkan adanya tantangan dalam mengupayakan penurunan kemiskinan, dan terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan tajam, dan kembali menurun hingga tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya potensi dalam efektivitas kebijakan atau program yang diterapkan pada tahun tersebut efektif dan efisien dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Namun demikian, tren data yang fluktuasi dalam data tersebut juga menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo. Dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan, perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan persentase jumlah penduduk miskin, seperti ekonomi lokal, akses terhadap pekerjaan, akses terhadap layanan sosial, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Diperlukan evaluasi terus-menerus dan pemahaman yang komprehensif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan serta efektivitas kebijakan atau program yang diterapkan untuk dapat mengoptimalkan upaya dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo.

3.2.1.4 Analisis Relevansi

**Grafik 3.10 Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%)
Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020 - 2024**



Sumber: BPS

Gambar Grafik diatas menunjukkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta, dan tingkat nasional periode tahun 2020 - 2024. Pada grafik diatas dapat dilihat beberapa relevansi perkembangan antara ketiga entitas tersebut, terlihat kenaikan dan penurunan persentase penduduk miskin terlihat dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo mengalami kenaikan dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, dan mengalami penurunan secara

bertahap, yaitu dari 18,38% pada tahun 2021 menjadi 15,64% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya upaya penanggulangan kemiskinan yang relatif efektif di Kabupaten Kulon Progo selama periode tersebut. Meskipun terjadi penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo, tetapi jika dibandingkan dengan Provinsi dan Tingkat Nasional, persentase penduduk miskin di kabupaten Kulon Progo masih berada di atas Provinsi dan Nasional. Provinsi D.I Yogyakarta dan tingkat nasional juga mengalami penurunan yang signifikan dalam persentase penduduk miskin selama periode yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo masih memiliki tantangan dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Dalam gambar grafik terlihat bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo mengalami fluktuasi yang tidak signifikan. Sementara itu, persentase penduduk miskin di tingkat provinsi dan nasional juga mengalami tren fluktuasi yang sama, dan cenderung menurun secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya berkelanjutan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo untuk mencapai penurunan yang lebih signifikan.

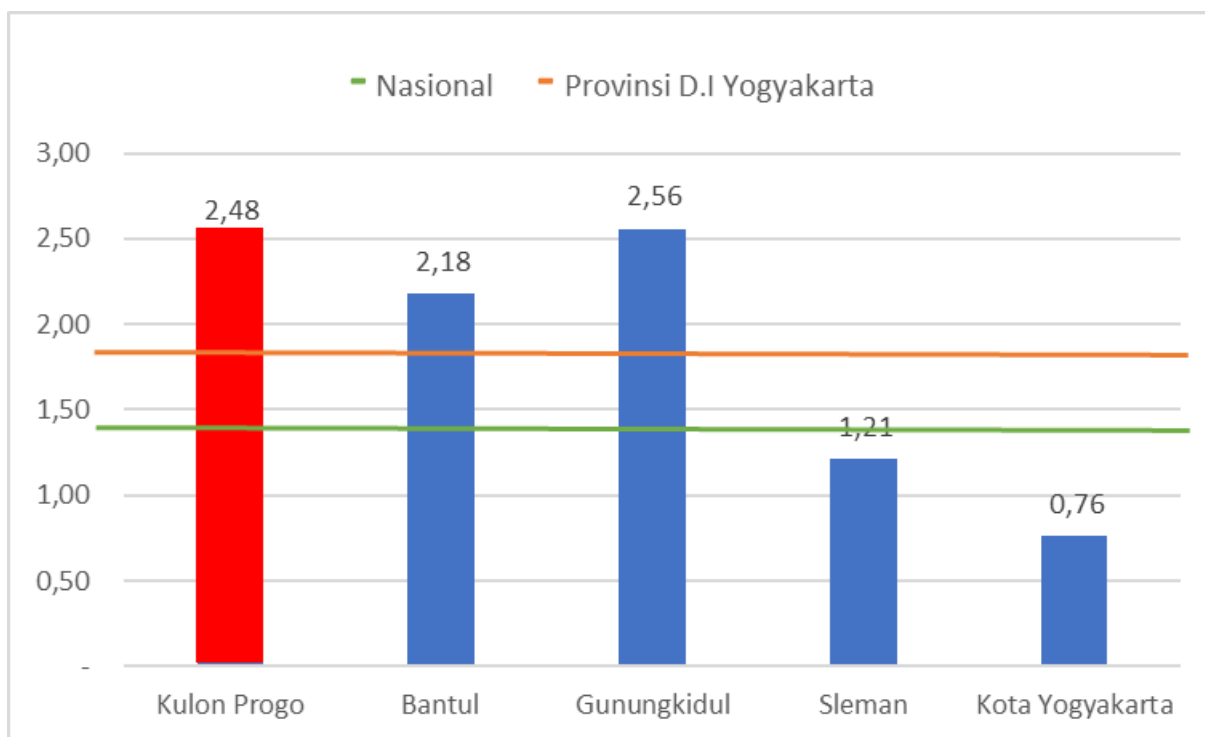
Dengan demikian, relevansi perkembangan antara Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta, dan tingkat nasional dapat dilihat dari penurunan persentase penduduk miskin, perbandingan dengan tingkat provinsi dan nasional, stabilitas persentase penduduk miskin, serta keterkaitan dengan kebijakan nasional. Data tersebut dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif di Kabupaten Kulon Progo.

3.2.2. Tingkat Kedalaman Kemiskinan

Tingkat kedalaman kemiskinan adalah indikator yang digunakan mengukur sejauh mana penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, serta seberapa dalam tingkat kemiskinan yang mereka alami. Analisis tingkat kedalaman kemiskinan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang seberapa parah kemiskinan yang dialami oleh penduduk miskin, dan seberapa dalam mereka terperosok dalam kondisi miskin.

3.2.2.1 Posisi Relatif

**Grafik 3.11 Posisi Relatif Indeks Kedalaman kemiskinan (P1)
Provinsi D.I Yogyakarta, Tahun 2024**



Sumber: BPS

Gambar grafik diatas menggambarkan posisi relatif indeks kedalaman kemiskinan di wilayah D.I Yogyakarta. Dalam gambar tersebut, Kabupaten Kulon Progo memiliki indeks kedalaman kemiskinan 2,48. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi D.I Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo menempati posisi relatif yang lebih baik dalam hal indeks kedalaman kemiskinan dari pada Kabupaten Gunungkidul yang memiliki indeks kedalaman kemiskinan 2,56.

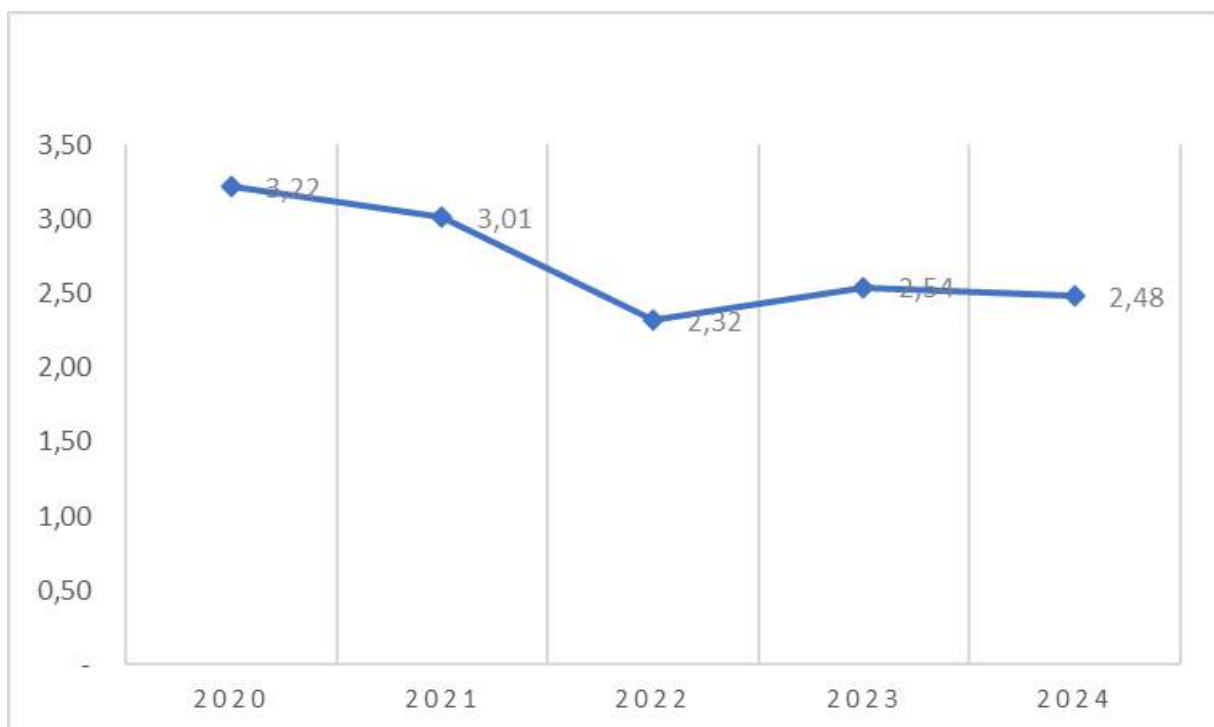
Namun demikian, Kabupaten Kulon Progo memiliki indeks kedalaman kemiskinan lebih tinggi jika dibandingkan dengan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten lainnya di D.I Yogyakarta, seperti di Kabupaten Bantul memiliki indeks 2,18, di Kabupaten Sleman memiliki indeks 1,21 dan Kota Yogyakarta dengan indeks kedalaman kemiskinan 0,76. Hal ini

memberikan gambaran bahwa Kabupaten Kulon Progo mempunyai posisi relatif indeks kedalaman kemiskinan yang masih rendah.

Dengan demikian, posisi relatif Kabupaten Kulon Progo dalam konteks Provinsi D.I Yogyakarta berada di antara Kabupaten/Kota dengan indeks kedalaman kemiskinan yang lebih tinggi dengan satu wilayah dan lebih rendah jika dibandingkan dengan tiga wilayah lainnya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian bahwa tingkat kedalaman kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo masih cukup signifikan dan perlu upaya lebih lanjut untuk mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

3.2.2.2 Perkembangan Antar Waktu

Grafik 3.12 Perkembangan Antar Waktu Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020 - 2024



Sumber: BPS

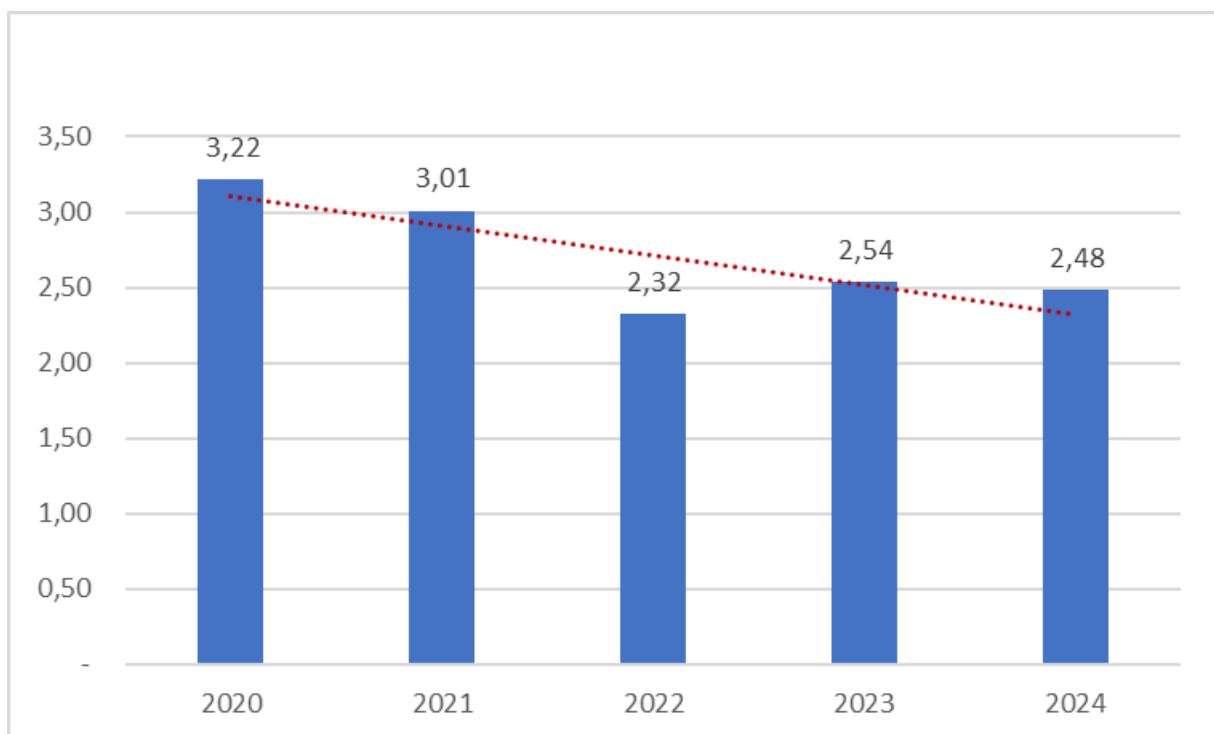
Gambar diatas merupakan grafik perkembangan antar waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Grafik ini menggambarkan bahwa semakin meningkatnya nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan, mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin lebar (ensiklopedia indikator BPS). Pada periode tahun 2020 - 2024 terlihat bahwa terjadi fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, indeks kedalaman kemiskinan mencapai 3,22 dan mengalami penurunan

menjadi 3,01 di tahun 2021, dan terus menurun menjadi 2,32 di tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi kenaikan menjadi 2,54, dan turun kembali di tahun 2024 menjadi 2,48.

Analisis data ini menunjukkan bahwa, jika dilihat dari lima tahun terakhir, Kabupaten Kulon Progo mempunyai tren yang cukup baik dalam mengatasi masalah kemiskinan. Tantangan yang dihadapi Kabupaten Kulon Progo, yaitu bagaimana mempersiapkan perencanaan dan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan lebih optimal, sehingga dapat meneruskan tren positif di tahun yang akan datang. Strategi penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan diperlukan, sebagai upaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo.

3.2.2.3 Analisis Efektivitas

**Grafik 3.13 Analisis Efektivitas Indeks Kedalaman kemiskinan (P1)
Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020 - 2024**



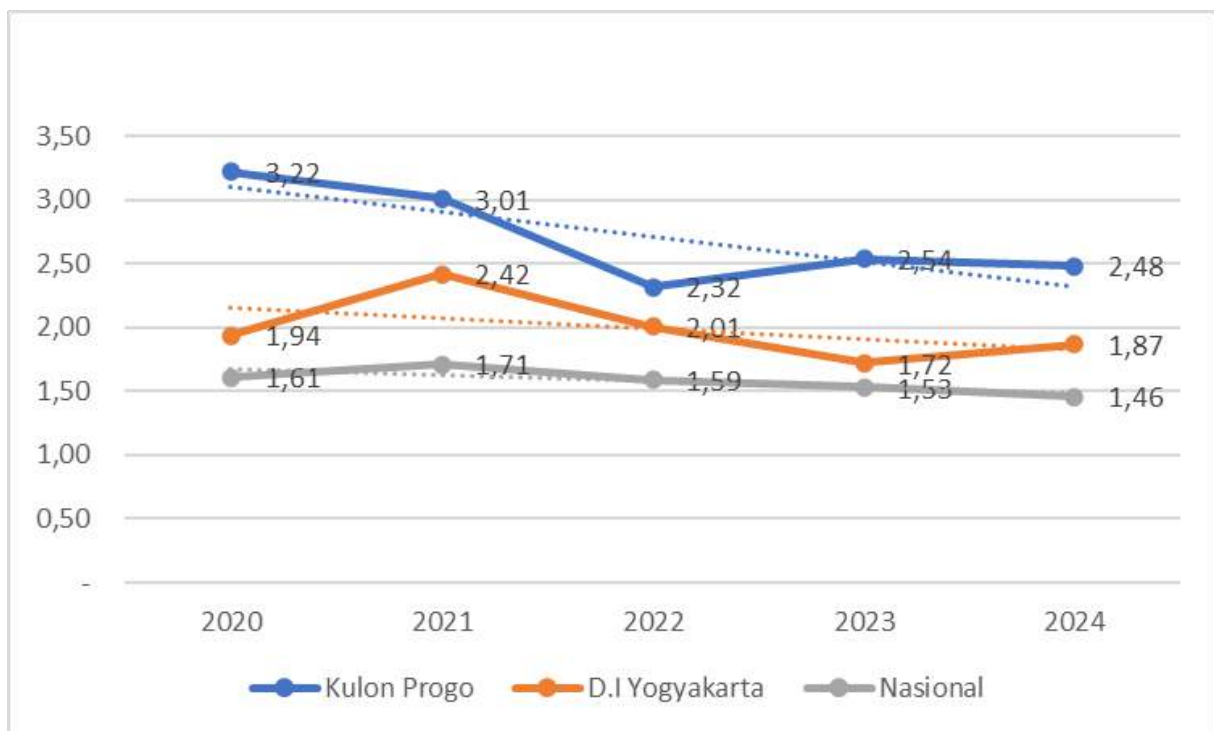
Sumber: BPS

Gambar diatas menunjukkan data analisis efektivitas indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Kulon Progo periode 2020 sampai dengan 2024. Berdasarkan data tersebut, indek kedalaman kemiskinan terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan, dan mulai naik kembali di tahun 2023. Pada tahun 2024 cukup baik karena tingkat kedalaman kemiskinan di Kulon Progo kembali mengalami penurunan.

Dari hasil analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa proses penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo cukup efektif. Misi yang dihadapi selanjutnya adalah bagaimana meneruskan tren positif ini di tahun mendatang, sehingga kebijakan yang telah diimplementasikan untuk mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

3.2.2.4 Analisis Relevansi

**Grafik 3.14 Analisis Relevansi Indeks Kedalaman kemiskinan (P1)
Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020 - 2024**



Sumber: BPS

Gambar grafik diatas menunjukkan relevansi perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo dengan provinsi D.I Yogyakarta dan Nasional dapat dilihat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pada periode tersebut, terlihat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo mengalami fluktuatif. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Kulon progo 3,22 di tahun 2020, dan mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 3,01 dan terus menurun menjadi 2,32 di tahun 2022. Pada tahun 2023 justru mengalami kenaikan lagi menjadi 2,54 dan di tahun 2024 kembali turun menjadi 2,48.

Sementara itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan di provinsi D.I Yogyakarta dan Nasional mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun cenderung mengalami penurunan. Secara

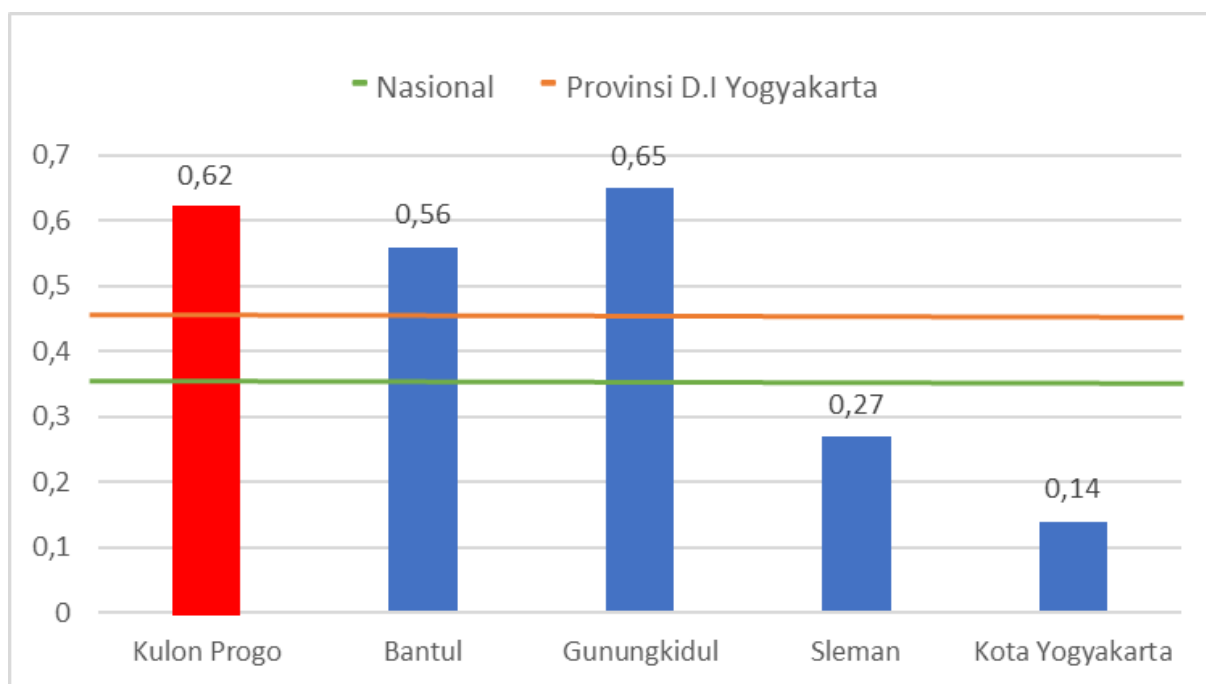
umum, indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo menuju tren positif dan relevan dengan dengan tingkat provinsi dan nasional.

3.2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

3.2.3.1 Posisi Relatif

**Grafik 3.15 Posisi Relatif Indeks Keparahan kemiskinan (P2)
Provinsi D.I Yogyakarta, Tahun 2024**



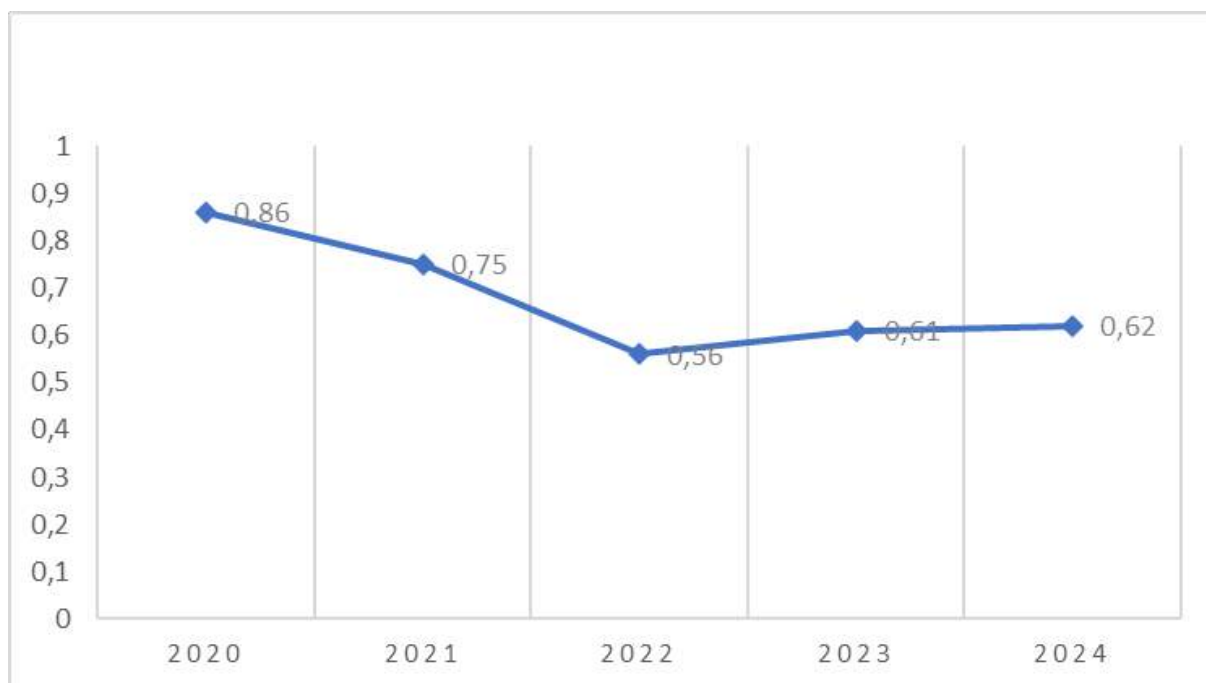
Sumber: BPS

Gambar grafik diatas menggambarkan posisi relatif indeks keparahan kemiskinan di wilayah D.I Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi D.I Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo menempati posisi relatif kedua dengan indeks 0,62 setelah Gunungkidul yang mempunyai indeks 0,65 dalam hal tingkat keparahan kemiskinan.

Dengan demikian, posisi relatif Kabupaten Kulon Progo dalam cakupan Provinsi D.I Yogyakarta berada di antara Kabupaten/Kota mempunyai indeks keparahan kemiskinan yang cukup tinggi. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Kulon Progo, bagaimana strategi upaya lebih lanjut untuk mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

3.2.3.2 Analisis Perkembangan Antar Waktu

**Grafik 3.16 Analisis Perkembangan Antar Waktu Indeks Keparahan kemiskinan (P2)
Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020 - 2024**



Sumber: BPS

Grafik diatas menggambarkan perkembangan antar waktu Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Gambar grafik tersebut menunjukkan nilai Indeks Keparahan Kemiskinan yang memberikan gambaran tentang ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin besar indeks keparahan kemiskinan, semakin besar pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada periode lima tahun terakhir terlihat bahwa terjadi fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun tahun 2020 tingkat keparahan kemiskinan di Kulon Progo mempunyai indeks 0,86, dan mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 0,75, dan terus mengalami penurunan menjadi 0,56 di tahun 2022.

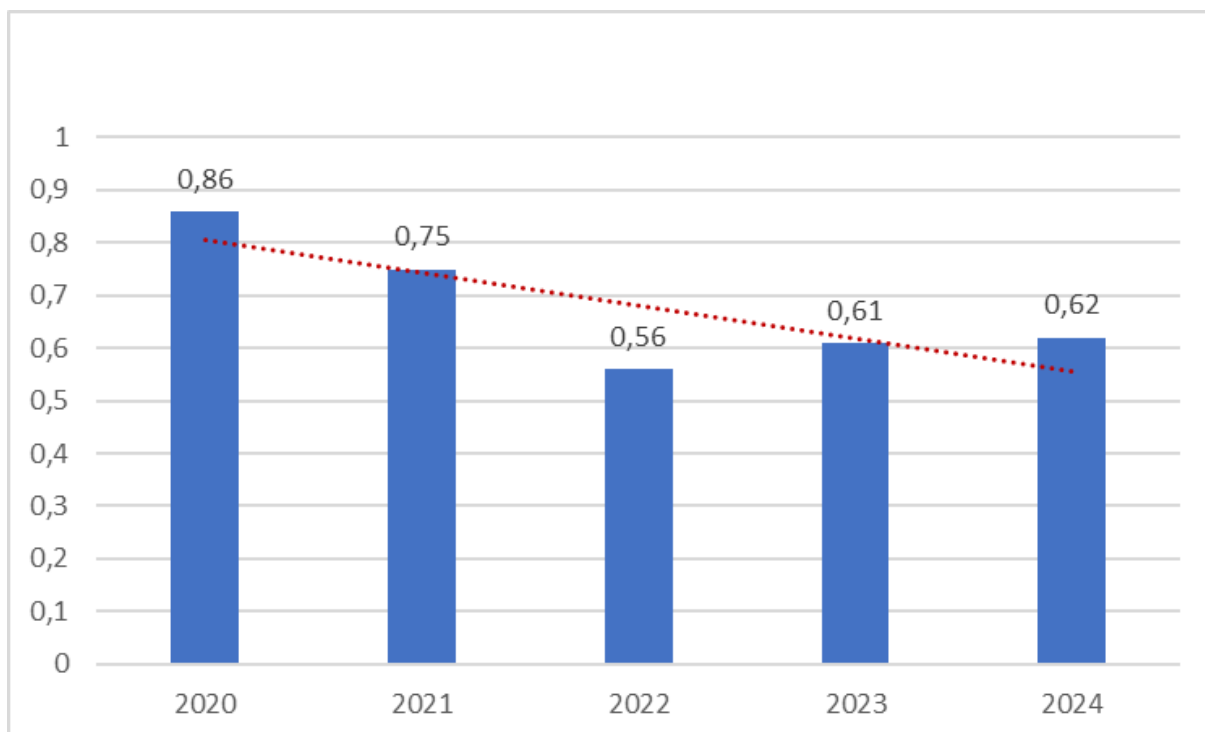
Tahun 2023 menjadi perhatian karena indek keparahan kemiskinan mengalami kenaikan menjadi 0,61, dan terus mengalami kenaikan menjadi 0,62 di tahun 2024.

Data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo menghadapi tantangan dalam mengatasi masalah kemiskinan, khususnya pada periode tahun 2022 sampai dengan 2024.

Tantangan nyata yang dihadapi, yaitu bagaimana mempersiapkan perencanaan penanggulangan kemiskinan yang optimal guna menurunkan kembali tingkat keparahan kemiskinan di tahun mendatang.

3.2.3.3 Analisis Efektivitas

**Grafik 3.17 Analisis Efektivitas Indeks Keparahan kemiskinan (P2)
Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020 - 2024**



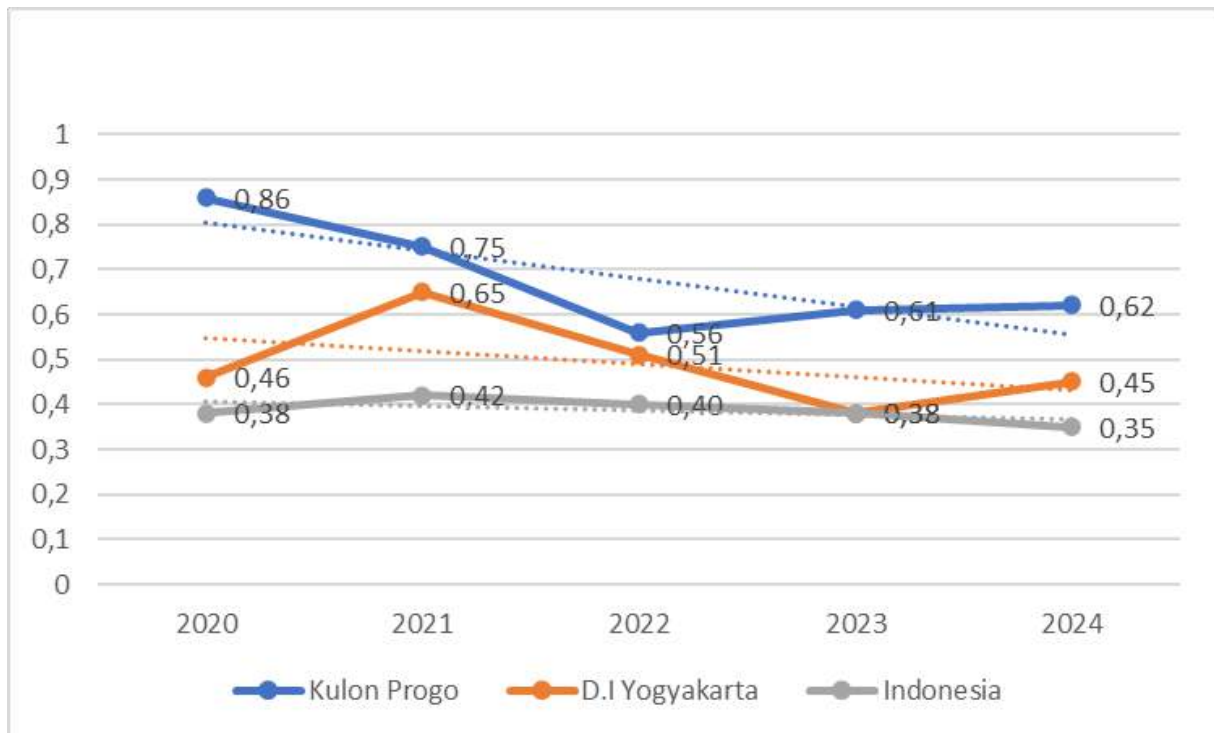
Sumber: BPS

Gambar grafik diatas menggambarkan data analisis efektivitas indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Kulon Progo periode 2020 sampai dengan 2024. Berdasarkan data tersebut, jika dilihat secara linier, penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo cukup efektif, karena mengalami penurunan indeks keparahan kemiskinan selama periode lima tahun terakhir. Tetapi jika dilihat secara mendalam, terjadi fluktuatif dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2020 indek keparahan kemiskinan 0,86 dan berangsur menurun hingga menjadi 0,56 di tahun 2022. Namun demikian, mengalami kenaikan di tahun 2023 dan terus naik sampai dengan tahun 2024. Oleh karena itu, perlu diperhatikan efektivitas kebijakan yang telah dijalankan untuk mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo. Monitoring dan evaluasi juga diperlukan untuk memastikan kebijakan dalam mengurangi tingkat keparahan kemiskinan dapat berjalan secara efektif di masa mendatang.

3.2.3.4 Analisis Relevansi

**Grafik 3.18 Analisis Relevansi Indeks Keparahan kemiskinan (P2)
Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020 - 2024**



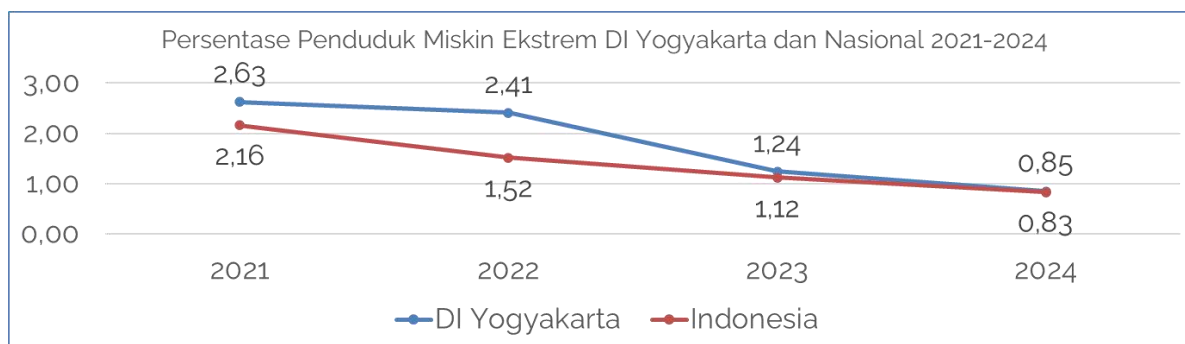
Sumber: BPS

Gambar grafik diatas menunjukkan relevansi perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo dengan provinsi D.I Yogyakarta dan nasional pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dalam grafik tersebut terlihat bahwa Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo mengalami fluktuatif, cenderung menurun. Sementara itu, di provinsi D.I Yogyakarta, Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun juga cenderung menurun. Di tingkat nasional, Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami sedikit fluktuatif dan cenderung mengalami sedikit penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo dalam periode lima tahun terakhir relevan dengan provinsi D.I Yogyakarta dan nasional.

3.2.4. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu sebesar 1,9 US dollar PPP (*purchasing power parity*) per hari. Artinya penduduk yang penghasilan sehari tidak mencapai 1,9 US dollar PPP termasuk ke dalam kategori miskin ekstrem.

Grafik 3.19 Persentase Penduduk Miskin Ekstrem di D.I Yogyakarta dan Nasional Tahun 2021-2024



Sumber: Diestimasi Satgas P3KE DIY dan BPS tahun 2024.

Grafik diatas menggambarkan persentase penduduk miskin ekstrem di wilayah D.I Yogyakarta yang disandingkan dengan Nasional. Dalam grafik tersebut dapat dilihat tren penduduk miskin ekstrem dari Tahun 2021 – 2024. Persentase penduduk miskin ekstrem di D.I Yogyakarta mempunyai tren yang sama dengan Nasional, yaitu mengalami penurunan yang konsisten dalam kurun waktu 5 tahun. Pada Tahun 2021 penduduk miskin ekstrem di D.I Yogyakarta sebesar 2,63% di mana mengalami penurunan menjadi 2,41% di tahun 2022 dan terus menurun menjadi 0,85% di tahun 2024. Demikian juga dengan tren di tingkat Nasional mengalami penurunan, pada tahun 2021 tingkat penduduk miskin ekstrem secara Nasional sebesar 2,16% dan terus mengalami penurunan menjadi 0,83% di tahun 2024. Hal ini menjadi capaian positif bagi D.I Yogyakarta dalam proses penanggulangan kemiskinan ekstrem yang selaras dengan program pemerintah pusat.

Sementara itu, kondisi tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten/kota wilayah provinsi D.I Yogyakarta, terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.11. Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2021-2024

Kabupaten/Kota	2021 (%) [*]	2022 (%) [*]	2023 (%) ^{**}	2024 (%) [*]
Kulon Progo	3.44	3.31	2.14	1.55

Gunung Kidul	5.13	4.30	1.71	1.37
Bantul	2.65	2.59	1.30	0.82
Yogyakarta	0.53	0.67	0.50	0.51
Sleman	1.54	1.42	0.87	0.44

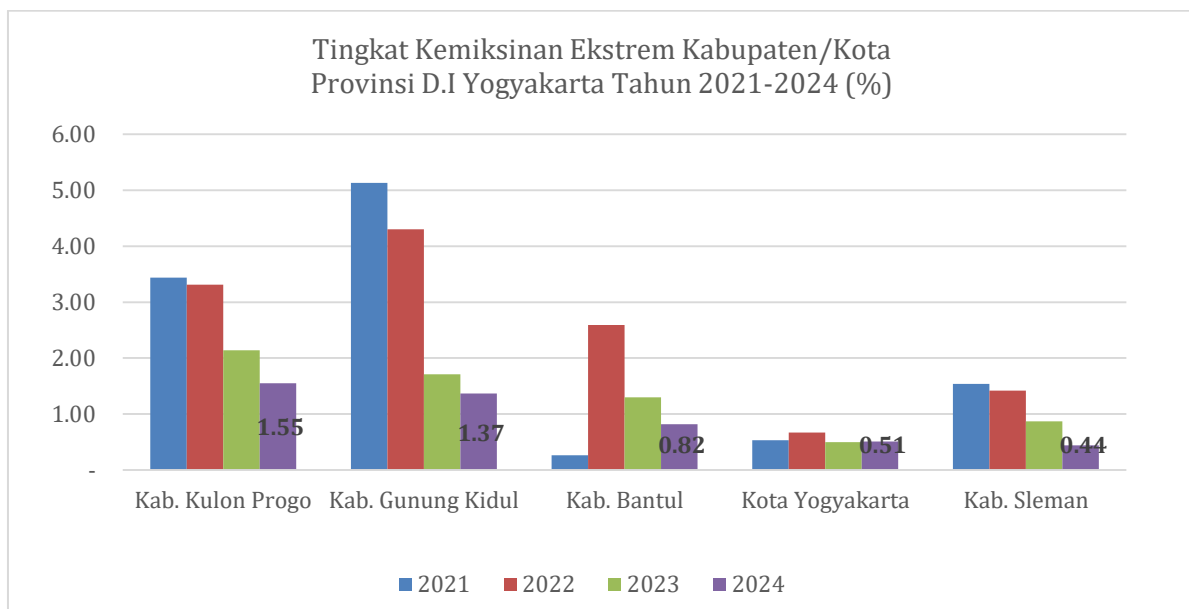
Sumber: * *Diestimasi Satgas P3KE*

**BPS*

Tabel di atas menggambarkan persentase tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten/Kota di wilayah provinsi D.I Yogyakarta periode Tahun 2021-2024. Dari data tersebut, jika dilihat tingkat kemiskinan ekstrem Tahun 2024, Kabupaten Kulon Progo mempunyai Tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di wilayah D.I Yogyakarta dengan 1,55%. Kabupaten Sleman merupakan Kabupaten/Kota paling rendah di wilayah D.I Yogyakarta dengan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0,44%.

Untuk melihat perbandingan tingkat kemiskinan ekstrem antar Kabupaten/Kota di wilayah provinsi D.I Yogyakarta, terdapat dalam gambar grafik di bawah ini.

Grafik 3.20. Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2021-2024



Sumber: *Diestimasi Satgas P3KE dan BPS*

Grafik di atas menggambarkan perbandingan tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten/Kota di wilayah provinsi D.I Yogyakarta periode tahun 2021-2024. Dengan melihat data Tahun 2024 (bagian grafik batang warna kuning). Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di D.I Yogyakarta, Tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Kulon Progo berada di posisi paling tinggi dengan angka 1,55%, selanjutnya disusul Kabupaten Gunung Kidul dengan angka

1,37%. Sementara Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman sudah berada di bawah 1%.

Dengan demikian, Kabupaten Kulon Progo masih mempunyai tantangan dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0%. Tantangan ini tentunya menjadi bagian dari agenda perencanaan bagi pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam merancang program penanggulangan kemiskinan daerah. Program penanggulangan kemiskinan daerah yang efektif dan efisien akan dapat memberikan dampak positif terhadap pengurangan tingkat kemiskinan daerah Kabupaten Kulon Progo, khususnya penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Tabel 3.12. Masalah Kemiskinan Konsumsi

No	Indikator Utama	Aspek yang dianalisis			
		Posisi relatif	Perkembangan antar waktu	Efektivitas	Relevansi
1	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Persentase penduduk miskin Kabupaten Kulon progo tertinggi se-D.I.Yogyakarta dan Nasional	Cenderung menurun	Cukup efektif Cenderung menurun	Relevan dengan Provinsi dan Nasional
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Kulon Progo Tertinggi kedua setelah Kabupaten Gunungkidul	Cenderung menurun	Cukup Efektif Cenderung menurun	Relevan dengan Provinsi dan Nasional
3	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Kulon Progo Tertinggi kedua setelah Kabupaten Gunungkidul	Cenderung naik	Cukup efektif Cenderung menurun	Relevan dengan Provinsi dan Nasional

3.3. Analisis Karakteristik Masalah Bidang Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan. Pendidikan juga berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas pendidikan akan

berdampak terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sehingga jika kualitas pendidikan rendah, maka akan berpengaruh terhadap daya saing dan kesempatan kerja.

Oleh karena itu, meningkatkan kualitas pendidikan juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan SDM, sehingga jika layanan dan kualitas pendidikan di daerah meningkat, maka akan memperluas kesempatan dan daya saing di dunia kerja.

Dalam konteks peningkatan kualitas layanan pendidikan, ada beberapa indikator yang menjadi acuan pemerintah daerah, antara lain seperti Angka Partisipasi Sekolah, Angka Putus Sekolah, dan Harapan Lama Sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah dibedakan menjadi dua yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK).

Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK merupakan indikator yang mengukur sejauh mana siswa terlibat dalam pendidikan di suatu daerah atau negara. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya.

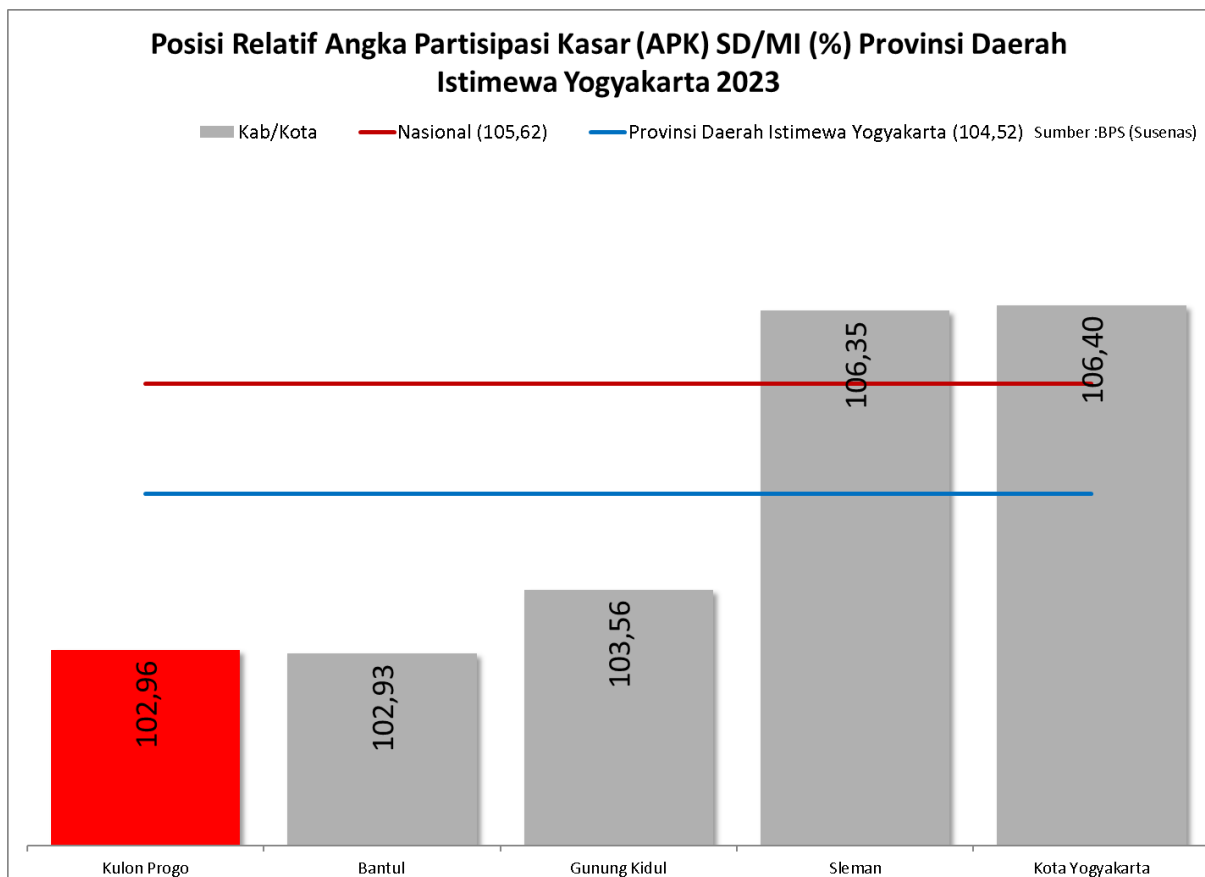
Terdapat hubungan yang signifikan antara APK dan tingkat kemiskinan; semakin tinggi APK, semakin rendah tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Ini karena APK yang tinggi mencerminkan banyaknya anak-anak yang mendapatkan akses ke pendidikan berkualitas. Dalam jangka panjang, hal ini dapat membantu mereka mengatasi kemiskinan dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya, APK yang rendah dapat memperburuk kemiskinan, karena anak-anak dari keluarga miskin sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pendidikan yang layak akibat biaya, jarak, atau kualitas pendidikan yang tidak memadai, sehingga mereka berisiko mengalami kemiskinan di masa depan.

3.3.1. APK SD/MI

Angka Partisipasi Kasar SD adalah perbandingan jumlah murid pada tingkat pendidikan SD dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

3.3.1.1. Posisi Relatif

**Grafik 3.21 Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2023**



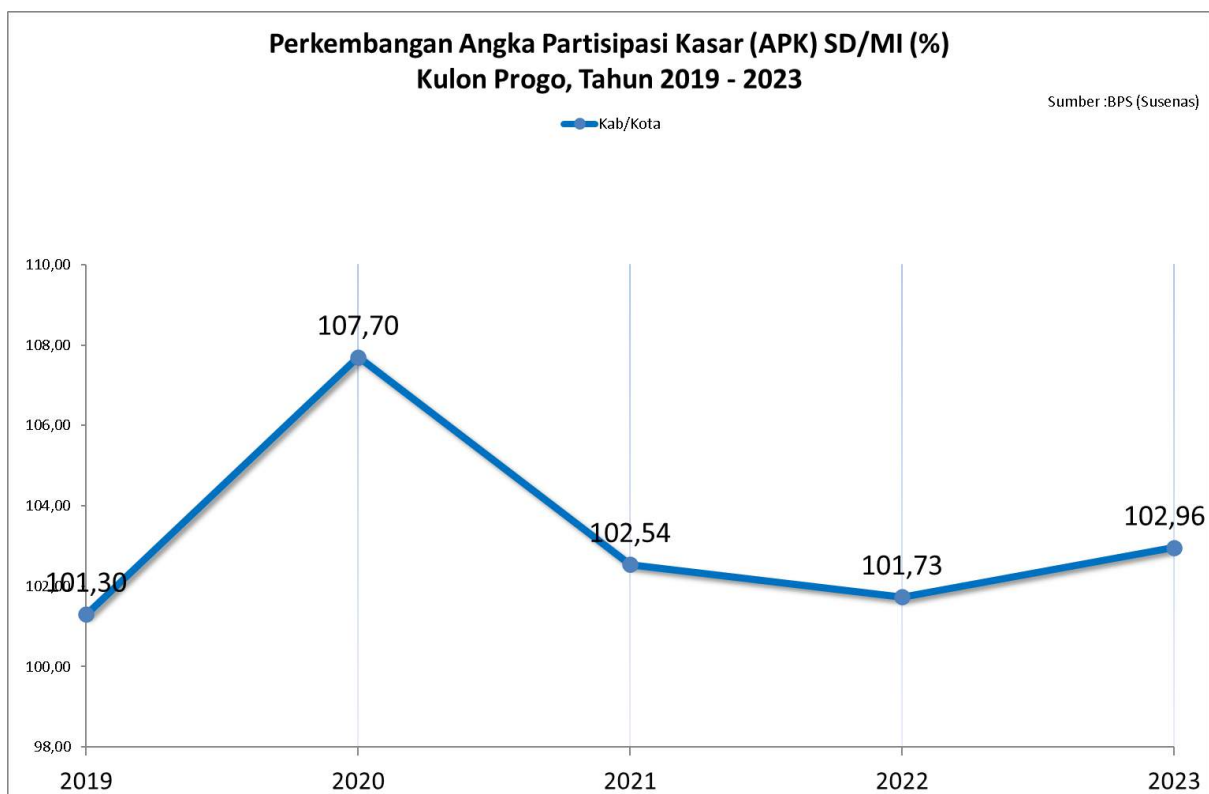
Sumber: Susenas, BPS.

Grafik di atas menyajikan perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD/MI di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2023. Garis merah menunjukkan rata-rata nasional, garis biru menunjukkan rata-rata provinsi DIY, sedangkan batang grafik mewakili masing-masing kabupaten/kota. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa posisi relatif APK di Kulon Progo adalah 102,96%, data tersebut menunjukkan bahwa APK SD/MI Kulon Progo berada **di bawah rata-rata provinsi dan nasional**. Dibanding Kabupaten lain, APK Kulon Progo juga **berada di urutan ke 4 dari 5**

Kabupaten/Kota di DIY. APK Kulon Progo juga terlihat mengalami kesenjangan yang sangat signifikan dengan kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang memiliki APK jauh di atas rata-rata Provinsi dan Nasional.

3.1.1.2. Perkembangan Antar Waktu

Grafik 3.22 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2019 - 2023

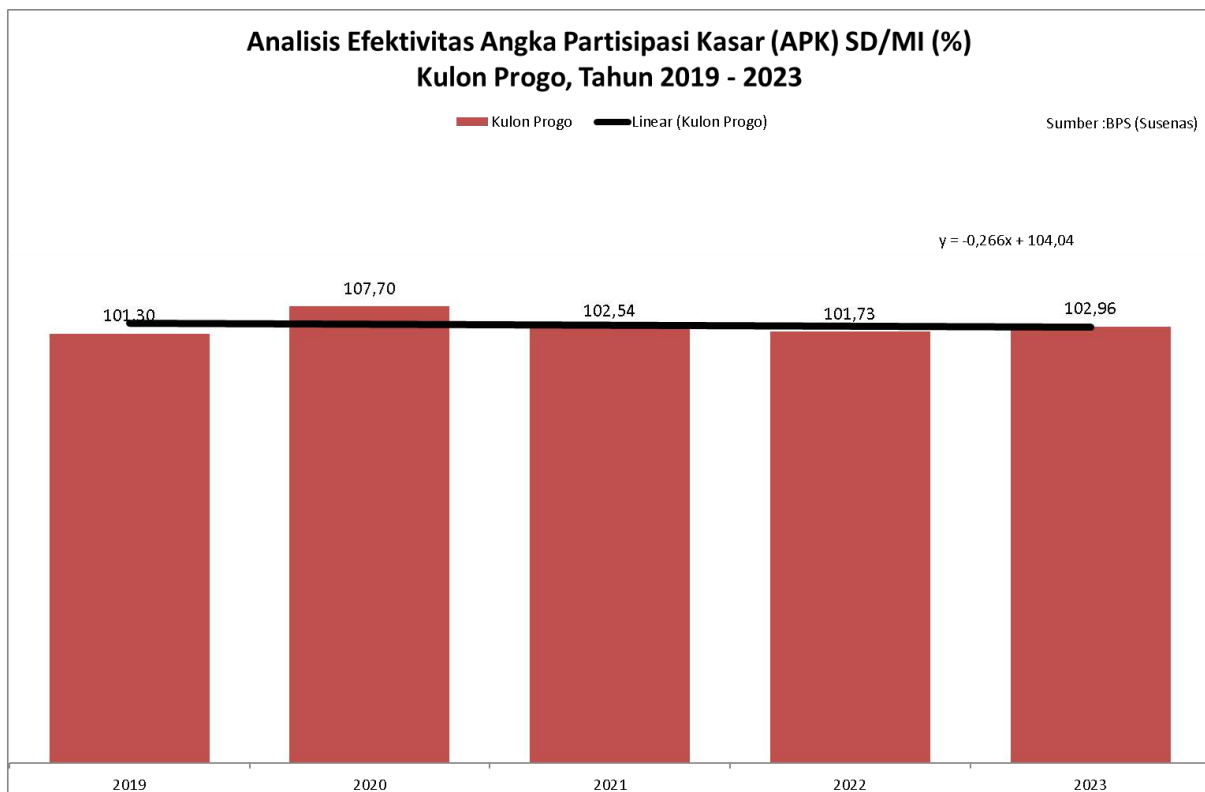


Sumber: Susenas, BPS.

Grafik di atas menunjukkan data perkembangan yang **fluktuatif** dalam APK SD/MI di Kulon Progo **selama lima tahun terakhir**. Setelah mencapai **puncak yang sangat tinggi di angka 107,70 pada tahun 2020**, partisipasi **menurun secara signifikan pada tahun-tahun berikutnya** sebelum mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2023. Tren ini mengindikasikan pentingnya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan atau mempertahankan partisipasi sekolah di Kulon Progo, dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi siswa di SD/MI.

3.1.1.3. Efektivitas

Grafik 3.23 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2019 - 2023



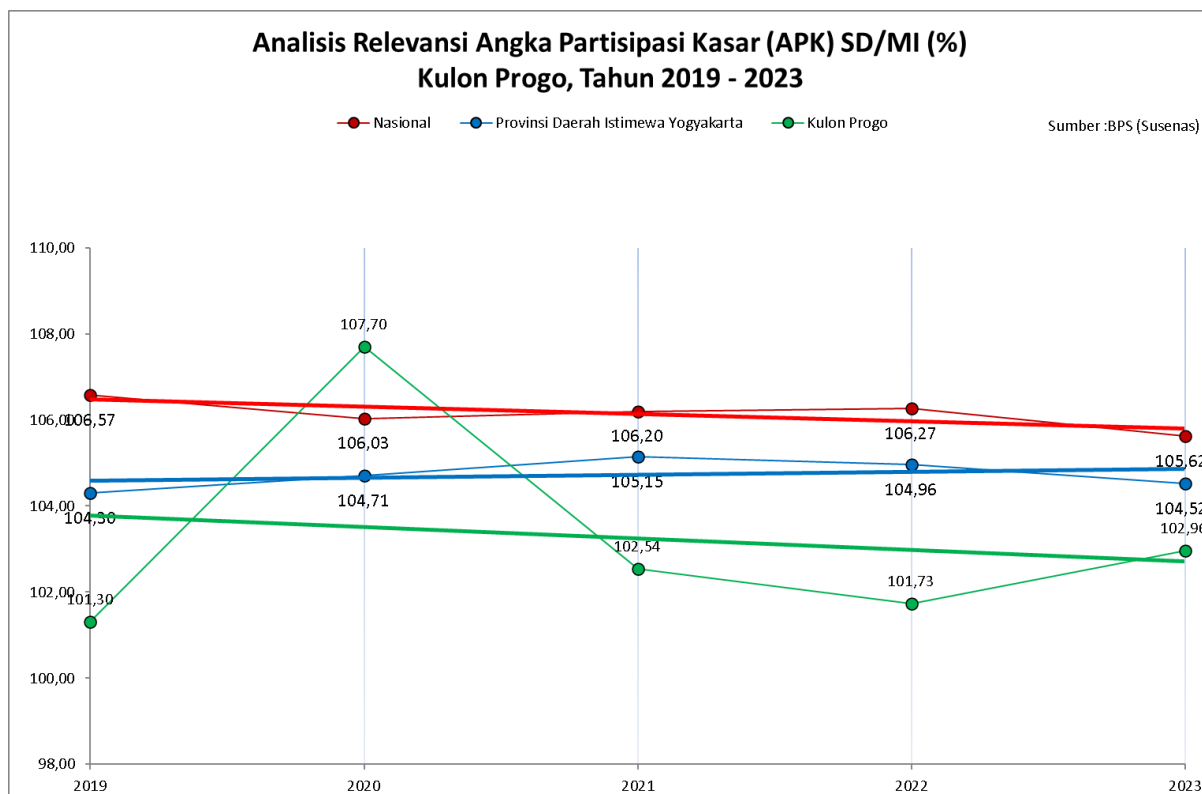
Sumber: Susenas, BPS.

Grafik di atas menunjukkan trend efektivitas APK Kulon Progo dari tahun 2019-2023. Selama periode lima tahun, APK mengalami fluktuasi dengan peningkatan besar pada tahun 2020 diikuti oleh penurunan signifikan dalam dua tahun berikutnya, dan sedikit peningkatan di tahun 2023. Peningkatan pada tahun 2020 disebabkan salah satunya oleh inisiatif pendidikan atau kebijakan yang efektif, tetapi penurunan berikutnya bisa terkait dengan berbagai tantangan, seperti dampak pandemi COVID-19 terhadap sistem pendidikan. Untuk menjaga atau meningkatkan kembali APK, diperlukan evaluasi kebijakan

pendidikan yang diterapkan pada tahun 2019 ke tahun 2020 dan identifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada penurunan setelah tahun tersebut.

3.1.1.4. Relevansi

Grafik 3.24 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kabupaten



Kulon Progo, Tahun 2019 - 2023

Sumber: Susenas, BPS.

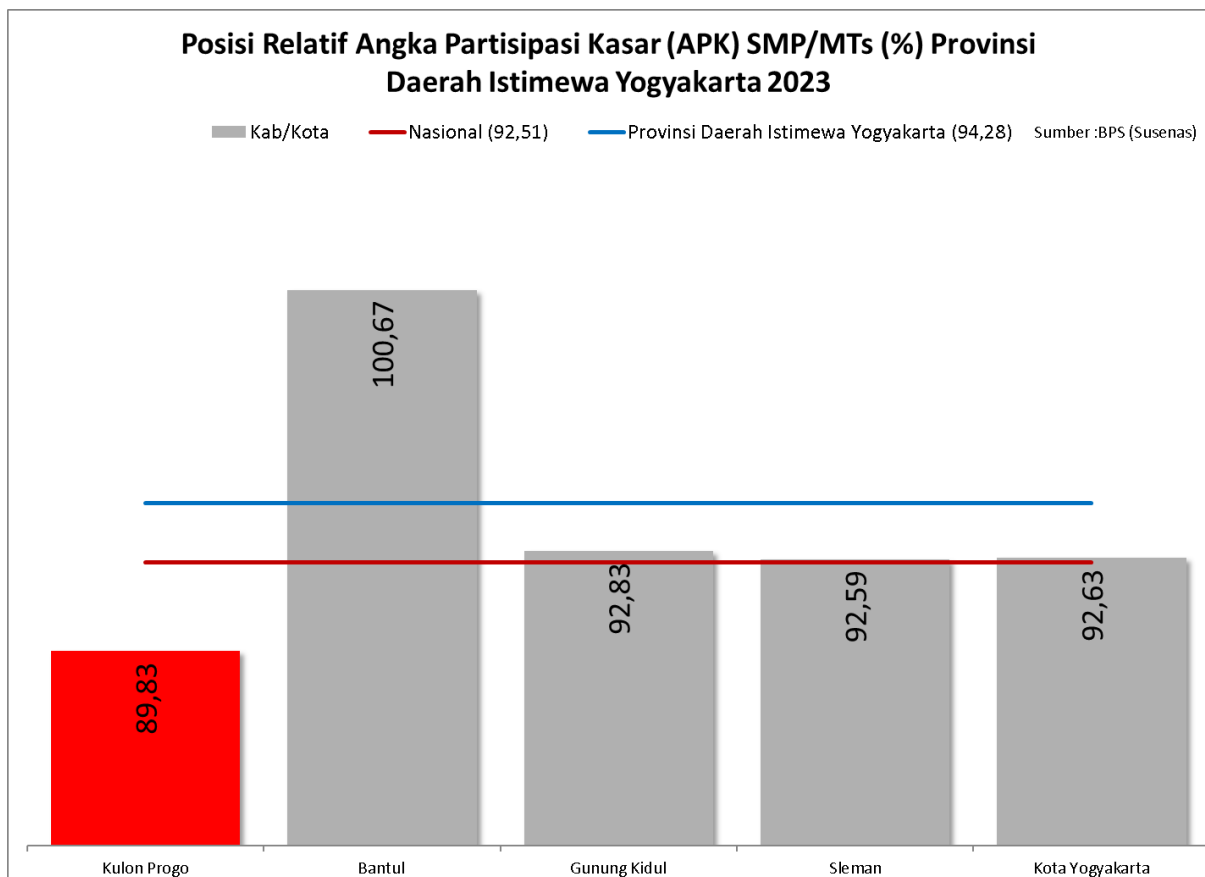
Grafik di atas merupakan trend APK Kulon Progo, Provinsi DIY dan Nasional dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2019-2023. Dari grafik tersebut dapat terlihat bahwa APK Kulon Progo pada tahun 2020 berada di atas rata-rata nasional dan DIY. Namun **sejak** tahun **2021** hingga **2023 APK Kulon Progo** mengalami **penurunan** hingga di bawah rata-rata nasional dan DIY. Namun, **penurunan tersebut** sejalan (**relevan**) **dengan** penurunan di tingkat Provinsi **DIY** dan **Nasional**.

3.3.2. APK SMP/MTS

Angka Partisipasi Kasar SD adalah perbandingan jumlah murid pada tingkat pendidikan SMP/Sederajat dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun.

3.3.2.1. Posisi Relatif

Grafik 3.25 Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2023



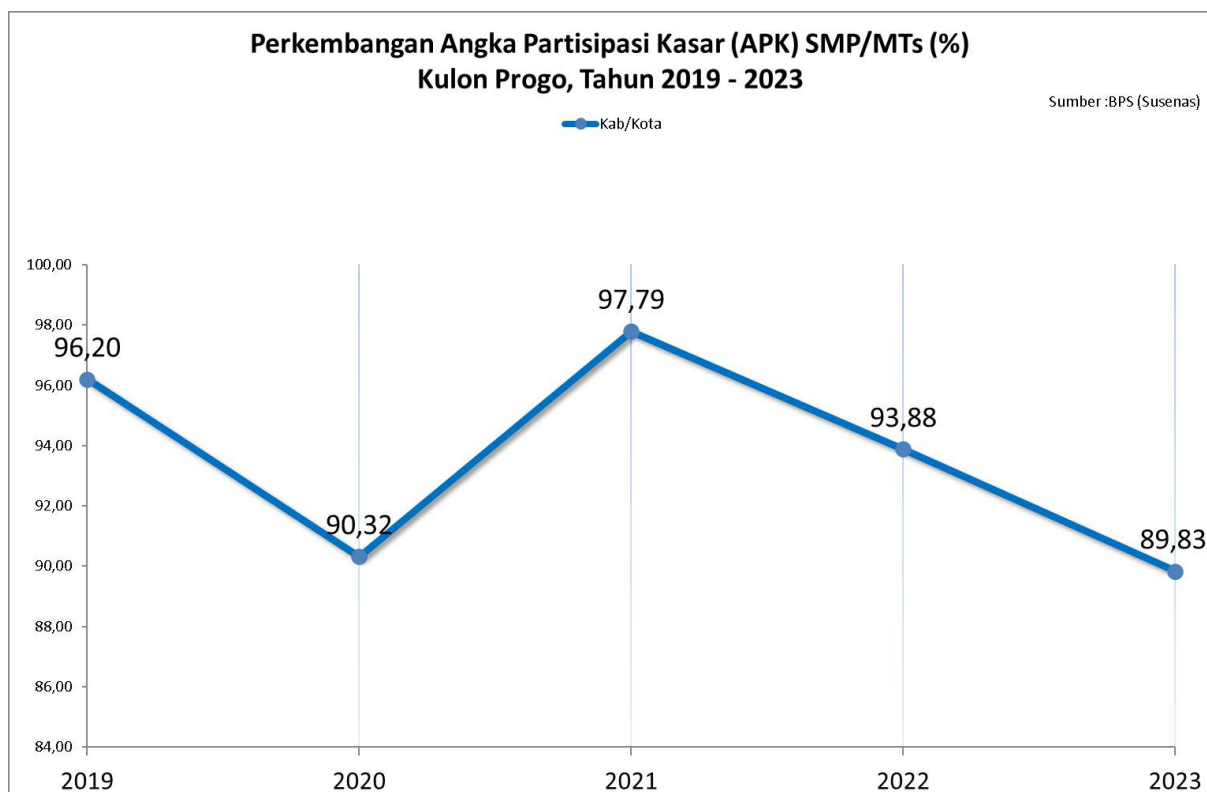
Sumber: Susenas, BPS.

Grafik di atas menyajikan perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SMP/MTs di berbagai kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun

2023. APK ini menunjukkan persentase anak usia sekolah menengah pertama yang benar-benar bersekolah. Secara keseluruhan, APK rata-rata untuk SMP/MTs di DIY (94,28%) lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional (92,51%). Ini menunjukkan bahwa akses pendidikan menengah pertama di DIY relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional. Sementara itu, Kabupaten **Kulon Progo** (89,83), memiliki APK **di bawah rata-rata provinsi dan nasional**, bahkan menjadi **terendah di antara kabupaten/kota lainnya di DIY**. Ini mengindikasikan bahwa masih ada tantangan dalam meningkatkan akses pendidikan menengah.

3.3.2.2. Perkembangan Antar Waktu

Grafik 3.26 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2019 - 2023



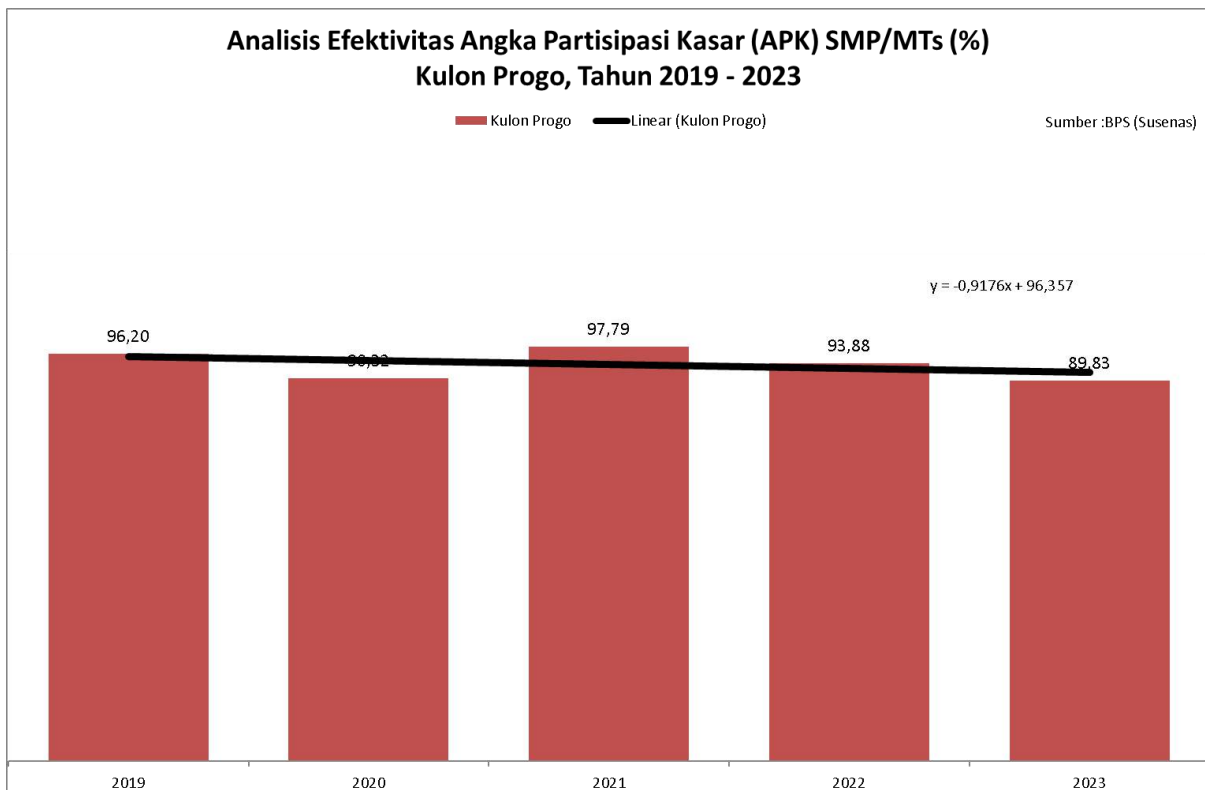
Sumber: Susenas, BPS.

Grafik di atas menggambarkan perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SMP/MTs di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2019 hingga 2023. Grafik menunjukkan **tren penurunan yang cukup signifikan** pada APK SMP/MTs di Kulon Progo selama periode pengamatan. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2019 (96,20%), kemudian mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 menjadi 90,32%, dan terus menurun hingga mencapai titik terendah pada tahun 2023 (89,83%). Meskipun trennya menurun, terdapat

fluktuasi pada tahun 2021 di mana APK sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, peningkatan ini tidak berkelanjutan dan diikuti oleh penurunan yang lebih tajam pada tahun-tahun berikutnya.

3.3.2.3. Efektivitas

Grafik 3.27 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kabupaten



Kulon Progo, Tahun 2019 - 2023

Sumber: Susenas, BPS.

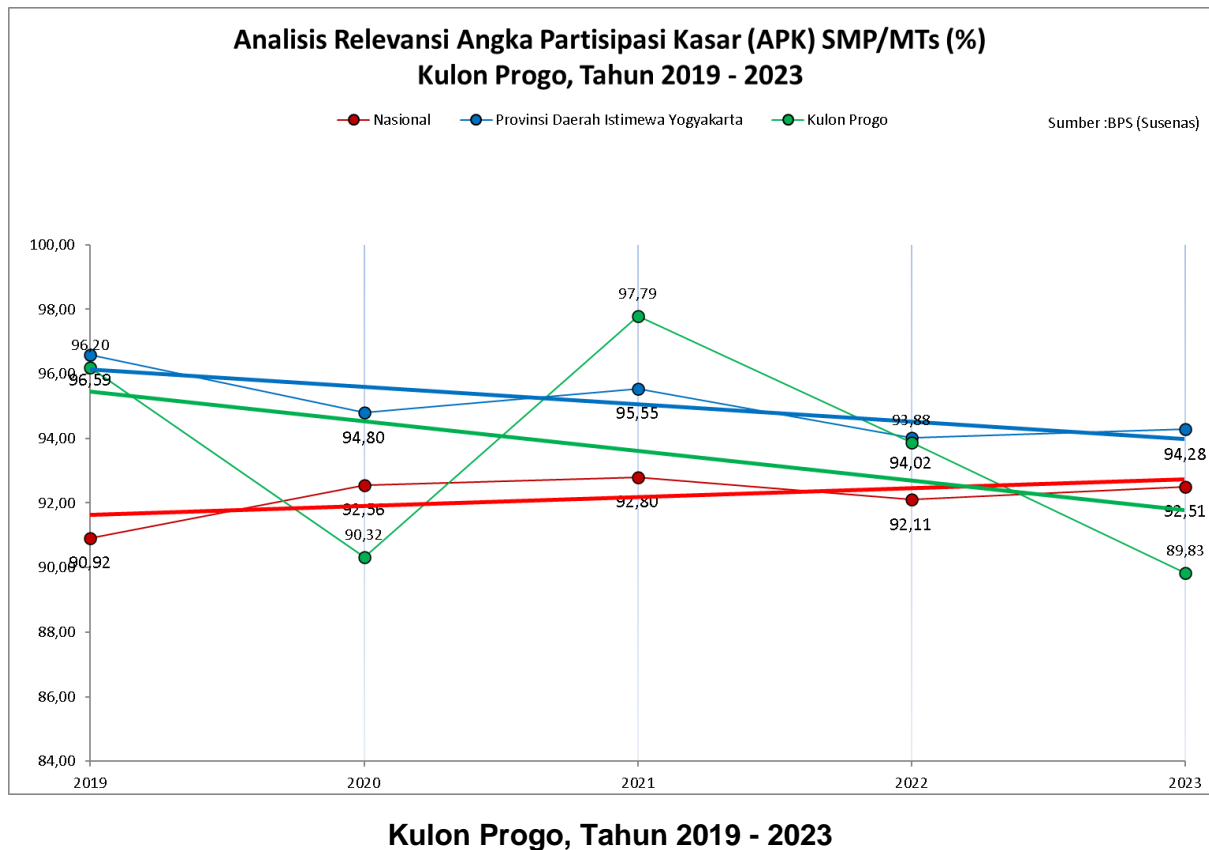
Grafik di atas menggambarkan efektivitas intervensi Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SMP/MTs di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2019 hingga 2023. Garis hitam mewakili tren linear dari data tersebut. Secara umum, grafik menunjukkan **tren penurunan APK SMP/MTs di Kulon Progo** selama periode 5 tahun. Meskipun terdapat sedikit fluktuasi, garis tren linear yang ditambahkan menunjukkan kecenderungan **penurunan yang cukup jelas**. Meskipun trennya menurun, terdapat sedikit kenaikan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Namun, secara keseluruhan, tren penurunan lebih dominan. Artinya, masih perlu ada evaluasi intervensi setidaknya dalam dua tahun terakhir, di mana angka APK mulai

menurun. Paling tidak, Pemkab Kulon Progo dapat mengoptimalkan strategi intervensi di tahun 2020 ke tahun 2021.

Faktor penyebab: Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap turunnya APK SMP/MTS di Kulon Progo. Faktor tersebut bisa dipengaruhi oleh aksesibilitas lokasi, fasilitas sekolah, atau ekonomi. Terkait aksesibilitas lokasi misalnya, tidak semua daerah di Kulon Progo merupakan wilayah dataran, ada beberapa wilayah seperti Kapanewon di sekitar menoreh merupakan daerah pegunungan dan terpencil. Kemudian kesenjangan fasilitas antara sekolah favorit dan sekolah di wilayah-wilayah terpencil, termasuk kemampuan ekonomi orang tua siswa yang belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan operasional ke sekolah. Faktor-faktor tersebut dapat terjadi berkelindan antara satu dengan yang lainnya yang membutuhkan intervensi khusus dari pemerintah daerah.

3.3.2.4. Relevansi

Grafik 3.28 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kabupaten



Sumber: Susenas, BPS.

Grafik di atas menyajikan perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SMP/MTs di tiga wilayah: Nasional, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Kabupaten Kulon Progo selama periode 2019 hingga 2023. Pada periode tersebut, APK SMP/MTs di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan **tren yang lebih fluktuatif dibandingkan nasional dan DIY**. Terdapat penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020, diikuti oleh peningkatan pada tahun 2021, namun kemudian kembali menurun hingga tahun 2023. Jika dilihat lebih dalam, APK Kulon Progo umumnya berada **di bawah rata-rata nasional dan DIY**, meskipun terdapat fluktuasi dari tahun ke tahun. Ini mengindikasikan bahwa akses pendidikan menengah pertama di Kulon Progo masih perlu ditingkatkan melalui strategi yang sama dengan tahun 2021, di mana APK Kulon Progo berada di atas rata-rata nasional dan DIY.

Angka Partisipasi Murni (APM)

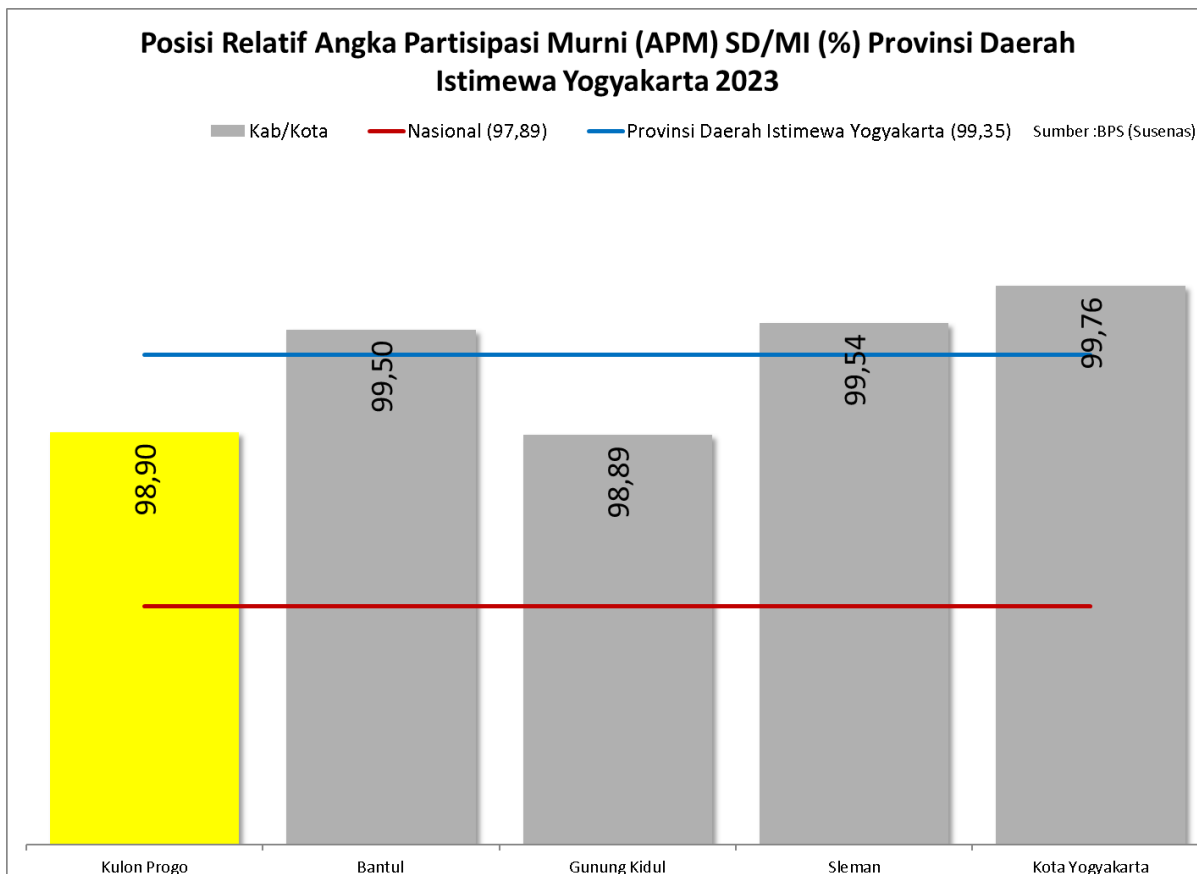
Angka partisipasi murni adalah ukuran persentase penduduk yang secara aktif mengikuti pendidikan pada suatu tahap tertentu, seperti sekolah dasar atau menengah. Angka ini memberikan gambaran tentang tingkat keterlibatan masyarakat dalam sistem pendidikan. Semakin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu.

3.3.3. APM SD/MI

Angka Partisipasi Murni SD/MI merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keterlibatan anak usia sekolah dasar dalam sistem pendidikan formal. Angka ini didapatkan dari perbandingan antara jumlah siswa yang terdaftar di SD/MI dengan jumlah seluruh anak usia 7-12 tahun.

3.3.3.1. Posisi Relatif

Grafik 3.29 Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2023

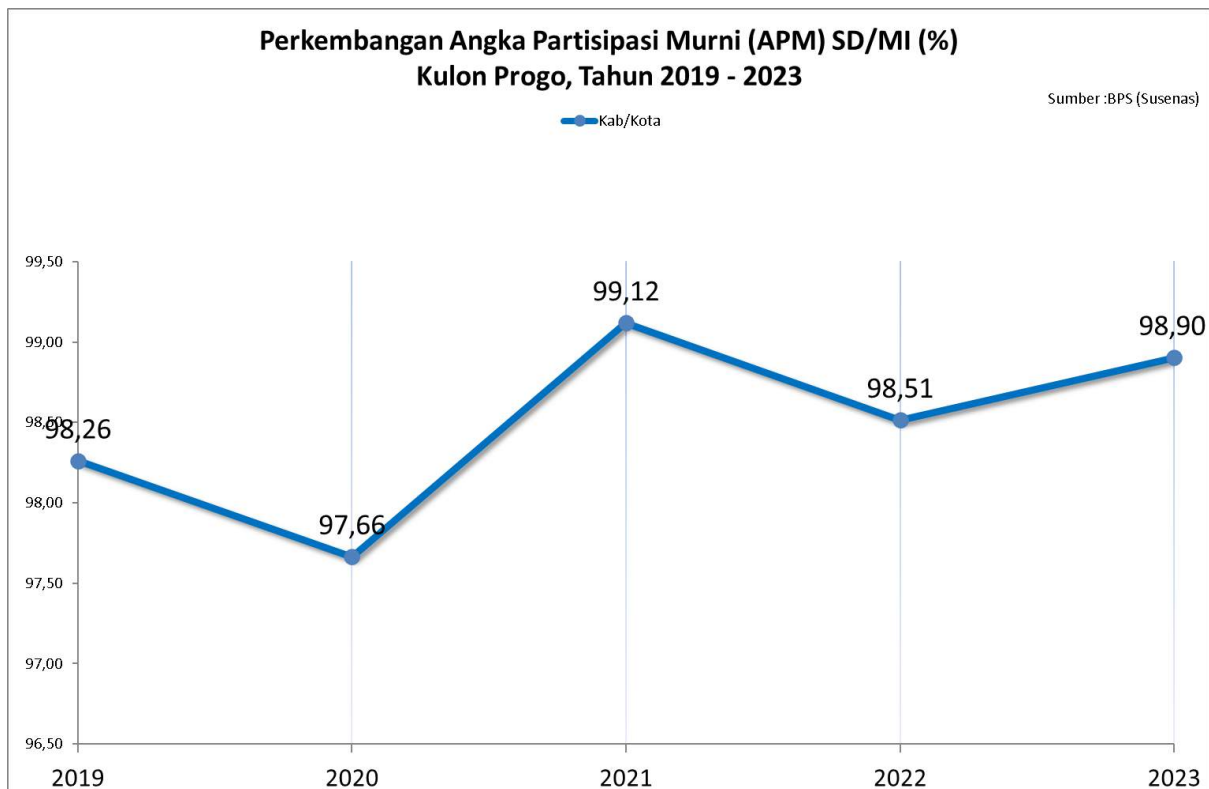


Sumber: Susenas, BPS

Grafik di atas menyajikan perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD/MI di berbagai kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2023. Secara keseluruhan, APM rata-rata untuk SD/MI di DIY (99,35%) lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional (97,89%). Ini menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar di DIY relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional. Sementara itu, Kabupaten **Kulon Progo** memiliki APM SD/MI **di atas rata-rata Provinsi** dan **di bawah rata-rata nasional**. APM SD/MI Kulon Progo juga **menempati urutan ke 4 dari 5 kabupaten/kota dengan APM rendah di DIY**, yaitu 98,90%. Meskipun angka ini **masih tergolong tinggi**, namun perlu Kulon Progo perlu untuk tetap mengejar ketertinggalan dari 3 kabupaten/kota lainnya di DIY.

3.3.3.2. Perkembangan Antar Waktu

Grafik 3.30 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2019 - 2023

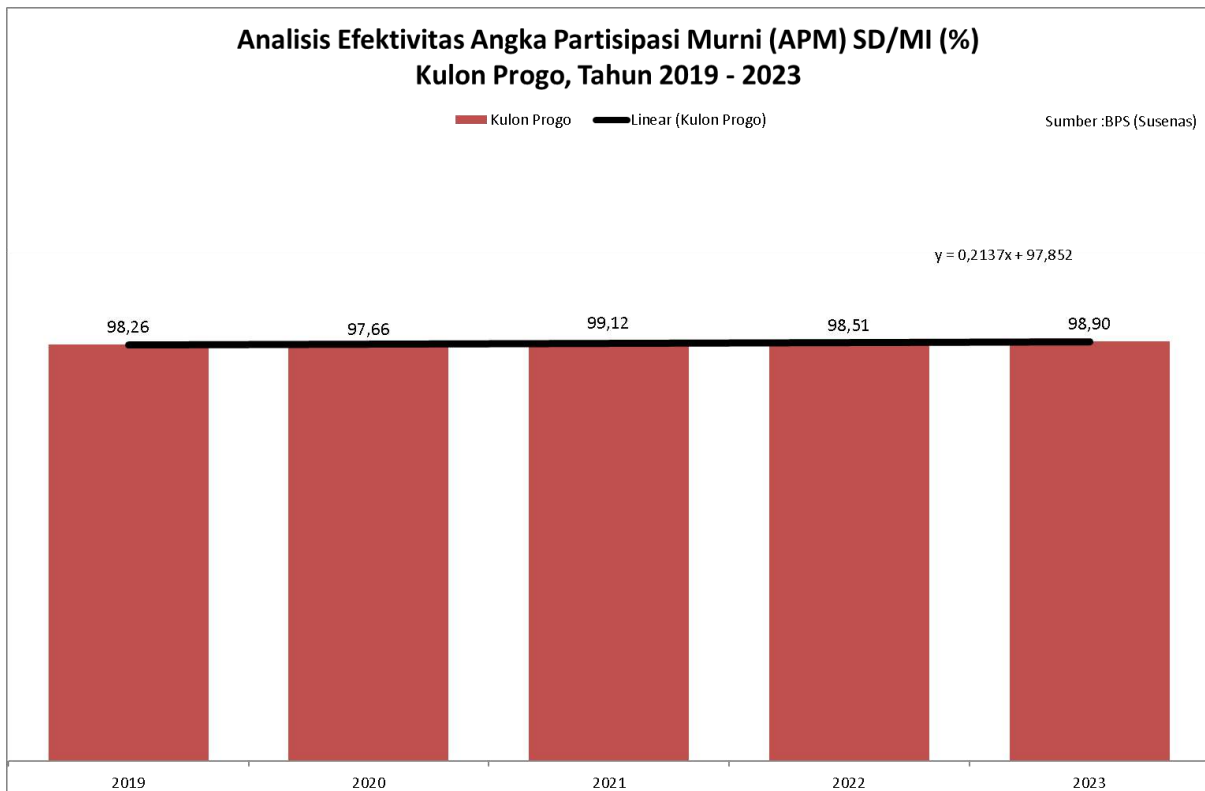


Sumber: Susenas, BPS.

Grafik di atas menggambarkan perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD/MI di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2019 hingga 2023. Grafik menunjukkan **tren yang cukup fluktuatif** pada APM SD/MI di Kulon Progo dalam periode 5 tahun. APM mencapai puncak tertinggi pada tahun 2021 dengan nilai 99,12%. Ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, **hampir semua anak usia sekolah dasar di Kulon Progo terdaftar sebagai siswa di sekolah dasar**. Setelah mencapai puncak pada tahun 2021, APM mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022, namun kemudian kembali naik pada tahun 2023.

3.3.3.3. Efektivitas

**Grafik 3.31 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kabupaten
Kulon Progo, Tahun 2019 - 2023**

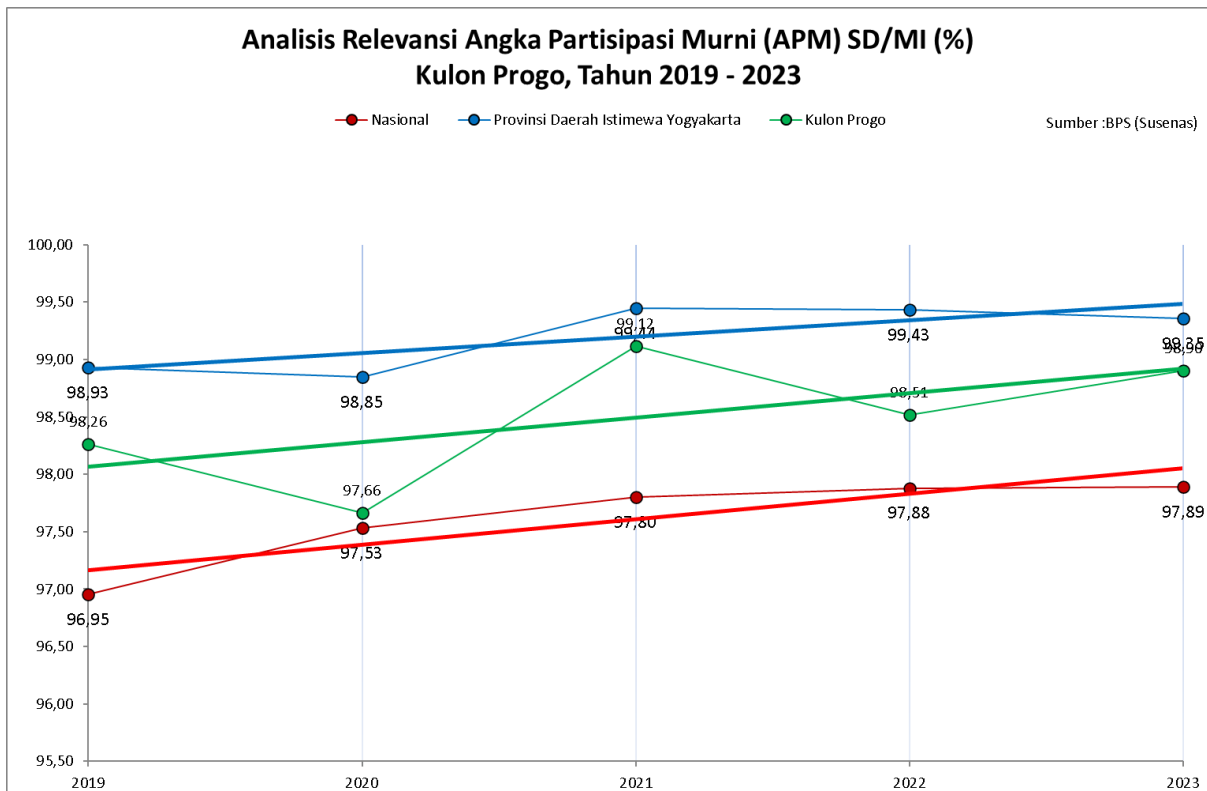


Sumber: Susenas, BPS.

Grafik di atas menggambarkan efektivitas intervensi Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD/MI di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2019 hingga 2023. Secara umum, grafik menunjukkan tren yang relatif stabil. Meskipun terdapat sedikit fluktuasi, garis tren linear yang ditambahkan menunjukkan kecenderungan yang hampir horizontal, mengindikasikan bahwa APM SD/MI di Kulon Progo **cenderung konsisten dalam 5 tahun terakhir**. Secara keseluruhan, nilai APM SD/MI di Kulon Progo berada **pada tingkat yang cukup tinggi**, mengindikasikan bahwa sebagian besar anak usia sekolah dasar di Kulon Progo telah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di sekolah dasar.

3.3.3.4. Relevansi

**Grafik 3.32 Relevansi Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)
Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2019 - 2023**



Sumber: Susenas, BPS.

Grafik di atas menyajikan perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD/MI di tiga wilayah: Nasional, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Kabupaten Kulon Progo selama periode 2019 hingga 2023. Di tingkat nasional dan provinsi, APM cenderung meningkat secara perlahan namun stabil selama periode pengamatan. Ini mengindikasikan adanya peningkatan akses dan kualitas pendidikan dasar di tingkat nasional dan provinsi. Sementara itu, di Kabupaten **Kulon Progo**, APM juga menunjukkan **tren peningkatan**. Terdapat peningkatan yang signifikan pada tahun 2021, namun kemudian sedikit menurun pada tahun 2022 sebelum kembali naik pada tahun 2023. Capaian APM SD/MI Kulon Progo umumnya **berada di bawah rata-rata nasional dan DIY**, meskipun terdapat perbaikan dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, berdasarkan data tersebut, trend peningkatan menunjukkan **indikasi yang relevan**.

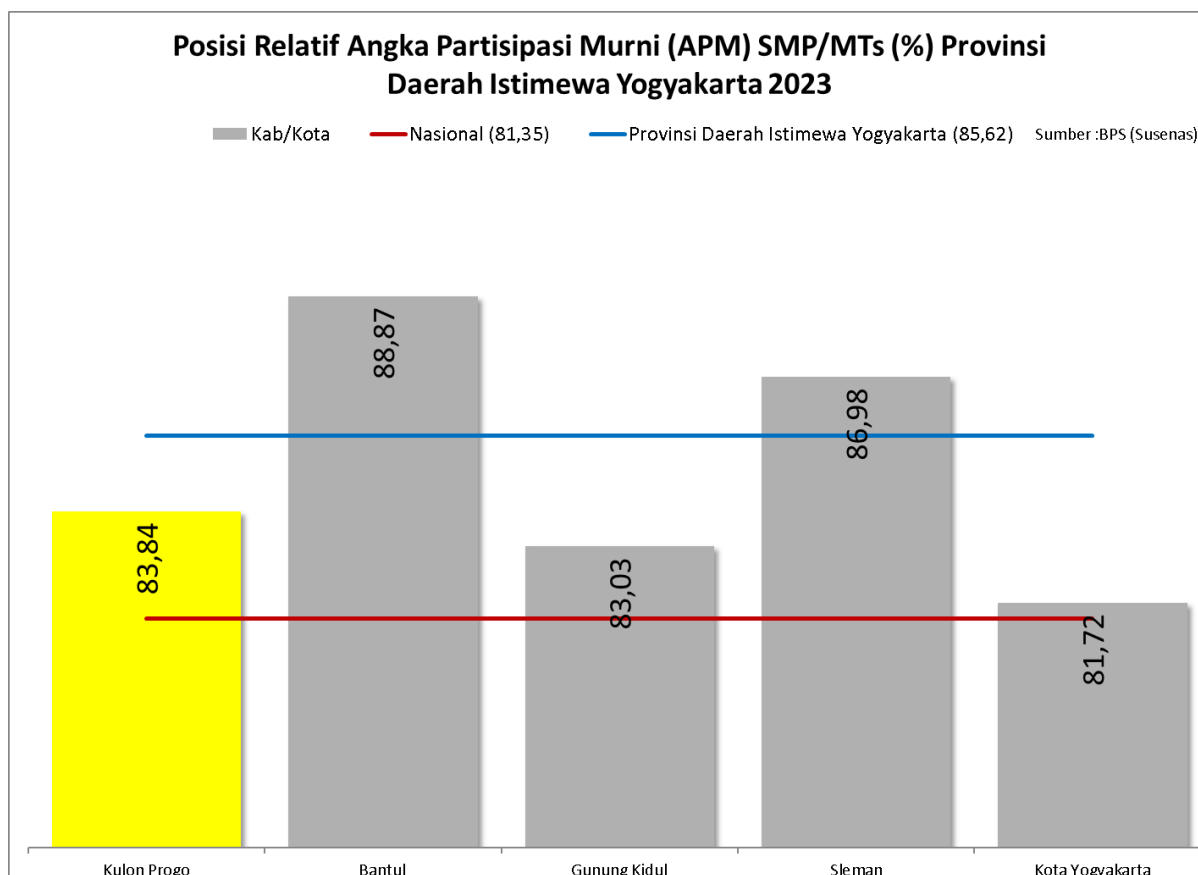
3.3.4. APM SMP/MTS

Angka Partisipasi Murni SMP/MTS merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keterlibatan anak usia sekolah menengah pertama dalam sistem pendidikan formal.

Angka ini didapatkan dari perbandingan antara jumlah siswa yang terdaftar di SMP/MTS dengan jumlah seluruh anak usia 13-15 tahun.

3.3.4.1. Posisi Relatif

Grafik 3.33 Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2023

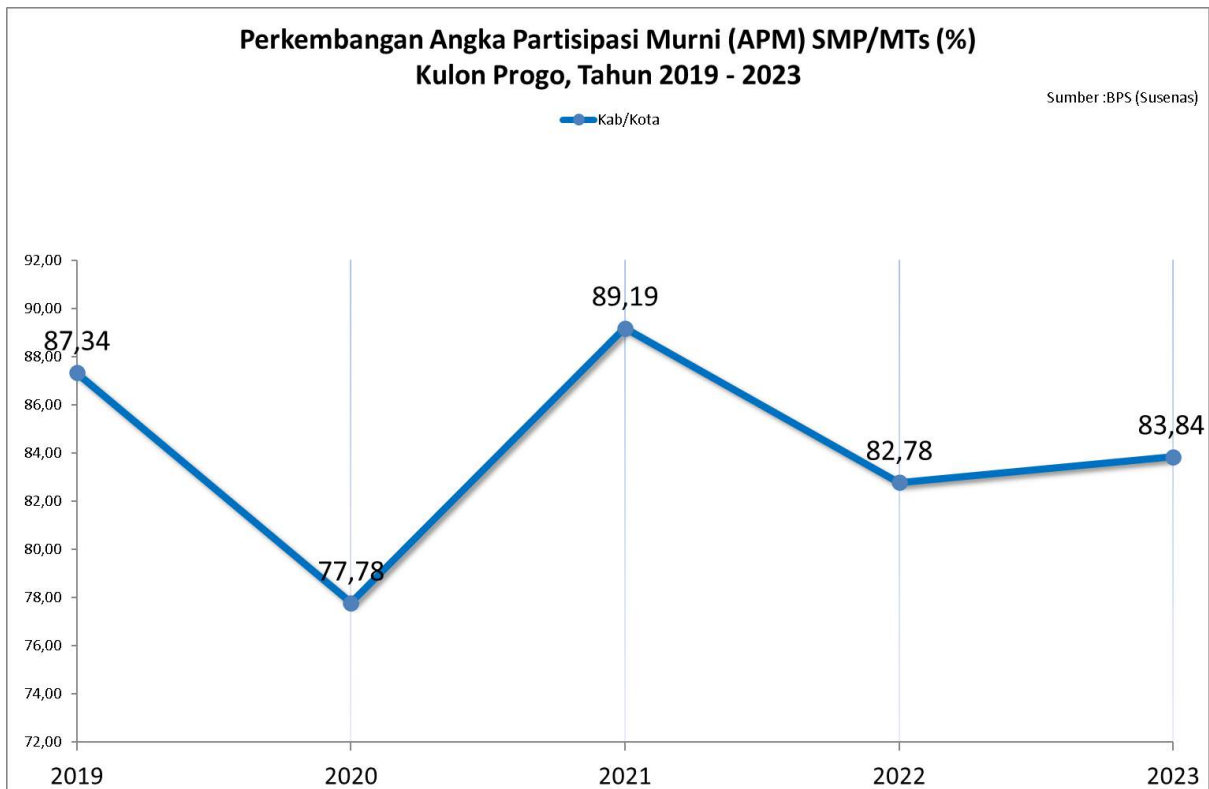


Sumber: Susenas, BPS.

Grafik di atas menyajikan perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SMP/MTs di berbagai kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2023. Secara keseluruhan, APM rata-rata untuk SMP/MTs di DIY (85,62%) lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional (81,35%). Ini menunjukkan bahwa akses pendidikan menengah pertama di DIY relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional. Sementara **Kulon Progo** menempati **posisi ke tiga tingkat APM terendah di DIY**, lebih baik dari Gunungkidul dan Kota Yogyakarta. Namun, Kulon Progo perlu meningkatkan 1,78% tingkat APM untuk minimal sama dengan rata-rata APM Provinsi DIY.

3.3.4.2. Perkembangan Antar Waktu

Grafik 3.34 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kabupaten



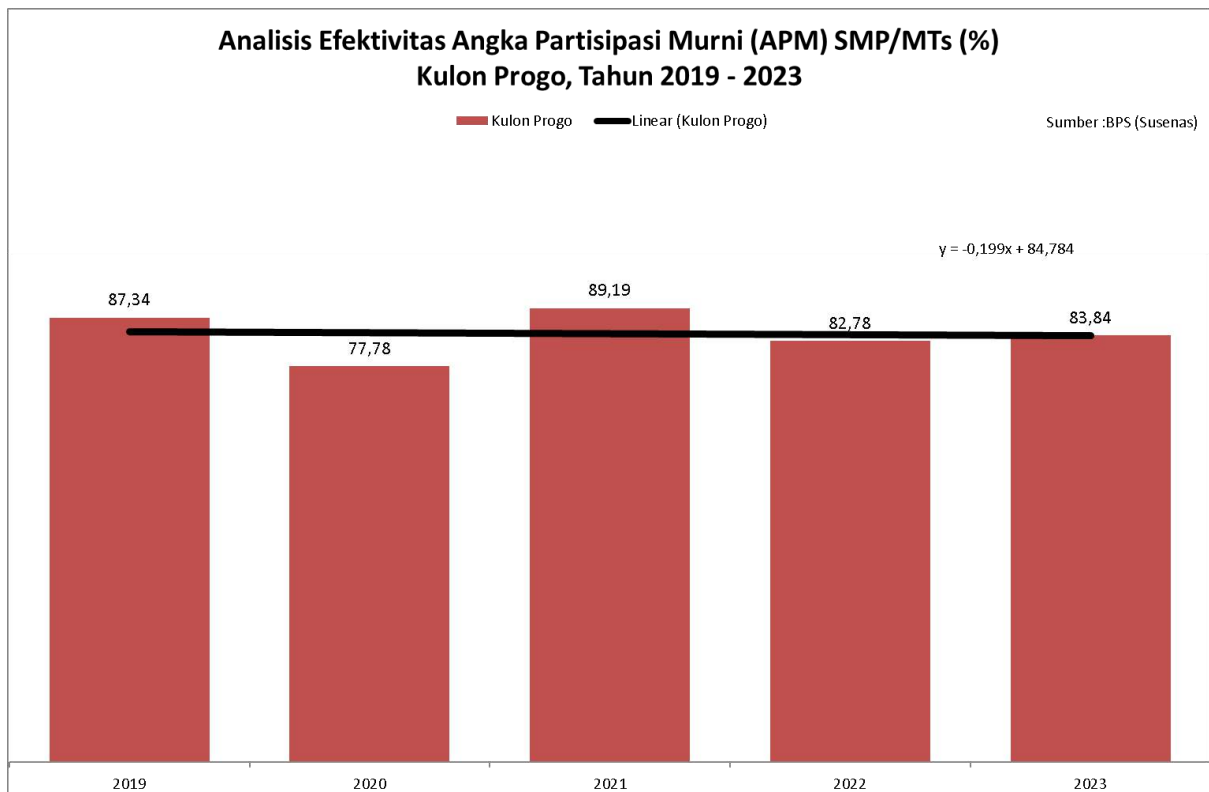
Kulon Progo, Tahun 2019 - 2023

Sumber: Susenas, BPS.

Grafik di atas menyajikan perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SMP/MTs di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2019 hingga 2023. Grafik menunjukkan **fluktuasi yang cukup signifikan** pada APM SMP/MTs di Kulon Progo selama 5 tahun terakhir. APM **mencapai puncak tertinggi pada tahun 2021** dengan nilai 89,19%. Ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, persentase anak usia SMP/MTs yang bersekolah di Kulon Progo mencapai tingkat yang cukup tinggi. Setelah mencapai puncak pada tahun 2021, APM mengalami **penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2022**, namun kemudian mengalami **sedikit peningkatan pada tahun 2023**.

3.3.4.3. Efektivitas Intervensi

Grafik 3.35 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2019-2023

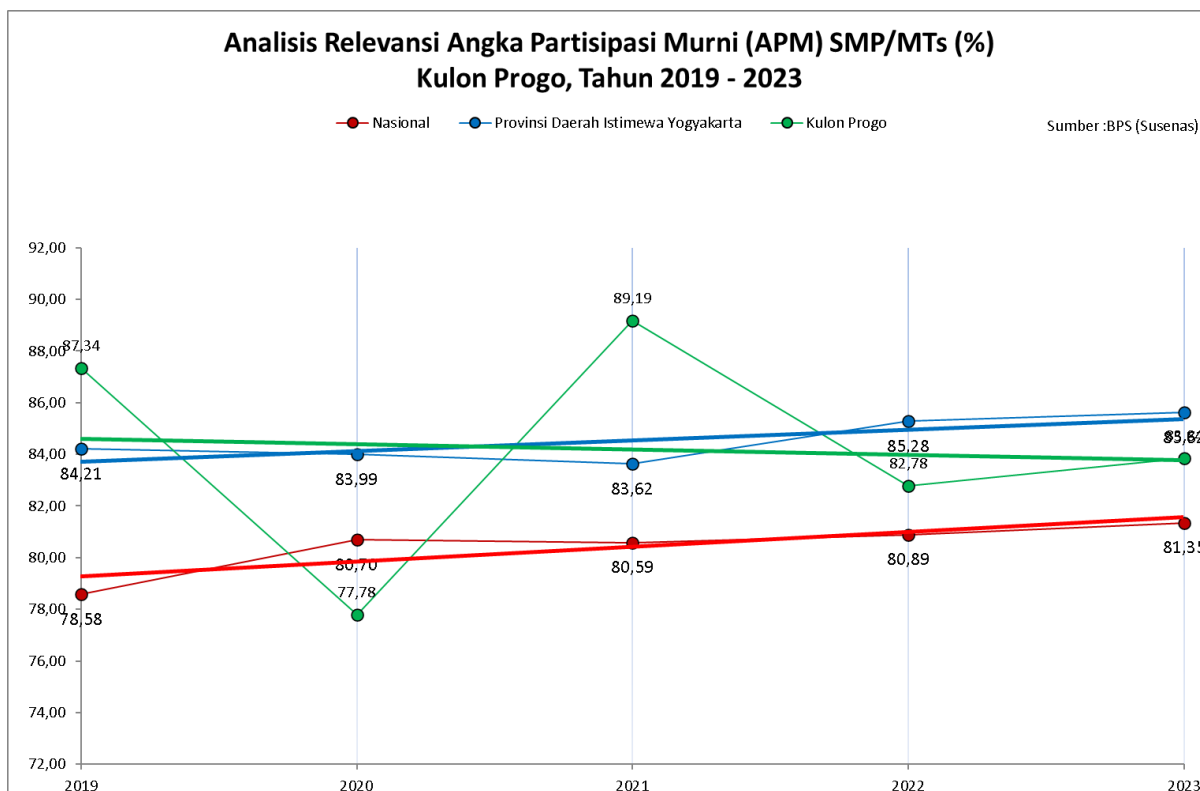


Sumber: Susenas, BPS.

Grafik di atas menyajikan efektivitas intervensi Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SMP/MTs di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2019 hingga 2023. Garis tren linear yang ditambahkan menunjukkan kecenderungan penurunan yang sangat kecil. Ini mengindikasikan bahwa secara umum, ada **sedikit penurunan dalam APM SMP/MTs di Kulon Progo selama periode 5 tahun terakhir**, meskipun fluktuasi tahunannya cukup besar. Strategi yang perlu dilakukan ialah mengintervensi secara konsisten program dengan pola yang sama saat terjadinya peningkatan APM, seperti tahun 2020 ke tahun 2021.

3.3.4.4. Relevansi

Grafik 3.36 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2019 - 2023



Sumber: Susenas, BPS.

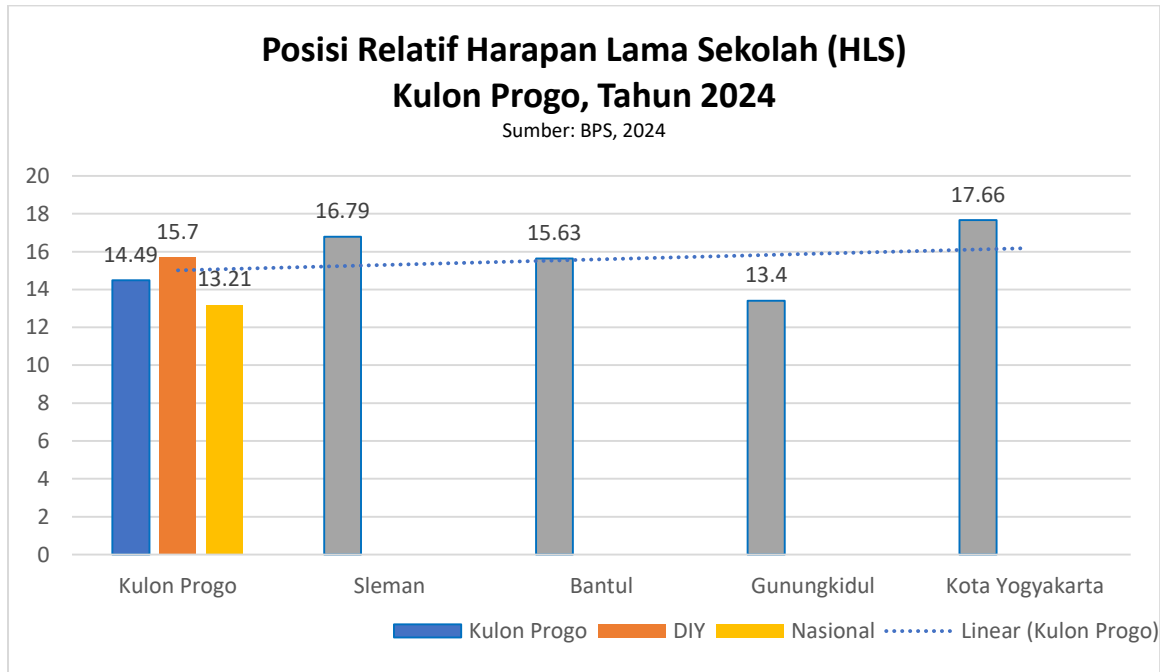
Grafik di atas menyajikan perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SMP/MTs di tiga wilayah: Nasional, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Kabupaten Kulon Progo selama periode 2019 hingga 2023. Di tingkat nasional dan provinsi, APM cenderung meningkat secara perlahan namun stabil selama periode pengamatan. Ini mengindikasikan adanya peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah pertama di tingkat nasional dan provinsi. Sementara **di Kabupaten Kulon Progo**, menunjukkan **fluktuasi yang cukup signifikan**. Terdapat **peningkatan yang signifikan pada tahun 2021**, namun kemudian mengalami **penurunan pada tahun 2022** dan **sedikit peningkatan kembali pada tahun 2023**. Pada umumnya berada **di bawah rata-rata nasional dan DIY**, terutama pada tahun 2020 dan 2022. Namun, pada tahun 2021, APM Kulon Progo sempat melampaui rata-rata nasional. Pada tahun 2022-2023, meski mengalami penurunan, data tersebut **relevan dengan trend Provinsi dan Nasional**.

3.3.5. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah (HLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak-anak pada usia tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

3.3.5.1. Posisi Relatif

Grafik 3.37 Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Provinsi DIY (%) Tahun 2024

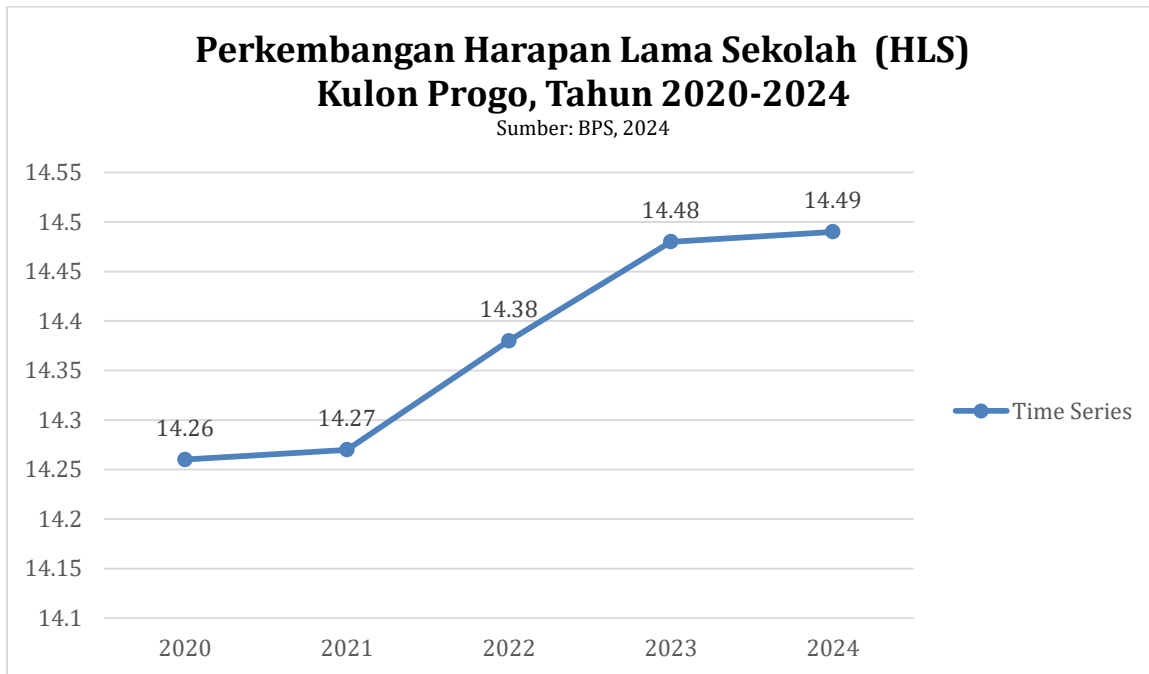


Sumber: Susenas, BPS, 2024.

Grafik di atas membandingkan harapan lama sekolah di Kulon Progo dengan daerah lain di DIY, yaitu Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta, serta dengan rata-rata nasional pada tahun 2024. Berdasarkan data di atas, harapan lama sekolah di Kulon Progo (14,49 tahun) berada **di atas rata-rata nasional** (13,21 tahun) dan **sedikit di bawah rata-rata DIY** (15,70 tahun). Posisi ini menunjukkan bahwa Kulon Progo secara umum memiliki HLS lebih lama dibandingkan dengan rata-rata nasional, dan masih ada ruang untuk peningkatan jika dibandingkan dengan daerah lain di DIY.

3.3.5.2. Perkembangan Antar Waktu

Grafik 3.38 Perkembangan Antar Waktu Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024



Sumber: Susenas, BPS, 2024.

Berdasarkan data pada grafik di atas dapat tergambar bahwa perkembangan antar waktu harapan lama sekolah di Kulon Progo selama tiga tahun pertama (2020-2021) **cenderung stabil di angka sekitar 14 tahun**. Pada tahun 2022, terjadi **peningkatan yang cukup signifikan**, di mana harapan lama sekolah mencapai 14,38 tahun. Ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian pada tahun 2023, angka harapan lama sekolah kembali meningkat di 14,48 tahun dan kembali meningkat menjadi 14,49 tahun pada tahun 2024. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesadaran yang terjadi pada tahun 2022 **berhasil dipertahankan**. Tingginya angka harapan lama sekolah menunjukkan potensi besar dalam pengembangan sumber daya manusia di Kulon Progo. Dengan harapan yang tinggi ini, diharapkan kualitas pendidikan di Kulon Progo juga terus meningkat.

3.3.5.3. Efektivitas

**Grafik 3.39 Analisis Efektivitas Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten
Kulon Progo, Tahun 2020-2024**



Sumber: Susenas, BPS, 2024.

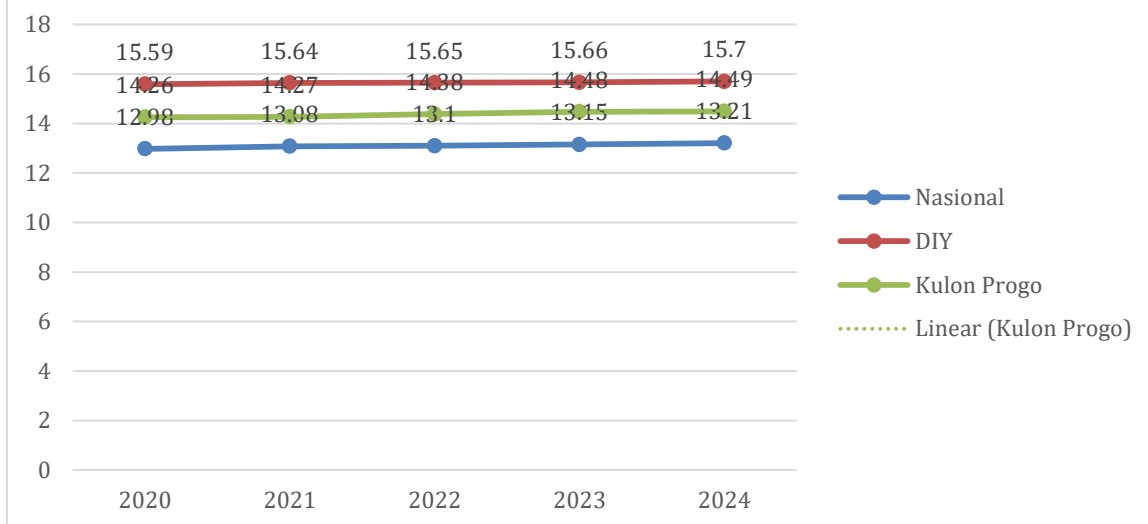
Secara umum, selama periode tahun 2020-2024, HLS di Kulon Progo menunjukkan **tren peningkatan** yang baik dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan harapan masyarakat terhadap pendidikan anak-anak mereka. Meskipun ada tren peningkatan, terlihat juga fluktuasi kecil dari tahun ke tahun. Fluktuasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan pendidikan, kondisi ekonomi, atau faktor lain seperti pandemi Covid-19 pada periode 2020-2021. Garis tren linear menunjukkan peningkatan yang lebih stabil dibandingkan dengan data aktual. Ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, peningkatan HLS di Kulon Progo mengikuti pola yang cukup linear. Artinya, upaya peningkatan HLS di Kulon Progo telah **membuahkan hasil yang cukup positif**. Ke depan, Pemerintah daerah Kulon Progo dapat merumuskan kebijakan untuk meningkatkan harapan lama sekolah, seperti memberikan beasiswa, meningkatkan kualitas pendidikan, atau melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan.

3.3.5.4. Relevansi

**Grafik 3.40 Analisis Relevansi Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten
Kulon Progo, Tahun 2020-2024**

Analisis Relevansi Harapan Lama Sekolah (HLS) Kulon Progo, Tahun 2019-2023

Sumber: BPS, 2023



Sumber: Susenas, BPS, 2024.

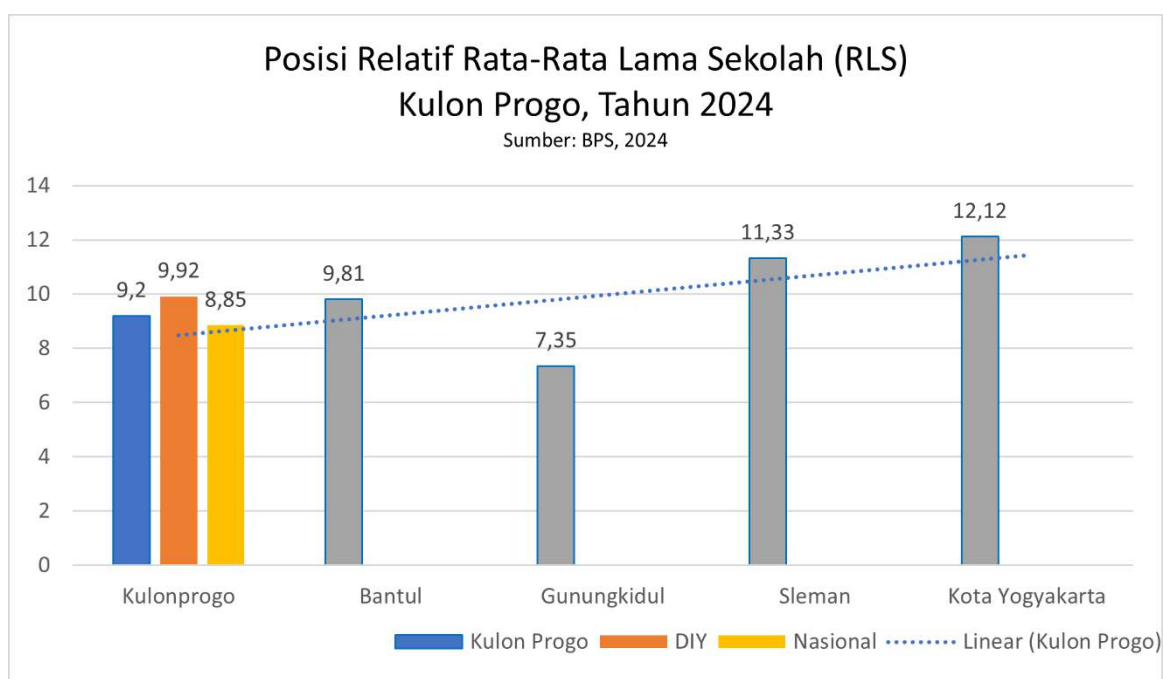
Grafik di atas menggambarkan tren relevansi Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kulon Progo dibandingkan dengan tingkat nasional dan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama periode 2020-2024. Secara umum, HLS di Kulon Progo menunjukkan **tren peningkatan dari tahun ke tahun**. Meskipun mengalami peningkatan, HLS di Kulon Progo masih berada di bawah rata-rata DIY. Namun, trend peningkatan HLS di Kulon Progo dengan DIY dan nasional **terlihat relevan**. Ini menunjukkan bahwa kenaikan di Kulon Progo berkontribusi terhadap kenaikan di tingkat provinsi dan nasional

3.3.6. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang dihabiskan penduduk untuk menjalani pendidikan formal. RLS didefinisikan sebagai rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas.

3.3.6.1. Posisi Relatif

Grafik 3.41 Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024

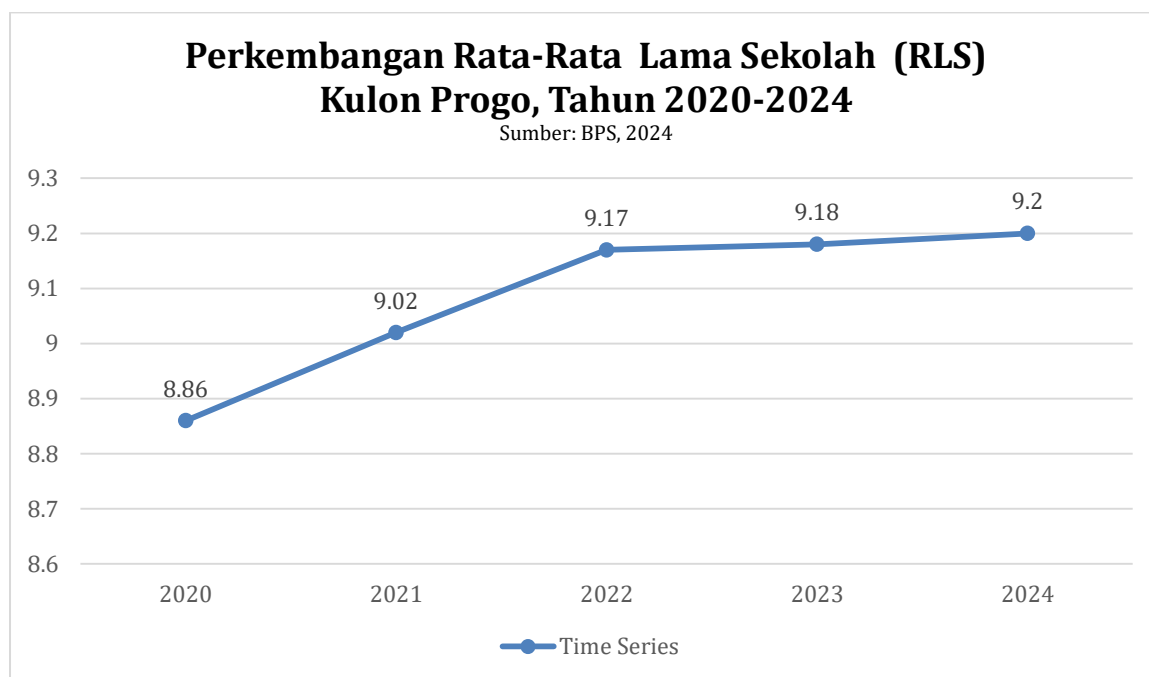


Sumber: Susenas, BPS, 2024.

Grafik di atas menunjukkan posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kulon Progo dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi DIY termasuk dengan Provinsi DIY dan nasional pada tahun 2024. Berdasarkan grafik tersebut, Kulon Progo Memiliki rata-rata lama sekolah 9,20 tahun, berada **di atas rata-rata nasional** (8,85 tahun) dan **di bawah rata-rata DIY** (9,92 tahun). Posisi Kulon Progo juga berada **di bawah rata-rata Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta**. Artinya posisi Kulon Progo (9,20) hanya berada satu tingkat di atas Gunung Kidul yang memiliki RLS (7,35 Tahun). Namun, secara capaian, posisi Kulon Progo sudah cukup baik, karena berada di atas rata-rata nasional (8,77 tahun).

3.3.6.2. Perkembangan Antar Waktu

Grafik 3.42 Perkembangan Antar Waktu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024

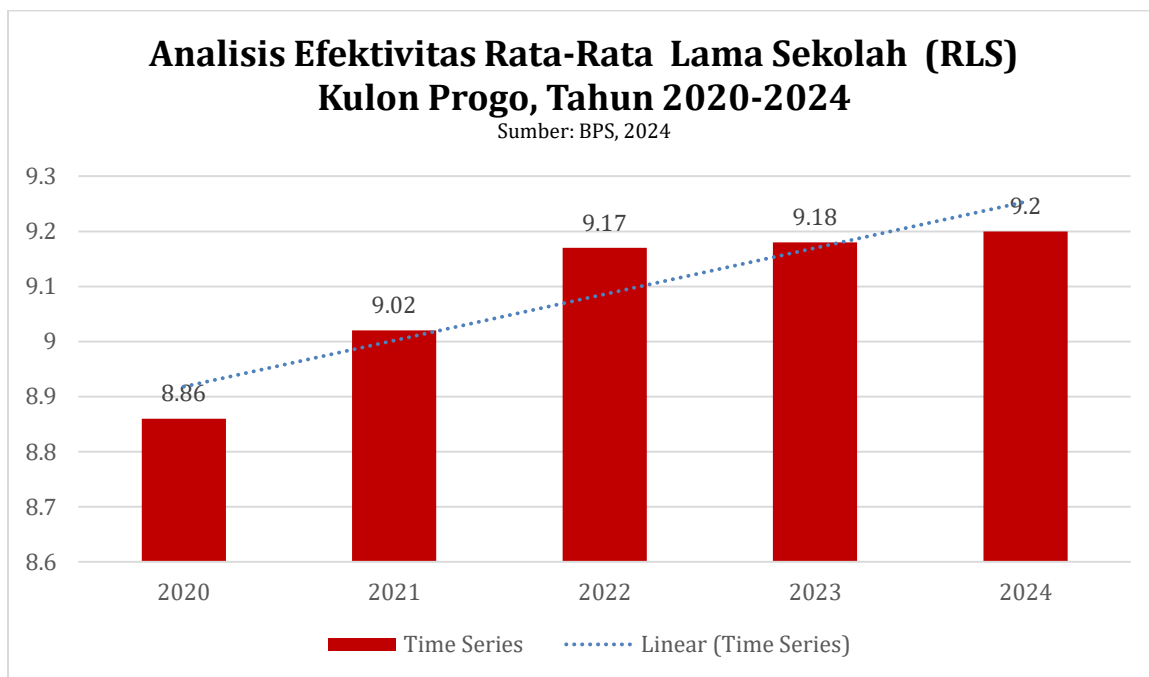


Sumber: Susenas, BPS.

Dari grafik yang disajikan, terlihat adanya **tren peningkatan** yang konsisten rata-rata lama sekolah di Kulon Progo selama periode 2020-2024. Jika kita bandingkan peningkatan antara tahun 2020-2022, tren peningkatannya cukup besar dibanding dengan peningkatan pada periode tahun 2022-2024. Namun, secara keseluruhan, selama 5 tahun terakhir, terlihat adanya percepatan peningkatan rata-rata lama sekolah. Ini mengindikasikan adanya upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kulon Progo. Setelah mencapai angka 9,17 tahun pada tahun 2022, rata-rata lama sekolah mengalami sedikit peningkatan menjadi 9,20 tahun pada tahun 2024. Ini menunjukkan adanya sedikit stabilisasi pada angka rata-rata lama sekolah.

3.3.6.3. Efektivitas

Grafik 3.43 Analisis Efektivitas Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024

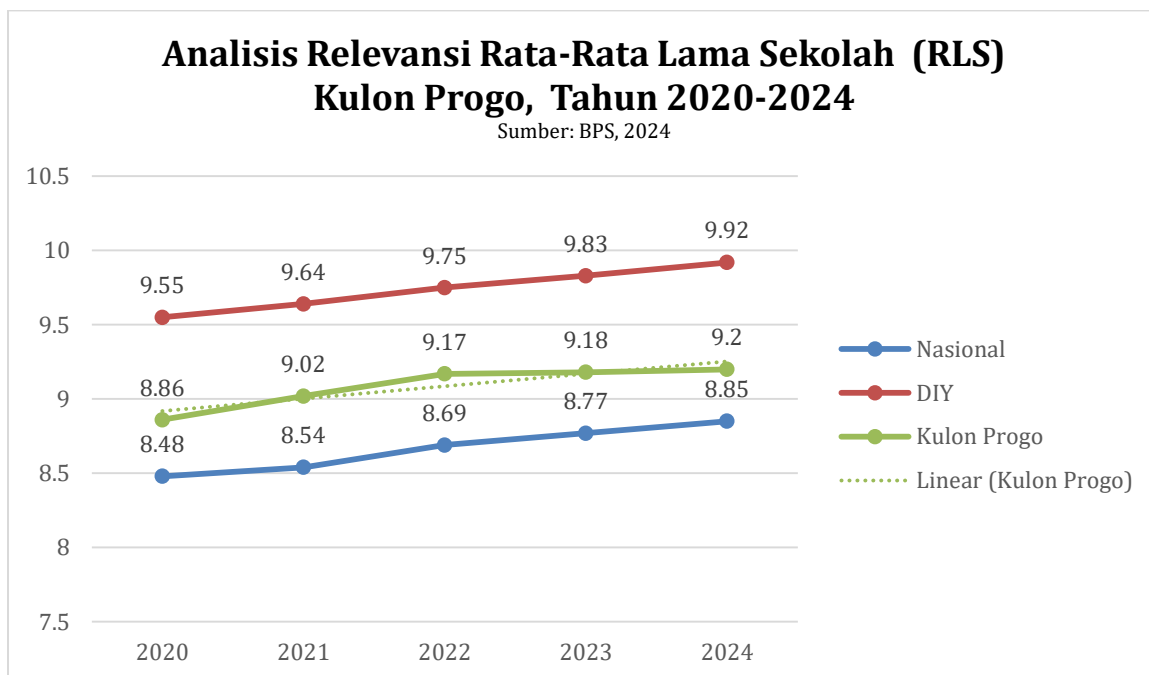


Sumber: Susenas, BPS, 2024.

Grafik di atas menunjukkan **tren peningkatan** Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2020 hingga 2024. Berdasarkan grafik tersebut dapat terlihat bahwa terdapat peningkatan yang konsisten dalam RLS di Kulon Progo dari tahun ke tahun. Ini mengindikasikan adanya **upaya yang berhasil** dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Meskipun peningkatan terjadi secara bertahap, namun terlihat adanya **percepatan peningkatan** terutama antara tahun 2020 dan 2022. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan RLS pada periode tersebut. Peningkatan ini juga menunjukkan adanya perbaikan kualitas pendidikan di Kulon Progo. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti peningkatan kualitas guru, sarana prasarana yang lebih baik, atau program-program pendidikan yang lebih efektif.

3.3.6.4. Relevansi

Grafik 3.44 Analisis Relevansi Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024



Sumber: Susenas, BPS.

Grafik di atas menyajikan perbandingan trend dan relevansi Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Kulon Progo dengan tingkat DIY dan Nasional selama periode 2020-2024. Secara umum, RLS di Kulon Progo menunjukkan **tren peningkatan** dari tahun ke tahun, meskipun dengan laju yang lebih lambat dibandingkan dengan tingkat DIY dan Nasional. Meskipun lebih lambat, terlihat adanya percepatan peningkatan RLS di Kulon Progo terutama pada tahun 2020 dan 2022. Namun, secara keseluruhan, trend peningkatan rata-rata lama sekolah di Kulon Progo dengan Provinsi dan Nasional **cukup relevan**, hal tersebut dapat dilihat dari garis linear, di mana secara konsisten kenaikan di Kulon Progo juga diikuti dengan kenaikan di tingkat Provinsi dan Nasional.

Tabel 3.13. Masalah Bidang Pendidikan

No	Indikator Utama	Aspek yang dianalisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
1	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	Lebih rendah dari nasional dan Provinsi. Memiliki kesenjangan yang Signifikan dengan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.	Cenderung Menurun	Tidak Efektif	Relevan dengan Provinsi dan Nasional
2	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS	Lebih rendah dari nasional, provinsi dan seluruh Kab/Kota di DIY.	Cenderung Menurun	Tidak Efektif	Relevan dengan Provinsi tidak relevan dengan nasional
3	Angka Partisipasi Murni SD/MI	Lebih tinggi dari nasional dan lebih rendah dari Provinsi.	Cenderung Menurun namun dengan angka yang stabil	Efektif	Relevan dengan Provinsi dan Nasional
4	Angka Partisipasi Murni SMP/MTS	Lebih tinggi dari nasional dan lebih rendah dari Provinsi. Lebih tinggi dari Gunungkidul, Bantul dan Kota Yogyakarta	Cenderung menurun	Tidak Efektif	Tidak Relevan
5	Harapan Lama Sekolah	Lebih tinggi dari nasional dan lebih rendah dari DIY. Berada di urutan keempat terendah dibanding Kab/Kota di DIY	Cenderung Meningkat	Efektif	Relevan
6	Rata-Rata Lama Sekolah	Lebih tinggi dari nasional dan lebih rendah dari DIY. Berada di urutan keempat terendah dibanding kab/kota di DIY	Cenderung Meningkat	Efektif	Relevan

3.4. Analisis Karakteristik Masalah Bidang Kesehatan

3.4.1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah salah satu indikator yang menunjukkan jumlah kematian ibu selama proses kehamilan, persalinan, dan postpartum (setelah melahirkan) per 100.000 kelahiran hidup dalam satu tahun. Ini merupakan ukuran dari kualitas perawatan kesehatan maternal di suatu wilayah. Angka ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, ketersediaan fasilitas medis, pendidikan dan pengetahuan tentang kesehatan maternal serta kondisi ekonomi.

3.4.1.1. Posisi relatif

Grafik 3.45 Posisi Relatif Angka Kematian Ibu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

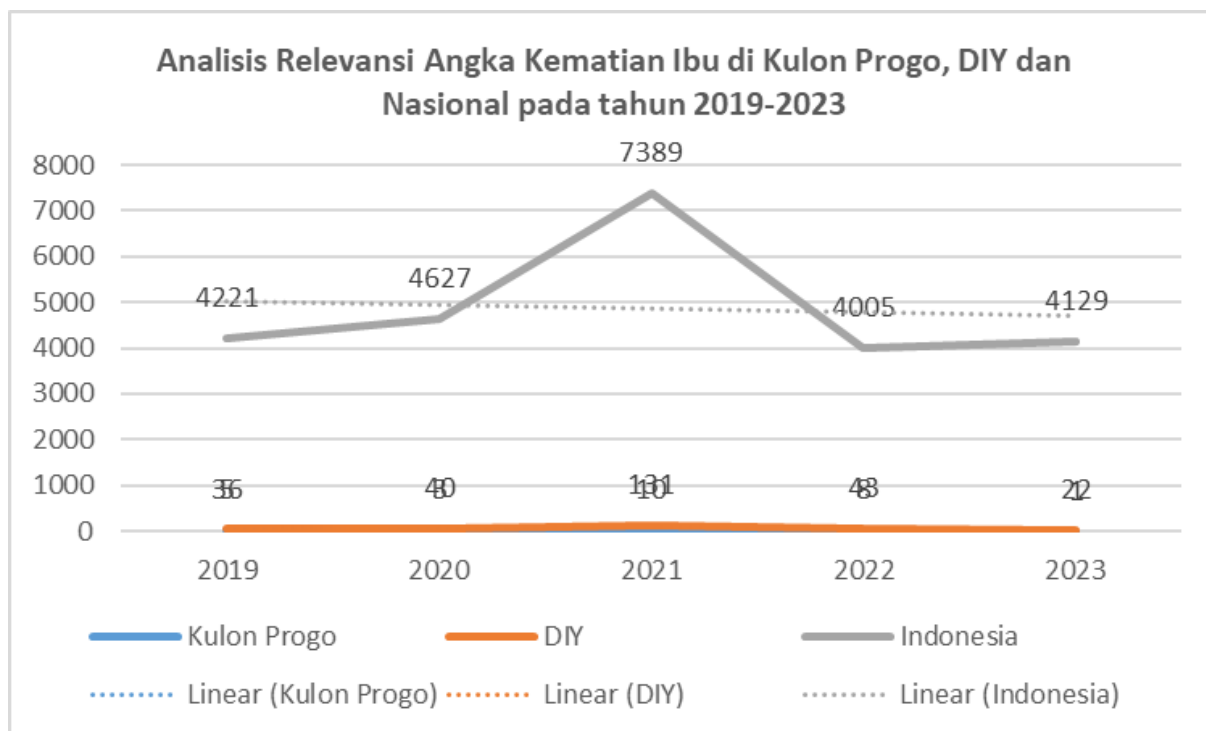


Sumber: Dinas Kesehatan DIY

Berdasarkan grafik posisi relatif Angka Kematian Ibu menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo berada pada posisi **terendah kedua** setelah Kota Yogyakarta, posisi ketiga Gunungkidul, keempat Sleman dan posisi tertinggi Kabupaten Bantul. Menurut data Dinas Kesehatan DIY (SSGI 2023), pada tahun 2023 AKI Kabupaten Kulon Progo yaitu 1 per 100.000 kelahiran hidup, Bantul 9 per 100.000 kelahiran hidup, Gunungkidul 5 per 100.000 kelahiran hidup, Sleman 7 per 100.000 kelahiran hidup dan Kota Yogyakarta 0 per 100.000 kelahiran hidup. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Kulon Progo memiliki capaian yang baik dalam menekan Angka Kematian Ibu dibanding 3 kabupaten/kota lainnya di DIY.

3.4.1.2. Perkembangan antar waktu

Grafik 3.46 Perkembangan Angka Kematian Ibu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Kesehatan DIY

Grafik perkembangan antar waktu Angka Kematian Ibu menunjukkan kecenderungan **tren menurun** dalam kurun waktu 2019-2023. Pada tahun 2019 AKI berjumlah 5 orang, kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi 3 orang dan mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2021 menjadi 10 orang, tahun 2022 turun kembali menjadi 8 orang dan kembali turun tahun 2023 menjadi 1 orang.

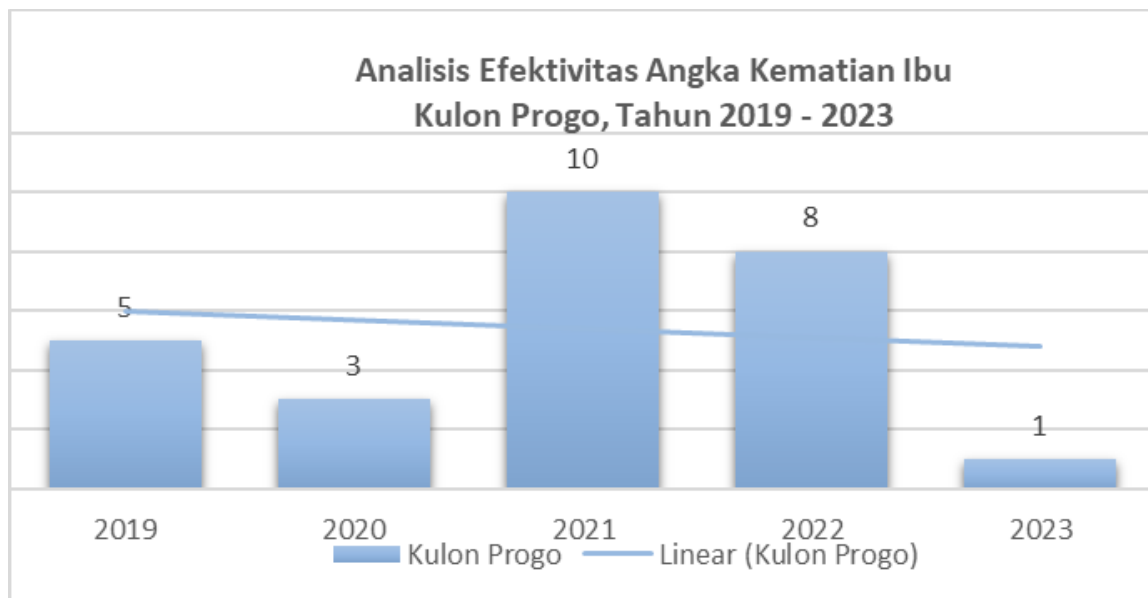
Secara keseluruhan berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo penyebab kematian ibu pada tahun 2020 sampai 2023 disebabkan oleh penyakit penyerta diantaranya yaitu Cardiomiopati peripartum (penyakit jantung), MODS (Multi Organ Dysfunction Syndrome), eklamsia dan pre eklamsia, AFLP (Acute Fatty Liver of Pregnancy), hipertensi kronik, TB paru, cancer payudara dan meninggal dengan kasus pemberat covid 19. Kematian ibu seluruhnya terjadi di Rumah Sakit dan bukan disebabkan kehamilan atau proses persalinan dan seluruhnya tercatat sebagai ibu hamil berisiko tinggi.

Tingginya kenaikan AKI tahun 2021 yang bersamaan dengan pandemi Covid-19 mengindikasikan bahwa wabah Covid-19 mempengaruhi tingkat risiko ibu hamil yang berisiko tinggi. Tingginya AKI tidak hanya terjadi di Kulon Progo namun juga di

kabupaten/kota lainnya di DIY bahkan di tingkat nasional. Menurut Dinas Kesehatan DIY, meningkatnya AKI di DIY pada tahun 2021 sangat terkait dengan risiko infeksi, namun juga berhubungan dengan masalah kesiapan sistem layanan kesehatan khusus bagi ibu hamil dan melahirkan. Selama pandemi terjadi penurunan kunjungan pasien non Covid-19 di puskesmas. Kondisi ini tidak lepas dari adanya ketakutan masyarakat terhadap penularan Covid-19 serta pembatasan sosial dan himbauan pemerintah untuk mengurangi kunjungan ke fasilitas Kesehatan. Selanjutnya, seiring dengan mereda dan terkendalinya Covid-19 kasus AKI mengalami penurunan secara berturut-turut pada tahun 2022 dan 2023. Kondisi tersebut menandakan bahwa ada pengaruh situasi Covid-19 terhadap AKI di Kabupaten Kulon Progo.

3.4.1.3. Efektivitas

Grafik 3.47 Analisis Efektivitas Angka Kematian Ibu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023



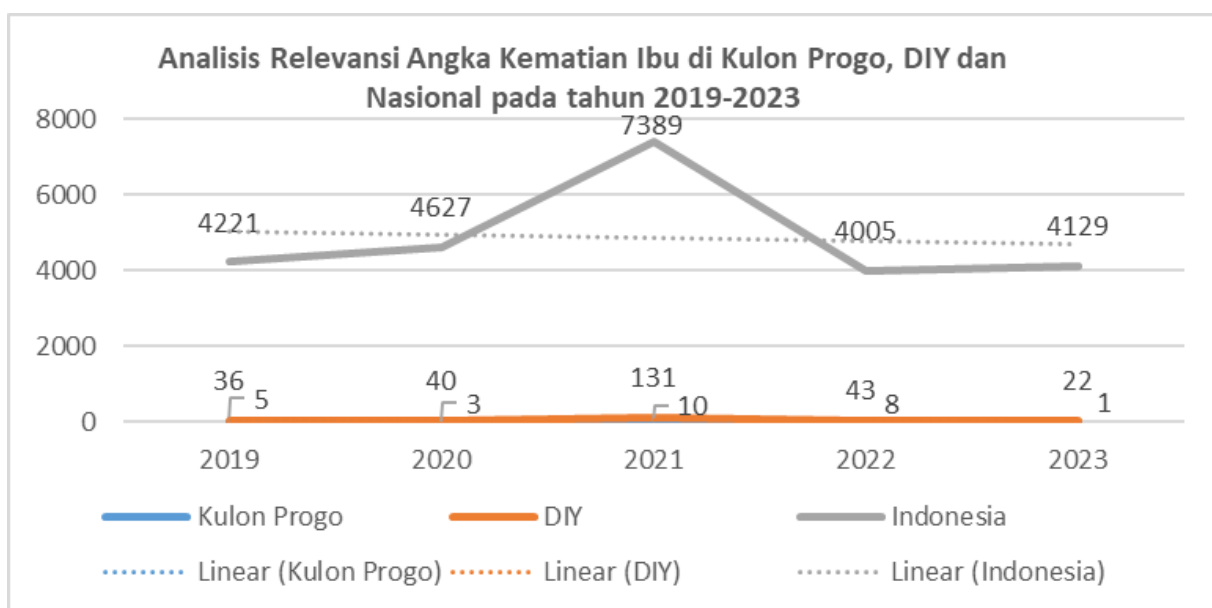
Sumber: Dinas Kesehatan DIY

Berdasarkan grafik efektivitas Angka Kematian Ibu Kabupaten Kulon Progo dalam kurun waktu tahun 2019-2023 menunjukkan tren **kecenderungan menurun**. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melakukan beberapa upaya untuk menurunkan AKI diantaranya yaitu penguatan Jejaring Peduli Kesehatan Ibu dan Anak (RINDU KIA), aplikasi Bumilku dan Manual Rujukan Maternal Neonatal (MRMN). Upaya tersebut cukup berhasil dalam mendeteksi sejak awal dan proses rujukannya serta dapat mengidentifikasi sejak dini melalui pemeriksaan kehamilan di Puskesmas. Upaya-upaya tersebut terbukti berhasil

menurunkan AKI sejak tahun 2020 sampai 2023, kecuali pada tahun 2021 di mana pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap ibu hamil berisiko tinggi dan membatasi masyarakat untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan sehingga berpengaruh terhadap kenaikan AKI. Namun, mulai tahun 2022 dimana kondisi wabah Covid-19 yang mulai terkendali berdampak pada pulihnya ke akses layanan kesehatan dan fasilitas medis sehingga berkontribusi terhadap penurunan AKI. Artinya kebijakan dan program-program seperti penguatan Jejaring Peduli Kesehatan Ibu dan Anak (RINDU KIA), aplikasi Bumilku dan Manual Rujukan Maternal Neonatal (MRMN) terbukti efektif menurunkan Angka Kematian Ibu Kulon Progo.

3.4.1.4 Relevansi perkembangan

Grafik 3.48 Analisis Relevansi Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kulon Progo, DIY dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Kesehatan DIY dan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan 2018-2021 & Maternal Perinatal Death Notification Kementerian Kesehatan 2022-2023 • VIZ: Bollo.id (di olah)

Pada tahun 2021-2023, tren relevansi Angka Kematian Ibu Kulon Progo **relevan** dengan tren yang terjadi di DIY dan nasional. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pandemi yang terjadi menyeluruh ke semua wilayah yang berdampak meningkatkan risiko bagi ibu hamil, melahirkan dan postpartum. Sementara itu, berbeda dengan AKI pada tahun 2019 dan 2020, dimana data DIY relevan dengan nasional yang mengalami kenaikan dari 36 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 40 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020. Data nasional menunjukkan 2.221 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019 meningkat menjadi 4.627 per 100.000 kelahiran hidup.

Meskipun AKI di Kulon Progo menunjukkan tren penurunan dalam dua tahun terakhir, angka ini masih menjadi perhatian semua pihak. Upaya terintegrasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, organisasi non pemerintah sangat penting untuk menurunkan angka kematian ibu dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak secara keseluruhan. meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan serta edukasi masyarakat menjadi langkah penting untuk tujuan ini.

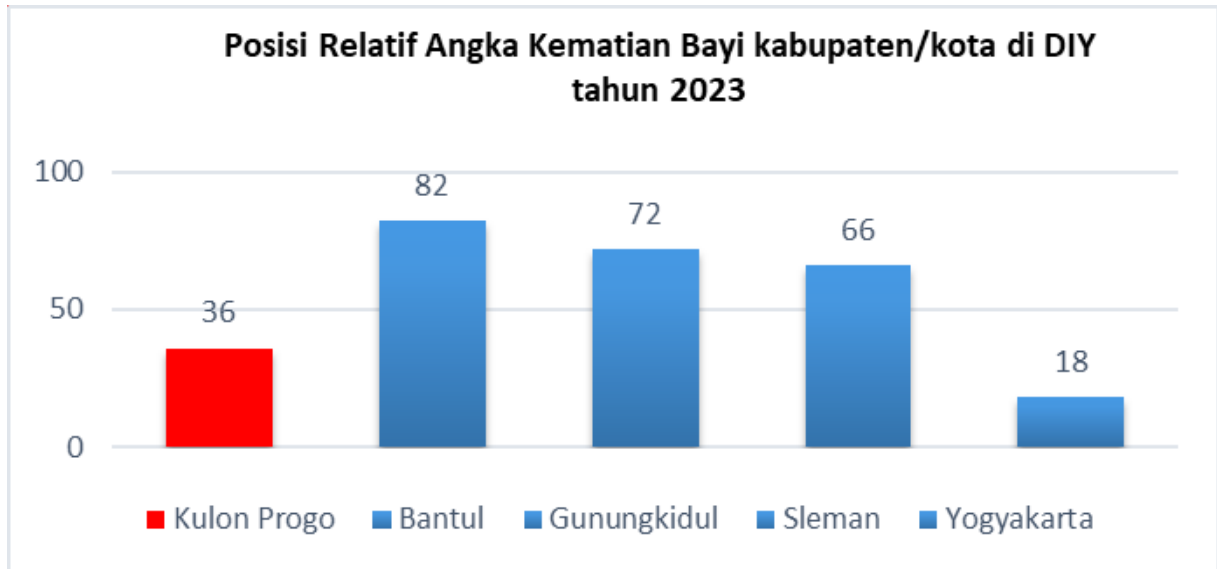
3.4.2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi (AKB) adalah ukuran penting yang menunjukkan kualitas perawatan kesehatan ibu dan bayi di suatu wilayah. Angka ini dinyatakan dalam jumlah kematian bayi yang meninggal per 1.000 kelahiran hidup sebelum mencapai usia 1 tahun pada periode waktu yang sama. Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mengukur keadaan derajat Kesehatan suatu masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi angka kematian bayi diantaranya;

- Kesehatan ibu : kondisi kesehatan ibu selama kehamilan dan persalinan, termasuk akses ke perawatan prenatal dan postnatal.
- Kualitas perawatan kesehatan : ketersediaan dan kualitas fasilitas kesehatan serta keahlian tenaga medis.
- Nutrisi dan sanitasi : akses ke makanan bergizi, air bersih dan sanitasi yang memadai.
- Penyakit dan infeksi : paparan terhadap penyakit menular atau infeksi yang dapat mempengaruhi bayi baru lahir
- Kesehatan lingkungan dan sosial : faktor sosial seperti kemiskinan, Pendidikan dan lingkungan tempat tinggal.

3.4.2.1. Posisi relatif

Grafik 3.49 Posisi Relatif Angka Kematian Bayi Kabupaten/Kota DIY Tahun 2023

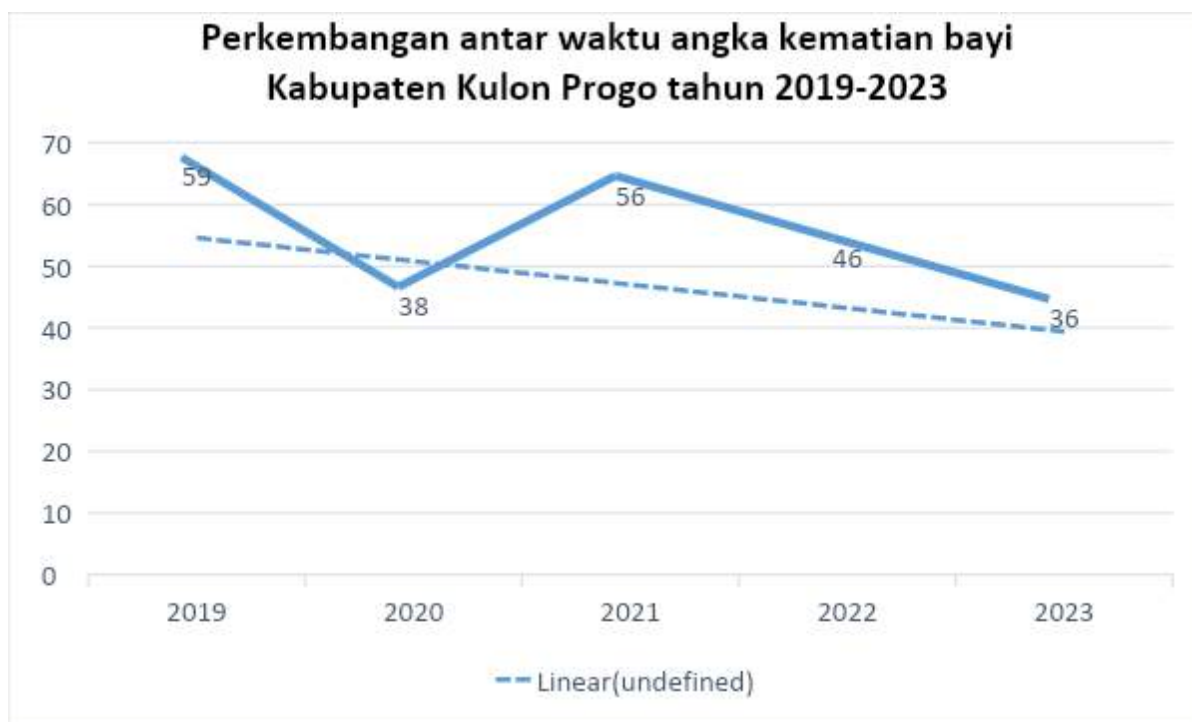


Sumber: Dinas Kesehatan DIY

Grafik posisi relatif angka kematian bayi kabupaten/kota di DIY pada tahun 2023 menempatkan Kulon Progo pada posisi **kedua terendah** angka kematian bayi setelah Kota Yogyakarta. Dibanding dengan 4 kabupaten/kota se-DIY posisi terendah kedua merupakan hal yang baik namun demikian jumlah kematian bayi yang mencapai 36 per 1.000 kelahiran hidup masih cukup tinggi. Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo beberapa penyebab kematian bayi antara lain berat badan lahir rendah, prematur, infeksi paru, kelainan bawaan dan kejang. BBLR mengacu pada berat badan bayi 1.500-2.499 gram dan dapat diakibatkan oleh gizi ibu yang kurang.

3.4.2.2 Perkembangan antar waktu

Grafik 3.50 Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Bayi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Kesehatan DIY

Menurut data tren perkembangan antar waktu Angka Kematian Bayi Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2019-2023 **cenderung menurun**. Meskipun AKI tahun 2021 jauh dibawah target yang ditetapkan yaitu 8,46 per 1.000 kelahiran dan realisasinya 12,4 per 1.000 kelahiran atau (angka absolut 56 bayi) dengan kelahiran hidup 4.523 bayi, namun pada tahun 2022 dan 2023 AKB mengalami penurunan yang konsisten. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2022 turun menjadi 46 per 1.000 kelahiran hidup dan tahun 2023 AKB kembali turun menjadi 36 per 1.000 kelahiran hidup. Kasus kematian bayi ini antara lain disebabkan oleh kelainan bawaan, Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, prematuritas, sepsis, infeksi paru, aspirasi, gangguan nafas.

3.4.2.3 Efektivitas

Grafik 3.51. Analisis Efektivitas Angka Kematian Bayi Kabupaten Kulon Progo Kulon Progo Tahun 2019-2023

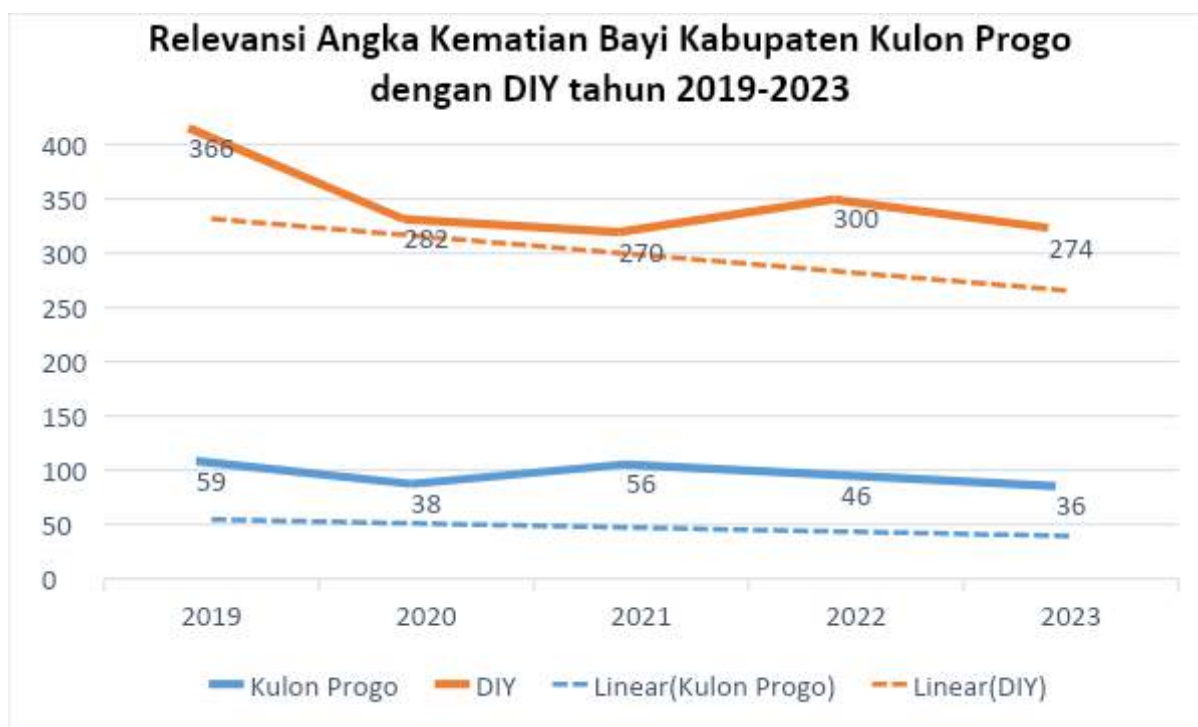


Sumber: Dinas Kesehatan DIY

Grafik di atas menunjukkan bahwa tren efektivitas angka kematian bayi cenderung menurun. Data tersebut mengindikasikan bahwa program dan kebijakan untuk menurunkan angka kematian bayi **efektif** karena dalam kurun waktu lima tahun, di tahun 2023 penurunan yang artinya cukup baik. Beberapa intervensi program telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dalam menurunkan angka kelahiran bayi seperti *antenatal care* (ANC) terpadu, pemberian makanan tambahan (PMT) ibu hamil, kelas ibu dan bimbingan dokter anak ke Puskesmas, serta pemberian asupan gizi seimbang kepada bayi yang sedang dirawat di RSUD.

3.4.2.4 Relevansi

Grafik 3.52. Analisis Relevansi Angka Kematian Bayi Kabupaten Kulon Progo dengan DIY Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Kesehatan DIY

Dari grafik relevansi angka kematian bayi Kabupaten Kulon Progo dengan DIY dalam kurun waktu 2019-2023 **kurang relevan**. Dari data tersebut menunjukkan bahwa saat AKB di Kulon Progo naik di tahun 2021, di tingkat DIY justru mengalami penurunan dan pada tahun 2022 saat AKB di Kulon Progo turun, AKB di DIY justru naik. Kondisi relevan terlihat pada tahun 2020 dan tahun 2023, pada saat AKB Kulon Progo turun, AKB DIY juga turun, demikian juga pada tahun 2023 saat AKB Kulon Progo turun, AKB DIY juga turun. Hal tersebut menunjukkan bahwa relevansi angka kematian bayi Kulon Progo dengan DIY tidak terlalu relevan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun tertentu ada kabupaten yang berkontribusi secara langsung dalam peningkatan maupun penurunan AKB di tingkat provinsi dan juga sebaliknya. Hal tersebut dikarenakan perhitungan AKB di tingkat provinsi dihitung secara kumulatif dari data setiap kabupaten termasuk Kulon Progo.

3.4.3. Prevalensi Stunting

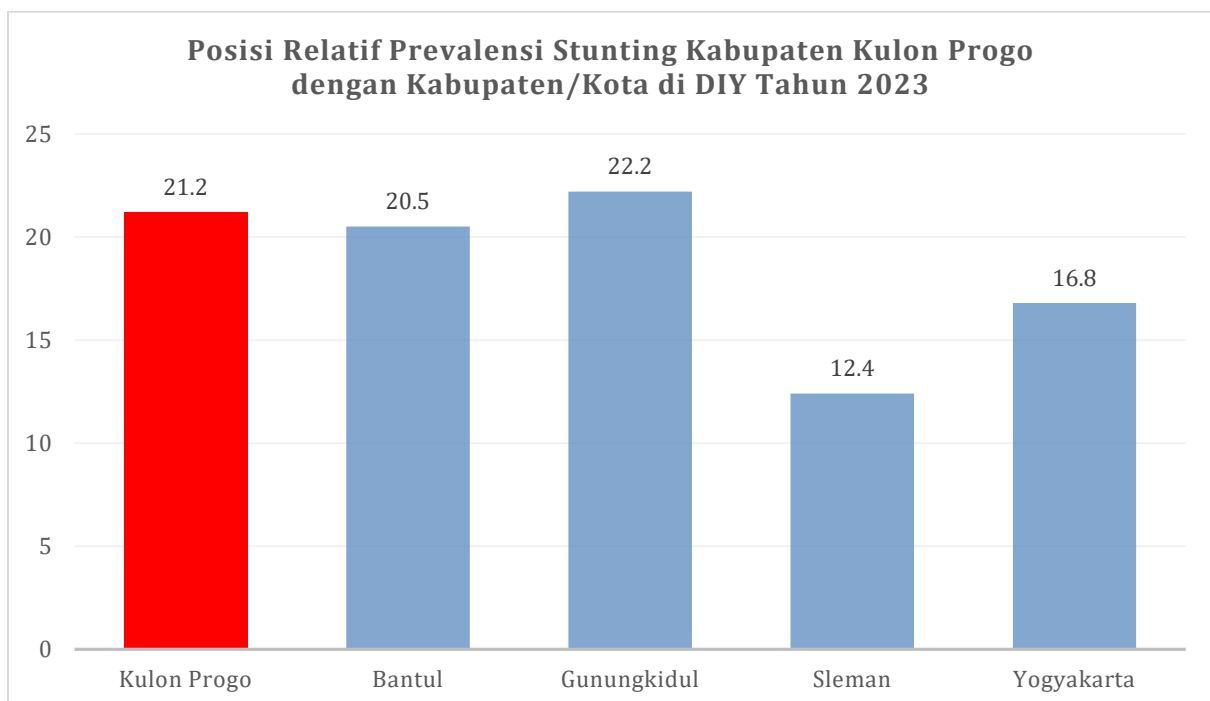
Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak balita terhambat akibat kekurangan gizi kronis, terutama selama 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK). Ketidakmampuan tumbuh ini disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu lama serta seringnya terjadi

infeksi berulang, yang semuanya dipengaruhi oleh pola asuh yang kurang memadai selama 1.000 HPK. Anak dikatakan stunting jika Panjang atau tinggi badannya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku. Kekurangan gizi ini bisa dimulai sejak dalam kandungan dan berlanjut setelah kelahiran, meskipun gejala stunting baru tampak setelah anak berusia 2 tahun. Kondisi ini membuat anak berisiko lebih tinggi terkena penyakit tidak menular saat dewasa, seperti diabetes melitus, kanker, penyakit jantung, hipertensi dan lainnya.

Prevalensi stunting merujuk pada proporsi anak-anak yang mengalami stunting dalam suatu populasi tertentu. Secara umum, prevalensi stunting diukur dengan menghitung persentase anak-anak di bawah usia lima tahun yang tinggi badannya di bawah batas tertentu. Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan adanya masalah serius dalam pemenuhan kebutuhan gizi dan Kesehatan anak-anak yang memerlukan perhatian dan tindakan dari berbagai pihak.

3.4.3.1. Posisi relatif

Grafik 3.53 Posisi Relatif Prevalensi Stunting Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2023



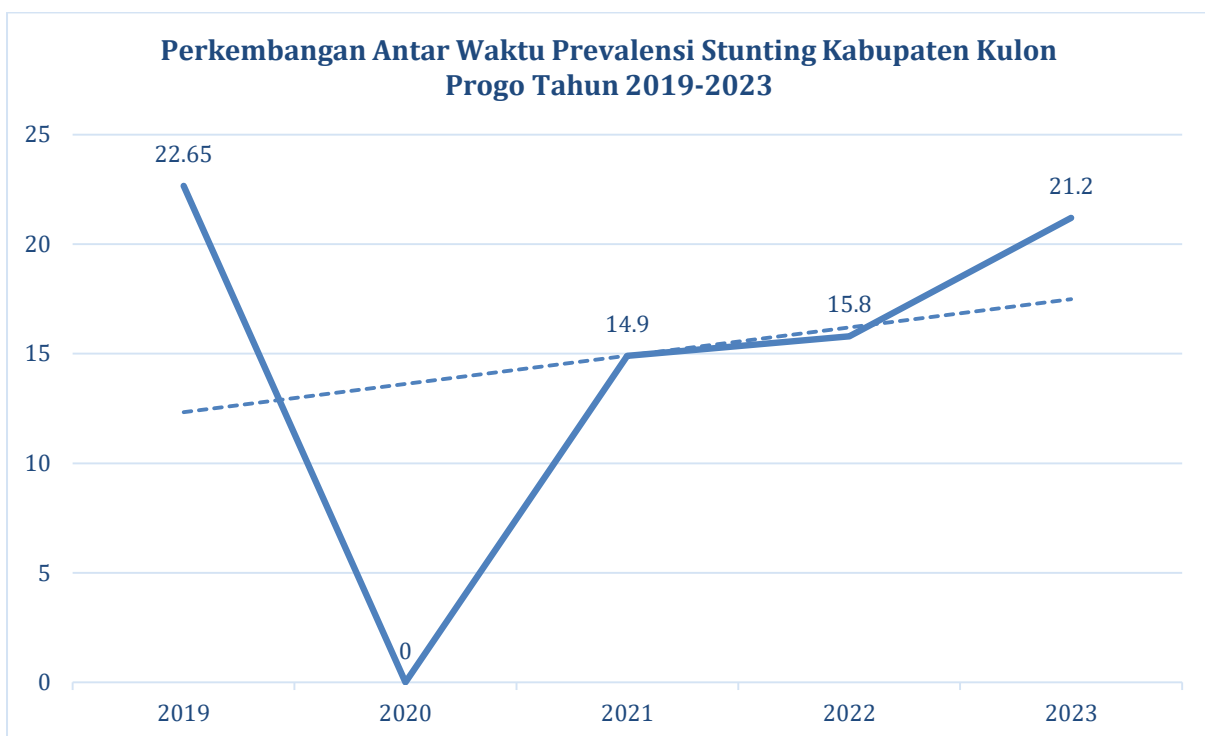
Sumber: SSGI, 2023.

Posisi relatif prevalensi stunting Kabupaten Kulon Progo menempati posisi **tertinggi kedua** dengan 21.2 persen setelah Kabupaten Gunungkidul Kota yang menempati posisi tertinggi se-DIY dengan angka 22.2 persen. Selanjutnya Kabupaten Bantul berada di posisi ketiga

dengan angka 20.5 persen, keempat Kota Yogyakarta 16.8 Persen dan posisi paling rendah Kabupaten Sleman dengan angka 12.4 persen. Sementara itu jika disbanding dengan rata-rata angka prevalensi stunting DIY, Kabupaten Kulon Progo di atas angka DIY dan di bawah rata-rata angka stunting Nasional. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan stunting di Kulon Progo cukup serius dan memerlukan perhatian dari berbagai pihak untuk pemenuhan gizi dan kesehatan anak-anak.

3.4.3.2 Perkembangan antar waktu

Grafik 3.54. Perkembangan Antar Waktu Prevalensi Stunting Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

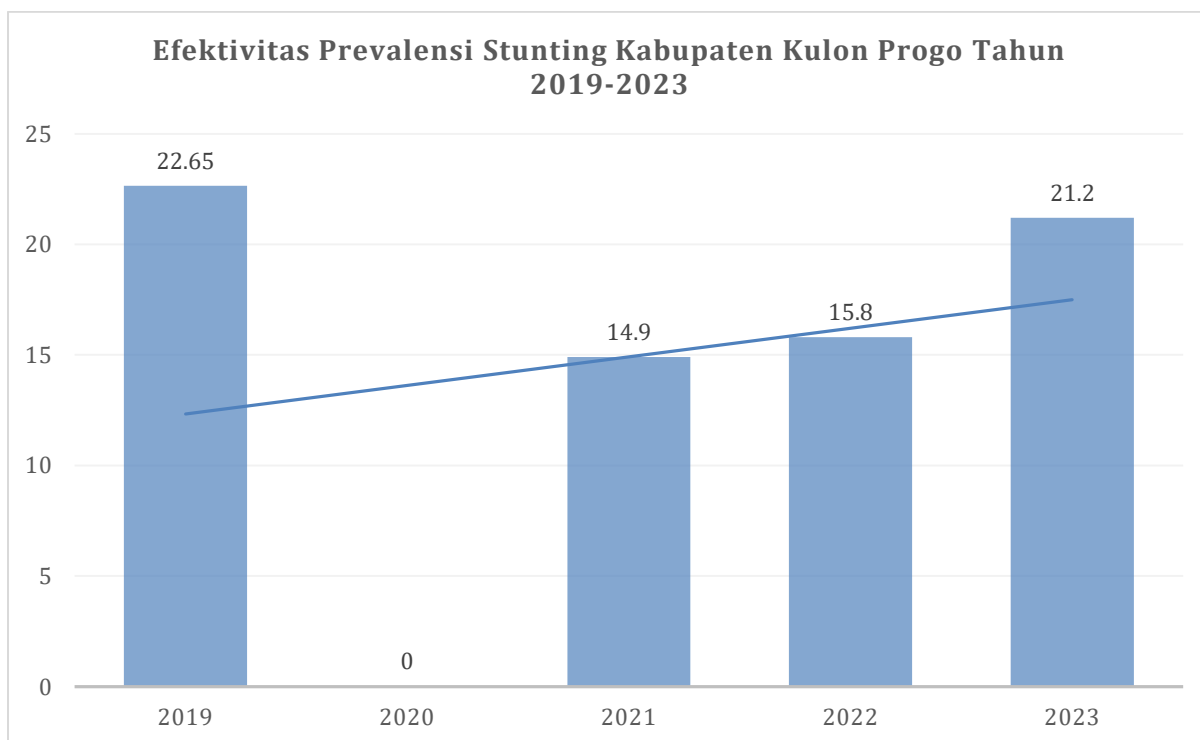


Sumber SSGI tahun 2019-2022 dan SKI 2023

Dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2019-2023, grafik perkembangan antar waktu prevalensi stunting Kabupaten Kulon Progo menunjukkan perubahan yang **cenderung naik**. Pada tahun 2019 prevalensi stunting mencapai 22.65 persen, pada tahun 2020 SSGI tidak dilakukan sehingga tidak ada data yang ditampilkan. Kemudian pada tahun 2021 angka prevalensi stunting mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2019 yaitu menjadi 14.9 persen, tahun 2022 angkanya naik Kembali menjadi 15.8 persen dan meningkat lagi secara signifikan pada tahun 2023 menjadi 21.2 persen.

3.4.3.3 Efektivitas

Grafik 3.55 Analisis Efektivitas Prevalensi Stunting Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023



Sumber: SSGI tahun 2019, 2021, 2022, dan SKI 2023

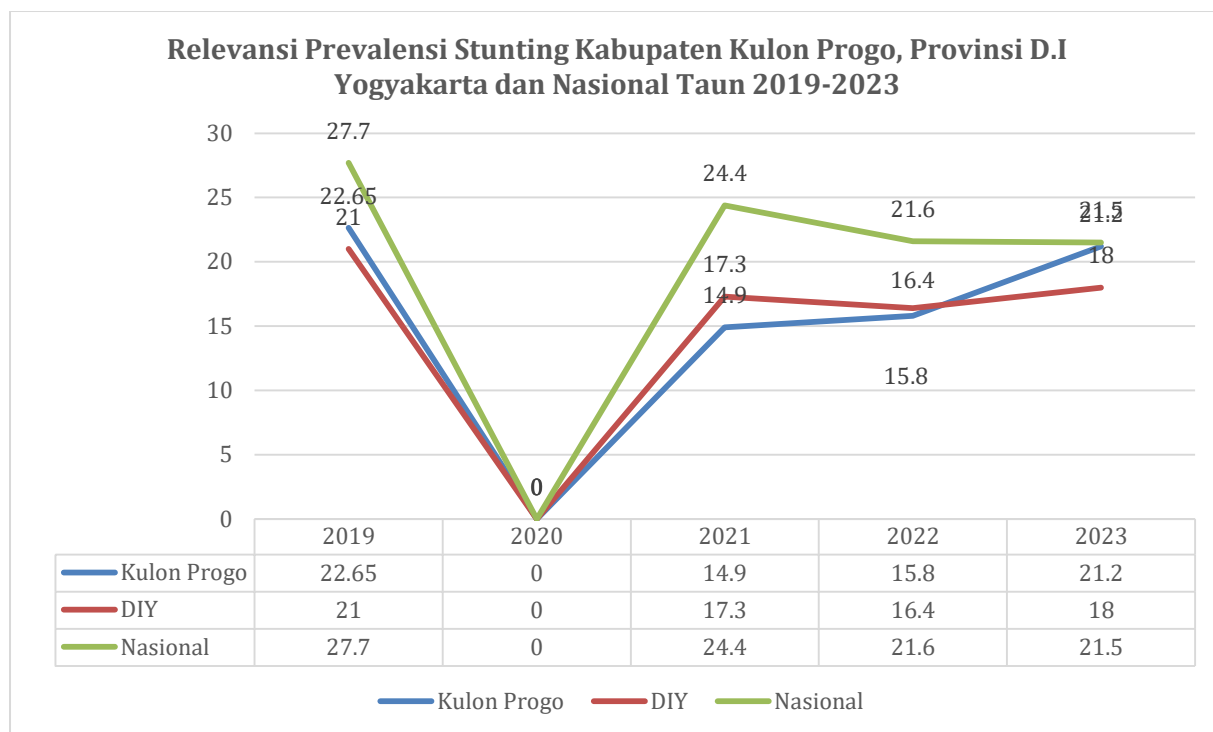
Dari sisi efektivitas prevalensi stunting Kabupaten Kulon Progo **tidak efektif** karena mengalami kenaikan prevalensi stunting secara berturut-turut dari 2021 yang sebesar 14.0 persen naik menjadi 15.8 persen pada tahun 2022 dan naik Kembali menjadi 21.2 persen pada tahun 2023 dengan kenaikan cukup signifikan. Berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 angka prevalensi stunting yang cukup tinggi turun signifikan menjadi 14.9 persen pada tahun 2021. Artinya pendekatan intervensi program yang dilakukan pada tahun 2021 dapat menurunkan angka stunting yang cukup signifikan meskipun penurunan tersebut tidak berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Menurut data dari Dinas Kesehatan Kulon Progo tren stunting meningkat setelah anak berusia 11 bulan, artinya kondisi stunting pada bayi terjadi setelah selesai ASI eksklusif atau pada masa pemberian MPASI.

Ada dua pendekatan intervensi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo yaitu intervensi spesifik dan sensitif dalam percepatan penurunan stunting yang dilakukan secara lintas sektor diantaranya program Kumbo Nambo, Matahatiku, pengembangan padi nutrizink dan pendampingan keluarga berisiko stunting.

Upaya intervensi gizi secara spesifik dan sensitif harus dipertahankan dan ditingkatkan dengan pemenuhan gizi khususnya bagi balita, anak-anak, remaja, calon pengantin, ibu hamil, dan ibu menyusui yang berpotensi terhadap terjadinya stunting.

3.4.3.4 Relevansi

Grafik 3.56. Analisis Relevansi Prevalensi Stunting Kabupaten Kulon Progo dengan DIY dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: SSGI tahun 2019, 2021, 2022, dan SKI 2023

Berdasarkan tren yang tergambar dari grafik di atas menunjukkan bahwa prevalensi stunting Kulon Progo **tidak relevan** dengan prevalensi stunting DIY dan Nasional. Kondisi yang sama terjadi pada tahun 2021 yang mengalami penurunan baik Kulon Progo, DIY dan nasional disbanding tahun 2019. Namun pada tahun 2021 ke 2022, Kulon Progo mengalami kenaikan dari 14.9 persen menjadi 15.8 persen pada tahun 2022. Hal berbeda terjadi di DIY dan Nasional yang justru mengalami penurunan yaitu DIY dari 17.3 turun menjadi 16.4 persen, nasional 21.4 persen turun menjadi 21.6 persen pada tahun 2022. Sementara itu pada tahun 2023 Kulon Progo kembali mengalami kenaikan menjadi 21.2 persen, begitupula dengan DIY angkanya naik menjadi 18 persen. Kenaikan pada tahun 2023 ini menandakan adanya kontribusi Kulon Progo terhadap kenaikan angka prevalensi stunting DIY mengingat angka 21.2 persen cukup tinggi dan menjadi kabupaten kedua penyumbang angka tertinggi prevalensi stunting di DIY. Di tingkat nasional prevalensi stunting masih berlanjut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya meskipun hanya 0.1 persen menjadi 21.5 persen. Dari data

tersebut menunjukkan bahwa antara Kabupaten Kulon Progo, DIY dan nasional perlu meningkatkan kerjasama dalam penanggulangan stunting sehingga mampu mencapai target penurunan angka stunting baik di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.

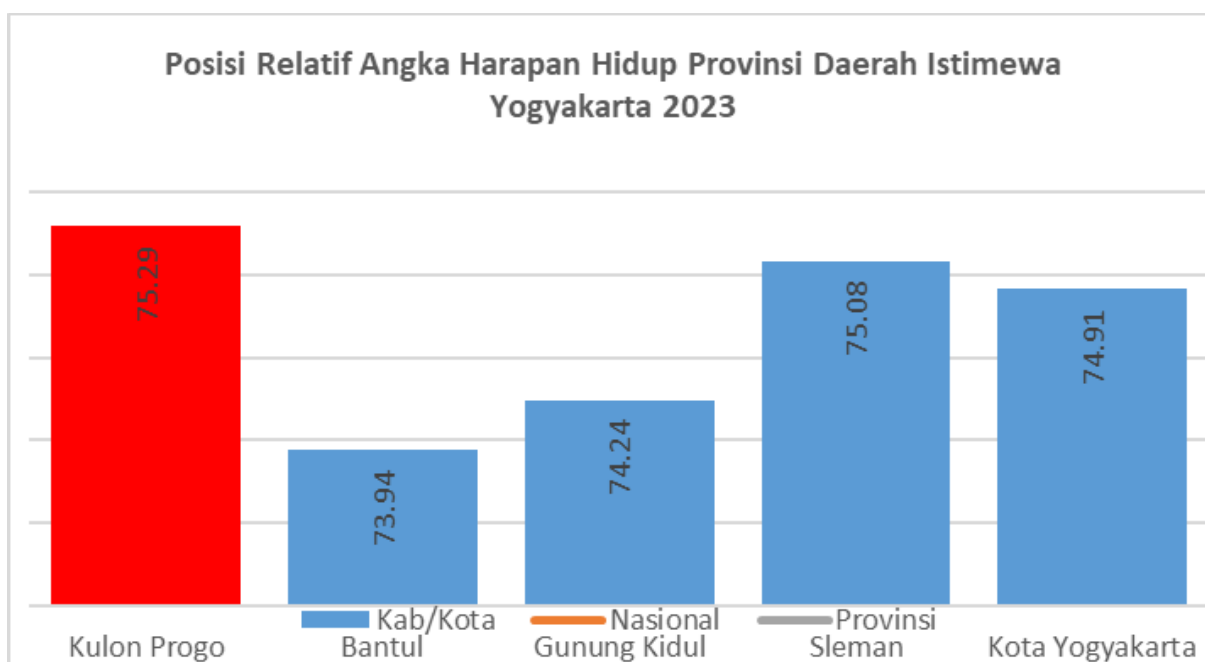
3.4.4. Angka Harapan Hidup

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tahun hidup yang masih dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir. AHH menggambarkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah atau negara. Secara khusus AHH dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas pelayanan kesehatan, kebersihan lingkungan, gizi dan kondisi sosial ekonomi.

AHH digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai kesejahteraan umum dan tingkat perkembangan manusia di suatu wilayah. Semakin tinggi angka harapan hidup, semakin baik kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.

3.4.4.1. Posisi relatif

Grafik 3.57 Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

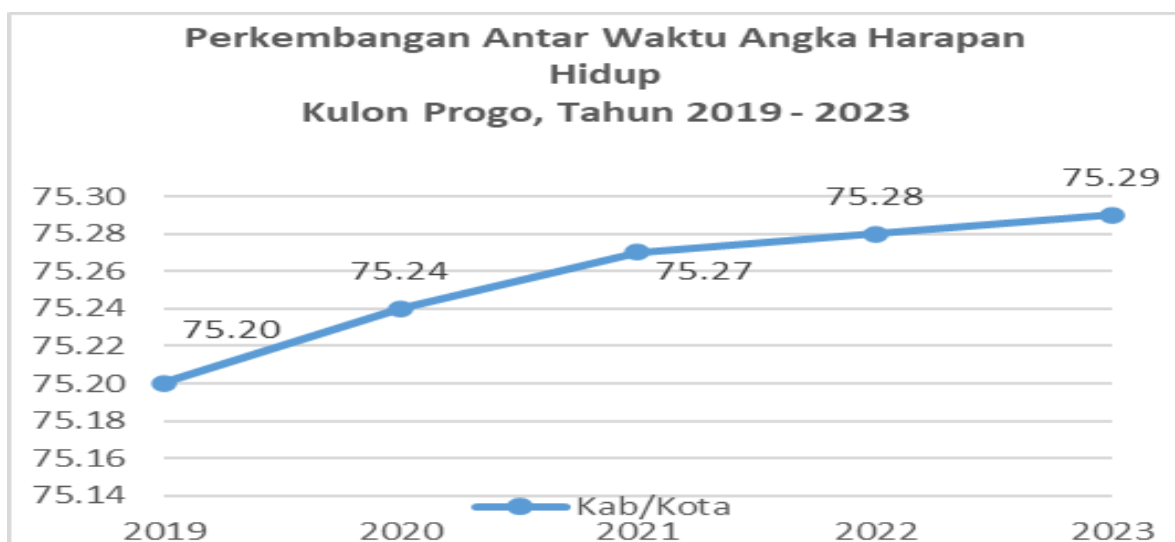


Sumber: Susenas, BPS.

Dari grafik posisi relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo mencapai 75.29 tahun, Bantul 73.94 tahun, Gunungkidul 74.24 tahun, Sleman 75.08 dan Kota Yogyakarta 74.91 tahun pada tahun 2023. Kabupaten Kulon Progo menempati **posisi tertinggi** AHH dari kabupaten/kota lainnya di DIY, kemudian disusul oleh Sleman, ketiga Kota Yogyakarta, keempat Gunungkidul dan yang kelima Bantul. Angka Harapan Hidup tersebut memosisikan Kulon Progo sebagai kabupaten dengan Angka Harapan Hidup di atas rata-rata provinsi dan nasional. Berdasarkan data tersebut disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Kulon Progo memiliki kualitas hidup yang baik seperti kualitas pelayanan kesehatan, kebersihan lingkungan, pemenuhan gizi masyarakat dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

3.4.4.2 Perkembangan antar waktu

Grafik 3.58 Perkembangan Antar Waktu Angka Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023



Sumber: Susenas, BPS.

Berdasarkan grafik perkembangan antar waktu AHH Kabupaten Kulon Progo mengalami **kecenderungan meningkat** dalam kurun waktu lima tahun yaitu 2019-2023. Pada tahun 2019 AHH Kulon Progo mencapai 75.20 tahun, 2020 75.24 tahun, 2021 75.27 tahun, 2022 75.28 tahun dan tahun 2023 mencapai 75.29 tahun. Kenaikan AHH ini tidak terlalu signifikan karena selama masa lima tahun masih berada pada angka 75 tahun lebih. AHH tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kulon Progo memiliki kualitas hidup yang baik. Namun demikian, pemerintah daerah harus terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tahun-tahun mendatang dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, kebersihan lingkungan, gizi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

3.4.4.3 Efektivitas

Grafik 3.59 Analisis Angka Harapan Hidup Kulon Progo Tahun 2019-2023



Sumber: Susenas, BPS.

Grafik efektivitas Angka Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo meningkat setiap tahun. Hal tersebut menandakan bahwa program-program pemerintah terkait peningkatan kualitas hidup masyarakat sudah **efektif**. Untuk meningkatkan AHH yang lebih signifikan, pemerintah daerah dan masyarakat harus lebih serius lagi untuk meningkatkan kualitas hidupnya karena sudah memiliki investasi yang baik terkait kualitas kesehatan masyarakat.

3.4.4.4 Relevansi

Grafik 3.60 Analisis Relevansi Angka Harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Kulon Progo dengan DIY dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: Susenas, BPS.

Dari grafik relevansi Angka Harapan Hidup saat lahir Kabupaten Kulon Progo pada periode 2019-2023 menunjukkan bahwa capaian AHH masyarakat Kulon Progo **relevan** dengan AHH di tingkat provinsi dan nasional. Dengan capaian AHH di atas rata-rata DIY dan nasional, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kulon Progo memiliki kualitas hidup yang lebih baik dari kabupaten/kota lainnya di DIY dan masyarakat secara nasional.

3.4.5. Angka Morbiditas

Morbiditas (kesakitan) adalah salah satu indikator penting dalam mengukur derajat kesehatan suatu populasi selain mortalitas (angka kematian) dan angka harapan hidup. Angka morbiditas menunjukkan seberapa banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan atau gangguan tubuh, baik dalam bentuk penyakit, cedera, atau gangguan fungsional lainnya. Semakin tinggi angka morbiditas, semakin buruk tingkat kesehatan penduduk tersebut, sedangkan semakin rendah angka morbiditas menunjukkan populasi yang lebih sehat.

Indikator ini mengukur seberapa besar penyimpangan dari status sehat atau kesejahteraan dalam suatu masyarakat. Contoh penyakit yang umum dilaporkan dalam angka morbiditas termasuk keluhan seperti demam, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma, atau sakit gigi. Bahkan penderita penyakit kronis dianggap memiliki keluhan kesehatan, meskipun penyakit mereka mungkin tidak kambuh selama periode survei tertentu.

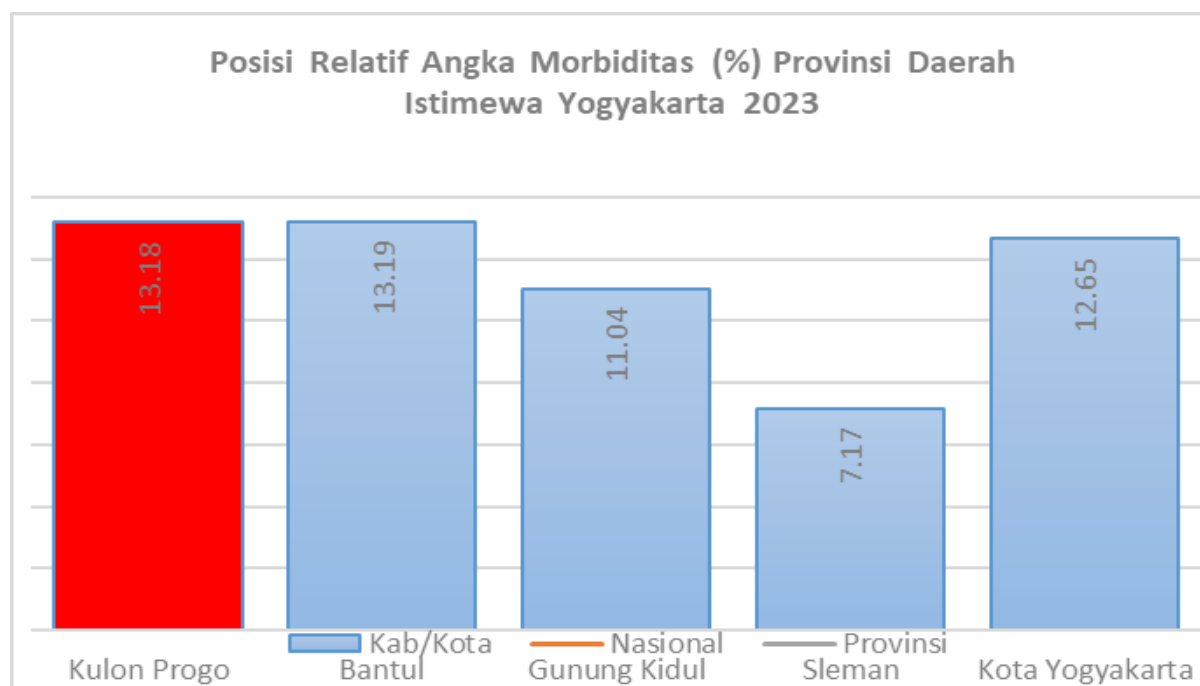
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ada tiga ukuran utama untuk morbiditas

1. Jumlah orang sakit : jumlah orang yang mengalami gangguan Kesehatan
2. Lamanya sakit : durasi waktu seseorang menderita penyakit
3. Periode sakit : frekuensi sakit atau kapan seseorang mengalami gangguan Kesehatan dalam periode tertentu

Dengan menggunakan angka morbiditas, kita dapat menilai kondisi kesehatan masyarakat dan merancang intervensi kesehatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan

3.4.5.1. Posisi relatif

Grafik 3.61 Posisi Relatif Angka Morbiditas (%) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

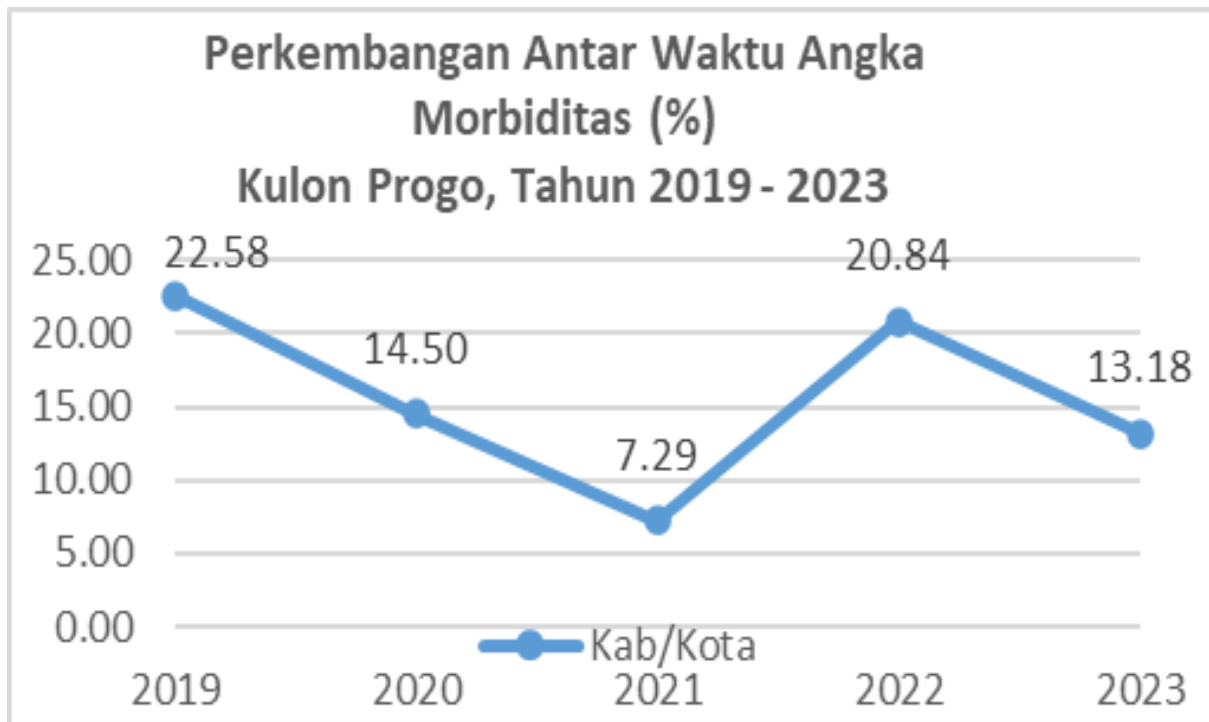


Sumber: Susenas, BPS.

Grafik posisi relatif angka morbiditas Kabupaten Kulon Progo 13.18 persen, Bantul 13.19 persen, Gunungkidul 11.04 persen, Sleman 7.17 persen dan Kota Yogyakarta 12.65 persen. Angka tersebut memposisikan Kulon Progo pada posisi **kedua tertinggi** setelah Kabupaten Bantul. Artinya banyak masyarakat Kulon Progo yang mengalami keluhan kesehatan atau derajat kesehatan yang buruk dibanding 3 kabupaten/kota lainnya di DIY. Dari tingginya morbiditas, pemerintah daerah harus memberikan perhatian serius dan melakukan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo.

3.4.5.2 Perkembangan antar waktu

Grafik 3.62 Perkembangan Antar Waktu Angka Morbiditas (%) Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2019-2023

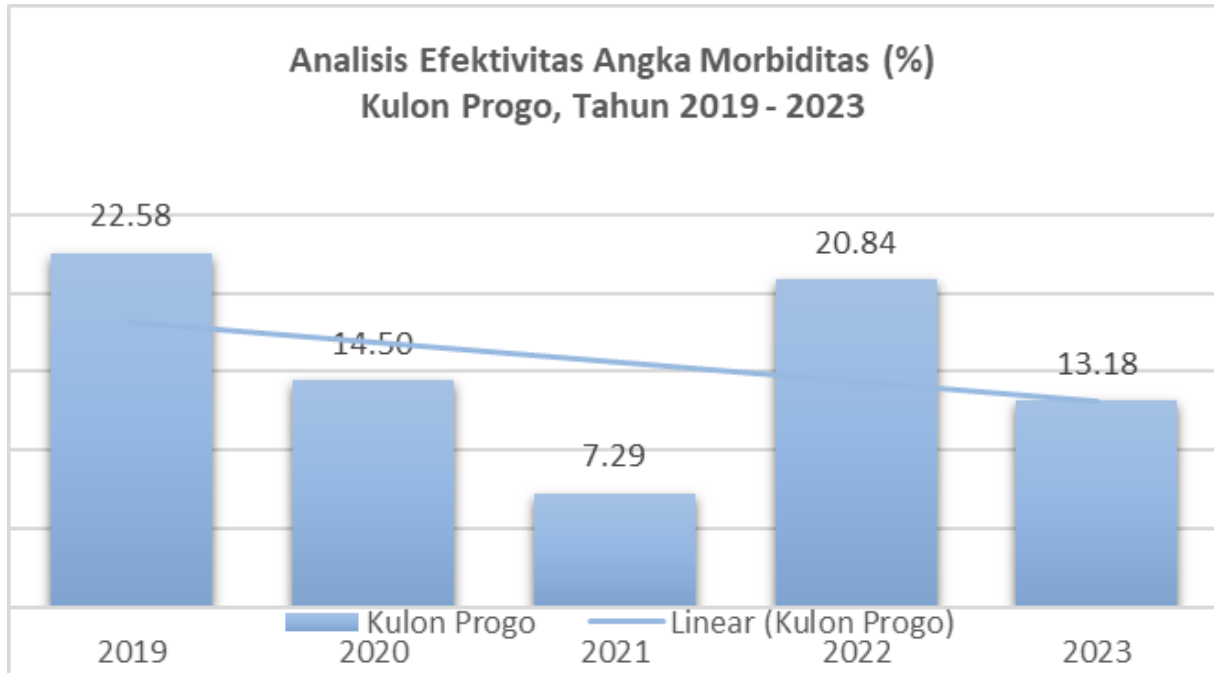


Sumber: Susenas, BPS.

Grafik perkembangan antar waktu, Kabupaten Kulon Progo mengalami **tren cenderung menurun** dalam periode lima tahun. Pada tahun 2019 morbiditas Kabupaten Kulon Progo mencapai 22.58 persen, tahun 2020 turun menjadi 14.50 persen, tahun 2021 turun Kembali menjadi 7.29 persen, tahun 2022 naik menjadi 20.84 persen dan tahun 2023 13.18 persen. Data diatas menunjukkan bahwa morbiditas terendah terjadi pada tahun 2021 yang artinya semakin rendah morbiditas maka derajat kesehatan masyarakat semakin baik. Dalam kondisi normal dapat disimpulkan demikian, namun pada tahun 2020-2021 ada kondisi yang tidak biasa yaitu mewabahnya Covid-19 di seluruh wilayah DIY termasuk Kulon Progo. Saat pandemi sangat berpengaruh terhadap jumlah kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan karena pasien enggan dan takut akan adanya penularan Covid-19, selain itu pemerintah menghimbau masyarakat untuk membatasi kunjungan ke tempat-tempat umum termasuk fasilitas kesehatan atau social distancing sehingga memungkinkan banyak masyarakat yang tidak menyampaikan keluhan penyakit ke fasilitas kesehatan dan berdampak pada menurunnya angka morbiditas di Kulon Progo.

3.4.5.3 Efektivitas

Grafik 3.63 Analisis Efektivitas Angka Morbiditas (%) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

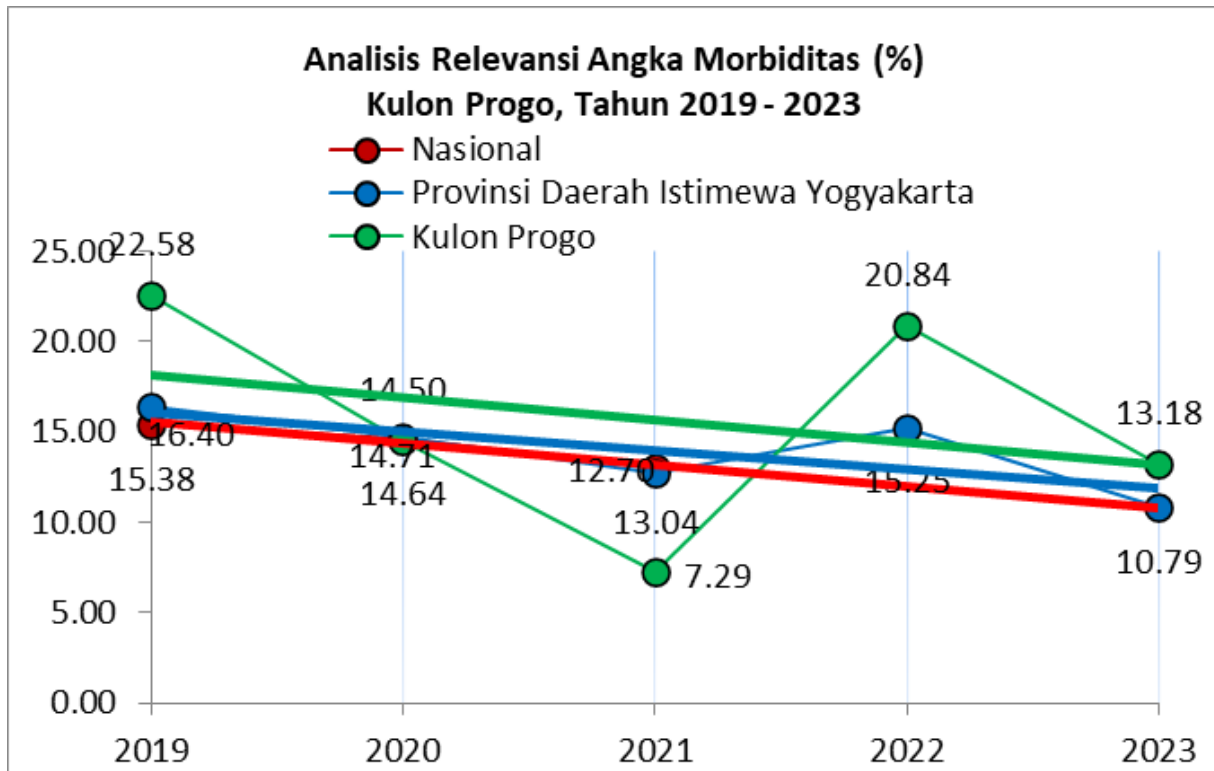


Sumber: Susenas, BPS.

Pada grafik efektivitas angka morbiditas Kabupaten Kulon Progo pada periode 2019-2023 cenderung turun. Kecenderungan morbiditas yang turun ini menandakan bahwa Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah cukup **efektif** dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kulon Progo sehingga mencapai morbiditas 13.18 persen pada tahun 2023. Upaya-upaya tersebut harus terus ditingkatkan mengingat Kabupaten Kulon Progo pernah mencapai angka morbiditas 7.29 persen pada tahun 2021 terlepas apakah angka tersebut dipengaruhi oleh pandemi atau bukan.

3.4.5.4 Relevansi

Grafik 3.64 Analisis Relevansi Angka Morbiditas (%) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023



Sumber: Susenas, BPS.

Grafik di atas menunjukkan bahwa pola dan tren morbiditas Kabupaten Kulon Progo dengan provinsi dan nasional cukup **relevan** atau sesuai yaitu dengan tren yang cenderung menurun meskipun Kulon Progo memiliki angka morbiditas yang lebih tinggi dibanding dengan provinsi dan nasional. Agar angka morbiditas Kulon Progo tidak terlalu jauh gapnya, perlu koordinasi dan sinkronisasi intervensi program yang tepat antara pemerintah daerah dan pusat untuk menurunkan angka morbiditas dan mengurangi gap derajat kesehatan masyarakat.

Tabel 3.14. Masalah Bidang Kesehatan

No	Indikator Utama	Aspek yang dianalisis			
		Posisi relatif	Perkembangan antar waktu	Efektivitas	Relevansi
1	Angka Kematian Ibu	Terendah kedua se-DIY	Cenderung menurun	Efektif	Relevan
2	Angka Kematian Bayi	Kedua terendah se-DIY	Cenderung menurun	Efektif	Tidak relevan
3	Prevalensi Stunting	Tertinggi ketiga se-DIY	Fluktuatif	Efektif	Tidak relevan
4	Angka Harapan Hidup	Tertinggi pertama se-DIY	Cenderung meningkat	Efektif	Relevan
5	Morbiditas	Tertinggi kedua di DIY	Cenderung menurun	Efektif	Relevan

3.5. Analisis Karakteristik Bidang Ketenagakerjaan

Salah satu indikator utama kemiskinan adalah besaran pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pokok. Besarnya pengeluaran ini dipengaruhi oleh pendapatan yang diperoleh, yang pada gilirannya ditentukan oleh jumlah dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anggota rumah tangga. Dengan demikian, terdapat korelasi yang kuat antara tingkat kemiskinan dan kondisi ketenagakerjaan

Untuk mengukur kondisi ketenagakerjaan, ada beberapa indikator yang menjadi acuan pemerintah daerah, di antaranya ialah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berikut adalah uraian kondisi TPAK dan TPT di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan 4 pendekatan analisis.

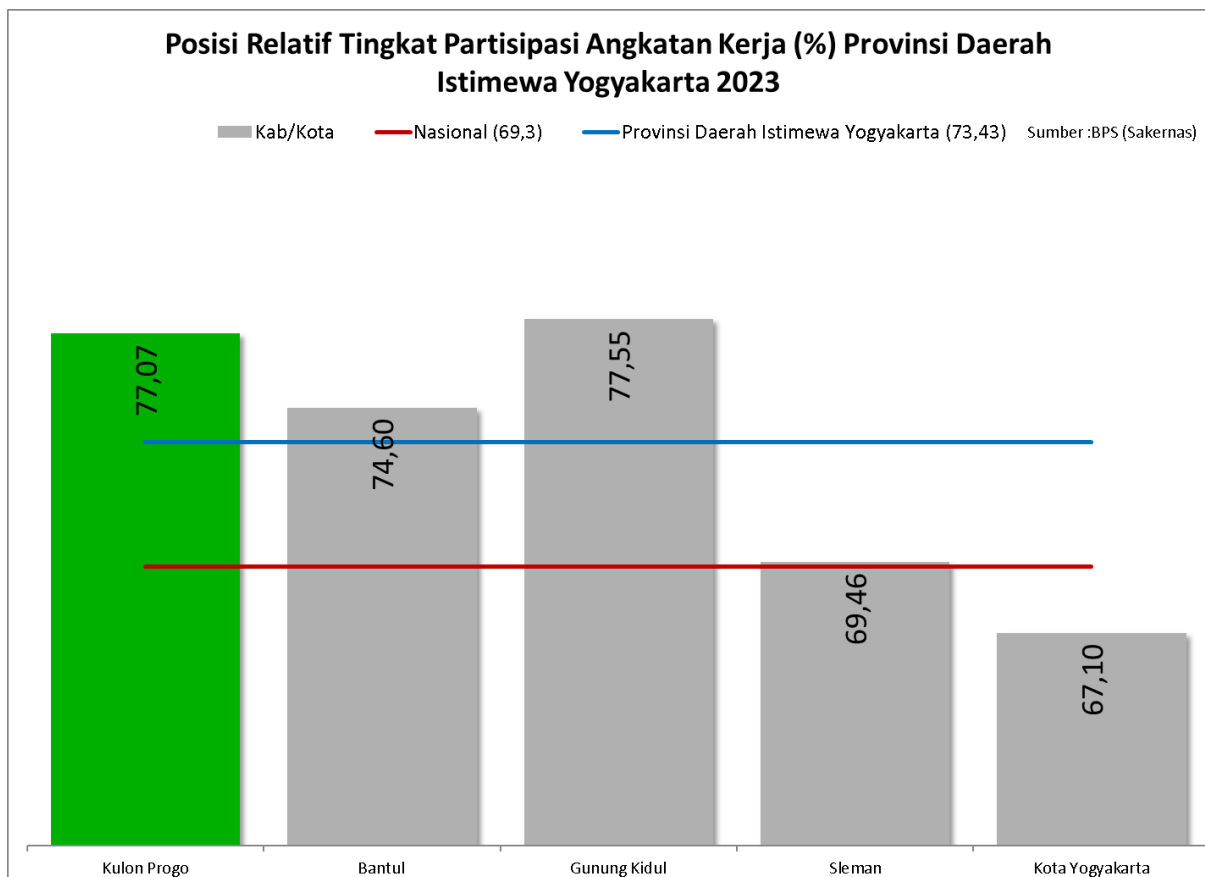
3.5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK dapat dihitung dengan membagi jumlah penduduk usia kerja yang bekerja atau mencari pekerjaan dengan jumlah penduduk usia kerja yang tidak bekerja.

TPAK dapat menjadi indikator untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang aktif bekerja atau mencari pekerjaan. TPAK yang tinggi dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena semakin banyak tenaga kerja yang tersedia, maka akan meningkatkan produktivitas, output, dan PDB.

3.5.1.1. Posisi Relatif

Grafik 3.65 Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2023



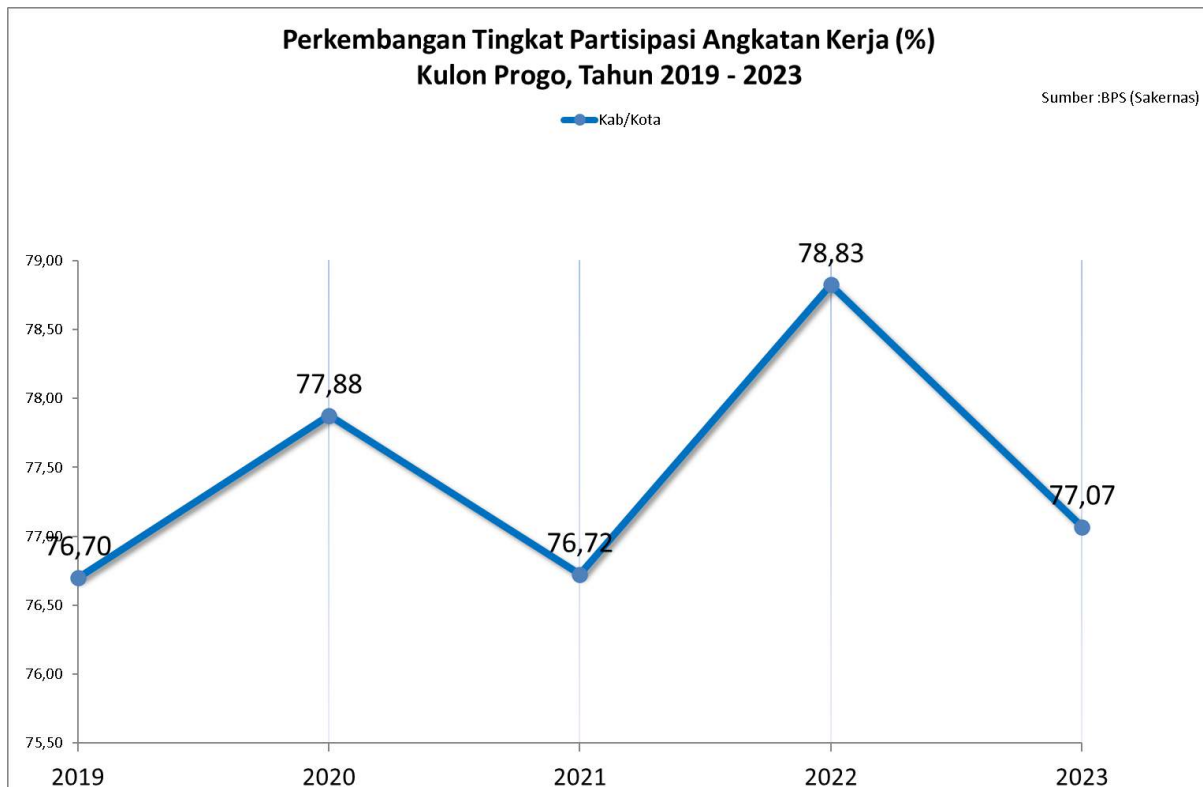
Sumber: Susenas, BPS.

Grafik di atas merupakan angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2023. Secara keseluruhan, TPAK Provinsi DIY (73,43%) berada di atas rata-rata nasional (69,3%). Ini mengindikasikan bahwa proporsi penduduk usia kerja di DIY yang aktif mencari atau memiliki pekerjaan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Sementara untuk tingkat kabupaten di DIY, **Kabupaten Kulon Progo** bersama Kabupaten Gunungkidul menjadi Kabupaten dengan **TPAK yang jauh berada di atas rata-rata nasional dan Provinsi**. Hal tersebut dapat dilihat dari sisi angka, **Kabupaten Kulon Progo menempati urutan kedua (77,07%)** setelah Kabupaten Gunung Kidul (77,55) **berjarak cukup jauh dengan kota Yogyakarta (67,10%)**

dan Sleman (69,46%) yang berada di bawah rata-rata nasional dan provinsi. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja di Kabupaten Kulon Progo aktif dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja formal maupun informal.

3.5.1.2. Perkembangan Antar Waktu

Grafik 3.66 Perkembangan Antar Waktu TPAK Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023



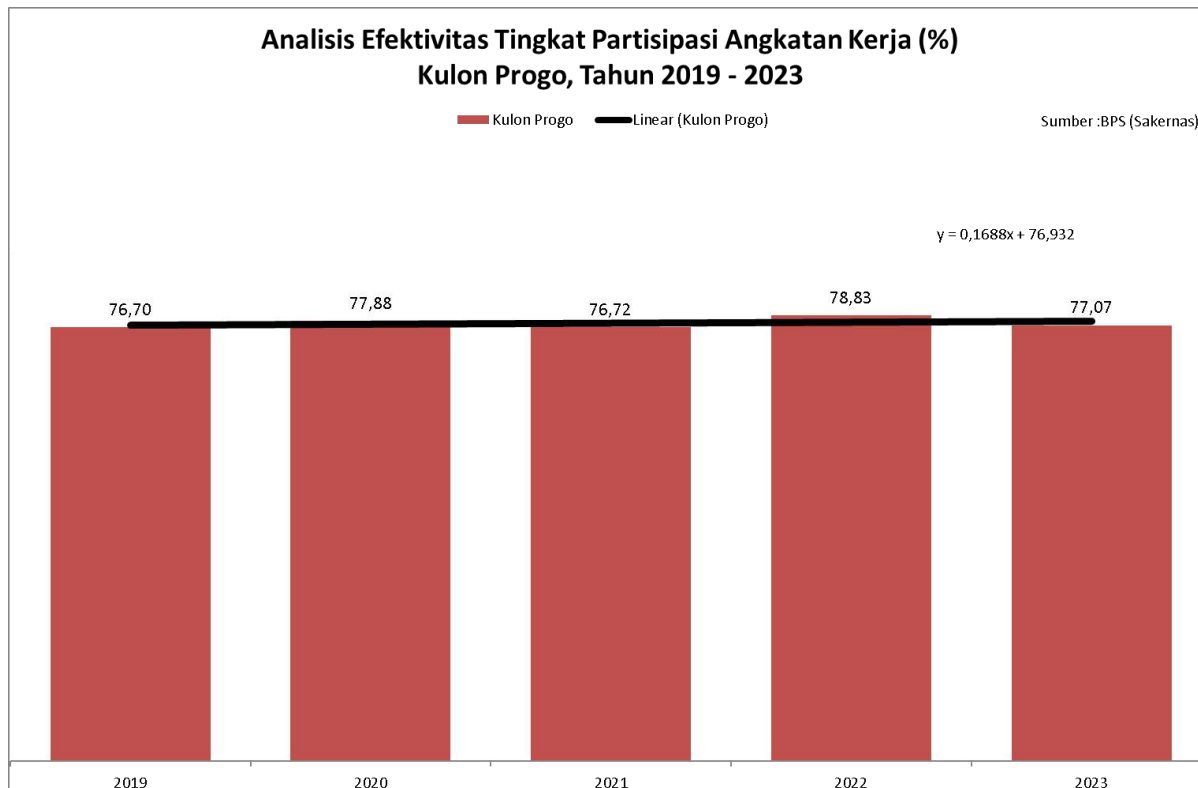
Sumber: Susenas, BPS.

Grafik diatas merupakan data perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kulon Progo tahun 2019-2023. Berdasarkan data tersebut, TPAK di Kulon Progo mengalami **fluktuasi selama periode 2019-2023**. Terdapat **peningkatan signifikan dari tahun 2021 ke 2022**, namun kemudian mengalami **sedikit penurunan di tahun 2023**. Meskipun ada fluktuasi, secara umum tren TPAK di Kulon Progo **cenderung meningkat**. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia produktif di Kulon Progo yang aktif mencari atau memiliki pekerjaan. Lonjakan TPAK yang cukup besar terjadi pada tahun 2022. Ini bisa mengindikasikan adanya faktor-faktor positif yang mendorong peningkatan partisipasi angkatan kerja, seperti pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, atau kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan produktivitas. Setelah mencapai puncaknya di tahun 2022, TPAK mengalami penurunan sedikit di tahun 2023. Penurunan ini bisa

disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan pemerintah atau faktor musiman seperti sektor pertanian yang bergantung pada kualitas cuaca musiman,

3.5.1.3. Efektivitas

Grafik 3.67 Analisis Efektifitas TPAK Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023



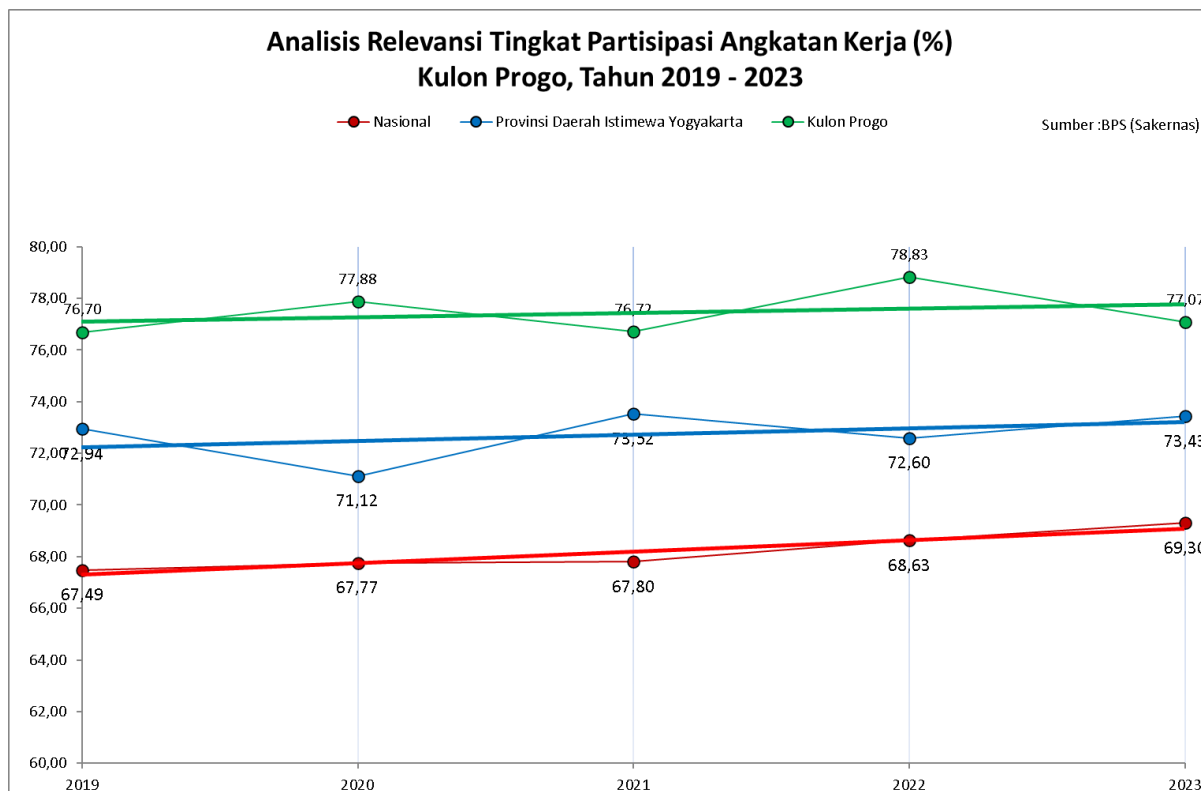
Sumber: Susenas, BPS.

Grafik di atas merupakan data analisis efektivitas intervensi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kulon Progo tahun 2019-2023. Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa TPAK di Kulon Progo cenderung stabil selama periode 2019-2023. Nilai TPAK fluktuasi dalam rentang yang relatif sempit, dengan tidak ada kenaikan atau penurunan yang signifikan. Garis tren yang ditampilkan cenderung datar, yang semakin memperkuat kesimpulan bahwa tidak ada tren peningkatan atau penurunan yang signifikan angka TPAK selama periode tersebut. Stabilitas TPAK dapat mengindikasikan stabilitas ekonomi di Kulon Progo. Artinya, kondisi pasar tenaga kerja cenderung seimbang, dengan ketersediaan lapangan kerja yang cukup untuk menampung angkatan kerja yang ada. Ini juga menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Kulon Progo dapat menjaga efektivitas intervensi program, meskipun perlu evaluasi di beberapa aspek seperti peningkatan kompetensi angkatan kerja dan produk usaha, agar nilai ekonomisnya juga meningkat.

Adanya trend penurunan pada beberapa tahun seperti tahun 2020 ke tahun 2021 besar kemungkinan karena kebijakan pembatasan aktivitas dan kontraksi ekonomi yang terjadi akibat pandemi covid-19. Sementara penurunan pada tahun 2022 ke tahun 2023

3.5.1.4. Relevansi

Grafik 3.68 Analisis Relevansi TPKA Kabupaten Kulon Progo dengan Provinsi DIY dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: Susenas, BPS.

Grafik di atas merupakan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kulon Progo dibandingkan dengan tingkat nasional dan Provinsi DIY selama periode 2019-2023. Berdasarkan data tersebut, TPAK Kulon Progo selalu berada di atas rata-rata nasional dan rata-rata Provinsi DIY. Ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia kerja di Kulon Progo yang aktif mencari atau memiliki pekerjaan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional maupun provinsi. Dibandingkan dengan nasional dan DIY, TPAK Kulon Progo cenderung meningkat dengan laju yang lebih lambat. Baik nasional maupun DIY menunjukkan tren peningkatan yang lebih signifikan, terutama pada tahun 2022. Meskipun tingkat peningkatannya lebih lambat, TPAK Kulon Progo tetap menunjukkan stabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan nasional dan DIY yang mengalami fluktuasi yang lebih besar. Secara keseluruhan, trend data TPAK Kulon Progo relevan dengan tingkat Provinsi

dan Nasional, hal tersebut dapat dilihat dari trend yang cenderung naik secara bersamaan oleh ketiga data.

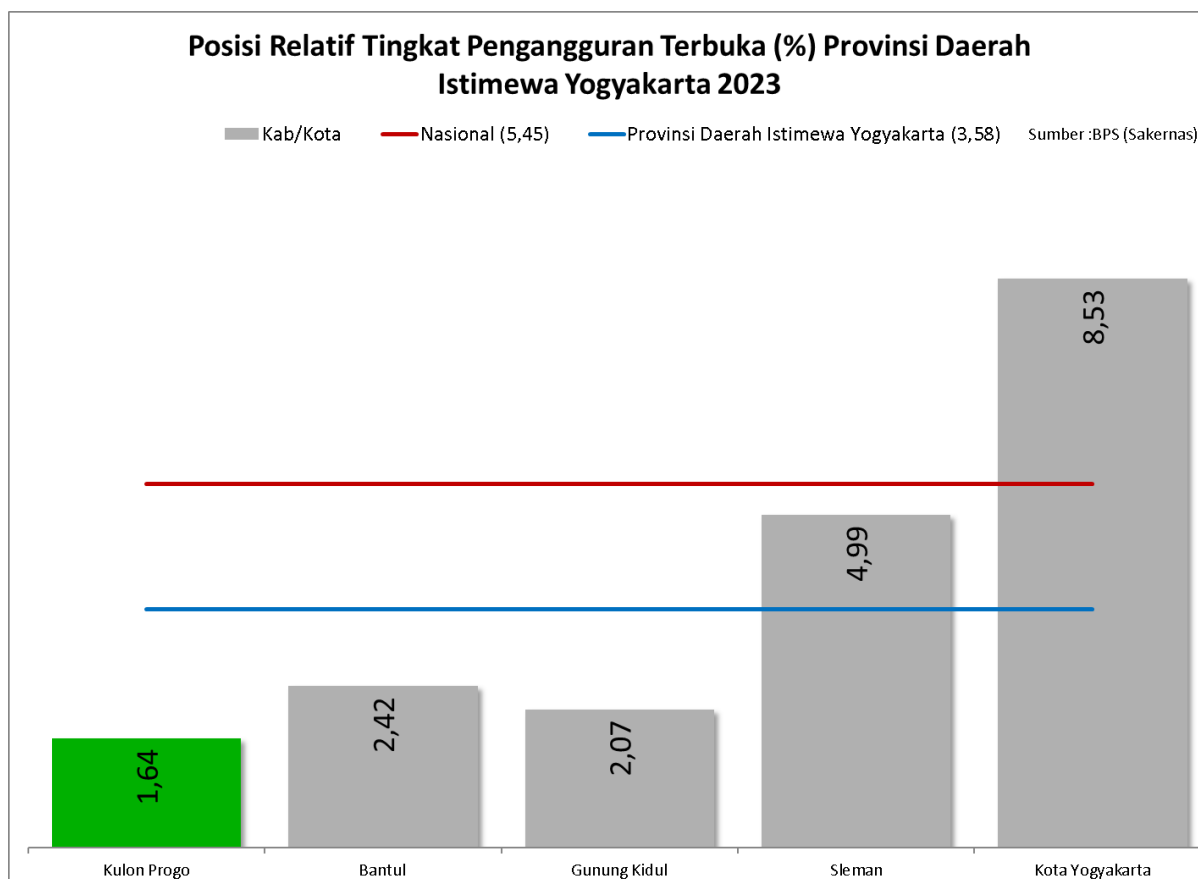
3.5.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan, atau sedang mencari pekerjaan. Seseorang dapat dikategorikan sebagai pengangguran terbuka jika: Tidak memiliki pekerjaan, Sedang mencari pekerjaan, Sedang mempersiapkan usaha, Belum mulai bekerja meskipun sudah memiliki pekerjaan.

Pengangguran terbuka bisa terjadi karena kurangnya kesempatan. Seseorang yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang baik bisa saja tidak dapat memanfaatkan kesempatan yang ada sehingga menjadi pengangguran. Semakin sedikit tingkat pengangguran terbuka berarti kondisi kemakmuran masyarakat akan meningkat.

3.5.2.1. Posisi Relatif

Grafik 3.69 Posisi Relatif TPT Provinsi DIY Tahun 2023

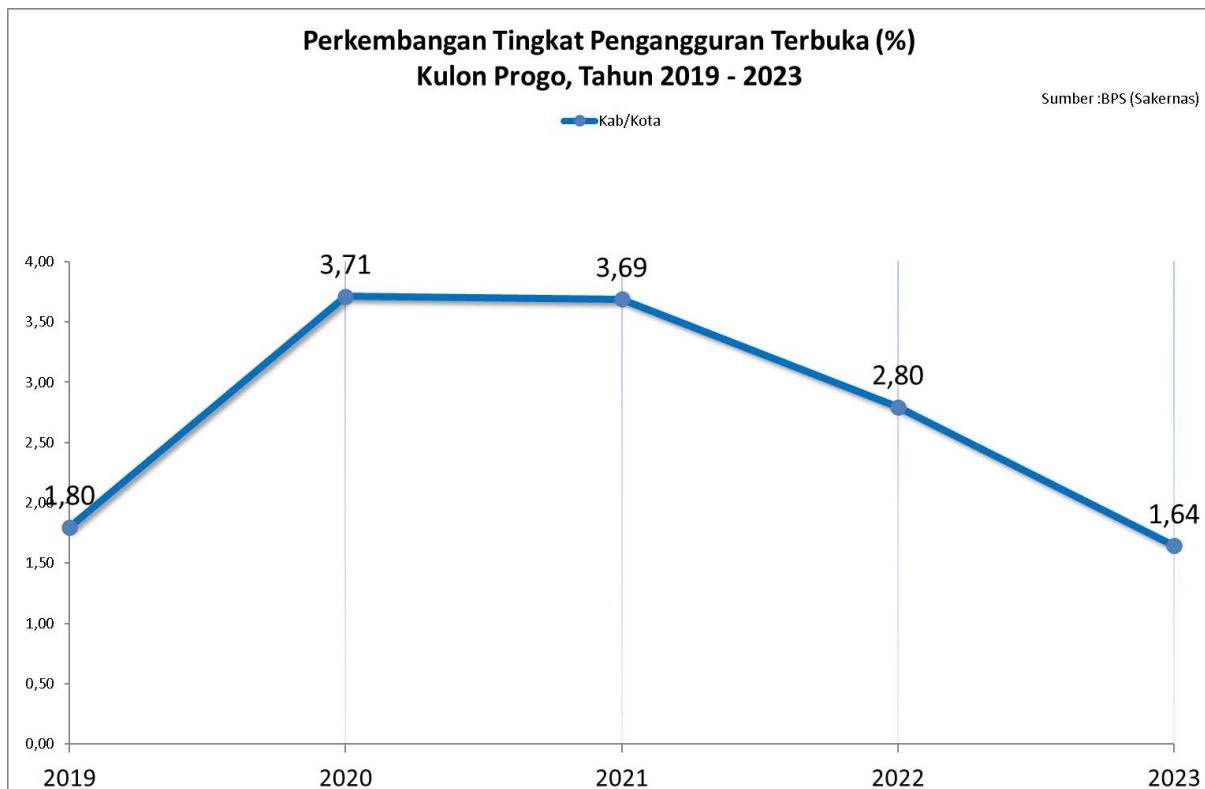


Sumber: Susenas, BPS.

Grafik diatas merupakan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2023. Berdasarkan data tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2023. Sementara di tingkat Kabupaten, **Kulon Progo memiliki TPT terendah (1,64%)**, diikuti Bantul (2,42%), Gunung Kidul (2,07%), Sleman (4,99%), dan Kota Yogyakarta (8,53%). Kulon Progo memiliki TPT yang jauh di bawah rata-rata nasional dan provinsi. Ini mengindikasikan bahwa pasar tenaga kerja di Kulon Progo relatif lebih ketat, dengan tingkat persaingan mendapatkan pekerjaan yang lebih tinggi.

3.5.2.2. Perkembangan Antar Waktu

Grafik 3.70 Perkembangan Antar Waktu TPT Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

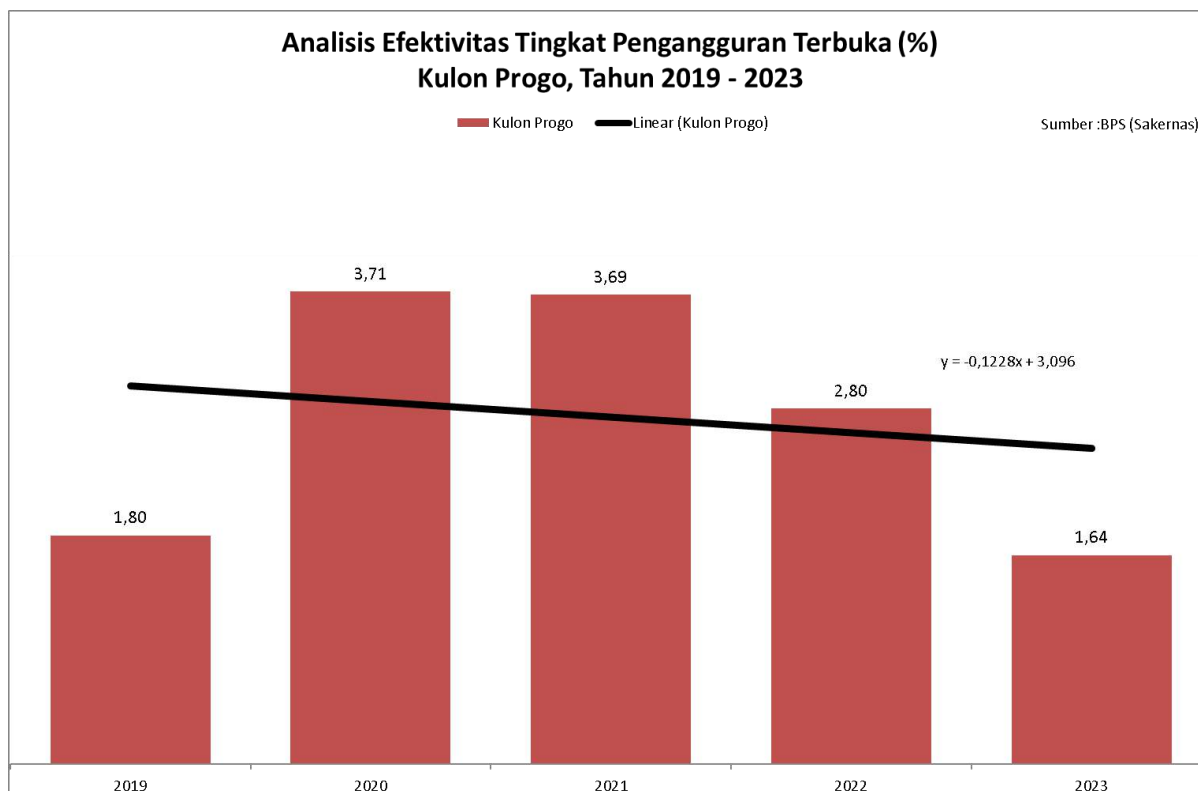


Sumber: Susenas, BPS.

Grafik diatas merupakan data perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kulon Progo tahun 2019-2023. Grafik tersebut menunjukkan adanya **penurunan yang cukup signifikan pada tingkat pengangguran di Kulon Progo dari tahun 2019 hingga 2023**. Pada awal periode (2019-2021), TPT mengalami sedikit fluktuasi, namun setelah itu terjadi penurunan yang cukup stabil hingga mencapai titik terendah pada tahun 2023. Penurunan TPT yang signifikan setelah tahun 2020 mengindikasikan adanya perbaikan kondisi ekonomi di Kulon Progo.

3.5.2.3. Efektivitas

Grafik 3.71 Analisis Efektivitas TPT Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

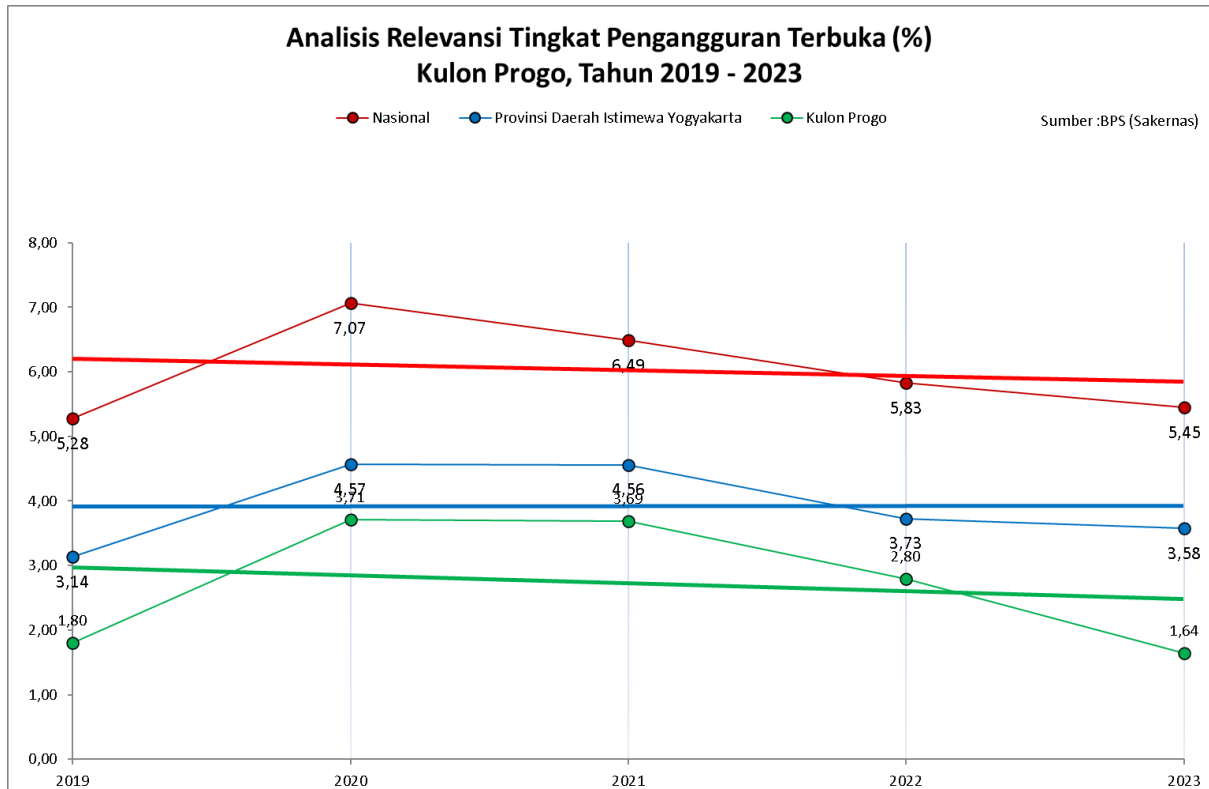


Sumber: Susenas, BPS.

Grafik di atas merupakan data analisis efektivitas Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kulon Progo tahun 2019-2023. Berdasarkan data tersebut, **TPT Kulon Progo mengalami penurunan yang cukup signifikan** pada tingkat pengangguran di Kulon Progo **dari tahun 2019 hingga 2023**. Garis tren yang ditampilkan menunjukkan penurunan yang relatif konsisten dari tahun ke tahun. Ini mengindikasikan adanya kecenderungan **penurunan tingkat pengangguran secara bertahap**. TPT mencapai puncaknya pada tahun 2020. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai sektor ekonomi. Setelah mencapai puncaknya, TPT mengalami penurunan yang cukup stabil hingga mencapai titik terendah pada tahun 2023. Ini menunjukkan adanya **perbaikan kondisi ekonomi di Kulon Progo**. Data tersebut sekaligus menunjukkan **program pemerintah yang bertujuan mengurangi pengangguran**, seperti pelatihan kerja dan penciptaan lapangan kerja, **telah efektif**.

3.5.2.4. Relevansi

Grafik 3.72 Analisis Relevansi TPT Kabupaten Kulon Progo dengan Provinsi DIY dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: Susenas, BPS.

Grafik diatas merupakan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kulon Progo dibandingkan dengan tingkat nasional dan Provinsi DIY selama periode 2019-2023. Selama periode tersebut, **TPT Kulon Progo selalu berada di bawah rata-rata nasional dan rata-rata Provinsi DIY**. Ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia kerja di Kulon Progo yang tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional maupun provinsi. Dibandingkan dengan nasional dan DIY, TPT Kulon Progo menunjukkan stabilitas yang lebih baik. Fluktuasi TPT di Kulon Progo tidak sebesar fluktuasi yang terjadi di tingkat nasional dan provinsi. Selain itu, Kulon Progo **mengalami penurunan TPT yang lebih cepat dibandingkan dengan nasional dan DIY**. Ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja lebih efektif. Secara keseluruhan, TPAK Kulon Progo dengan nasional dan provinsi **memiliki relevansi** yang proporsional.

Tabel 3.15. Masalah Bidang Ketenagakerjaan

No	Indikator Utama	Aspek yang dianalisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Lebih tinggi dari rata-rata nasional dan Provinsi. Berada di urutan kedua dengan TPAK tertinggi di DIY	Cenderung Meningkat	Efektif	Relevan dengan Provinsi dan Nasional
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Lebih rendah dari nasional, provinsi dan seluruh Kab/Kota di DIY.	Cenderung Menurun	Efektif	Relevan dengan Provinsi dan Nasional

3.6 Analisis Karakteristik Masalah Bidang Kesetaraan Gender

Gender adalah konsep yang merujuk pada perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan. Ini bukan hanya tentang perbedaan biologis, tetapi juga tentang peran, perilaku, sikap, dan harapan yang dikaitkan dengan masing-masing gender oleh masyarakat. Untuk memahami konsep gender, maka harus dibedakan antara kata gender dengan kata jenis kelamin. Jenis kelamin (*sex*) mengacu pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, seperti kromosom, organ reproduksi, dan hormon. Gender menurut Fakhri (2008: 8) yaitu suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural³. Istilah gender merujuk kepada perbedaan karakter laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya, yang berkaitan dengan sifat, status, posisi, dan perannya dalam masyarakat.

Ketidaksetaraan gender masih menjadi masalah yang kompleks. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai, namun masih banyak contoh nyata yang menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki tidak selalu memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama. Berikut ialah beberapa contoh ketidaksetaraan gender yang masih sering terjadi di masyarakat:

1. Akses pendidikan di beberapa daerah, perempuan masih terbatas aksesnya jika dibandingkan dengan laki-laki.

³ Analisis gender dan transformasi sosial, Mansour Fakhri. 2012

2. Dalam dunia pekerjaan, masih ditemukan adanya kesenjangan gaji antara perempuan dan laki-laki, bahkan ketika bekerja diposisi yang sama. Kemudian perempuan sering kali menghadapi diskriminasi dalam pekerjaan, terutama dibidang-bidang yang dianggap sebagai pekerjaan laki-laki.
3. Dalam lingkup rumah tangga dan keluarga, perempuan masih sering diberikan beban ganda, bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dan juga bertanggung jawab dengan pekerjaan rumah tangga serta pengasuhan anak. Kemudian perempuan rentan menerima kekerasan dalam rumah tangga.
4. Representasi perempuan masih kurang terwakili dalam posisi-posisi politik yang strategis. Serta perempuan masih mendapatkan diskriminasi politik.

Untuk mengetahui sejauh mana program prioritas pembangunan sudah responsif gender dan mendukung adanya pengarusutamaan gender dapat dilihat dari analisa terhadap indikator - indikator yang menunjukkan capaian pembangunan berbasis gender. Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) akan memberikan gambaran nyata tentang besar kecilnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

3.6.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), IPG merupakan indikator yang mengukur kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010.

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

IPG mengukur adanya dampak dari upaya peningkatan kemampuan dasar, dengan demikian komponen dasar perhitungannya ialah, angka harapan hidup waktu lahir, kemudian pencapaian pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekola, serta pengeluaran untuk konsumsi.

3.6.1.1. Posisi Relatif

Grafik 3.73 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi DI. Yogyakarta Tahun 2023



Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik

Skor IPG Kabupaten Kulon Progo melampaui Provinsi DIY dan Nasional di tahun 2023. Kabupaten Kulon Progo mencapai skor 95.21 poin, sedangkan Provinsi DIY 94.93 poin, dan nasional skornya berada dibawah Provinsi DIY yaitu 91,85 poin.

Jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota di Provinsi DIY, Kabupaten Kulon Progo menempati posisi keempat. Kota Yogyakarta berada di posisi pertama dengan skor IPG sebesar 98.47 poin. Setelahnya ada Kabupaten Sleman dengan skor IPG 96.40 poin. Disusul oleh Kabupaten Bantul tercatat memiliki skor 95.54 point. Adapun, kabupaten dengan skor terendah adalah Gunungkidul yaitu 85.93 poin.

Kabupaten Kulon Progo menunjukkan nilai IPG yang melampaui rata-rata Provinsi DIY dan nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo telah mencapai hal positif dalam kesetaraan gender. Hanya saja, di tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Kulon Progo skornya di bawah Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Dari data tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan ketiga kabupaten untuk mencapai kesetaraan gender telah berjalan baik.

3.6.1.2. Perkembangan Antar Waktu

Grafik 3.74 Perkembangan Antar Waktu Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 – 2023



Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik

Berdasarkan grafik perkembangan antar waktu, nilai **IPG Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren peningkatan**. Di tahun 2019 sampai 2021 terjadi peningkatan IPG, tetapi tidak terlalu signifikan, hanya di angka 0.2 di setiap tahunnya. Kemudian peningkatan signifikan terjadi di tahun 2022, mencapai nilai 95.54 poin, yang mana di tahun sebelumnya hanya 95.09 poin. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan kesetaraan gender.

Setelah terjadi peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2022, Kabupaten Kulon Progo mengalami sedikit penurunan nilai IPG di tahun 2023 dengan nilai 95.27 poin. Hal ini perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah untuk dapat mendorong peningkatan nilai IPG di tahun berikutnya.

3.6.1.3. Efektivitas

Grafik 3.75 Analisis Efektivitas Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 – 2023



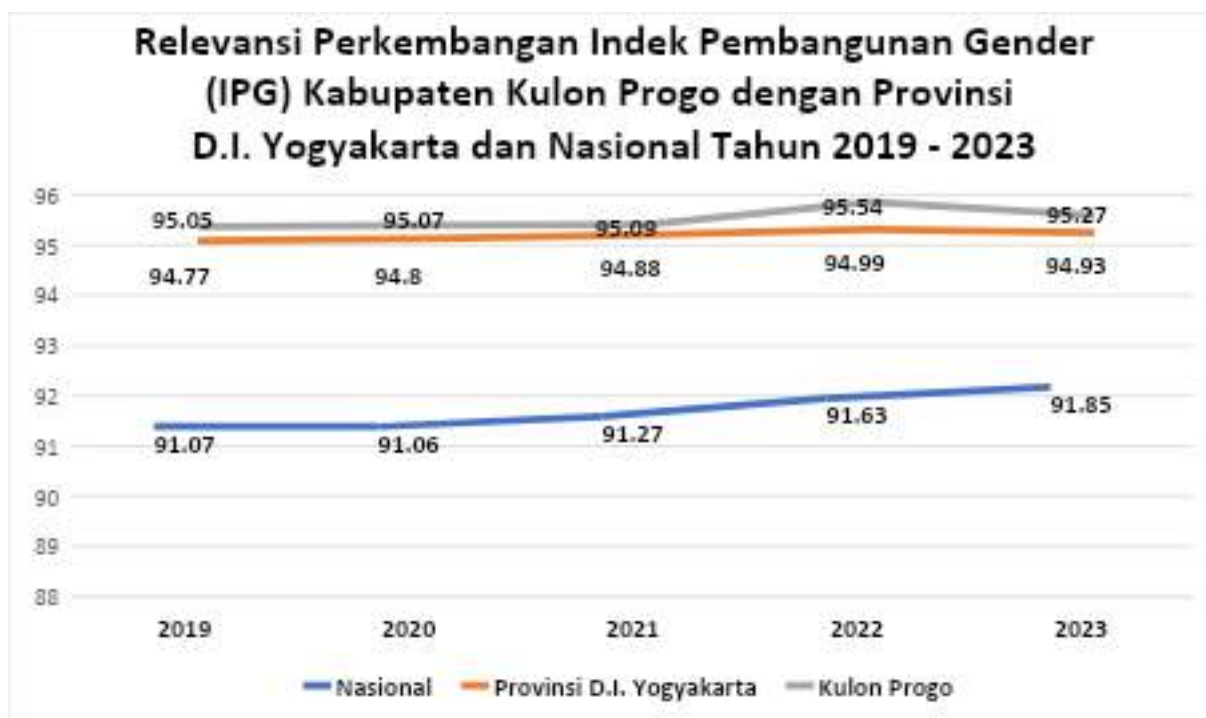
Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2019 hingga 2021, nilai IPG menunjukkan peningkatan yang stabil dari nilai 95.05 ke 95.09 poin. Kemudian di tahun 2022 adanya peningkatan nilai IPG yang sangat signifikan mencapai 95.54 poin. Namun, di tahun 2023 nilai IPG menurun menjadi 95.27 poin.

Peningkatan IPG dari tahun 2019 hingga 2021 yang cukup stabil, berarti upaya-upaya peningkatan kesetaraan gender yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah berjalan baik, tetapi belum memberikan hasil dengan perubahan yang signifikan. Terjadi peningkatan nilai IPG yang signifikan di tahun 2022, dapat diartikan kebijakan atau program yang diimplementasikan berjalan baik untuk pembangunan gender di tahun tersebut. Sedangkan terjadinya penurunan nilai IPG di tahun 2023 bisa disebabkan karena belum optimalnya implementasi kebijakan dan program pemerintah. Secara keseluruhan upaya **Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mengupayakan peningkatan nilai IPG selama periode lima tahun sudah berjalan efektif.**

3.6.1.4. Relevansi

Grafik 3.76 Relevansi Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kulon Progo dan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2019 – 2023



Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik

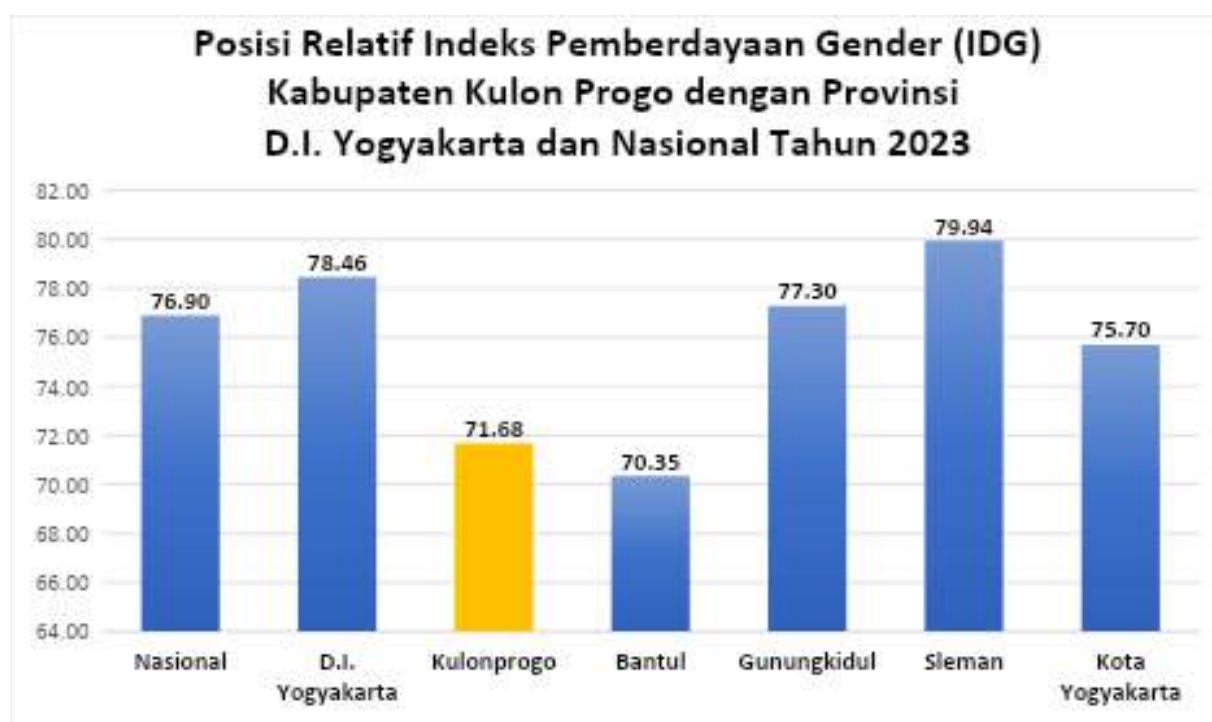
Berdasarkan data relevansi IPG yang disajikan di atas, **kurang relevan**. Kabupaten Kulon Progo nilai IPG lebih tinggi, jika disandingkan dengan rata-rata nilai Provinsi DIY dan nasional. Selama periode tahun 2019 – 2023 Kabupaten Kulon Progo secara konsisten memiliki nilai IPG yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi DIY dan nasional. Kemudian kenaikan nilai IPG Kabupaten Kulon Progo di tahun 2022 lebih signifikan menjadi 95.54 dari tahun sebelumnya angka 95.09. Sama dengan kabupaten Kulon Progo, rata-rata nilai nasional ditahun 2022 meningkat signifikan menjadi 91.63 dari sebelumnya 91.27 ditahun 2021. Sedangkan di Provinsi DIY ditahun 2022 naik tidak terlalu signifikan dengan nilai 94.99 naik 0.11 dari tahun sebelumnya 94.88. Pada tahun 2023 terjadi penurunan nilai IPG di Kabupaten Kulon Progo dan Provinsi DIY. Di Kabupaten Kulon Progo penurunan IPG cukup signifikan dari 94.57 menjadi 94.27, sedangkan di Provinsi DIY penurunan tidak signifikan dari 94.99 menjadi 94.93. Penurunan IPG di Kabupaten Kulon Progo dan Provinsi DIY tidak memberikan dampak pada nilai IPG nasional. Rata-rata nasional ditahun 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya 91.63 menjadi 91.85.

3.6.2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi dan politik serta partisipasi dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan. Semakin tinggi angka IDG, maka semakin tinggi tingkat pemberdayaan dan kesetaraan gender di wilayah tersebut.

3.6.2.1. Posisi Relatif

Grafik 3.77 Relatif Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota di DIY
Tahun 2023



Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik

Grafik diatas menyajikan data perbandingan nilai IDG di kabupaten/kota DIY, Provinsi DIY, dan nasional ditahun 2023. Semakin tinggi batang grafik, maka semakin tinggi pula nilai IDG-nya, yang berarti semakin baik tingkat pemberdayaan gender di wilayah tersebut.

Kabupaten Kulon Progo memiliki nilai IDG sebesar 71.68 poin, yang posisinya berada **di bawah rata-rata nasional dan Provinsi DIY**, yang berarti pemerdayaan gender masih perlu ditingkatkan jika dibandingkan dengan wilayah lain. Angka IDG nasional adalah 76.90 poin dan Provinsi DIY mencapai 78.46 poin, yang miliki nilai rata-rata lebih tinggi dari nasional. Kabupaten Bantul memiliki nilai IDG sebesar 70.35 poin, yang merupakan nilai terendah di antara IDG kabupaten/kota di Provinsi DIY. Kemudian Kabupaten Gunungkidul memiliki nilai IDG 77.30 poin, nilai tersebut lebih tinggi dari rata-rata nasional namun lebih rendah dari

rata-rata provinsi. Kota Yogyakarta memiliki IDG dengan nilai sebesar 75.70 poin, lebih rendah dari rata-rata provinsi tetapi masih mendekati nilai rata-rata nasional. Selanjutnya di Kabupaten Sleman, memiliki nilai IDG tertinggi sebesar 97.94 poin, menunjukkan pemberdayaan gender yang sangat baik di wilayah ini jika dibandingkan dengan daerah lain di provinsi dan tingkat nasional.

Berdasarkan grafik tersebut, dapat diartikan bahwa Kabupaten Sleman memiliki performa terbaik dalam hal pemberdayaan gender di Provinsi DIY, sementara Kabupaten Bantul memiliki performa yang paling rendah. Kulonprogo juga menunjukkan performa yang perlu ditingkatkan meskipun tidak serendah Kabupaten Bantul. Kota Yogyakarta dan Gunungkidul berada di posisi menengah dengan Gunungkidul memiliki nilai IDG sedikit lebih unggul.

3.6.2.2. Perkembangan Antar Waktu

Grafik 3.78 Perkembangan Antar Waktu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 – 2023



Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik

Grafik di atas menunjukkan perkembangan antar waktu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2019 hingga 2023, yang menunjukkan tren **cenderung meningkat**. Pada tahun 2019, IDG di Kabupaten Kulon Progo memiliki nilai 71.58 poin. Di tahun 2020, nilai IDG sedikit menurun menjadi 71.45 poin. Kemudian pada tahun 2021, nilai IDG kembali mengalami penurunan menjadi 71.41 poin. Sedangkan di tahun 2022, IDG mengalami peningkatan yang sangat signifikan menjadi 72.27 poin, yang merupakan nilai tertinggi selama periode lima tahun. Sayangnya, pada tahun 2023 IDG kembali menurun

dengan nilai 71.68 poin, meskipun nilai tersebut sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020. Diperlukannya program dan kebijakan yang keberlanjutan, sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan IDG Kabupaten Kulon Progo, agar dapat mempertahankan nilai tinggi secara konsisten.

3.6.2.3. Efektivitas

Grafik: 3.79 Analisis Efektivitas Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 – 2023

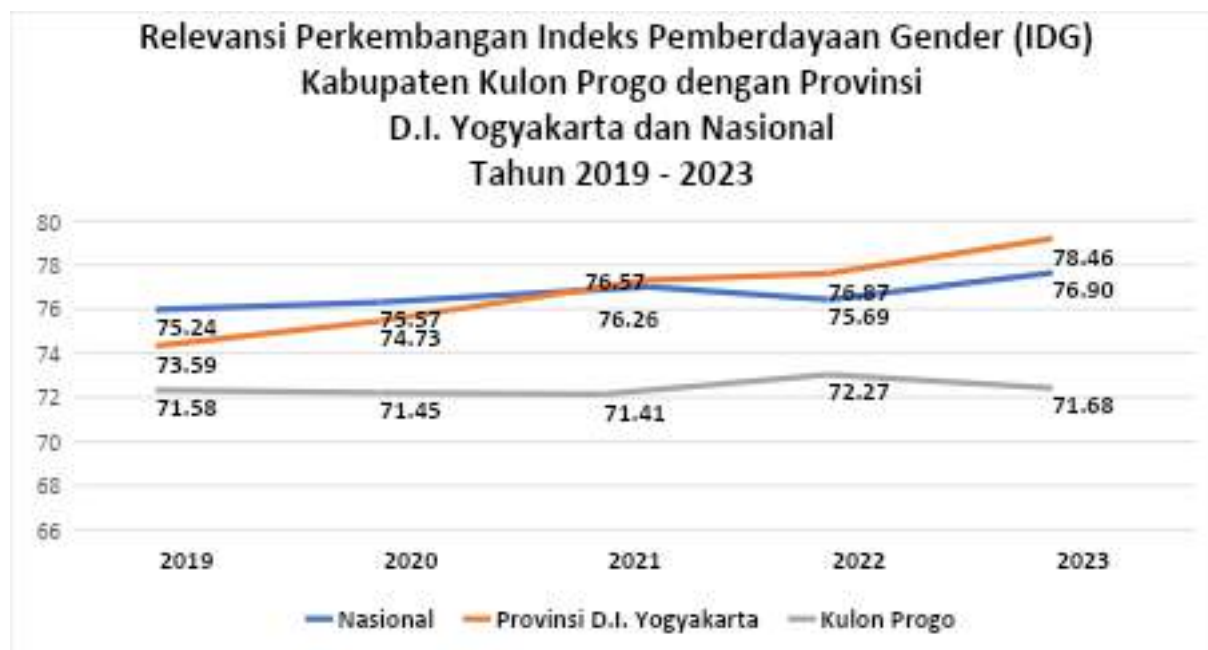


Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik

Grafik batang garis ini menampilkan perkembangan nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) di Kabupaten Kulon Progo selama periode 5 tahun, yaitu dari tahun 2019 hingga 2023. Secara umum, nilai IDG Kabupaten Kulon Progo cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hasil menunjukkan program dan kebijakan pemerintah sudah berjalan **cukup efektif**, untuk perbaikan dalam upaya mencapai kesetaraan gender. Adanya peningkatan nilai IDG yang signifikan terjadi pada tahun 2022, dari tahun sebelumnya 71.41 menjadi 72.27 poin. Hal tersebut menandakan adanya upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan kesetaraan gender pada tahun tersebut.

3.6.2.4. Relevansi

Grafik 3.80 Relevansi Indeks Pemberdayaan Gender (IDP) di Kabupaten Kulon Progo dengan Provinsi D.I. Yogyakarta dan Nasional Tahun 2019 – 2023



Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik

Grafik di atas menyajikan perbandingan data perkembangan nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di tiga wilayah, yaitu Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY, dan tingkat nasional selama periode 5 tahun, dari 2019 hingga 2023. Secara umum, baik di tingkat nasional, Provinsi DIY, maupun Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren peningkatan nilai IPG.

Adanya perbedaan nilai IDG antar ketiga wilayah. Secara konsisten di tingkat nasional dan Provinsi DIY memiliki nilai IPG yang lebih tinggi daripada Kabupaten Kulon Progo. Kemudian adanya fluktuasi nilai di ketiga wilayah dari tahun-tahun. Pada tahun 2021, di tingkat nasional dan Provinsi DIY menunjukkan adanya peningkatan nilai IDG, dari tahun sebelumnya di tingkat nasional hanya 75.57 menjadi 76.57 poin dan di provinsi DIY sebelumnya hanya 74.73 menjadi 76.26 poin. Berbanding terbalik dengan Kabupaten Kulon Progo yang mengalami penurunan IDG, dari semula 71.45 menjadi 71.41 poin. Kemudian ditahun 2022, Kabupaten Kulon Progo menunjukkan ada peningkatan nilai IDG menjadi 72.27, sedangkan di tingkat nasional dan Provinsi DIY terjadi penurunan nilai IDG. Situasi yang sama dengan tahun 2021 kembali terjadi di tahun 2023, saat di tingkat nasional dan Provinsi DIY adanya peningkatan IDG yang signifikan, sedangkan di Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan IDG. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesetaraan gender di indikator IDG Kabupaten Kulon Progo **tidak relevan** dan perlu ditingkatkan.

3.6.3. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi, yaitu: Kesehatan reproduksi, Pemberdayaan gender, Pasar tenaga kerja. Dengan kata lain, IKG memberikan gambaran tentang seberapa jauh potensi pembangunan manusia yang hilang akibat adanya ketimpangan gender.

IKG merupakan salah satu indikator pembangunan yang menunjukkan capaian pembangunan manusia yang kurang optimal. IKG memiliki besaran antara 0 - 1, dimana semakin besar nilai indeksnya berarti ketimpangan gender di suatu wilayah semakin besar.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdiri dari tiga komponen utama yang mencerminkan berbagai aspek kehidupan perempuan, diantaranya:

1. Komponen kesehatan reproduksi, untuk mengukur akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan, termasuk:
 - a. Angka kematian ibu
 - b. Angka kematian bayi
 - c. Akses terhadap kontrasepsi modern
 - d. Persalinan ditolong tenaga kesehatan
2. Komponen pemberdayaan, digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan representasi perempuan dalam berbagai bidang, seperti politik dan ekonomi. Indikator yang sering digunakan antara lain:
 - a. Tingkat melek huruf perempuan
 - b. Tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja
 - c. Persentase perempuan yang duduk di lembaga legislatif
3. Komponen pasar tenaga kerja, ini mengukur kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja, yaitu:
 - a. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan
 - b. Upah perempuan dibandingkan dengan upah laki-laki
 - c. Jenis pekerjaan yang didominasi perempuan

Pemerintah dapat menggunakan IKG untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah dilakukan dalam upaya mencapai kesetaraan gender. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gender dan meningkatkan kualitas hidup seluruh warga di Kabupaten Kulon Progo.

3.6.3.1. Posisi Relatif

Grafik 3.81 Posisi Relatif Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2023



Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik

Data grafik di atas menunjukkan data perbandingan nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di beberapa wilayah pada tahun 2023, yaitu tingkat nasional, Provinsi D.I. Yogyakarta secara keseluruhan, dan masing-masing kabupaten/kota di Yogyakarta. Semakin tinggi nilai IKG, maka semakin besar ketimpangan gender di wilayah tersebut.

Kabupaten Kulon Progo memiliki nilai IKG lebih rendah diantara Provinsi DIY dan nasional. Di tingkat nasional nilai IKG yang paling tinggi, yaitu mencapai 0.477. Data tersebut menunjukkan bahwa ditingkat nasional masih terdapat ketimpangan gender yang cukup signifikan tinggi. Sedangkan di Kabupaten Kulon Progo nilai IKG di angka 0.129, ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender relative lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi DIY, Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta. Kabupaten Sleman memiliki nilai IKG sedikit lebih rendah dari Kulon Progo, yaitu 0.116. Sedangkan nilai IKG di Kabupaten Bantul 0.15, Gunungkidul 0.183, dan Kota Yogyakarta 0.151 bahkan melampaui nilai IKG Provinsi DIY. Ini berarti ketimpangan gender di ketiga wilayah tersebut cenderung lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Kulon Progo.

3.6.3.2. Perkembangan Antar Waktu

Grafik 3.82 Perkembangan Antar Waktu Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 – 2023



Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik

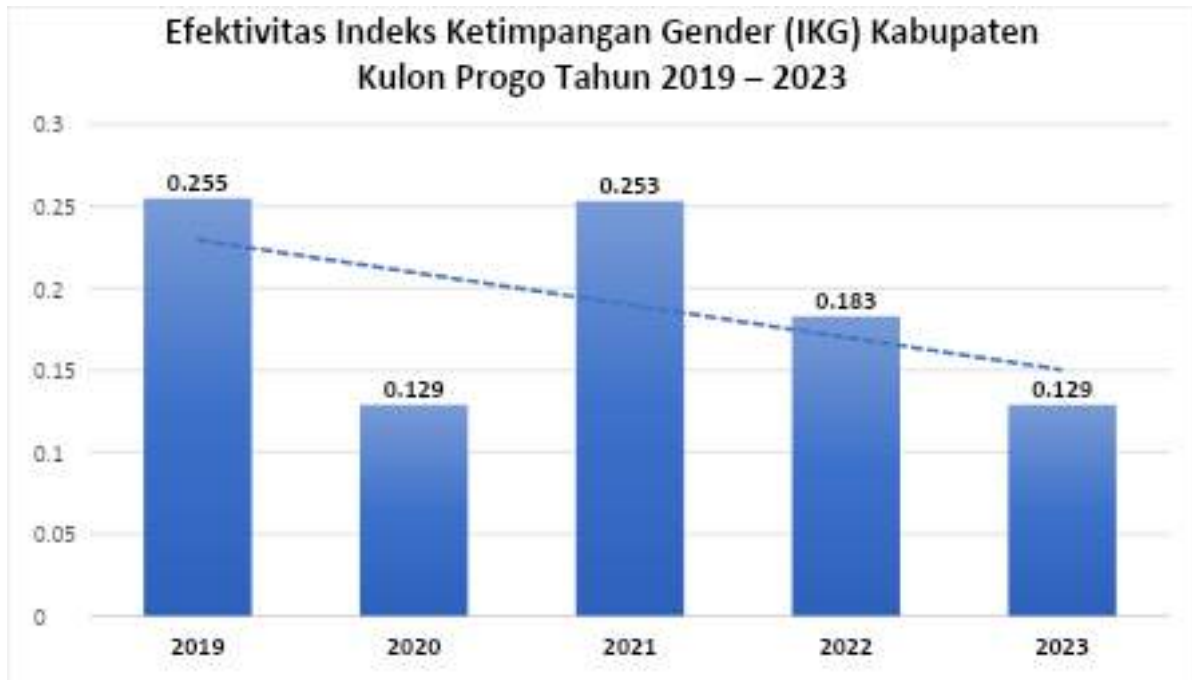
Data pada grafik diatas meenyajikan informasi perubahan nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Kulon Progo selama periode 5 tahun, yaitu dari tahun 2019 hingga 2023. Garis putus-putus pada grafik menunjukkan tren umum perubahan nilai IKG selama periode tersebut.

Nilai IKG di Kabupaten Kulon Progo mengalami fluktuasi selama periode 2019-2023. Di tahun 2019 nilai IKG sebesar 0.255. Kemudian terjadi penurunan yang cukup signifikan pada nilai IKG di tahun 2020 menjadi 0.129 dibandingkan dengan tahun 2019. Namun, ditahun 2021 terjadi kenaikan signifikan nilai IKG menjasi 0.253. Kemudian didua tahun berikutnya menunjukkan penurunan IKG secara bertahap, yaitu tahun 2022 menjadi 0.183 dan ditahun 2023 dengan nilai 0.129.

Meskipun terdapat fluktuasi selamaperiode lima tahun, tren secara umum yang terlihat di Kabupaten Kulon Progo adalah **penurunan nilai IKG**. Ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam mengurangi ketimpangan gender di Kabupaten Kulon Progo selama periode tersebut.

3.6.3.3. Efektivitas

Grafik 3.83 Analisis Efektivitas Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 – 2023



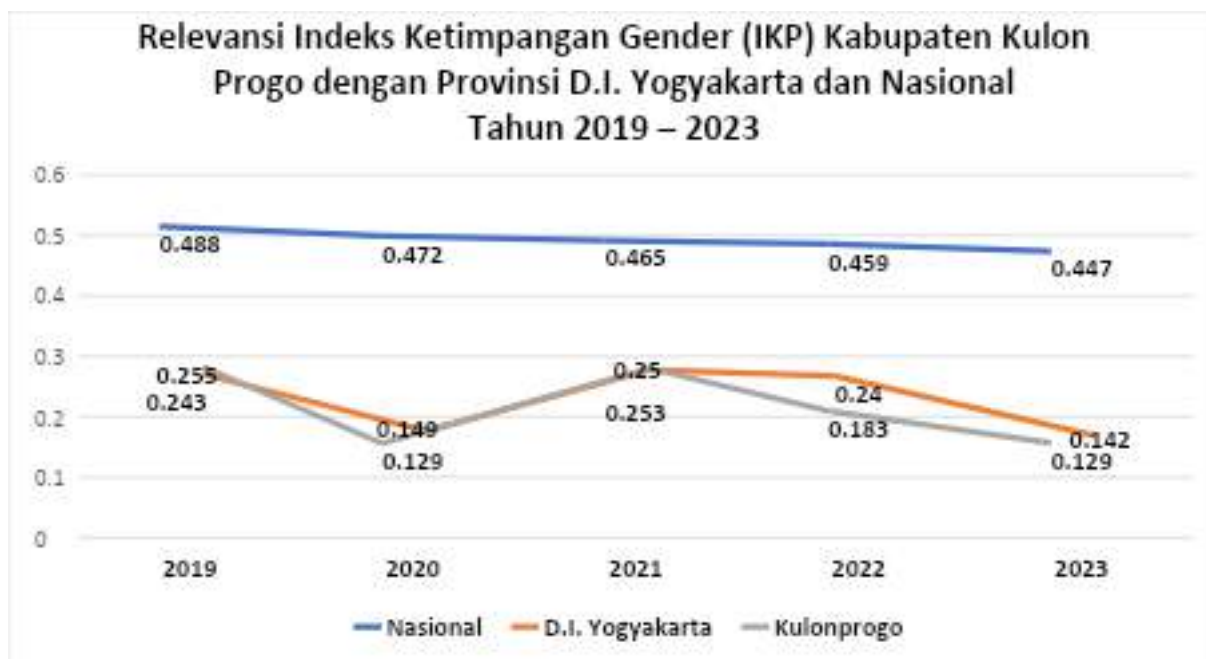
Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik

Berdasarkan grafik Efektivitas Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan bahwa, di tahun 2019 nilai IKG cukup tinggi yaitu 0.255. Mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 menjadi 0.129. Pada tahun berikutnya, kembali naik menjadi 0.253. Sedangkan di tahun 2022, terjadi penurunan IKG menjadi 0.183. Kemudian di tahun 2023, nilai IKG kembali turun menjadi 0.129.

Data tersebut menyajikan informasi bahwa ada variasi dalam efektivitas penanganan ketimpangan gender di Kabupaten Kulon Progo dalam waktu lima tahun terakhir. Meskipun ada peningkatan di tahun 2021, secara keseluruhan tren menunjukkan penurunan nilai IKG. Hal ini berarti bahwa dalam upaya mengurangi ketimpangan gender, hanya saja hasilnya belum konsisten, dikarenakan ada andil dari program dan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang berjalan **cukup efektif**.

3.6.3.4. Relevansi

Grafik 3.84 Relevansi Indeks Ketimpangan Gender (IKP) Kabupaten Kulon Progo dan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2019 – 2023



Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data grafik di atas, secara umum di tingkat nasional ada tren penurunan sedikit angka IKG, namun konsisten dari tahun 2019 hingga 2023. Sedangkan di Provinsi DIY, angka IKG menurun secara signifikan di tahun 2020 menjadi 0.149, naik kembali di tahun 2021 menjadi 0.25, kemudian turun kembali di tahun 2022 menjadi 0.24 dan tahun 2023 turun signifikan menjadi 0.142. Di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan terjadinya fluktuasi yang cukup signifikan dengan penurunan IKG terbesar di tahun 2020 menjadi 0.129 dari semula 0.255. Kemudian naik di tahun 2021 menjadi 0.253, dan penurunan kembali pada tahun 2022 menjadi 0.183 dan 0.129 di tahun 2023.

Nilai IKP di tingkat nasional menunjukkan tren penurunan yang stabil, mengindikasikan bahwa ketimpangan gender secara nasional mengalami perbaikan secara perlahan. Meskipun ada fluktuasi, tren keseluruhan menunjukkan penurunan nilai IKP, yang mengindikasikan perbaikan dalam ketimpangan gender di tingkat Provinsi DIY. Sama dengan Provinsi DIY yang mengalami fluktuasi, Tetapi Kabupaten Kulon Progo memiliki nilai IKG yang lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat nasional dan Provinsi DIY. Ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mengatasi ketimpangan gender sudah **cukup relevan**, hanya saja masih memerlukan perhatian lebih, agar hasil IKG dapat konsisten disetiap tahunnya.

Tabel 3.16. Masalah Bidang Kesetaraan Gender

No	Indikator Utama	Aspek yang dianalisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Di atas rata-rata Nasional dan Provinsi DIY	Meningkat	Efektif	Kurang Relevan
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Di bawah rata-rata nasional dan Provinsi DIY	Cenderung Meningkat	Cukup Efektif	Tidak Relevan
3.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Lebih Rendah dari Provinsi DIY dan Nasional	Menurun	Cukup Efektif	Cukup Relevan

3.7. Analisis Karakteristik Masalah Kesejahteraan Sosial

3.7.1. Jumlah Penduduk Disabilitas

Jumlah penyandang disabilitas di suatu daerah dapat menjadi indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, namun tidak secara langsung menentukan kesejahteraan. Kesejahteraan suatu daerah ditentukan oleh banyak faktor termasuk ekonomi, pendidikan, akses kesehatan, inklusivitas dan partisipasi sosial. Semakin sedikit jumlah penduduk disabilitas suatu daerah artinya semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

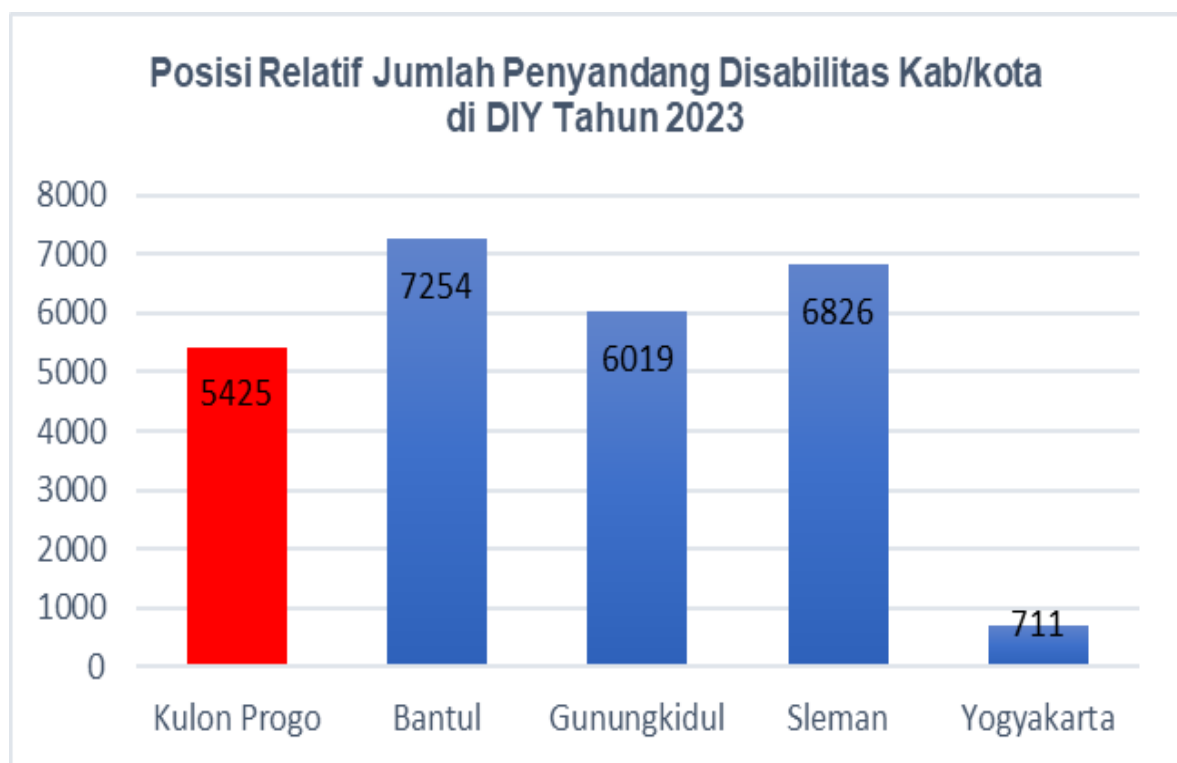
Disabilitas adalah kondisi seseorang yang mengalami keterbatasan atau ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas-aktivitas tertentu yang umumnya bisa dilakukan orang lain, baik secara fisik, mental, intelektual, sensorik, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Disabilitas dapat mempengaruhi interaksi seseorang dengan lingkungannya, kemampuan berkomunikasi, bergerak, belajar, bekerja atau berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Menurut definisi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), disabilitas adalah istilah umum yang mencakup kerusakan fungsi tubuh, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Disabilitas bukan hanya kondisi kesehatan seseorang, tetapi juga interaksi antara orang tersebut dengan hambatan fisik atau lingkungan yang dapat memperburuk kondisi mereka.

Disabilitas bukanlah penyakit, tetapi lebih merupakan kondisi yang perlu diatasi dengan dukungan yang tepat dari masyarakat dan lingkungan agar individu tersebut dapat berfungsi secara maksimal. Beberapa ragam jenis disabilitas yaitu;

1. Disabilitas fisik: Ketidakmampuan dalam aspek-aspek fisik seperti kelumpuhan, amputasi atau keterbatasan mobilitas
2. Disabilitas sensorik: Gangguan pada indra, seperti penglihatan dan pendengaran
3. Disabilitas intelektual: Ketidakmampuan dalam fungsi intelektual dan adaptif, seperti gangguan perkembangan intelektual
4. Disabilitas mental: Gangguan kesehatan mental yang menghambat aktivitas sehari-hari atau partisipasi sosial.

3.7.1.1. Posisi relatif

Grafik 3.85 Posisi Relatif Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2023



Sumber: Dinas Sosial DIY (diolah)

Berdasarkan grafik posisi relatif jumlah penyandang disabilitas di kabupaten/kota di se DIY menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo berada pada posisi **kedua terendah** dari kabupaten/kota lainnya dengan jumlah disabilitas sebanyak 5.425 orang setelah Kota Yogyakarta yang menempati posisi pertama jumlah disabilitas paling sedikit yaitu 711 orang. Urutan ketiga, Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah disabilitas sebanyak 6.019 orang,

keempat, Kabupaten Sleman Bantul 6.826 orang dan kelima Kabupaten Bantul sebanyak 7.254 orang. Meskipun menempati posisi kedua, namun jumlah disabilitas masih cukup banyak. Dengan begitu pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus lebih memperhatikan dan memprioritaskan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan

3.7.1.2 Perkembangan antar waktu

Grafik 3.86 Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo (diolah)

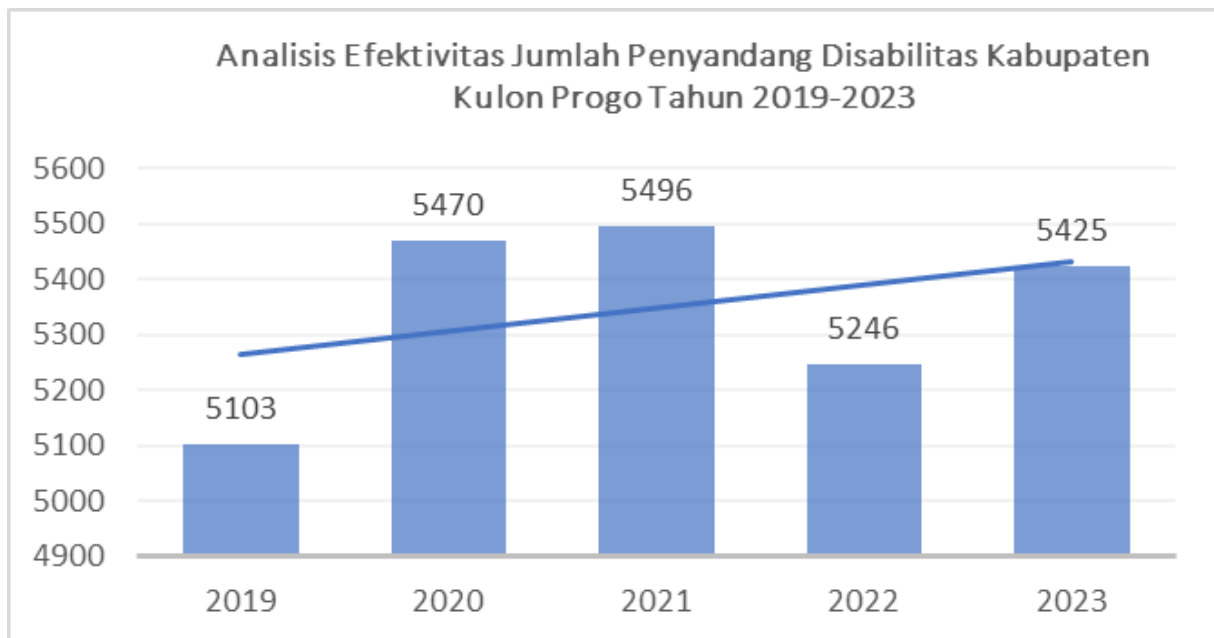
Perkembangan antar waktu jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Kulon Progo pada periode 2019-2023 menunjukkan **tren yang meningkat**. Dalam kurun lima tahun jumlah penyandang disabilitas paling sedikit pada tahun 2019 yang berjumlah 5.103 orang, kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 5.470 orang dan tahun 2021 meningkat Kembali menjadi 5.496 orang. Pada tahun 2022 mengalami penurunan jumlah disabilitas menjadi 5.246 orang dan Kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 5.425 orang.

Menurut data dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, penyandang disabilitas di Kulon Progo didominasi oleh penyandang disabilitas mental yang mencapai 2.999 orang (data sementara) pada tahun 2023, dan

jumlah terbanyak kedua adalah penyandang disabilitas tuna daksa sebanyak 1.912 orang. Penyandang disabilitas mental ini juga mendominasi penyandang disabilitas di tingkat DIY yang berjumlah 6.278 orang di tahun 2023. Disabilitas mental merujuk pada kondisi kesehatan yang mempengaruhi fungsi kognitif seseorang seperti gangguan perkembangan intelektual, gangguan kesehatan mental, gangguan perilaku, atau gangguan lainnya.

3.7.1.3 Efektivitas

Grafik 3.87 Analisis Efektivitas Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

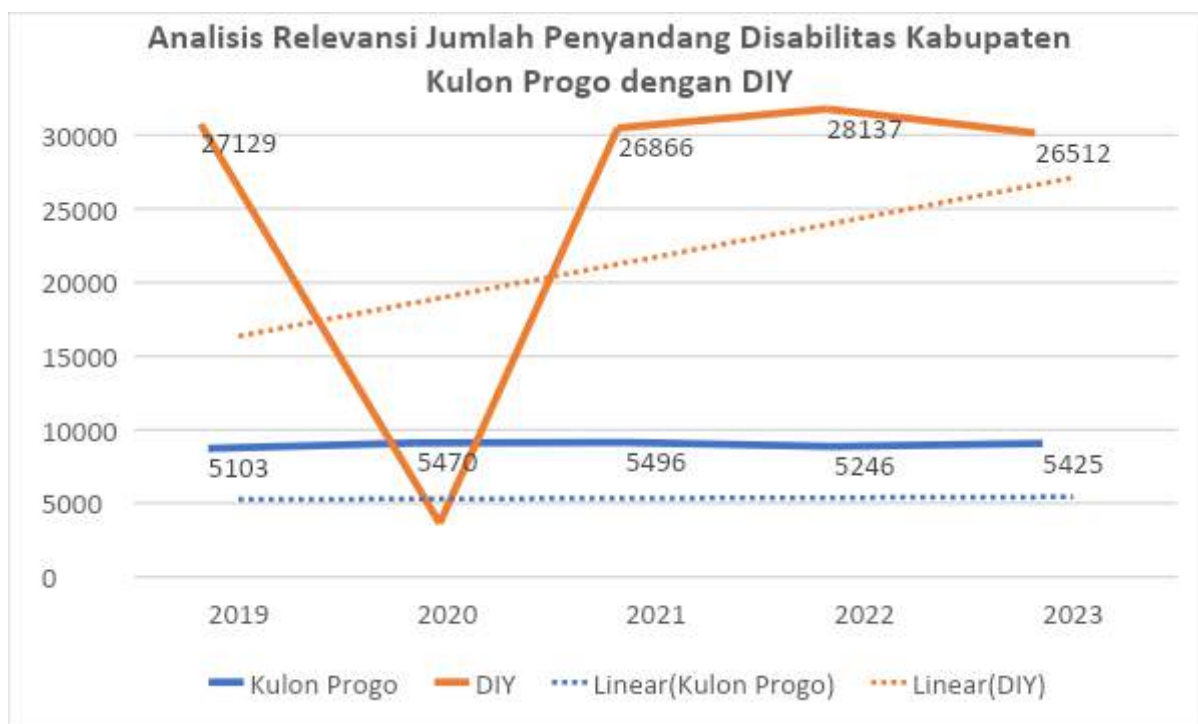


Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo (diolah)

Dari analisis efektivitas jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2019-2023 menunjukkan **kecenderungan tren yang meningkat**. Data tersebut mengindikasikan program-program pencegahan maupun penanganan disabilitas di Kabupaten Kulon Progo **kurang efektif**. Kondisi tersebut harus mendapatkan perhatian dan upaya-upaya khusus untuk pencegahan dan penanganan kasus penyandang disabilitas. Banyaknya ragam disabilitas memerlukan upaya pencegahan dan penanganan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan jenis atau ragam disabilitasnya. Selain ragam disabilitasnya data usia, jenis kelamin dan latar belakang kondisi ekonomi sosial keluarga penyandang disabilitas untuk menentukan intervensi program yang sesuai. Intervensi program bagi penyandang disabilitas juga harus melibatkan banyak pihak antara lain keluarga penyintas, lingkungan masyarakat sekitar dan berbagai pihak lainnya.

3.7.1.4 Relevansi perkembangan

Grafik 3.88 Analisis Relevansi Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten Kulon Progo dengan DIY Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Sosial DIY (diolah).

Tren meningkatnya jumlah penyandang disabilitas Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2019-2023 **relevan** dengan jumlah penyandang disabilitas di DIY. Artinya jumlah kenaikan penyandang disabilitas di Kabupaten Kulon Progo mempengaruhi jumlah naiknya penyandang disabilitas di Tingkat DIY. Dengan kondisi demikian pemerintah kabupaten dan DIY perlu mensinergikan intervensi program-program pencegahan dan penanganan masalah disabilitas di Tingkat kabupaten dan provinsi.

3.7.2. Jumlah penduduk lanjut usia terlantar

Penduduk lanjut usia adalah mereka yang berusia di atas 60 tahun. Penduduk lanjut usia terlantar adalah kelompok lansia yang tidak memiliki kemampuan atau dukungan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti tempat tinggal, makanan, perawatan kesehatan, dan perhatian sosial. Mereka biasanya tidak memiliki dukungan keluarga, mengalami isolasi sosial atau tidak memiliki akses yang cukup terhadap bantuan sosial dan layanan Kesehatan. Berdasarkan UU No 12 Tahun 1998, diperlukan adanya wadah bagi penduduk lansia untuk meningkatkan dan menjaga kesejahteraan sosial.

Jumlah penduduk lanjut usia terlantar dapat menjadi salah satu faktor penting untuk menilai sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Semakin sedikit jumlah penduduk lansia terlantar maka semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah, sebaliknya semakin banyak jumlah penduduk lansia terlantar maka mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat daerah kurang baik.

3.7.2.1 Posisi relatif

Grafik 3.89 Posisi Relatif Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2023



Sumber: Dinas Sosial DIY (diolah)

Posisi relatif jumlah penduduk lanjut usia terlantar Kabupaten Kulon Progo berada pada **urutan ketiga** dari 5 kab/kota se DIY pada tahun 2023. Jumlah penduduk lanjut usia terlantar paling sedikit di Kota Yogyakarta yang berjumlah 80 orang, selanjutnya Gunungkidul dengan jumlah lansia terlantar sebanyak 1.760 orang, Kulon progo 3.297 orang, Bantul 4.614 orang dan terbanyak ada di Kabupaten Sleman dengan jumlah sebanyak 7.345 orang.

3.7.2.2 Perkembangan antar waktu

Grafik 3.90 Analisis Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo (diolah)

Grafik perkembangan antar waktu selama 2019-2023 menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia terlantar di Kabupaten Kulon Progo **cenderung menurun**. Pada tahun 2019-2020 jumlah penduduk lansia terlantar sebanyak 5.205 orang, tahun 2021 berkurang menjadi 4.460 orang, tahun 2022 berkurang Kembali menjadi 3.308 orang dan tahun 2023 kembali berkurang menjadi 3.297 orang.

3.7.2.3 Efektivitas

Grafik 3.91 Analisis Efektivitas Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

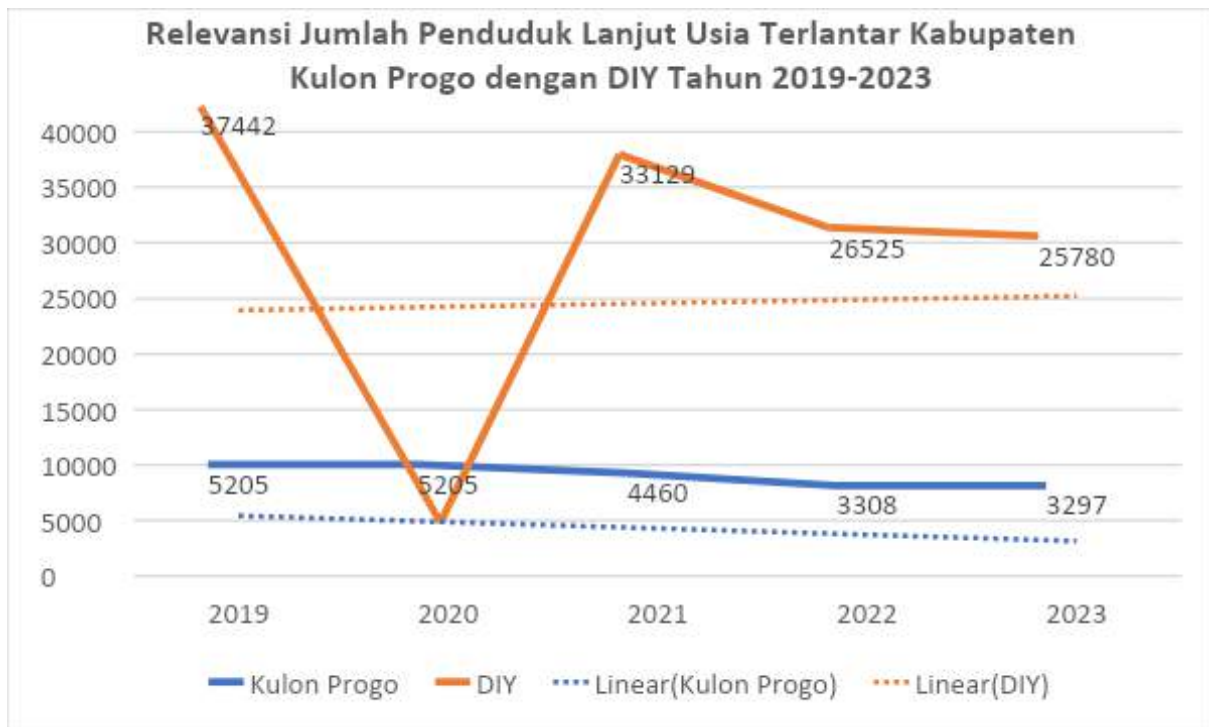


Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo (diolah)

Grafik analisis efektivitas jumlah penduduk lanjut usia terlantar Kabupaten Kulon Progo cenderung menurun dalam waktu 2019-2023. Kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa intervensi program pemerintah dalam melakukan penanganan lansia terlantar **cukup efektif**. Artinya, Tingkat kesejahteraan penduduk lansia di Kulon Progo semakin baik. Intervensi program yang dianggap cukup berhasil harus lebih ditingkatkan agar jumlah penduduk lansia terlantar semakin berkurang secara signifikan dari tahun ke tahun.

3.7.2.4 Relevansi perkembangan

Grafik 3.92 Analisis Relevansi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Kabupaten Kulon Progo dengan DIY Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo (diolah)

Tren jumlah penduduk lanjut usia terlantar Kabupaten Kulon Progo **relevan** dengan tren jumlah penduduk lanjut usia terlantar di DIY pada tahun 2019-2023. Hanya pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa tidak ada data jumlah penduduk lansia di Tingkat DIY, sehingga relevansi dapat disesuaikan pada tahun 2019, 2021, 2022, dan 2023.

3.7.3. Jumlah Perempuan rawan sosial ekonomi

Perempuan rawan sosial ekonomi adalah individu atau kelompok perempuan yang berada dalam kondisi rentan terhadap kemiskinan, ketidakadilan, diskriminasi dan terbatasnya akses terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi. Kondisi tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain diskriminasi gender di tempat kerja, tingkat pendidikan, beban ganda (domestik dan ekonomi), kemiskinan struktural dan ketimpangan sosial, kekerasan berbasis gender dan lain sebagainya.

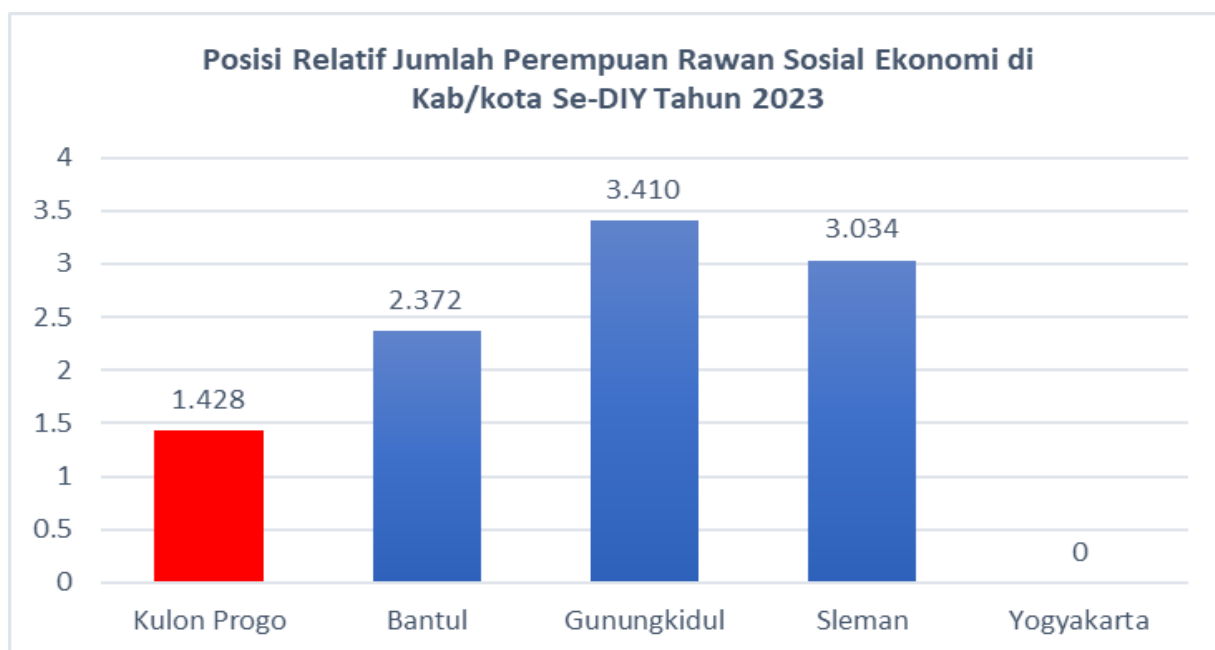
Kerentanan sosial ekonomi pada perempuan dapat berdampak pada kemiskinan dan ketidakamanan finansial. Perempuan rawan sosial ekonomi cenderung terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Dengan pendapatan yang rendah atau tidak stabil menyulitkan

perempuan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan anak dan kesehatan. Selain kemiskinan kerentanan sosial ekonomi juga berdampak pada kesehatan fisik dan mental yang buruk. Perempuan yang dalam kondisi ekonomi sulit seringkali mengabaikan kesehatan mereka sendiri karena kurangnya akses ke layanan kesehatan atau prioritas pada kebutuhan lainnya. Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental mereka. Selanjutnya kerentanan ekonomi juga dapat berdampak pada akses pendidikan yang terbatas bagi anak-anak mereka. Dalam kondisi ekonomi sulit, mereka tidak memiliki kemampuan memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak mereka sehingga berpotensi memperburuk kemiskinan antargenerasi.

Jumlah Perempuan rawan sosial ekonomi menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Semakin banyak jumlah Perempuan rawan sosial maka semakin buruk tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Sebaliknya semakin sedikit jumlah perempuan rawan sosial maka semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Untuk mengurangi kerentanan sosial ekonomi pada perempuan memerlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, organisasi non pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, kesempatan dan perlindungan yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan.

3.7.3.1 Posisi relatif

Grafik 3.93 Posisi Relatif Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi DIY Tahun 2023



Sumber: Dinas Sosial DIY (diolah)

Posisi relatif jumlah perempuan rawan sosial ekonomi Kabupaten Kulon Progo berada pada **posisi kedua paling sedikit** setelah Kota Yogyakarta pada tahun 2023. Kota Yogyakarta berada pada urutan pertama karena tidak ada perempuan rawan sosial ekonomi di daerahnya atau 0, sedangkan Kulon Progo memiliki 1.428 perempuan rawan sosial ekonomi, urutan ketiga Bantul dengan jumlah perempuan rawan sosial ekonomi sebanyak 2.372 orang, urutan keempat Sleman sebanyak 3.034 orang perempuan rawan sosial ekonomi dan terbanyak adalah Kabupaten Gunungkidul yaitu 3.410 perempuan rawan sosial ekonomi. Dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan perempuan di Kota Yogyakarta terbaik se-DIY berdasarkan indikator jumlah perempuan rawan sosial ekonomi. Sementara Kulon Progo, meskipun jumlah perempuan rawan sosial ekonominya lebih sedikit dibanding dengan tiga kabupaten lainnya, namun jumlah tersebut masih cukup tinggi. Sehingga memerlukan intervensi program bagi perempuan rawan sosial ekonomi di Kabupaten Kulon Progo.

3.7.3.2 Perkembangan antar waktu

Grafik 3.94 Perkembangan Antar Waktu Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023



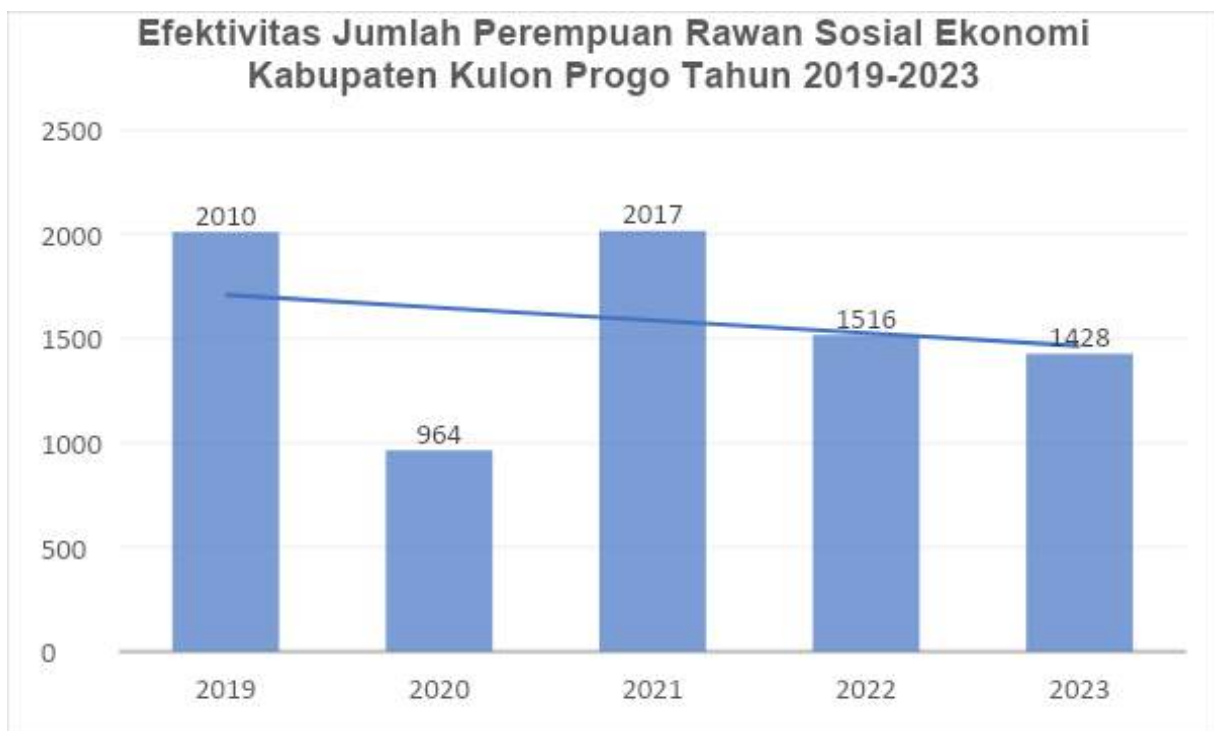
Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo (diolah).

Grafik perkembangan antar waktu jumlah perempuan rawan sosial ekonomi Kulon Progo tahun 2019-2023 menunjukkan **kecenderungan menurun**. Selama 5 tahun jumlah

perempuan rawan sosial ekonomi paling sedikit di tahun 2020 dan jumlah paling banyak terjadi di tahun 2021. Kenaikan signifikan jumlah perempuan rawan sosial ekonomi terjadi pada tahun 2021, dimana di tahun tersebut puncak mewabahnya pandemi Covid-19 yang berdampak pada berbagai sektor dan kalangan sehingga meningkatkan kondisi perempuan rawan sosial ekonomi. Selanjutnya, pada tahun 2022 dan 2023 jumlah perempuan rawan sosial ekonomi menurun secara berturut-turut. Hal tersebut menandakan bahwa upaya kebijakan dan program-program pemerintah daerah dalam menanggulangi perempuan rawan sosial ekonomi cukup berhasil meskipun jumlahnya terbilang masih cukup tinggi.

3.7.3.3. Efektivitas

Grafik 3.95 Analisis Efektivitas Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

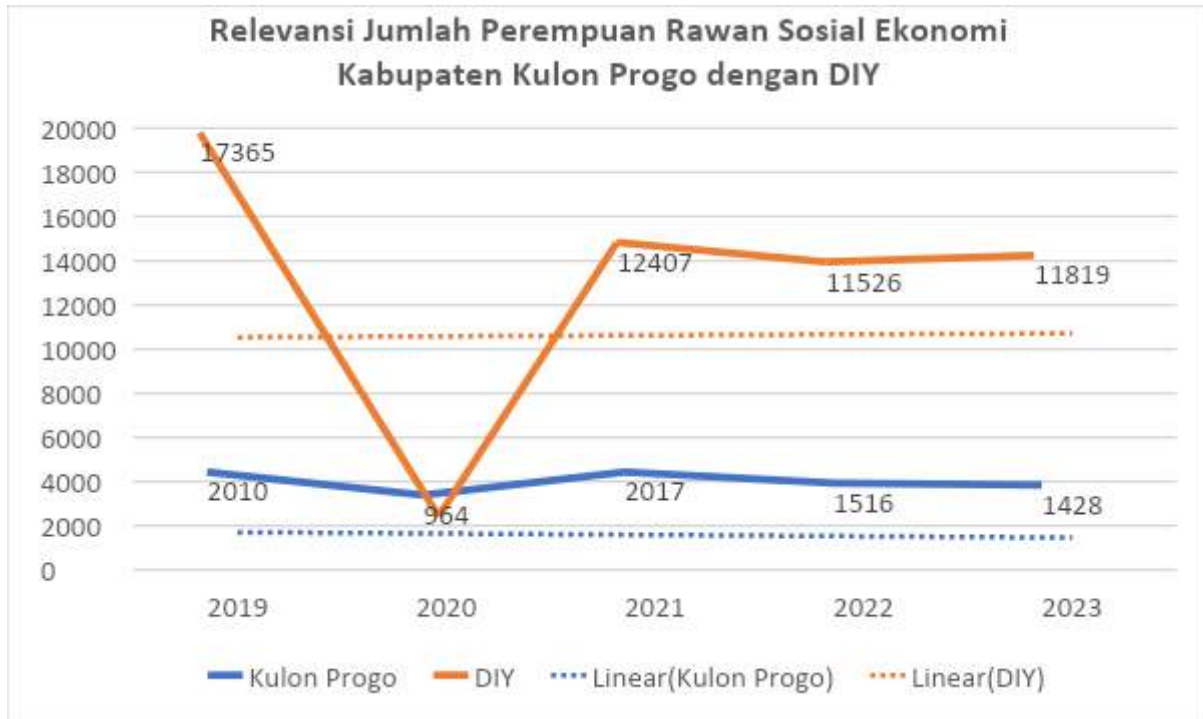


Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo (diolah)

Grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah perempuan rawan sosial ekonomi di Kabupaten Kulon Progo mengalami **kecenderungan tren menurun** dalam waktu lima tahun. Kecenderungan tersebut dapat diartikan bahwa jumlah perempuan rawan sosial ekonomi semakin berkurang dalam beberapa tahun terakhir dan ini menjadi salah satu indikator yang baik bagi pemerintah daerah karena intervensi program terkait penanganan perempuan rawan sosial ekonomi **cukup efektif**.

3.7.3.4 Relevansi perkembangan

Grafik 3.96 Analisis Relevansi Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Sosial DIY (diolah)

Grafik relevansi jumlah perempuan rawan sosial ekonomi Kabupaten Kulon Progo dengan DIY selama lima tahun menunjukkan hubungan yang **kurang relevan**. Hal tersebut terlihat dari garis tren jumlah perempuan rawan sosial ekonomi Kulon Progo yang cenderung menurun, sementara garis tren DIY cenderung fluktuatif. Kondisi yang sama terjadi pada tahun 2022 di mana jumlah perempuan rawan sosial ekonomi Kulon Progo mengalami penurunan, hal yang sama juga terjadi di DIY yaitu jumlah perempuan rawan sosial ekonomi di DIY juga berkurang menjadi 11.526 dari jumlah sebelumnya yaitu 12.407. Kondisi tersebut bisa saja terjadi karena pada saat kecenderungan penurunan/peningkatannya sama, artinya Kulon Progo turut menyumbang jumlah perempuan rawan sosial ekonomi di tingkat DIY, dan jika memiliki kecenderungan penurunan/peningkatan yang berbeda artinya ada kabupaten/kota lain yang berkontribusi terhadap penurunan maupun peningkatan jumlah perempuan rawan sosial ekonomi bagi DIY. Upaya yang perlu dilakukan adalah bagaimana pemerintah Kulon Progo dan DIY dapat bersinergi melakukan intervensi program untuk mengurangi jumlah perempuan rawan sosial ekonomi di tingkat kabupaten maupun provinsi.

3.7.3. Jumlah anak terlantar

Anak terlantar menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia adalah anak yang tidak mendapatkan perhatian, perawatan, dan pengasuhan yang layak dari orang tua atau wali mereka. Ini termasuk anak yang ditinggalkan, diabaikan, atau tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasar mereka.

Jumlah anak terlantar seringkali berkaitan dengan berbagai faktor termasuk tingkat kesejahteraan di suatu daerah. Di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, misalnya, lebih banyak anak yang mengalami situasi terlantar akibat kurangnya akses ke pendidikan, layanan kesehatan dan dukungan sosial. Di sisi lain, daerah dengan kesejahteraan yang lebih baik cenderung memiliki lebih banyak program perlindungan anak yang dapat membantu mengurangi jumlah anak terlantar.

3.7.3.1 Posisi relatif

Grafik 3.97 Posisi Relatif Jumlah Anak Terlantar Kabupaten/Kota Provinsi DIY Tahun 2023



Sumber: Dinas Sosial DIY (diolah)

Jumlah anak terlantar di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 853 anak pada tahun 2023, Kulon Progo menempati **posisi kedua** paling banyak setelah urutan pertama ditempati oleh Sleman dengan jumlah anak terlantar sebanyak 1.648 anak. Urutan ketiga, Bantul dengan

jumlah 579 anak, keempat Gunungkidul sebanyak 278 anak dan Kota Yogyakarta menempati posisi terbaik dengan jumlah anak terlantar paling sedikit yaitu 5 orang anak.

3.7.3.2 Perkembangan antar waktu

Grafik 3.98 Analisis Perkembangan Antar Waktu Jumlah Anak Terlantar Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

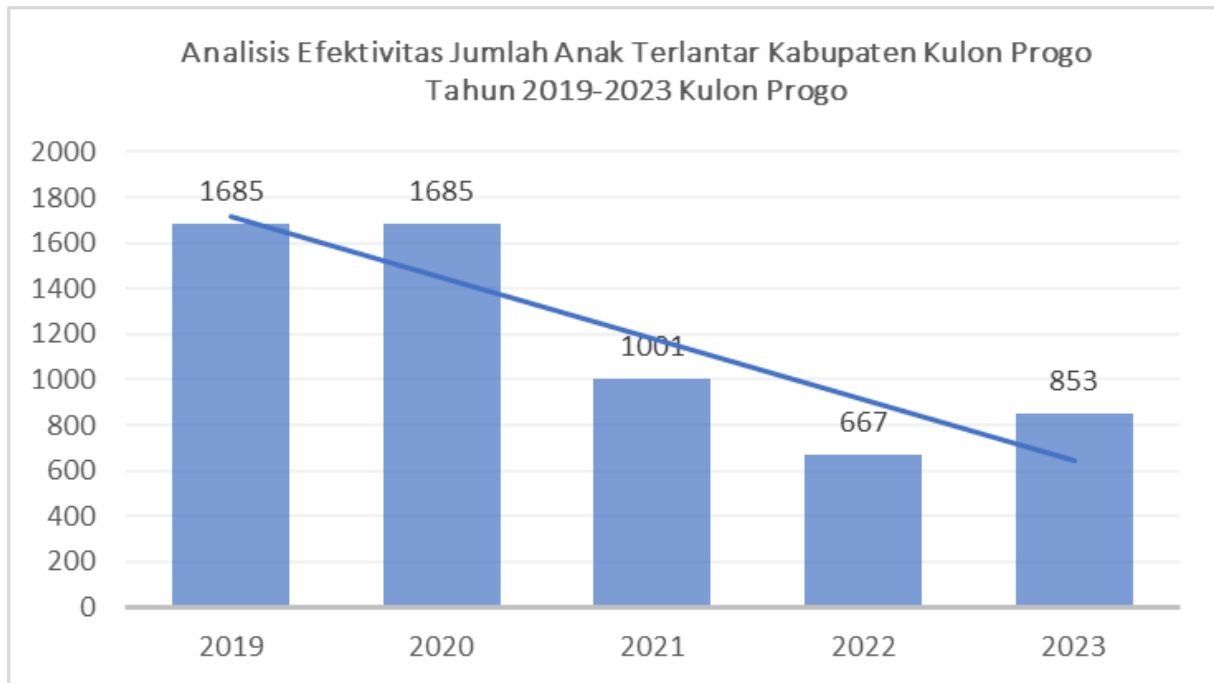


Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo (diolah).

Dari sisi perkembangan antar waktu, jumlah anak terlantar di Kabupaten Kulon Progo **cenderung menurun** selama lima tahun yaitu 2019-2023. Kecenderungan menurunnya jumlah anak terlantar di Kulon Progo menandakan adanya perbaikan dari hal kesejahteraan masyarakat ataupun banyaknya program perlindungan dari pemerintah daerah sehingga berdampak pada Tingkat kesejahteraan dan berkurangnya jumlah anak terlantar.

3.7.3.3 Efektivitas

Grafik 3.99 Analisis Efektivitas Jumlah Anak Terlantar Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

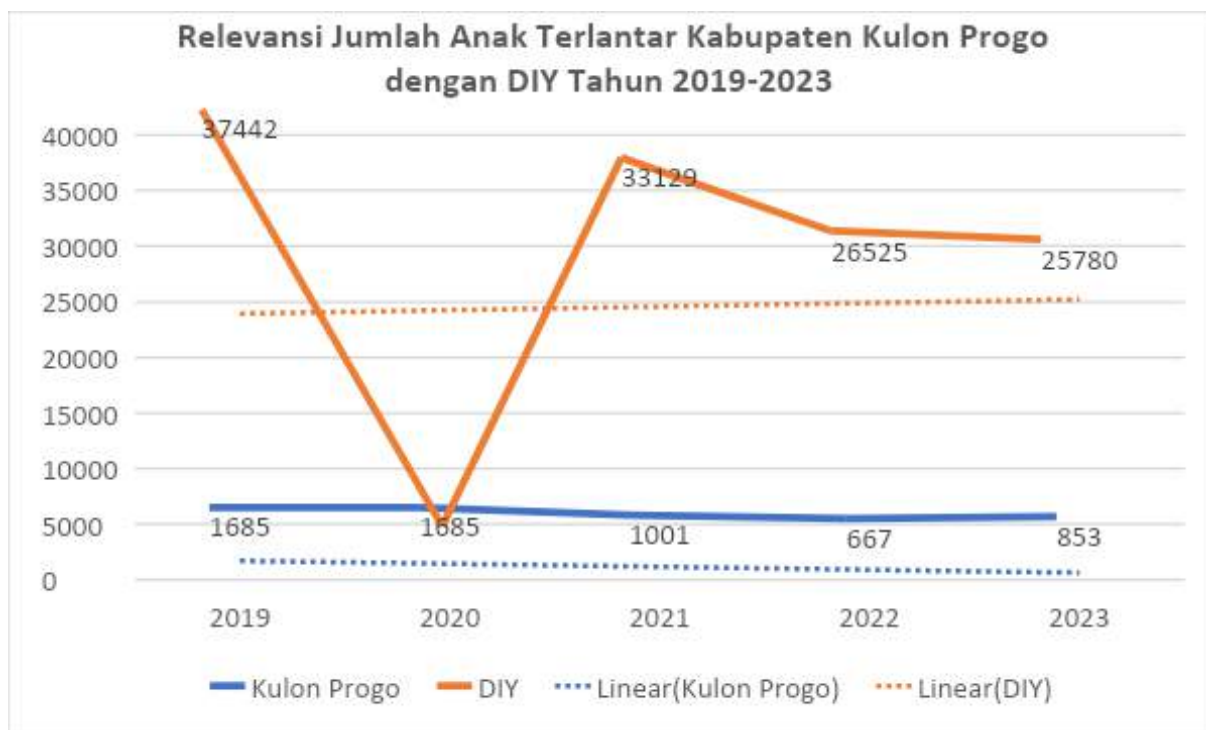


Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo (diolah)

Analisis efektivitas menunjukkan apakah intervensi program-program pemerintah berhasil atau efektif menysasar pada persoalan yang terjadi di suatu daerah. Dalam hal jumlah anak terlantar di Kabupaten Kulon Progo terlihat bahwa dalam waktu lima tahun mengalami tren menurun atau berkurangnya jumlah anak terlantar. Kondisi tersebut menandakan hal yang baik, artinya semakin berkurangnya jumlah anak terlantar maka program-program pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah **efektif** menysasar kelompok anak terlantar.

3.7.3.4 Relevansi perkembangan

Grafik 3.100 Analisis Relevansi Jumlah Anak Terlantar Kabupaten Kulon Progo dengan DIY Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Sosial DIY (diolah)

Dalam waktu empat tahun yaitu 2019-2022, grafik relevansi jumlah anak terlantar di Kabupaten Kulon Progo dengan DIY menunjukkan hubungan yang **relevan** dengan kecenderungan tren menurun. Berbeda pada tahun 2023, di mana Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan jumlah anak terlantar menjadi 853 anak dari tahun sebelumnya yang berjumlah 667 anak. Kondisi berbeda terjadi di tingkat DIY yang justru mengalami penurunan jumlah dari 26.525 anak berkurang menjadi 25.780 anak.

Tabel 3.17. Masalah Bidang Sosial

No	Indikator Utama	Aspek yang dianalisis			
		Posisi relatif	Perkembangan antar waktu	Efektivitas	Relevansi
1	Jumlah penduduk disabilitas	Kedua terendah se-DIY	Cenderung meningkat	Kurang efektif	Relevan
2	Jumlah penduduk lansia terlantar	Ketiga se-DIY	Cenderung menurun	Efektif	Relevan
3	Perempuan rawan sosial ekonomi	Terendah kedua se-DIY	Cenderung menurun	Efektif	Kurang relevan
4	Jumlah anak terlantar	Tertinggi kedua terbanyak se-DIY	Cenderung menurun	Efektif	Relevan

3.8. Analisis Karakteristik Masalah Bidang Infrastruktur Dasar

3.8.1. Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi layak

Sanitasi adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk membudayakan hidup bersih, dengan tujuan utama mencegah manusia terpapar langsung oleh kotoran dan limbah berbahaya lainnya. Harapannya, dengan melakukan ini, kita dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Sanitasi yang baik adalah kunci penting dalam mendukung kesehatan manusia.

Menurut definisi WHO, sanitasi mencakup penyediaan fasilitas dan layanan untuk pembuangan limbah manusia, seperti urine dan tinja. Sanitasi sangat berkaitan dengan kesehatan lingkungan, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat. Jika kondisi sanitasi buruk, dampaknya bisa sangat merugikan, mulai dari penurunan kualitas lingkungan hidup, pencemaran sumber air minum, hingga meningkatnya kasus diare dan munculnya berbagai penyakit.

Sebuah rumah tangga dianggap memiliki akses sanitasi yang layak jika fasilitas yang digunakan memenuhi standar kesehatan, seperti dilengkapi dengan leher angsa, tangki septik, atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) yang digunakan secara individu atau

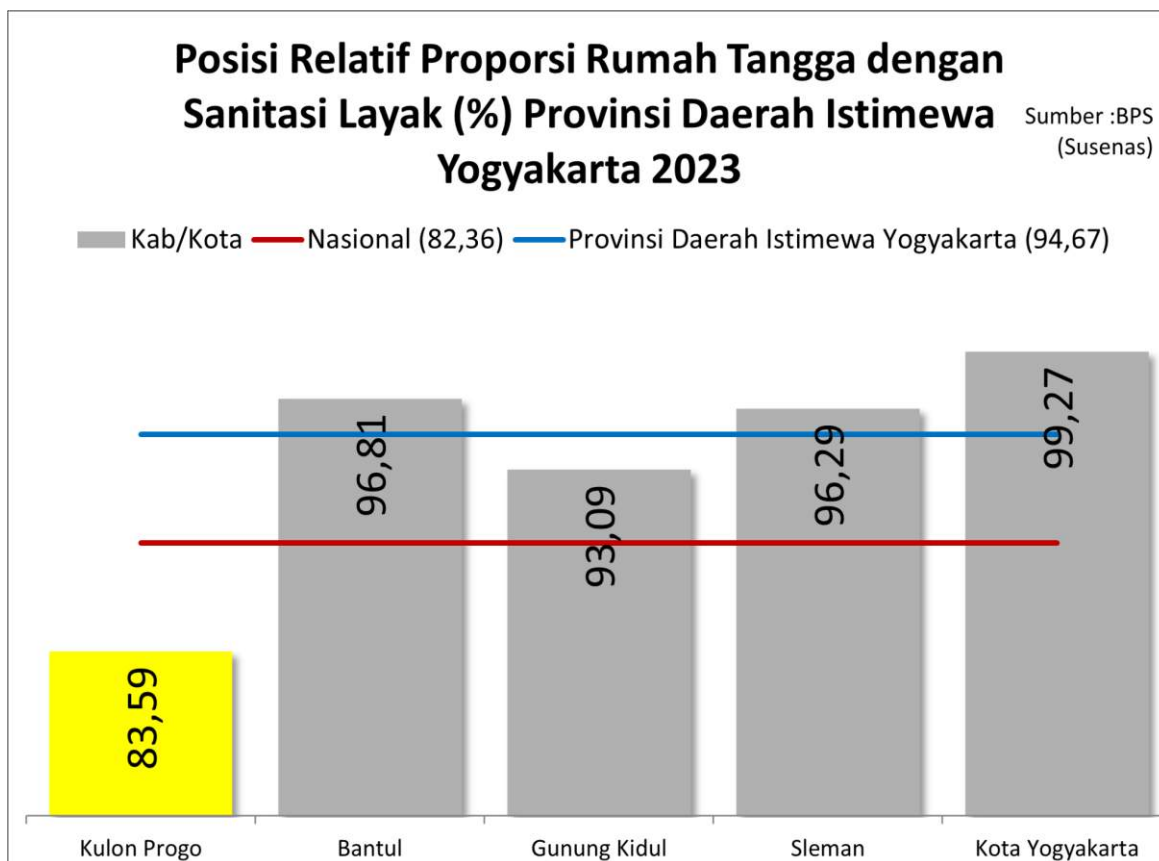
bersama-sama (Kemenkes RI, 2018). Akses sanitasi yang layak sangat penting, karena dapat mempengaruhi kesehatan, kesejahteraan, ekonomi, dan lingkungan.

Tanpa akses sanitasi yang memadai, masyarakat rentan terhadap penyakit yang dapat menurunkan produktivitas dan kualitas hidup, serta merusak lingkungan. Sanitasi yang baik juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Dengan meningkatkan akses sanitasi yang aman dan memadai, kita dapat mengurangi biaya kesehatan dan meningkatkan produktivitas, karena orang-orang akan lebih sehat dan terampil. Ini juga dapat memperkuat infrastruktur serta memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Lebih dari itu, sanitasi yang layak memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Pengelolaan limbah yang buruk dapat mengakibatkan pencemaran air dan tanah, yang pada akhirnya merusak ekosistem dan mengancam kesehatan manusia serta hewan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, akses sanitasi yang layak harus menjadi bagian dari tujuan pembangunan yang lebih luas, guna mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, serta melindungi lingkungan.

3.8.1.1. Posisi Relatif

Grafik 3.101 Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2023

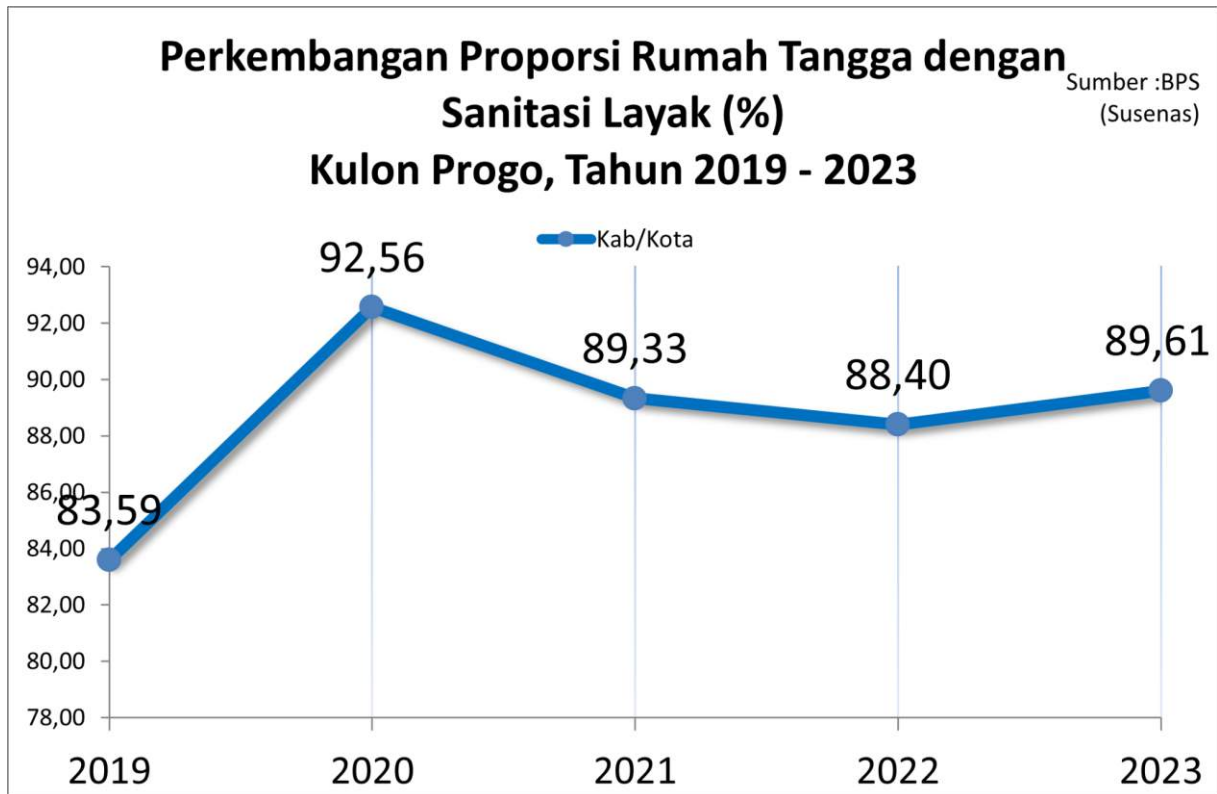


Sumber: BPS (Susenas).

Grafik di atas menyajikan perbandingan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2023. Garis merah menunjukkan rata-rata nasional, garis biru menunjukkan rata-rata provinsi DIY, sedangkan batang grafik mewakili masing-masing kabupaten/kota. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa posisi relatif proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Kulon Progo adalah 83,59%, data tersebut menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak Kulon Progo berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Dibanding Kabupaten lain, proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak Kulon Progo juga berada di urutan ke 5 dari 5 Kabupaten/Kota di DIY. Proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak Kulon Progo juga terlihat mengalami kesenjangan yang sangat signifikan dengan kabupaten Bantul, kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang memiliki proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak jauh di atas rata-rata Provinsi dan Nasional

3.8.1.2. Perkembangan Antar Waktu

Grafik 3.102 Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2019 - 2023

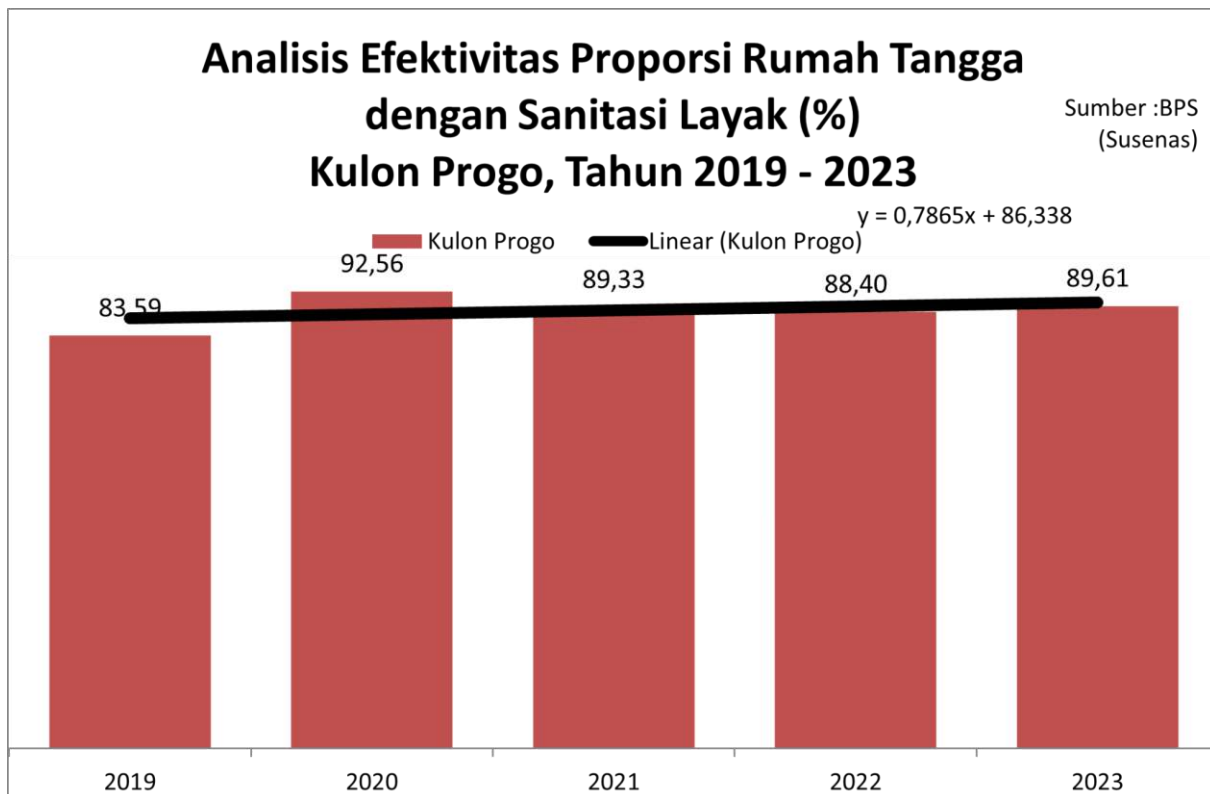


Sumber: BPS (Susenas).

Grafik di atas menunjukkan data perkembangan yang **fluktuatif** dalam proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Kulon Progo **selama lima tahun terakhir**. Setelah mencapai **puncak yang sangat tinggi di angka 92,56 pada tahun 2020**, proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak **menurun secara signifikan pada tahun-tahun berikutnya** setelah itu mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2023. Tren ini mengindikasikan pentingnya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan atau mempertahankan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Kulon Progo, dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak.

3.8.1.3. Efektivitas

Grafik 3.103 Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2019 – 2023

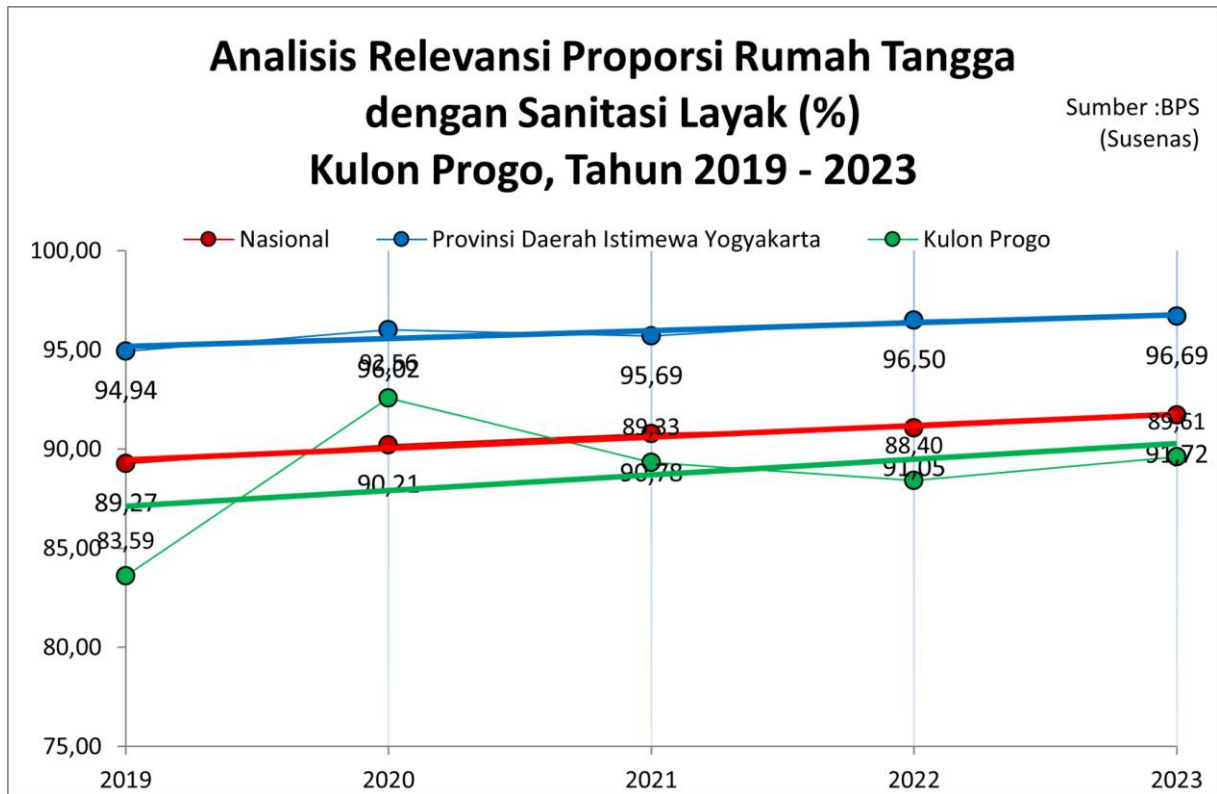


Sumber: BPS (Susenas).

Grafik di atas menunjukkan tren efektivitas proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak Kulon Progo dari tahun 2019-2023. Selama periode lima tahun, proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak mengalami fluktuasi dengan peningkatan pada tahun 2020 diikuti oleh sedikit penurunan dalam dua tahun berikutnya, dan sedikit peningkatan di tahun 2023. Untuk menjaga atau meningkatkan kembali proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak, mungkin diperlukan evaluasi kebijakan tentang rumah tangga dengan sanitasi layak yang diterapkan pada tahun 2019 ke tahun 2020 dan identifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada penurunan setelah tahun tersebut.

3.8.1.4. Relevansi

**Grafik 3.104 Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%)
Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2019 - 2023**



Sumber: BPS (Susenas).

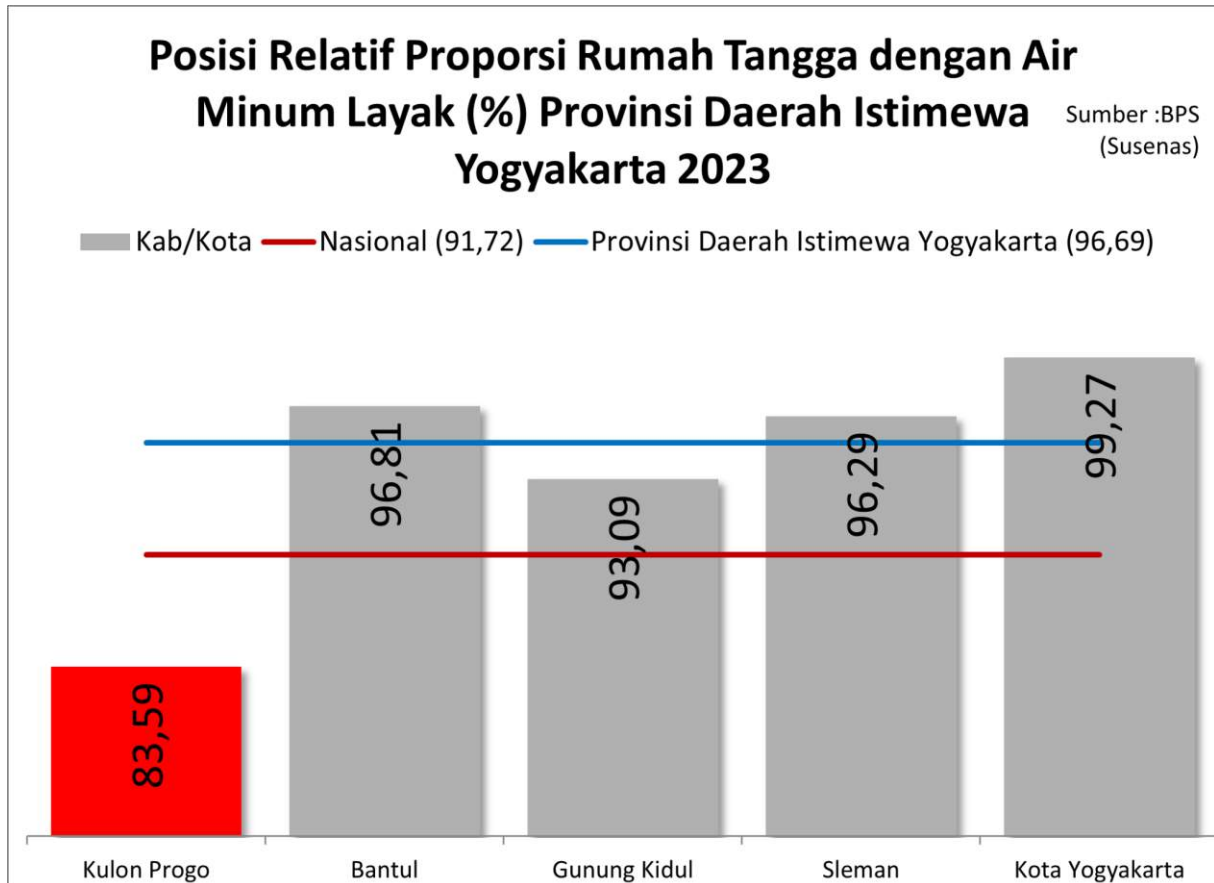
Grafik di atas merupakan tren proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak Kulon Progo, Provinsi DIY dan Nasional dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2019-2023. Dari grafik tersebut dapat terlihat bahwa proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Kulon Progo pada tahun 2020 berada di atas rata-rata nasional. Namun sejak tahun 2021 hingga 2023 proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak Kulon Progo mengalami penurunan hingga di bawah rata-rata nasional dan DIY. Penurunan tersebut terjadi sampai tahun 2022 dan meningkat di tahun 2023. Dari analisis relevansi ini dapat dilihat bahwa kabupaten Kulon Progo menunjukkan ada peningkatan dalam pemenuhan rumah tangga dengan sanitasi yang layak sejalan dengan tren yang terjadi pada tingkat provinsi dan nasional.

3.8.2. Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak

Sejak tahun 2019, konsep yang digunakan mengacu pada metadata SDGs dimana rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak (*access to improved water*) yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindungi dan mata air terlindungi. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindungi, mata air terlindungi, dan air hujan.

3.8.2.1. Posisi Relatif

Grafik 3.105 Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2023

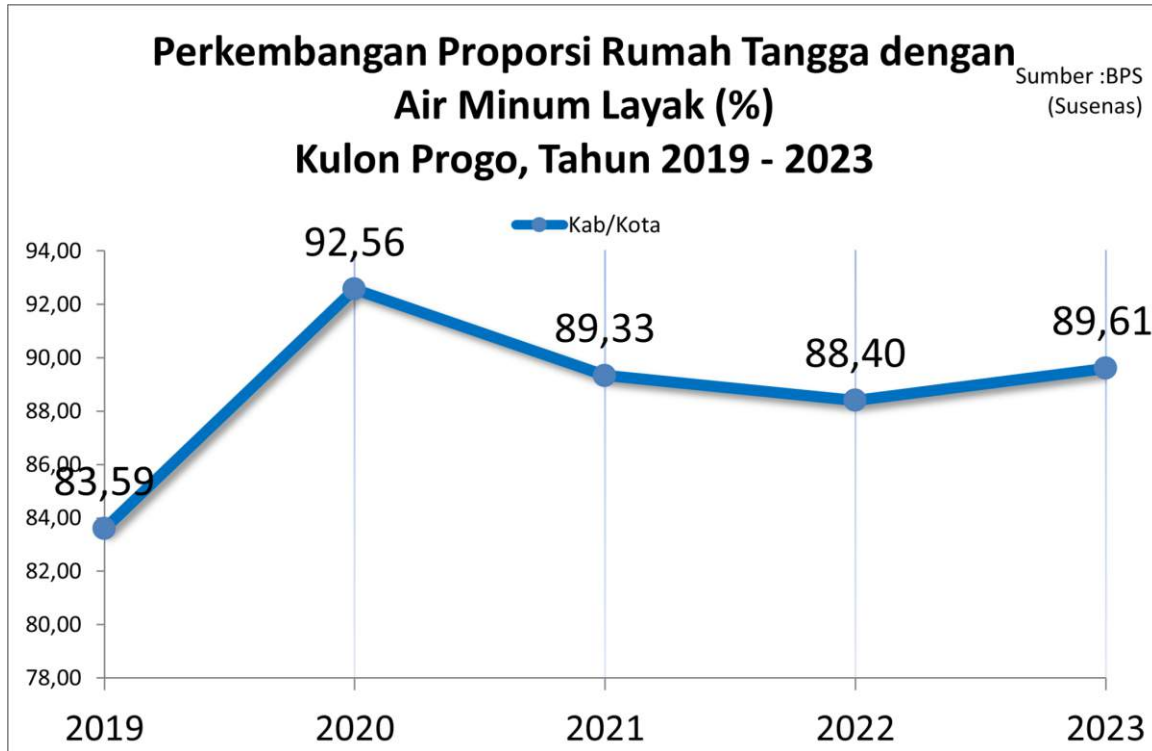


Sumber: BPS (Susenas).

Grafik diatas menyajikan perbandingan rumah tangga dengan air minum layak di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2023. Garis merah menunjukkan rata-rata nasional, garis biru menunjukkan rata-rata provinsi DIY, sedangkan batang grafik mewakili masing-masing kabupaten/kota. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa proporsi rumah tangga dengan air minum layak di Kulon Progo adalah 83,59%, data tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga dengan air minum layak Kulon Progo berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Dibanding Kabupaten lain, rumah tangga dengan air minum layak Kulon Progo juga berada di urutan ke 5 dari 5 Kabupaten/Kota di DIY. Proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak Kulon Progo juga terlihat mengalami kesenjangan yang sangat signifikan dengan kabupaten Bantul, kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang memiliki proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak jauh di atas rata-rata Provinsi dan Nasional

3.8.2.2. Perkembangan Antar Waktu

Grafik 3.106 Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2019 - 2023

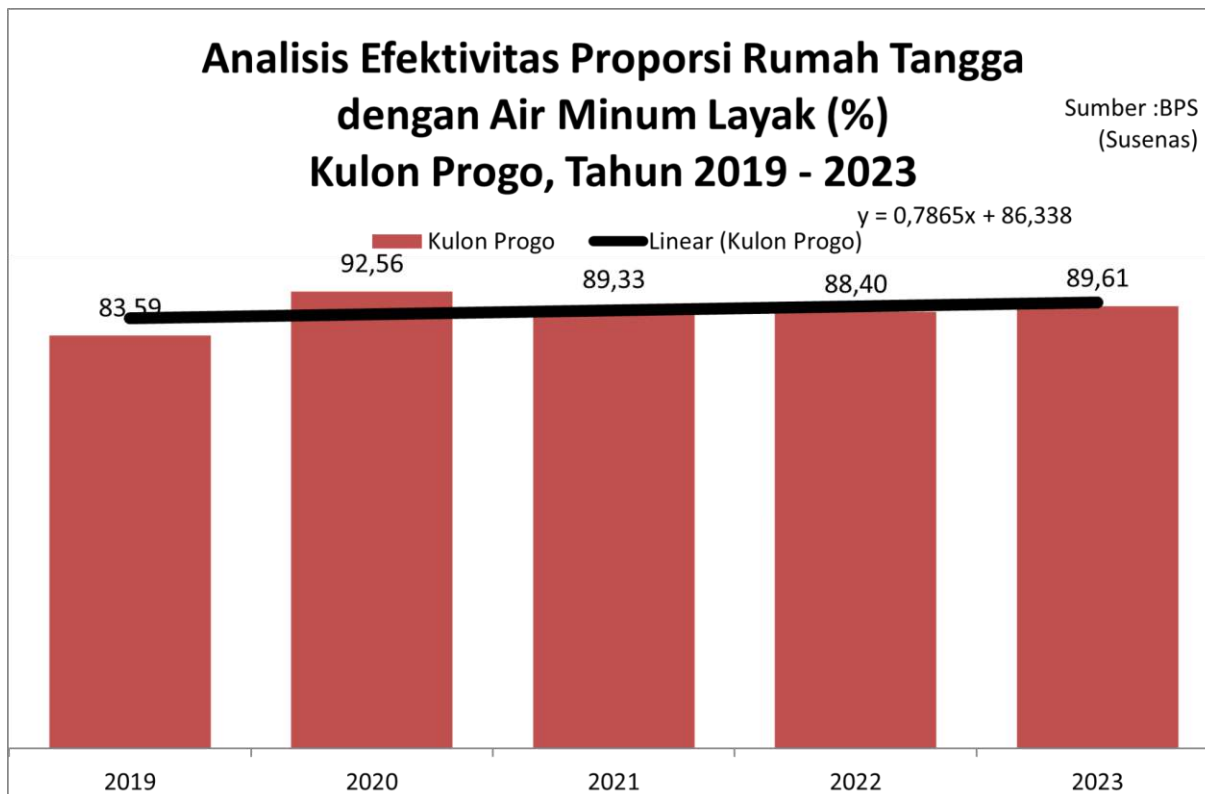


Sumber: BPS (Susenas).

Berdasarkan data proporsi rumah tangga dengan sumber air minum layak di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2019 hingga tahun 2020, terlihat adanya kenaikan persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak dimana persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak naik dari 83,59% pada tahun 2019 menjadi 92,56%. Pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 turun menjadi 88,40%. Penurunan ini bisa mengindikasikan adanya permasalahan atau tantangan dalam akses dan kualitas sumber air minum yang layak di Kabupaten Kulon Progo pada periode tersebut, seperti masalah infrastruktur, kualitas air, atau faktor eksternal lainnya. Peningkatan persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak pada tahun 2023 dimana persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak naik menjadi 89,61%. Peningkatan ini bisa mengindikasikan adanya upaya perbaikan atau peningkatan dalam akses dan kualitas sumber air minum yang layak di Kabupaten Kulon Progo pada tahun tersebut, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan kesadaran masyarakat, atau perubahan kebijakan terkait pengelolaan sumber air.

3.8.2.3. Efektivitas

Grafik 3.107 Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2019 - 2023

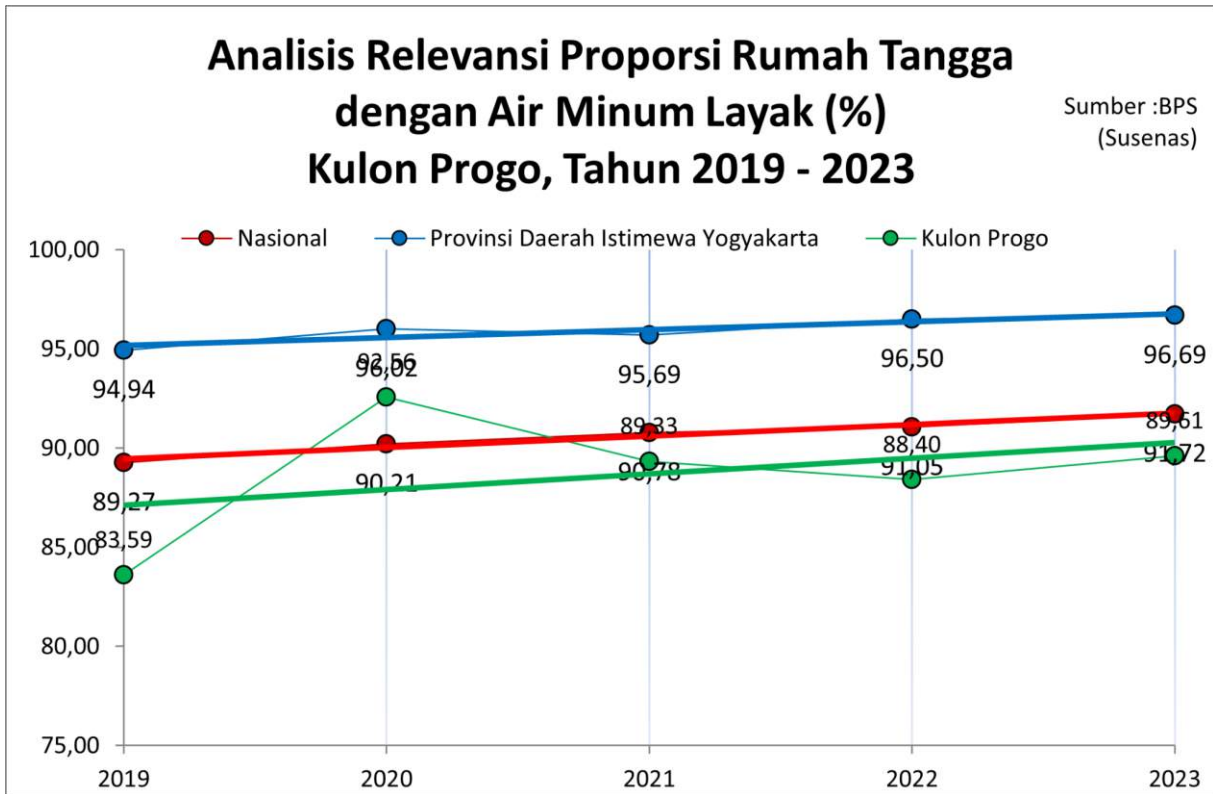


Sumber: BPS (Susenas).

Dari grafik di atas proporsi rumah tangga dengan sumber air minum layak di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2019 hingga tahun 2020, terdapat kenaikan angka yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi yang dilakukan. Pada tahun 2019, proporsi rumah tangga dengan sumber air minum layak mencapai 83,59%. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga di Kabupaten Kulon Progo telah memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak. Pada tahun 2020 proporsi rumah tangga dengan sumber air minum layak mengalami kenaikan menjadi 92,56%. Kenaikan ini mengindikasikan adanya potensi penyelesaian permasalahan atau tantangan yang mungkin muncul dalam intervensi yang berhasil dilakukan. Penurunan proporsi rumah tangga dengan sumber air minum layak juga terjadi pada tahun 2021 dan 2022, dimana angkanya turun menjadi 89,33% dan 88,40%. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan belum efektif dalam meningkatkan proporsi rumah tangga dengan sumber air minum layak. Pada tahun 2023, proporsi rumah tangga dengan sumber air minum layak kembali meningkat menjadi 89,61%. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam intervensi yang dilakukan pada tahun tersebut, dan dapat dianggap sebagai tanda positif terhadap efektivitas intervensi.

3.8.2.4. Relevansi

Grafik 3.108 Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%)
Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2019 - 2023



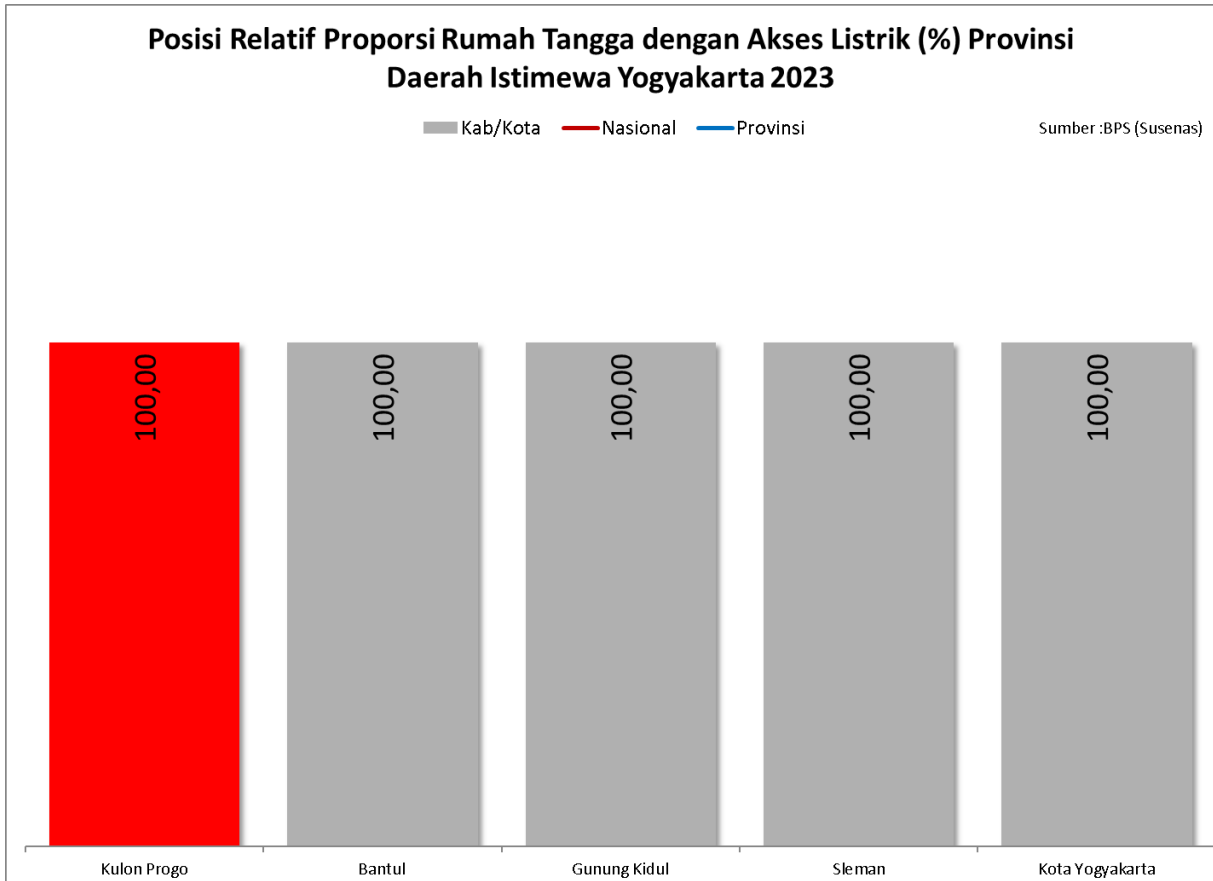
Sumber: BPS (Susenas).

Grafik di atas merupakan tren proporsi rumah tangga dengan sumber air minum layak Kulon Progo, Provinsi DIY dan Nasional dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2019-2023. Dari grafik tersebut dapat terlihat bahwa proporsi rumah tangga dengan sumber air minum layak di Kulon Progo pada tahun 2020 berada di atas rata-rata nasional. Namun sejak tahun 2021 hingga 2023 proporsi rumah tangga dengan sumber air minum layak Kulon Progo mengalami penurunan hingga di bawah rata-rata nasional dan DIY. Penurunan tersebut terjadi sampai tahun 2022 dan meningkat di tahun 2023. Dari analisis relevansi ini dapat dilihat bahwa kabupaten Kulon Progo menunjukkan ada peningkatan dalam pemenuhan proporsi rumah tangga dengan sumber air minum layak sejalan dengan tren yang terjadi pada tingkat provinsi dan nasional.

3.8.3. Proporsi rumah tangga dengan akses listrik

3.8.3.1. Posisi Relatif

Grafik 3.109 Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023



Sumber: BPS (Susenas)

Grafik di atas menyajikan perbandingan rumah tangga dengan akses listrik di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2023. Posisi relatif proporsi rumah tangga dengan akses listrik di kabupaten Kulon Progo memiliki kesamaan persentase yang menunjukkan bahwa kabupaten Kulon Progo untuk akses listrik dapat diakses oleh keseluruhan rumah tangga.

3.8.3.2. Perkembangan Antar Waktu

Grafik 3.110 Perkembangan Antar Waktu Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

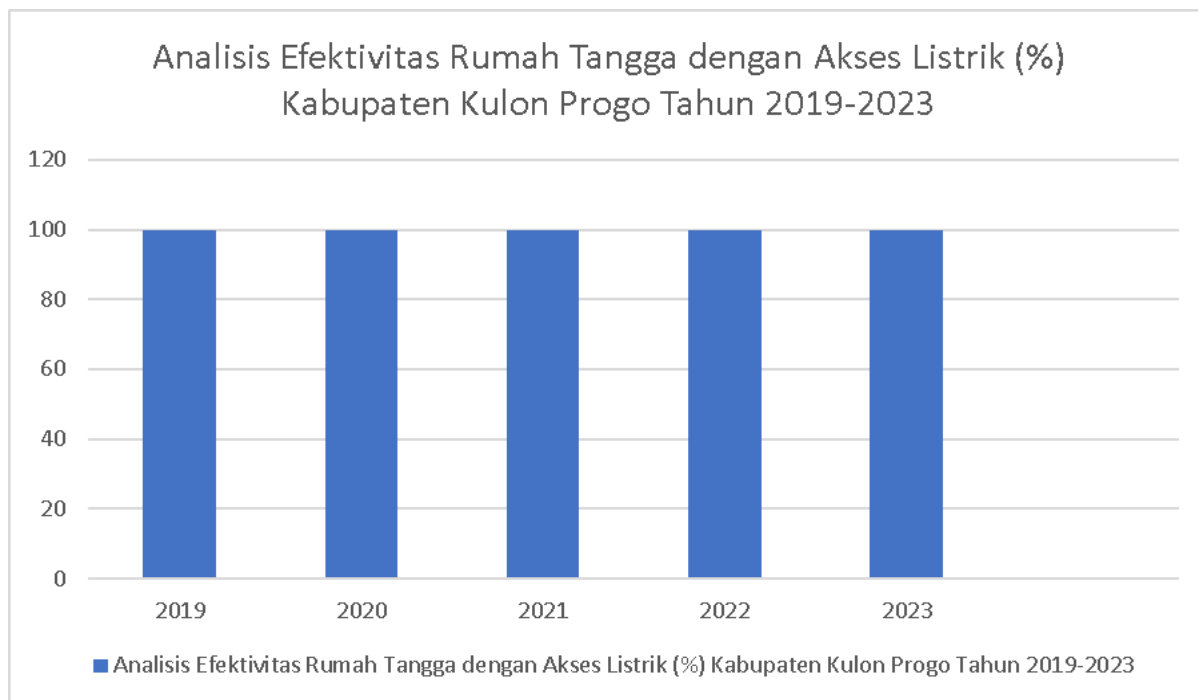


Sumber: BPS (Susenas).

Berdasarkan data proporsi rumah tangga dengan akses listrik di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2019 hingga tahun 2023 terlihat adanya persentase yang tidak berubah rumah tangga dengan akses listrik dimana persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak 100% pada tahun 2019 dan tetap sama persentasenya pada tahun 2023. Tren yang sama ini bisa mengindikasikan bahwa tingkat kelayakan di Kabupaten Kulon Progo pada periode tersebut sudah sangat baik.

3.8.3.3. Efektivitas

Grafik 3.111 Analisis Efektivitas Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023

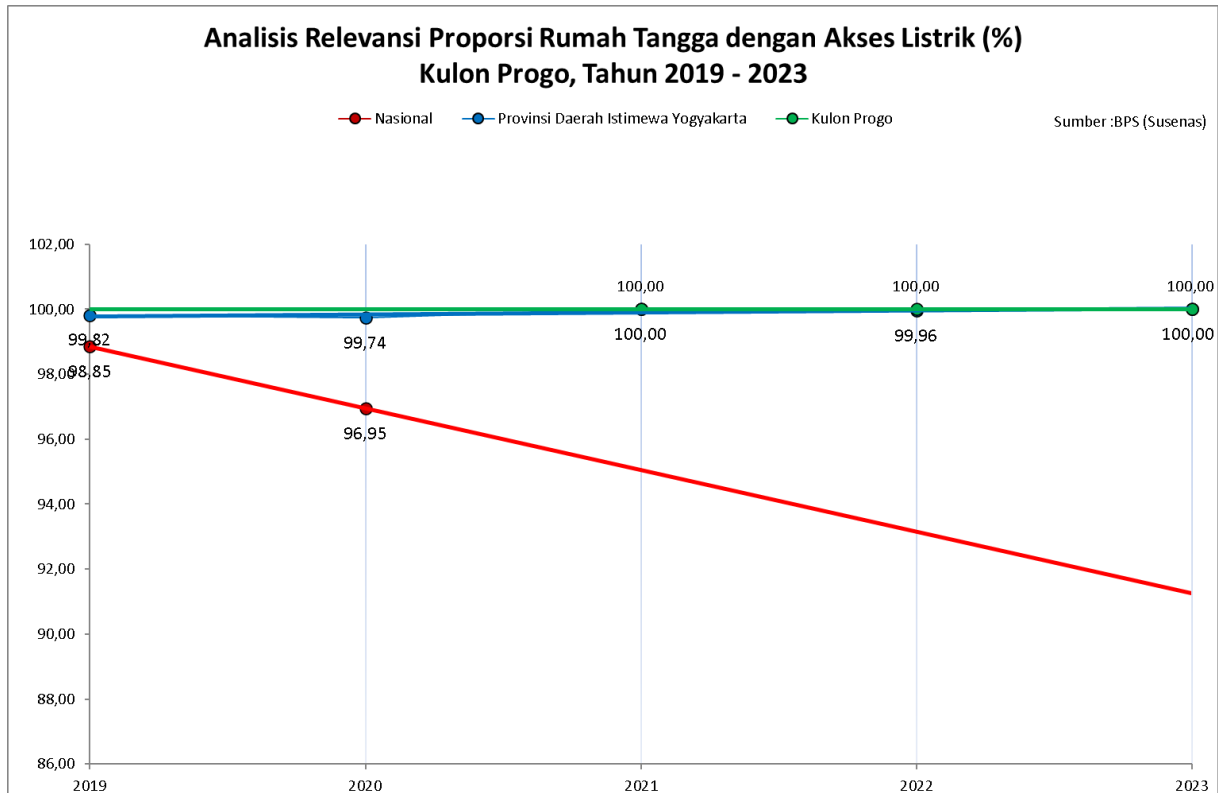


Sumber: BPS (Susenas).

Dari grafik di atas proporsi rumah tangga dengan akses listrik yang layak di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2019 hingga tahun 2023, tidak mengalami kenaikan dan penurunan angka yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi yang dilakukan. Pada tahun 2019, proporsi rumah tangga dengan sumber air minum layak mencapai 100%. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga di Kabupaten Kulon Progo telah memiliki akses terhadap listrik yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan sudah cukup efektif dalam meningkatkan proporsi rumah tangga dengan akses listrik yang layak.

3.8.3.4. Relevansi Perkembangan

Grafik 3.112 Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2023



Sumber: BPS (Susenas).

Grafik di atas merupakan tren proporsi rumah tangga dengan akses listrik Kulon Progo, Provinsi DIY dan Nasional dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2019-2023. Dari grafik tersebut dapat terlihat bahwa proporsi rumah tangga dengan akses listrik di Kulon Progo pada tahun 2019 - 2023 berada di atas rata-rata propinsi dan nasional. Proporsi rumah tangga dengan akses listrik kabupaten Kulon Progo sudah cukup baik dibandingkan tingkat nasional yang mengalami tren penurunan akses listrik pada rumah tangga.

Tabel 3.18. Masalah Bidang Infrastruktur Dasar

No	Indikator Utama	Aspek yang dianalisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
1	Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi layak	Lebih rendah dari nasional dan Provinsi. Memiliki kesenjangan yang signifikan dengan Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta.	Cenderung Naik	Tidak Efektif	Relevan dengan Provinsi dan Nasional
2	Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak	Lebih rendah dari nasional, provinsi dan seluruh Kab/Kota di DIY.	Cenderung Naik	Tidak Efektif	Relevan dengan Provinsi dan Nasional
3	Proporsi rumah tangga dengan akses listrik	Lebih tinggi dari nasional, dan provinsi serta relatif sama dengan kabupaten/kota lainnya.	Cenderung naik	Efektif	Relevan dengan Provinsi, namun tidak relevan dengan Nasional

BAB IV. PRIORITAS PROGRAM

4.1 Analisis Prioritas Masalah (Determinan) Kemiskinan dan Teori Perubahan/ToC (Theory of Change)

4.1.1. Prioritas Masalah Kemiskinan Konsumsi

4.1.1.1. Analisis Masalah Kemiskinan Konsumsi

Analisis kemiskinan konsumsi secara detail telah disajikan dalam BAB III, dalam analisis tersebut terdapat beberapa indikator utama, yaitu: Analisis persentase penduduk miskin (P0), Analisis indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Analisis indeks keparahan kemiskinan (P2).

Analisis prioritas masalah kemiskinan konsumsi dapat dilakukan melalui identifikasi prioritas masalah kemiskinan konsumsi. Identifikasi prioritas masalah kemiskinan konsumsi yang terdapat di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.1. Masalah Kemiskinan Konsumsi

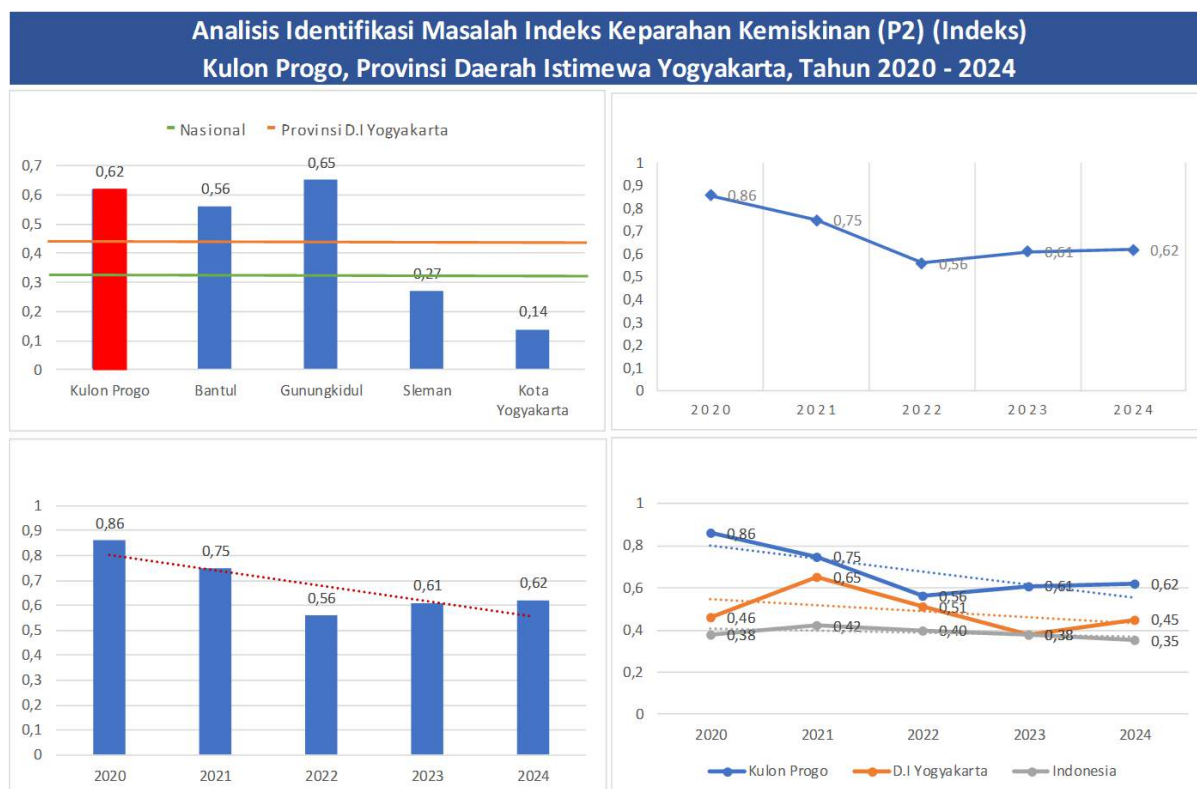
No	Indikator Utama	Aspek yang dianalisis			
		Posisi relative	Perkembangan antar waktu	Efektivitas	Relevansi
1	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Persentase penduduk miskin Kabupaten Kulon progo tertinggi se-D.I.Yogyakarta dan Nasional	Cenderung menurun	Cukup efektif Cenderung menurun	Relevan dengan Provinsi dan Nasional
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Kulon Progo Tertinggi kedua setelah Kabupaten Gunungkidul	Cenderung menurun	Cukup Efektif Cenderung menurun	Relevan dengan Provinsi dan Nasional
3	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Kulon Progo Tertinggi kedua setelah Kabupaten Gunungkidul	Cenderung naik	Cukup efektif Cenderung menurun	Relevan dengan Provinsi dan Nasional

Tabel diatas menunjukkan matriks data identifikasi masalah kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan analisis determinan, prioritas masalah kemiskinan terdapat pada indikator indeks keparahan kemiskinan (P2). Dalam analisis tersebut, terdapat dua permasalahan, yaitu: Persentase keparahan kemiskinan Kulon Progo tertinggi dibandingkan seluruh Kabupaten dan Kota di D.I Yogyakarta dan Nasional. Permasalahan yang kedua adalah analisis tren perkembangan keparahan kemiskinan cenderung naik.

Dari data analisis prioritas masalah konsumsi di atas, dapat diidentifikasi bahwa, aspek-aspek yang perlu menjadi fokus perbaikan dan peningkatan antara lain:

- Memperbaiki posisi relatif pada tingkat keparahan kemiskinan (P2) di Kulon Progo dengan kabupaten/kota lain di Provinsi DIY dan Nasional.
- Meningkatkan tren tahunan yang mengalami kenaikan pada satu tahun terakhir.
- Melakukan evaluasi efektivitas intervensi program.

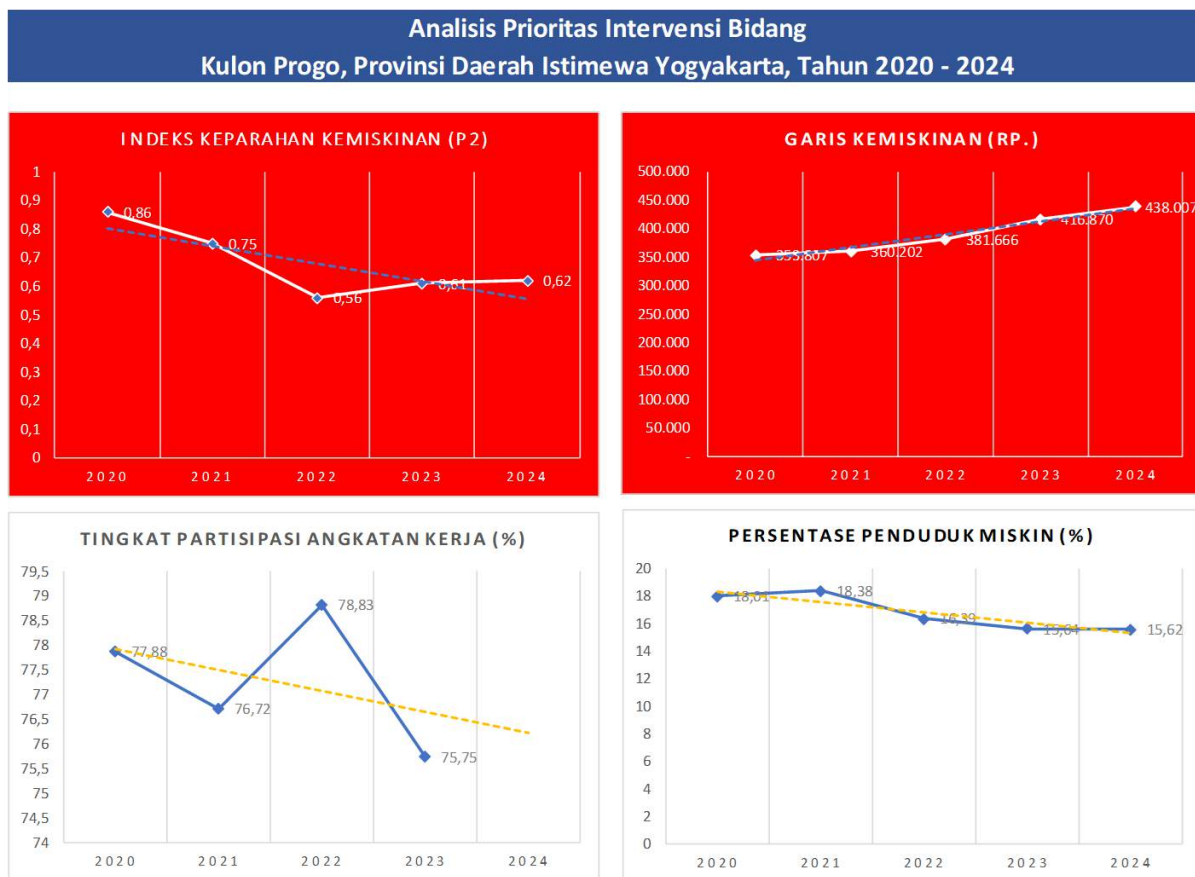
Grafik 4.1. Analisis Identifikasi Masalah Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2)



Dalam grafik diatas menunjukkan bahwa, analisis efektifitas Kabupaten Kulon Progo cukup efektif dan dari analisis relevansi juga relevan dengan Provinsi dan Nasional. Tetapi jika dibandingkan dengan Provinsi D.I Yogyakarta dan Nasional, posisi relatif indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo pada posisi tertinggi kedua setelah Gunungkidul,

demikian juga dengan tren perkembangan indeks keparahan kemiskinan juga cenderung naik.

Grafik 4.2. Casual Attribution Bidang Kemiskinan Konsumsi



Grafik diatas menunjukkan grafik analisis prioritas intervensi kemiskinan konsumsi periode tahun 2020-2024. Pada grafik indeks keparahan kemiskinan menunjukkan tren menurun sampai dengan tahun 2022, akan tetapi trend tersebut mulai naik di tahun 2023 dan 2024. Pada grafik lainnya memberikan gambaran bahwa garis kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo terus mengalami kenaikan. Kondisi ini dapat menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam menentukan kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam menurunkan persentase penduduk miskin.

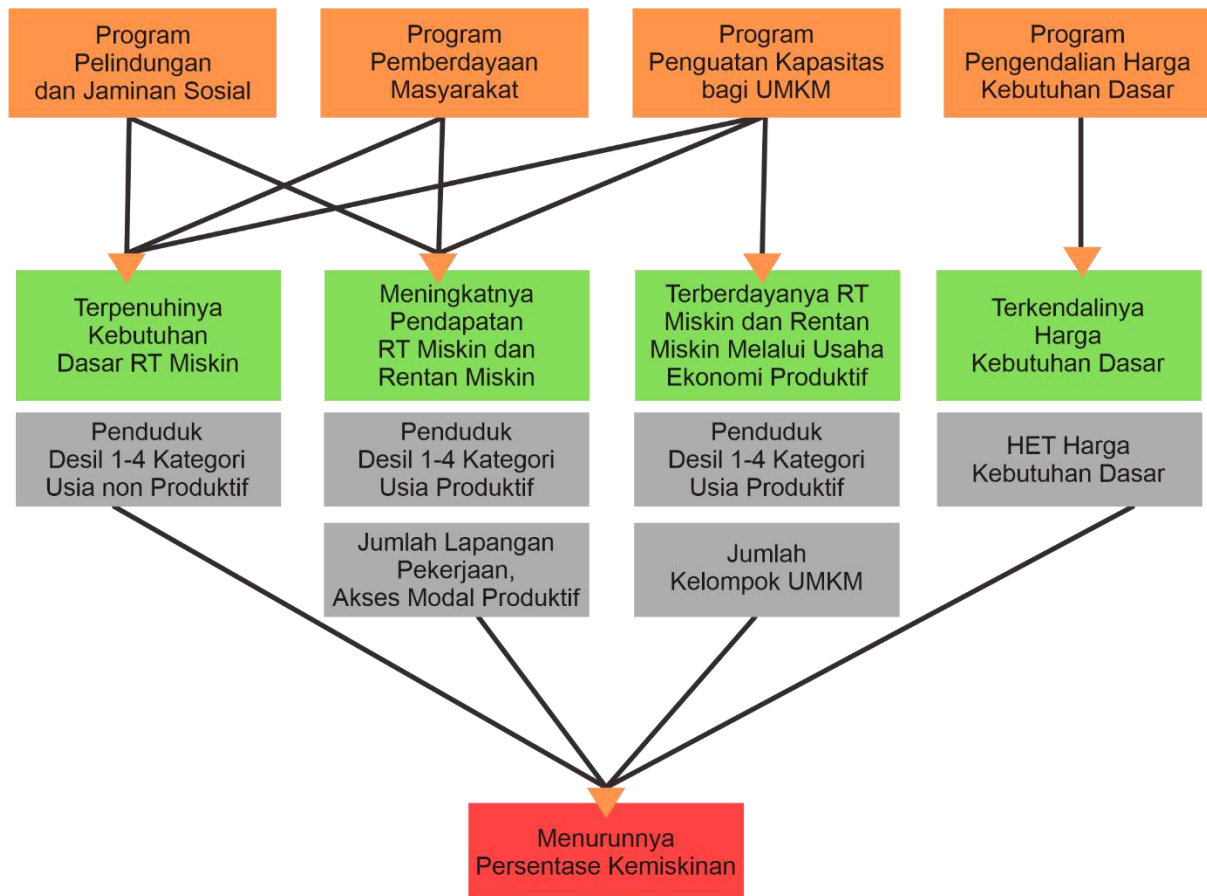
Tujuan utama upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo adalah bagaimana perencanaan kegiatan yang dilakukan dapat menurunkan persentase penduduk miskin. Untuk dapat merealisasikan upaya tersebut, dibutuhkan strategi program yang dapat dijalankan pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kebutuhan untuk menekan persentase kemiskinan setidaknya ada empat sasaran yang bisa dijalankan pemerintah Kulon Progo, antara lain:

- a. Perlindungan dan Jaminan Sosial
- b. Pemberdayaan Masyarakat
- c. Penguatan Kapasitas bagi UMKM
- d. Pengendalian Harga Kebutuhan Dasar

4.1.1.2. Teori Perubahan

Teori perubahan adalah deskripsi atau diagram yang menggambarkan strategi, tindakan, kondisi, dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai hasil dan perubahan. Dalam Upaya penanggulangan kemiskinan daerah, Kabupaten Kulon Progo mempunyai target menurunkan persentase kemiskinan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan strategi, Tindakan dan pengerahan sumber daya yang dimiliki.

Gambar 4.1. Teori Perubahan (ToC) Bidang Konsumsi



Dalam gambar diatas menunjukkan bahwa, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membutuhkan strategi dan sumber daya dalam penanggulangan kemiskinan daerah. Strategi yang dibutuhkan adalah bagaimana tata kelola implementasi program penanggulangan kemiskinan ini dapat tepat sasaran dan fokus pada permasalahan bidang konsumsi. Selain

itu strategi perencanaan penganggaran juga penting untuk mengakomodir operasional program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah.

4.1.1.3. Intervensi Program

Intervensi program penanggulangan kemiskinan daerah dibutuhkan supaya kebijakan, strategi, dan tindakan yang dirancang untuk mengurangi tingkat kemiskinan di suatu wilayah dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, mendorong program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan ini bertujuan untuk menurunkan persentase kemiskinan daerah, selain itu program-program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong inklusi sosial-ekonomi.

Pada BAB III telah dilakukan analisis jumlah penduduk miskin berdasarkan usia, hasil analisis tersebut menggambarkan bahwa Kabupaten Kulon Progo mempunyai kantong kemiskinan pada penduduk usia produktif hingga kelompok lansia. Dengan demikian, program kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah diharapkan dapat mengintervensi persoalan tersebut. Identifikasi modus intervensi program kegiatan penanggulangan kemiskinan konsumsi Kabupaten Kulon Progo terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.2. Identifikasi Modus Intervensi

Sasaran	Prioritas Intervensi	Program Kegiatan
Terpenuhinya kebutuhan dasar rumah tangga miskin	Pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi kelompok usia tidak produktif (Lansia dan Disabilitas)	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan sosial
Meningkatnya pendapatan rumah tangga miskin dan rentan miskin	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat bagi kelompok usia produktif	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan dan pelatihan usaha produktif di bidang jasa, perdagangan, pertanian, perikanan Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat kelompok produktif dan non produktif.
Terberdayanya rumah tangga miskin dan rentan miskin melalui usaha ekonomi produktif	Penguatan kapasitas bagi UMKM yang dikelola kelompok usia produktif	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi UMKM (menjaring masyarakat untuk ikut serta dalam program pemerintah) Peningkatan Kapasitas UMKM (Permodalan, produksi, pengemasan, pemasaran, keuangan) Pembentukan kelompok UMKM

Terkendalinya harga kebutuhan dasar	Pengendalian harga kebutuhan dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian rantai pasok • Operasi harga pasar • Platform informasi harga komoditas kebutuhan dasar yang terintegrasi
-------------------------------------	------------------------------------	--

4.1.2. Prioritas Intervensi Bidang Pendidikan

Berdasarkan serangkaian analisis seluruh indikator utama bidang pendidikan seperti APK SD/MI, APK SMP/MTS, APM SD/MI, APM SMP/MTS pada bab III, Harapan Lama Sekolah, dan Rata-Rata Lama Sekolah, maka dapat terlihat bahwa indikator yang paling prioritas untuk diintervensi ialah APK SMP/MTS. Dibanding indikator yang lain, APK SMP/MTS menunjukkan hasil yang kurang baik. Hal tersebut terlihat dari tabel hasil analisis posisi relatif, perkembangan antar waktu, efektivitas dan relevansi antar indikator sebagai berikut.

Tabel 4.3. Masalah Bidang Pendidikan

No	Indikator Utama	Aspek yang dianalisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
1	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	Lebih rendah dari nasional dan Provinsi. Memiliki kesenjangan yang Signifikan dengan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.	Cenderung Menurun	Tidak Efektif	Relevan dengan Provinsi dan Nasional
2	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS	Lebih rendah dari nasional, provinsi dan seluruh Kab/Kota di DIY.	Cenderung Menurun	Tidak Efektif	Relevan dengan Provinsi tidak relevan dengan nasional
3	Angka Partisipasi Murni SD/MI	Lebih tinggi dari nasional dan lebih rendah dari Provinsi.	Cenderung Menurun namun dengan angka yang stabil	Efektif	Relevan dengan Provinsi dan Nasional
4	Angka	Lebih tinggi dari nasional,	Cenderung	Tidak	Tidak

	Partisipasi Murni SMP/MTS	namun lebih rendah dari Provinsi. Lebih tinggi dari Gunungkidul, Bantul dan Kota Yogyakarta	menurun	Efektif	Relevan
5	Harapan Lama Sekolah	Lebih tinggi dari nasional dan lebih rendah dari DIY. Berada di urutan keempat terendah dibanding Kab/Kota di DIY	Cenderung Meningkat	Efektif	Relevan
6	Rata-Rata Lama Sekolah	Lebih tinggi dari nasional dan lebih rendah dari DIY. Berada di urutan keempat terendah dibanding kab/kota di DIY	Cenderung Meningkat	Efektif	Relevan

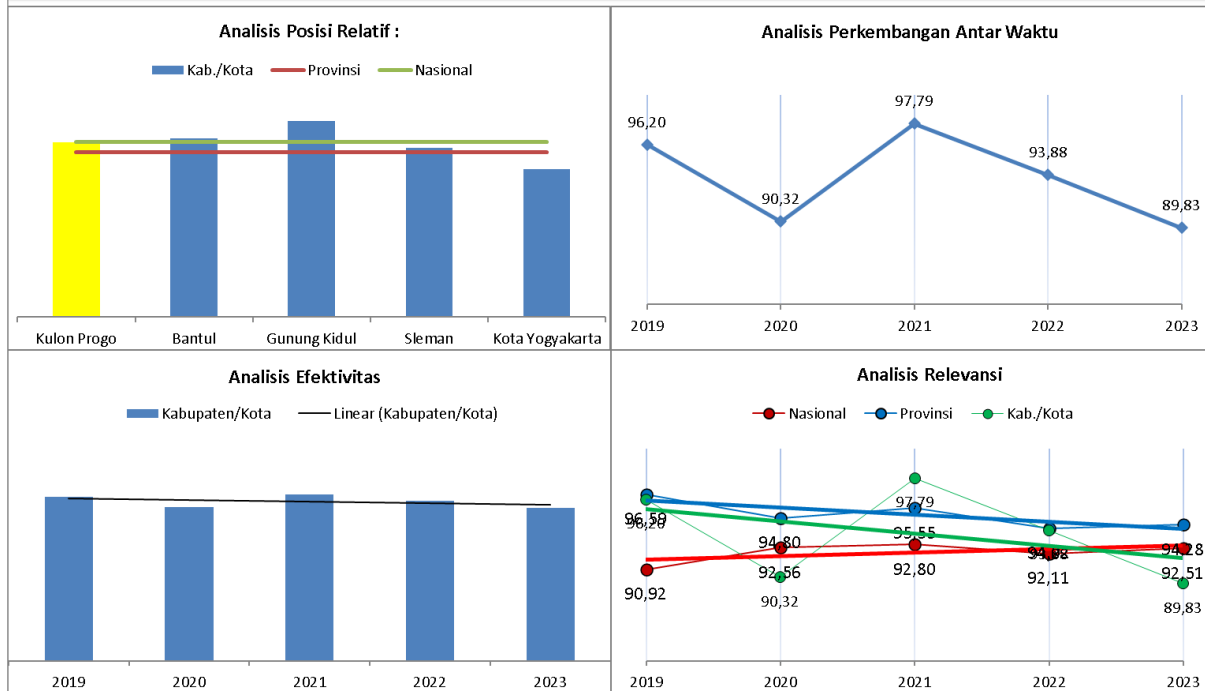
Jika dilihat lebih khusus pada grafik analisis pada indikator APK SMP/MTS, terlihat bahwa aspek yang perlu menjadi fokus perbaikan antara lain ialah

1. Memperbaiki posisi relatif APM Kulon Progo dengan kabupaten/kota lain di Provinsi DIY.
2. Meningkatkan trend tahunan yang mengalami penurunan pada dua tahun terakhir.
3. Mengevaluasi epektifitas intervensi program

Grafik 4.3. Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Kasar

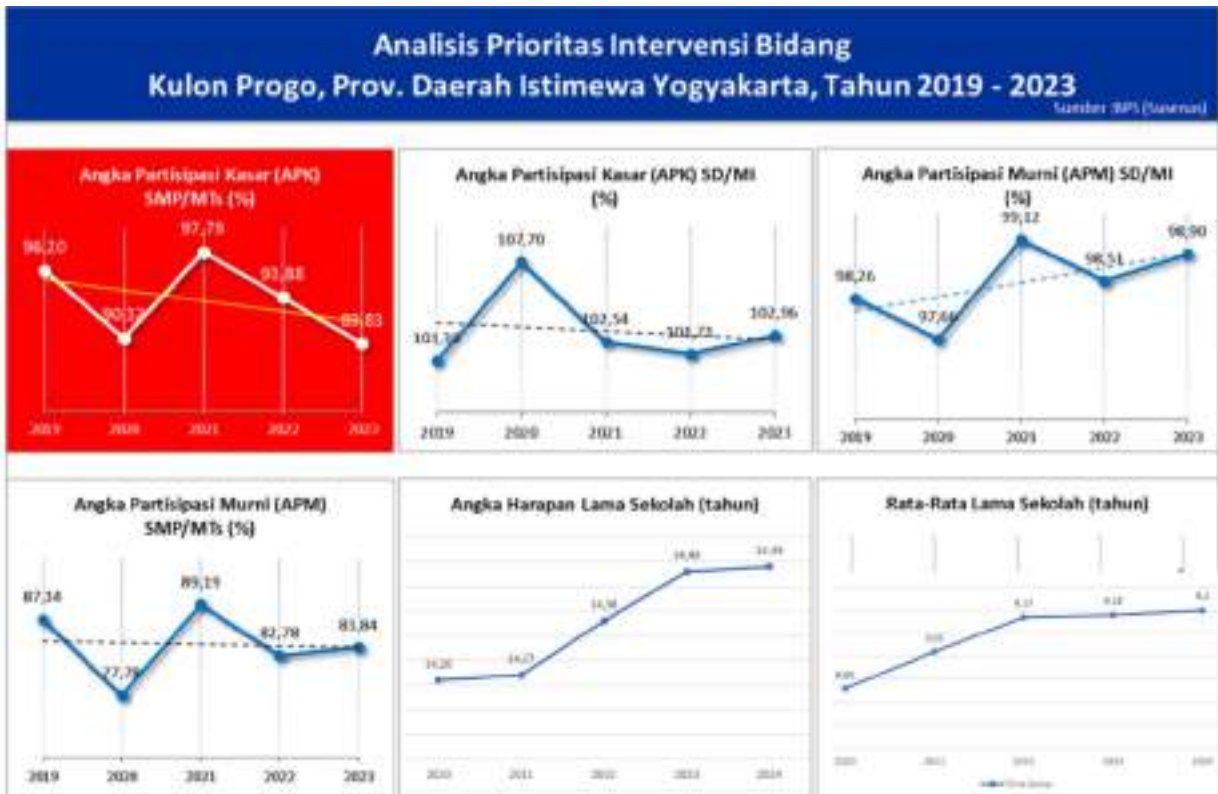
Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kulon Progo, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2019 - 2023

Sumber :BPS (Susenas)



Pada aspek trend, jika dikaitkan antar indikator utama, gap APK SMP/MTs juga cukup jelas terlihat. Pada indikator yang lain, trendnya mengalami perbaikan dengan peningkatan angka yang cukup signifikan. Berbeda dengan trend APK SMP/MTs yang secara signifikan mengalami penurunan.

Grafik 4.4. Casual Attribution Bidang Pendidikan



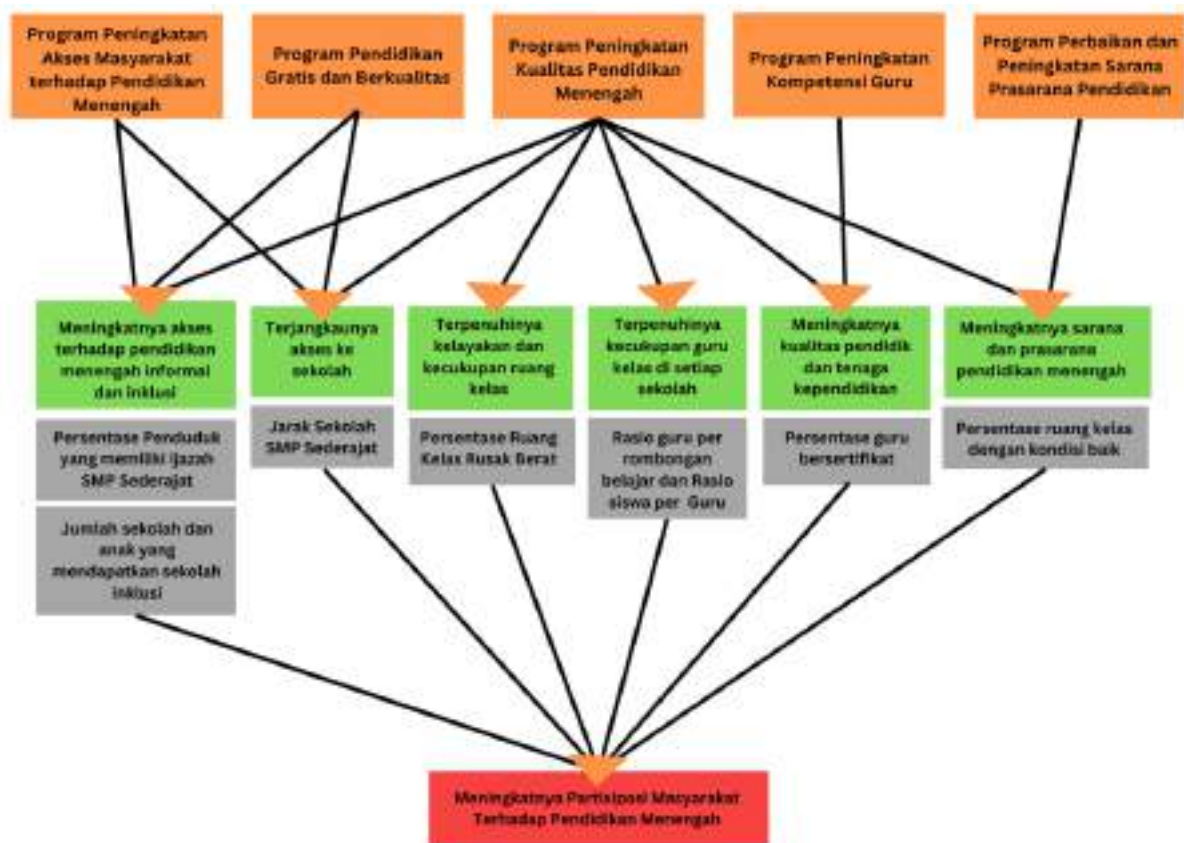
Analisis Intervensi

Untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah menengah (SMP) ada berbagai strategi program yang akan dijalankan pemerintah Kulon Progo. Berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah menengah setidaknya ada 6 sasaran yang ingin dicapai pemerintah Kulon Progo, antara lain ialah

- Meningkatnya akses terhadap pendidikan menengah informal dan inklusi
- Terjangkaunya akses ke sekolah
- Terpenuhinya kelayakan dan kecukupan ruang kelas
- Terpenuhinya kecukupan guru kelas di setiap sekolah
- Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
- Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan menengah

Target tersebut akan dicapai dengan beberapa program reguler seperti program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga beasiswa. Pemerintah juga perlu untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sekolah agar jarak tempuh semakin efisien dan mudah. Selain itu, yang juga sangat penting ialah meningkatkan kualitas sarana prasarana seperti bangunan dan fasilitas sekolah, serta peningkatan kompetensi tenaga pengajar. Jika disajikan dalam teori perubahan, maka dapat dilihat sebagai berikut

Gambar 4.2. Teori Perubahan (ToC) Bidang Pendidikan



Tabel 4.4. Identifikasi Modus Intervensi Bidang Pendidikan

Sasaran	Prioritas Intervensi	Program Kegiatan
Meningkatnya akses terhadap pendidikan informal dan inklusi	Penyelenggaraan pendidikan Kejar Paket B dan Pendidikan inklusi	<ul style="list-style-type: none"> • Program Kejar Paket B • Program pendidikan inklusi SMP Sederajat

Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan menengah SMP Sederajat	Penyelenggaraan pendidikan gratis dan berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya operasional sekolah (BOS) • Beasiswa Pendidikan • Program Indonesia Pintar (PIP)
Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan menengah	Pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi Gedung sekolah • Pemenuhan laboratorium sekolah
Meningkatnya kualitas endidik dan tenaga kependidikan	Penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga pendidik	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan kompetensi bagi tenaga pendidik • Pelaksanaan sertifikasi tenaga pendidik

4.1.3. Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan

Analisis masalah kemiskinan bidang Kesehatan pada bab III meliputi lima indikator penting yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), prevalensi stunting, Angka Harapan Hidup (AHH) dan Angka Morbiditas. Hasilnya, dari lima indikator **ada empat indikator dengan capaian yang lebih baik** yaitu indikator Angka Kematian Ibu yang jumlah kasusnya cenderung menurun, Angka Kematian Bayi dengan jumlah kasus cenderung menurun, Angka Harapan Hidup yang semakin meningkat dan Angka Morbiditas yang cenderung menurun. Sementara itu, **capaian yang masih rendah terjadi pada indikator prevalensi stunting** dengan persentase di atas rata-rata Provinsi DIY. Artinya kasus stunting yang terjadi di Kulon Progo masih cukup tinggi dan menjadi masalah serius dalam pemenuhan gizi dan kesehatan anak-anak yang memerlukan perhatian serius pula dari berbagai pihak khususnya pemerintah Kulon Progo.

Tabel 4.5. Masalah Bidang Kesehatan

No	Indikator Utama	Aspek yang dianalisis			
		Posisi relatif	Perkembangan antar waktu	Efektivitas	Relevansi

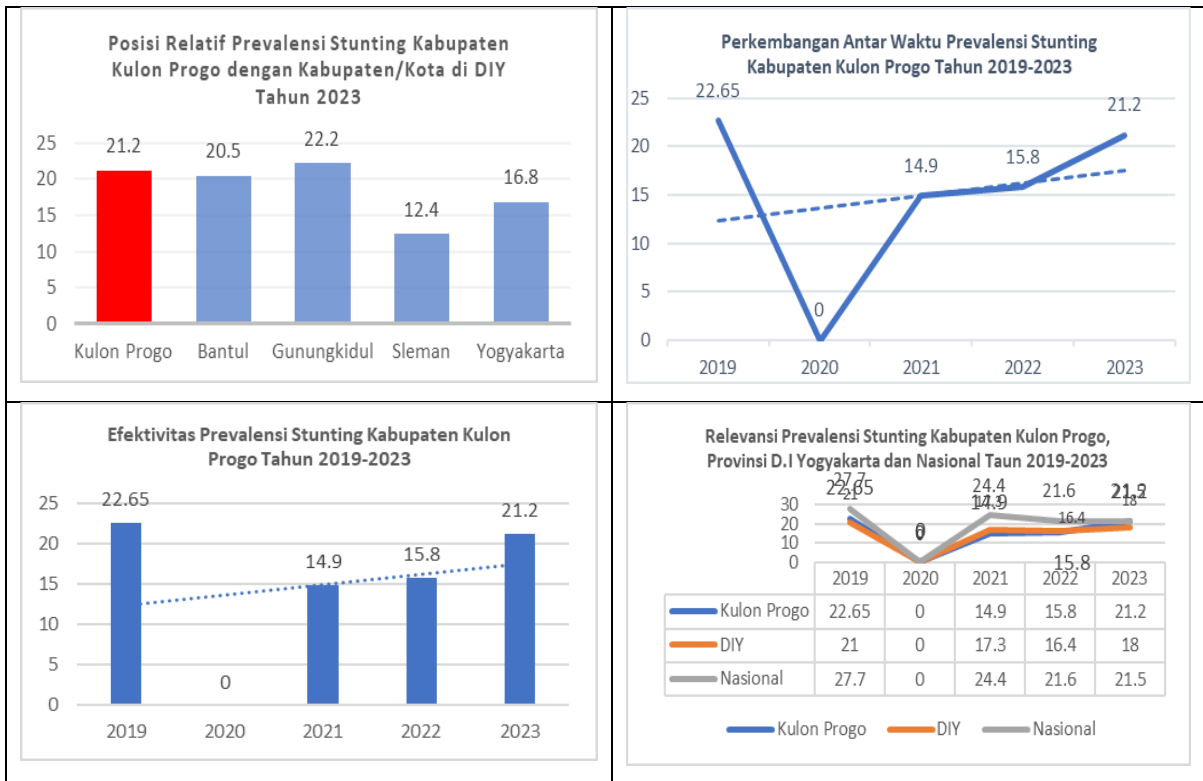
1	Angka Kematian Ibu	Terendah kedua se-DIY	Cenderung menurun	Efektif	Relevan
2	Angka Kematian Bayi	Kedua terendah se-DIY	Cenderung menurun	Efektif	Tidak relevan
3	Prevalensi Stunting	Tertinggi kedua se-DIY, lebih tinggi rata-rata provinsi dan lebih rendah dari rata-rata nasional	Cenderung naik	Tidak Efektif	Tidak relevan
4	Angka Harapan Hidup	Tertinggi pertama se-DIY	Cenderung meningkat	Efektif	Relevan
5	Morbiditas	Tertinggi kedua di DIY	Cenderung menurun	Efektif	Relevan

Hasil analisis pada indikator prevalensi stunting menunjukkan bahwa ada 3 aspek yang perlu mendapat perhatian serius antara lain:

1. Memperbaiki posisi relatif prevalensi stunting Kabupaten Kulon Progo dengan kabupaten/kota lain di DIY
2. Mempertahankan tren perkembangan antar waktu agar konsisten menurun
3. Mengevaluasi relevansi program Kabupaten Kulon Progo dengan Provinsi DIY terkait penurunan prevalensi stunting

Grafik 4.5. Analisis Identifikasi Masalah Prevalensi Stunting

Analisis Identifikasi Masalah Prevalensi Stunting Kabupaten Kulon Progo, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2023



Grafik 4.6. Casual Attribution Bidang Kesehatan

Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2019-2023



Untuk menanggulangi kasus stunting dapat dilakukan berbagai upaya dengan sasaran jangka menengah sebagai berikut:

1. Tercukupinya pangan dan gizi masyarakat miskin dan rentan
2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi layak
4. Meningkatnya surveilans kesehatan pangan dan gizi
5. Meningkatnya pemahaman ibu dan remaja terkait kesehatan reproduksi dan gizi

Secara umum, stunting disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

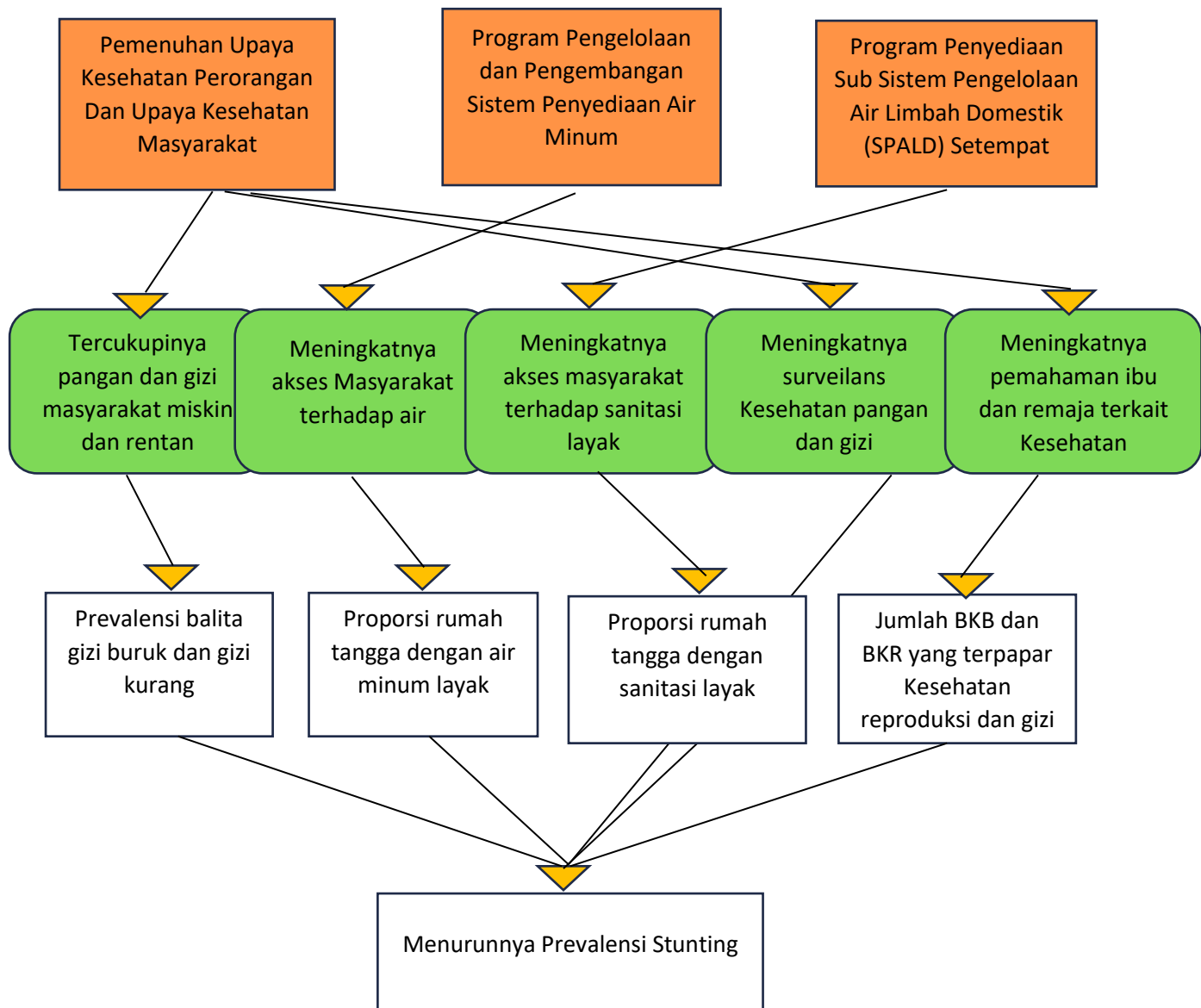
- Kurangnya asupan gizi pada ibu selama hamil, saat melahirkan dan 1.000 hari pertama kehidupan anak
- Pola asuh yang kurang baik, terutama dalam pemberian makan kepada anak
- Anak tidak mendapatkan ASI eksklusif
- Kualitas gizi MPASI yang kurang
- Kurangnya akses air bersih dan sanitasi
- Perilaku Masyarakat yang kurang peduli terhadap pemenuhan gizi dan Kesehatan anak

Di Kulon Progo beberapa faktor pencetus terjadinya stunting sebagian besar disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, pola asuh yang kurang baik, keluarga miskin, anak tidak

mendapatkan ASI eksklusif dan sanitasi yang tidak layak. Beberapa program disiapkan untuk prioritas intervensi penanggulangan stunting di Kulon Progo antara lain:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Gambar 4.3. Teori Perubahan (ToC) Bidang Kesehatan



Tabel 4.6. Identifikasi Modus Intervensi Bidang Kesehatan

Sasaran	Prioritas Intervensi	Program Kegiatan
Tercukupinya pangan	Penyelenggara pangan dan gizi	Pemenuhan Upaya Kesehatan

dan gizi masyarakat miskin dan rentan	masyarakat	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih	Penyelenggara SPAM bagi Masyarakat miskin dan rentan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan kegiatan sebagai berikut <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi layak	Penyelenggara sanitasi layak dan rumah layak huni	Program Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat dengan kegiatan sebagai berikut <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

4.1.4. Prioritas Intervensi Bidang Ketenagakerjaan

Berdasarkan serangkaian analisis pada dua indikator utama bidang ketenagakerjaan seperti TPAK dan TPT, terlihat bahwa kondisi TPAK dan TPT di Kabupaten Kulon Progo sudah cukup baik. TPAK Kulon Progo secara posisi berada di atas rata-rata nasional dan provinsi serta berada di urutan tertinggi kedua di DIY setelah Kabupaten Gunungkidul. Tingginya TPAK berbanding lurus dengan rendahnya TPT di Kabupaten Kulon Progo, di mana TPT Kulon Progo berada di bawah rata-rata nasional dan provinsi serta terendah di antara seluruh kabupaten/kota di Provinsi DIY. Dari aspek trend, TPAK dan TPT di Kabupaten Kulon Progo juga secara konsisten mengalami perbaikan. Hal tersebut menunjukkan efektivitas intervensi.

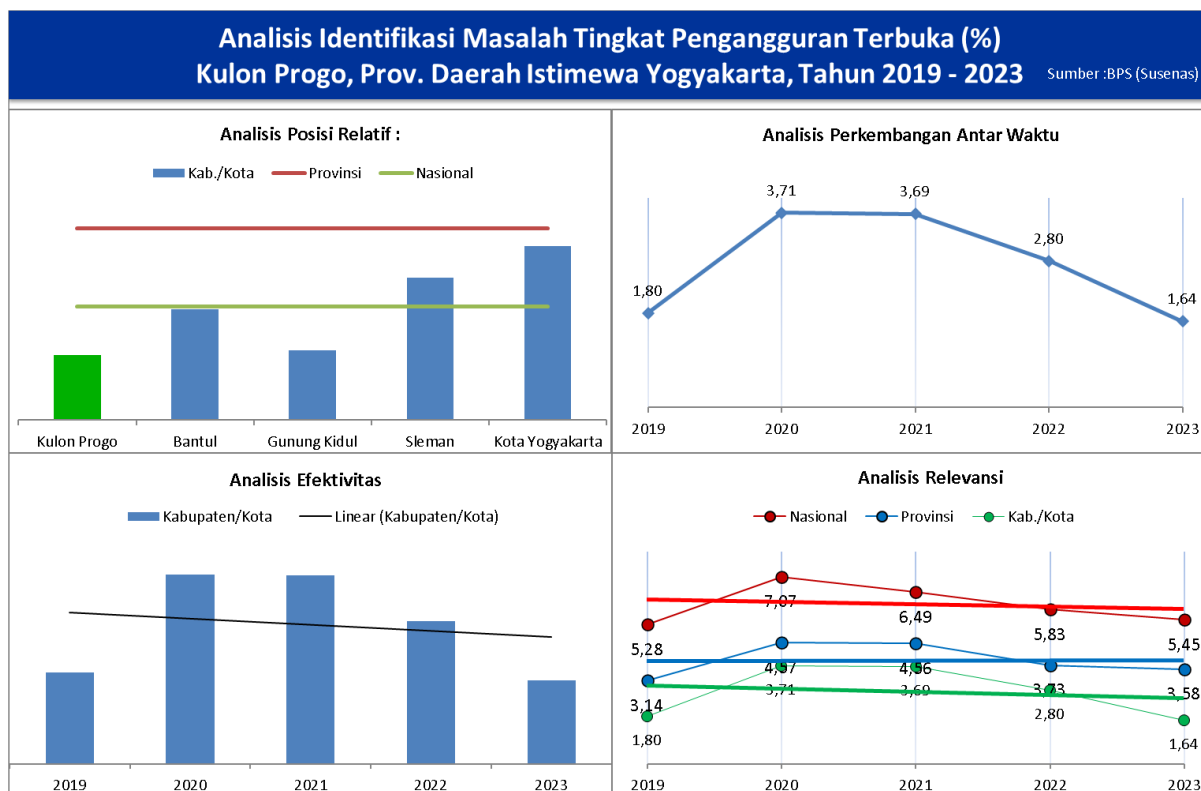
Tabel 4.7. Masalah Bidang Ketenagakerjaan

No	Indikator Utama	Aspek yang dianalisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Lebih tinggi dari rata-rata nasional dan Provinsi. Berada di urutan kedua dengan TPAK tertinggi di DIY	Cenderung Meningkat	Efektif	Relevan dengan Provinsi dan Nasional
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Lebih rendah dari nasional, provinsi dan seluruh Kab/Kota di DIY.	Cenderung Menurun	Efektif	Relevan dengan Provinsi dan Nasional

Maka dapat dilihat lebih khusus grafik analisis pada indikator TPT, terlihat bahwa aspek yang perlu menjadi fokus perbaikan antara lain ialah

1. Memastikan pekerja informal mendapat akses dan kesejahteraan yang setara.
2. Mempertahankan trend penurunan yang konsisten
3. Meningkatkan kompetensi pekerja

Grafik 4.7. Analisis Identifikasi Masalah Tingkat Pengangguran Terbuka



Meski capaian pada dua indikator ketenagakerjaan menunjukkan angka yang baik, namun jika dicermati lebih dalam pada grafik trend antar indikator yang terkait, sebenarnya penurunan TPT Kulon Progo juga memiliki presentase yang kecil atau melambat. Ada banyak penyebab, salah satunya seperti pergeseran demografi dan dominannya sektor pekerjaan informal.

Tabel 4.8 Jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Kulon Progo, Agustus 2023.

Lapangan Pekerjaan Utama	Tahun 2023	
	Jumlah Pekerja	Persentase
Agriculture (Pertanian)	85.247	32,44%
Manufacture (Industri Pengolahan)	69.197	26,33%
Services (Jasa)	108.369	41,23%
Jumlah	262.813	100%

Sumber: Sakernas Agustus 2023 dengan penimbang hasil proyeksi SP 2020, BPS

Tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama selama seminggu terakhir pada Agustus 2023. Pada periode tersebut, sektor pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Kulon Progo adalah sektor jasa. Sektor ini memiliki daya serap tenaga kerja yang cukup tinggi dibandingkan sektor lainnya, dengan jumlah pekerja mencapai 108.369 orang atau sekitar 41,23 persen.

Pada sektor manufaktur, jumlah pekerja pada Agustus 2023 tercatat sebanyak 69.167 orang. Secara persentase, sektor ini menjadi yang paling kecil dalam menyerap tenaga kerja, yakni sebesar 26,33 persen.

Sementara itu, sektor pertanian merupakan kategori dengan jumlah tenaga kerja terbesar kedua setelah sektor manufaktur, dengan jumlah pekerja mencapai 85.247 orang. Beberapa industri pengolahan berskala besar di Kabupaten Kulon Progo meliputi industri pembuatan rambut palsu dan rokok. Selain itu, terdapat pula industri skala kecil dan menengah yang cukup banyak menyerap tenaga kerja, seperti industri makloon untuk kerajinan tangan dari bahan alami, seperti eceng gondok, bambu, dan lainnya.

Tabel 4.9 Persentase Penduduk Yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Kulon Progo, Agustus 2021-2023

Status Pekerjaan Utama	2021	2022	2023
Berusaha Sendiri	15,84	12,38	22,75
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Dibayar dan Buruh/Karyawan/Pegawai	37,15	34,79	34,49
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar dan Pekerja keluarga/Tidak Dibayar	35,89	43,65	33,91
Pekerja Bebas	11,12	9,18	88,84

Sumber: Sakernas Agustus 2021-2022 dengan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015, BPS Sakernas Agustus 2023 dengan penimbang hasil proyeksi SP 2020, BPS

Pada Agustus 2023, mayoritas pekerja di Kulon Progo berstatus sebagai pengusaha yang dibantu pekerja tetap/dibayar serta buruh/karyawan/pegawai, dengan persentase sebesar 34,49 persen. Namun, angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan Agustus 2021 yang mencapai 37,15 persen. Penurunan tersebut mencerminkan adanya pergeseran kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja, di mana sektor formal mengalami penurunan, sementara sektor informal meningkat.

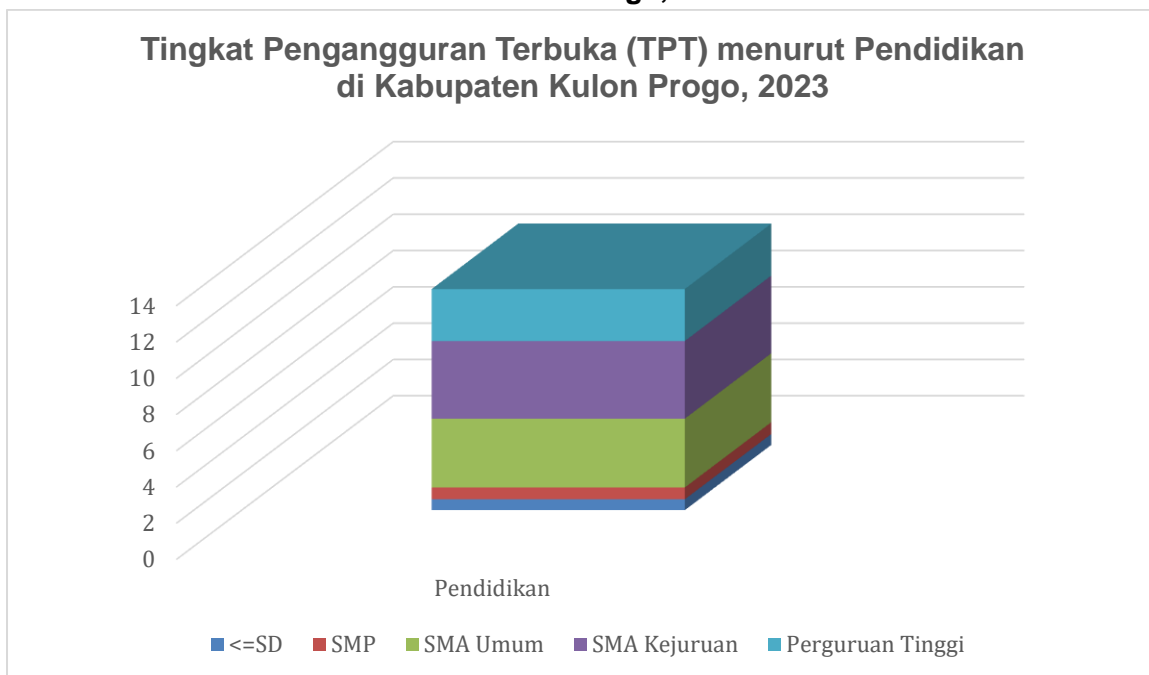
Pada periode Agustus 2021 hingga Agustus 2023, terdapat fluktuasi pada status pekerja yang berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

Pada Agustus 2021, kelompok ini mencapai 35,89 persen, naik menjadi 43,65 persen pada Agustus 2022, tetapi kembali turun pada Agustus 2023 hingga berada di bawah tingkat tahun 2020, yaitu sebesar 33,91 persen.

Sebaliknya, pada Agustus 2023, terjadi peningkatan pada status pekerja yang berusaha sendiri, dengan persentase mencapai 22,75 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kewirausahaan di Kabupaten Kulon Progo.

Sementara itu, status pekerjaan dengan kontribusi paling kecil pada Agustus 2023 adalah pekerja bebas, yang hanya sebesar 8,48 persen. Angka ini turun 2,28 persen poin dibandingkan Agustus 2021 yang tercatat sebesar 11,12 persen.

Grafik 4.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Pendidikan di Kabupaten Kulon Progo, 2023



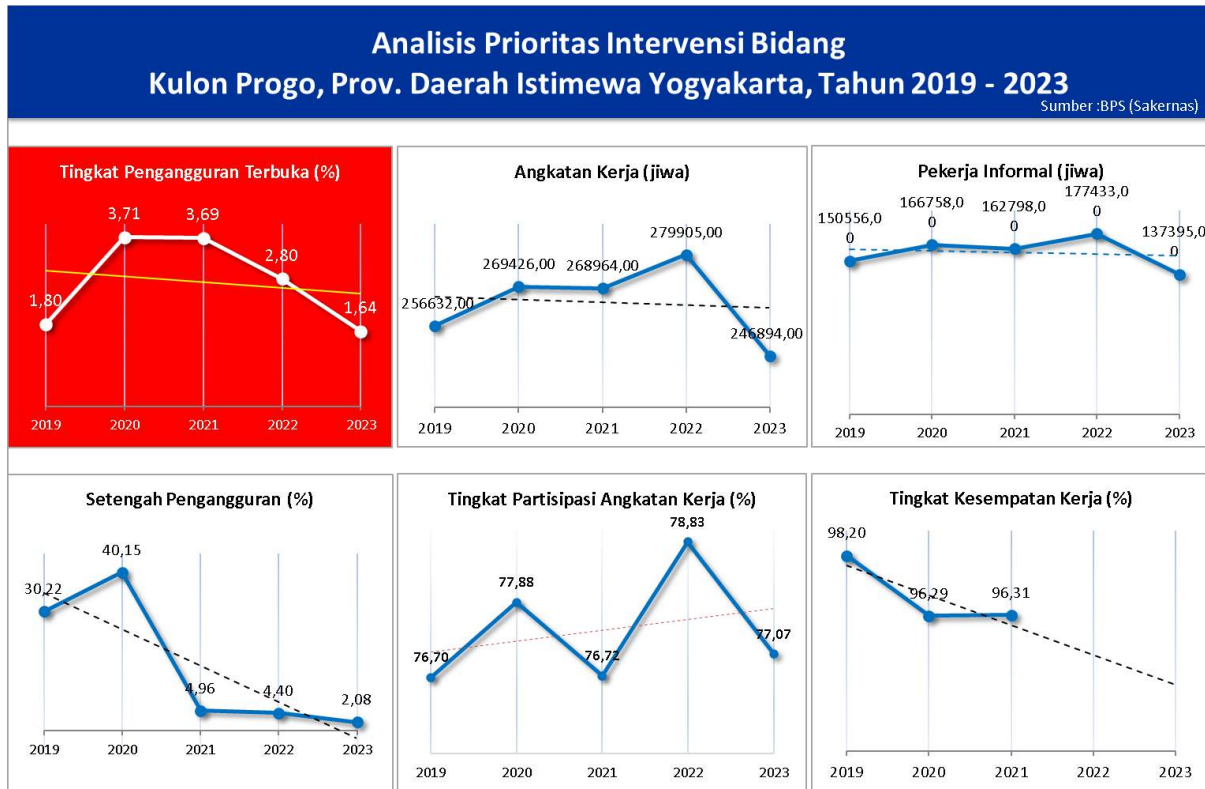
Sumber: Sakernas Agustus 2021-2022 dengan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015, BPS

Pada Agustus 2023, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan variasi berdasarkan tingkat pendidikan. TPT tertinggi tercatat pada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan persentase sebesar 4,28 persen. Sementara itu, TPT terendah terjadi pada lulusan Perguruan Tinggi, yaitu hanya 2,86 persen dari angkatan kerja yang memiliki pendidikan tinggi.

Untuk lulusan SD ke bawah dan SMP, TPT tercatat sangat rendah, masing-masing sebesar 0,60 persen dan 0,65 persen pada Agustus 2023. Data ini menunjukkan bahwa tingkat

penyerapan tenaga kerja untuk lulusan dengan pendidikan rendah sangat tinggi di Kulon Progo. Kondisi tersebut disebabkan oleh dominasi pekerjaan dengan upah rendah dan karakteristik pekerjaan yang tidak memerlukan kualifikasi pendidikan tinggi.

Grafik 4.9. Casual Attribution Bidang Ketenagakerjaan

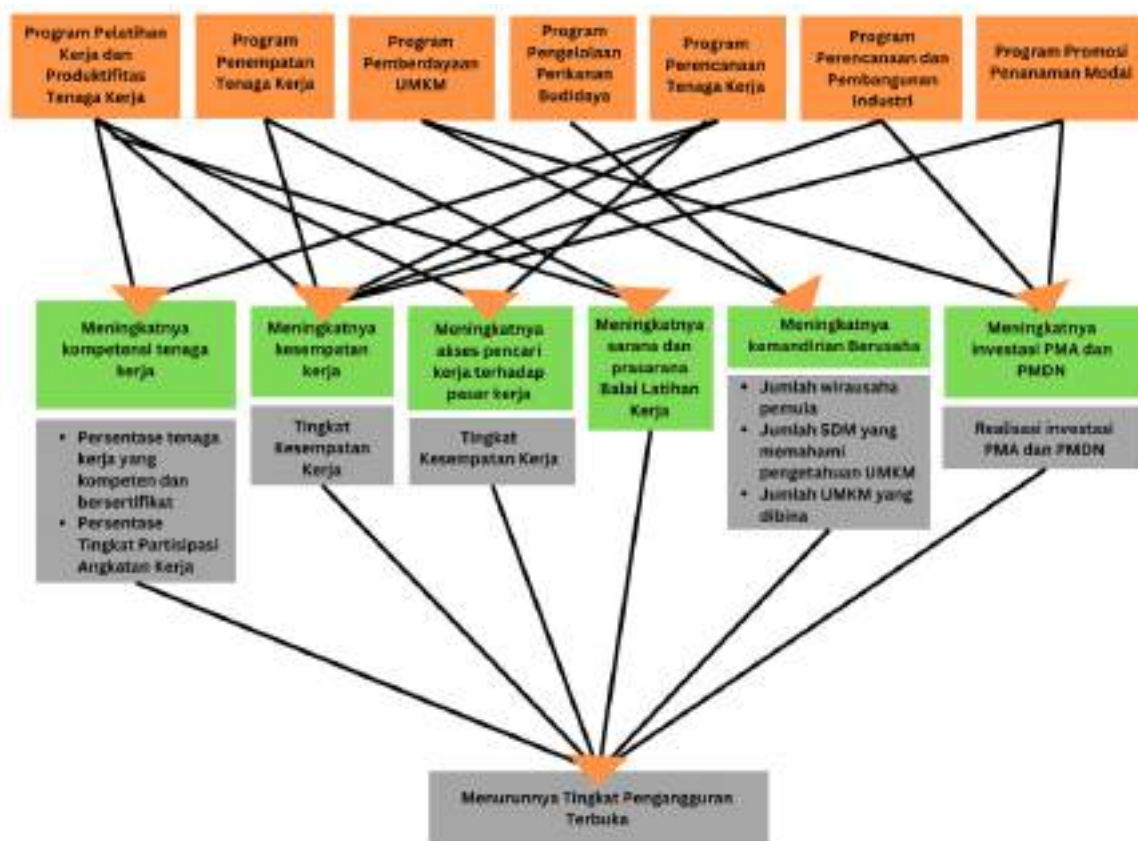


Analisis Intervensi

Untuk menurunkan TPT, sesuai data analisisi prioritas pada grafik di atas, maka setidaknya ada 6 sasaran yang ingin dicapai pemerintah Kulon Progo, antara lain ialah

- Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
- Meningkatnya kesempatan kerja

Gambar 4.4. Teori Perubahan (ToC) Bidang Ketenagakerjaan



Analisis Intervensi

Untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka ada beberapa strategi program yang akan dijalankan pemerintah Kulon Progo. Program-Program tersebut ditargetkan dapat menghasilkan capaian sebagai berikut

- Meningkatnya kompetensi tenaga kerja (kompetensi tenaga kerja dan partisipasi angkatan kerja).
- Meningkatnya kesempatan kerja
- Meningkatnya akses pencari kerja terhadap pasar kerja.
- Meningkatnya sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja.
- Meningkatnya kemandirian berusaha
- Meningkatnya investasi asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN).

Tabel 4.10. Identifikasi Modus Intervensi Bidang Ketenagakerjaan

Sasaran	Prioritas Intervensi	Program Kegiatan
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja (kompetensi tenaga kerja dan partisipasi angkatan kerja).	Penyelenggaraan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Program perencanaan tenaga kerja • Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
Meningkatnya kesempatan kerja	Percepatan pertumbuhan investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Program perencanaan tenaga kerja • Program perencanaan dan pembangunan industri • Program promosi penanaman modal • Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program penempatan kerja
Meningkatnya akses pencari kerja terhadap pasar kerja	Penyelenggaraan bursa kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Program perencanaan tenaga kerja • Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja • Bursa kerja/Job Fair
Meningkatnya sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja	Peningkatan sarana prasarana yang adaptif terhadap ekosistem kerja	Pengembangan dan pengadaan balai latihan kerja yang adaptif dengan ekosistem kerja
Meningkatnya kemandirian berusaha	Penyelenggaraan pendampingan terhadap UMKM dan perikanan budidaya	<ul style="list-style-type: none"> • Program pemberdayaan UMKM • Program pengelolaan perikanan budidaya
Meningkatnya kemandirian berusaha Meningkatkan investasi asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN)	Pengembangan iklim penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> • Program promosi penanaman modal • Program Pengembangan Iklim Penanaman Moda

4.1.5. Prioritas Intervensi Bidang Kesetaraan Gender

Identifikasi masalah kemiskinan bidang kesetaraan gender pangan pada Bab III menggunakan pendekatan analisis posisi relatif, perkembangan antar waktu, efektivitas dan relevansi terhadap tiga indikator yang diantaranya Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

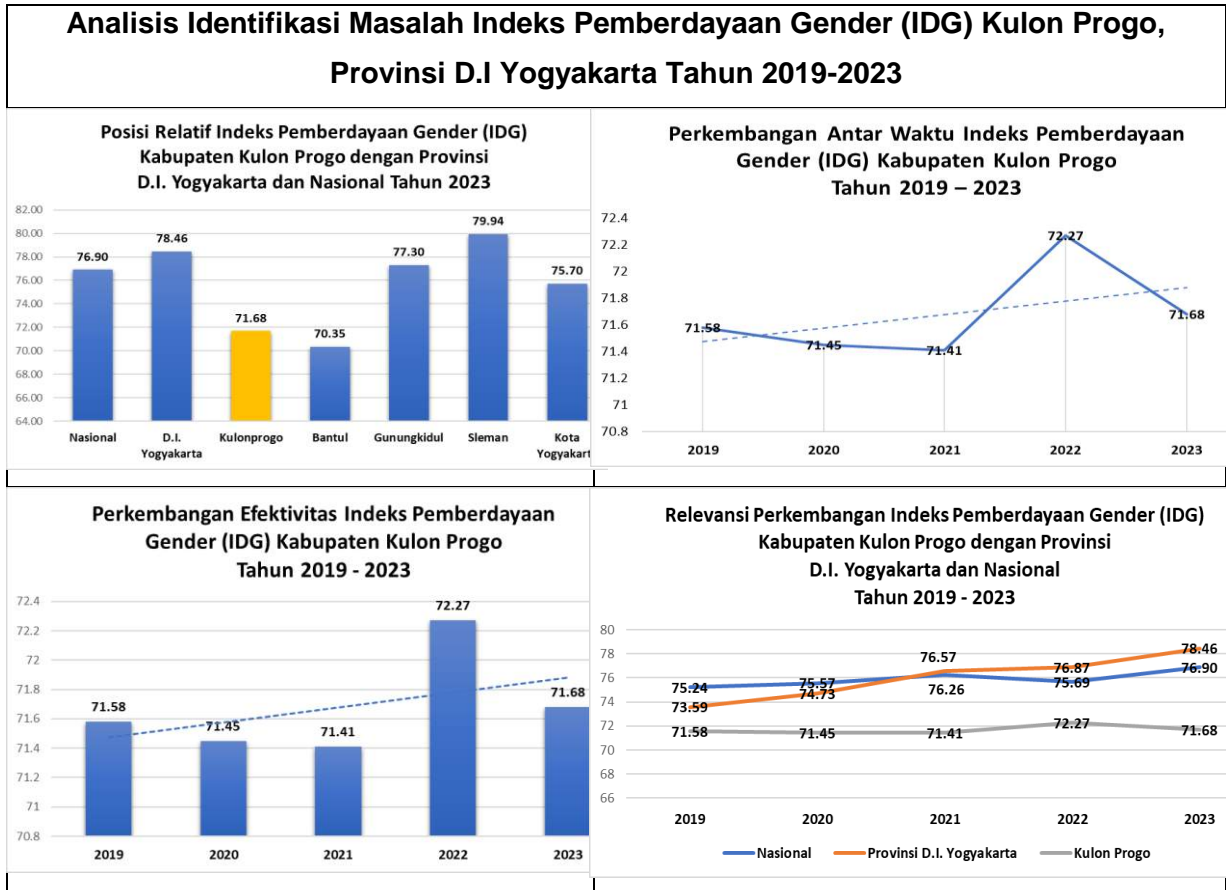
Tabel 4.11. Masalah Bidang Kesetaraan Gender

No	Indikator Utama	Aspek yang dianalisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Di atas rata-rata Nasional dan Provinsi DIY	Meningkat	Efektif	Kurang Relevan
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Di bawah rata-rata nasional dan Provinsi DIY	Cenderung Meningkatkan	Cukup Efektif	Tidak Relevan
3.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Lebih Rendah dari Provinsi DIY dan Nasional	Menurun	Cukup Efektif	Cukup Relevan

Satu indikator utama dibidang masalah kesetaraan gender ialah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang perlu mendapatkan perhatian, jika dibandingkan dengan dua indikator lainnya. Upaya peningkatan nilai IDG adalah proses yang sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan. Evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk mengukur keberhasilan program dan melakukan penyesuaian program jika diperlukan. Selain itu, partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

1. Meningkatkan dan secara konsisten dapat menstabilkan nilai IDG setiap tahunnya.
2. Mengevaluasi efektivitas intervensi program dan kegiatan dari komponen-komponen yang berkontribusi pada peningkatan atau penurunan IDG
3. Memperbaiki posisi relative IDG dari kabupaten/kota lainnya

Grafik 4.10. Analisis Masalah Bidang Kesetaraan Gender Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2019-2023

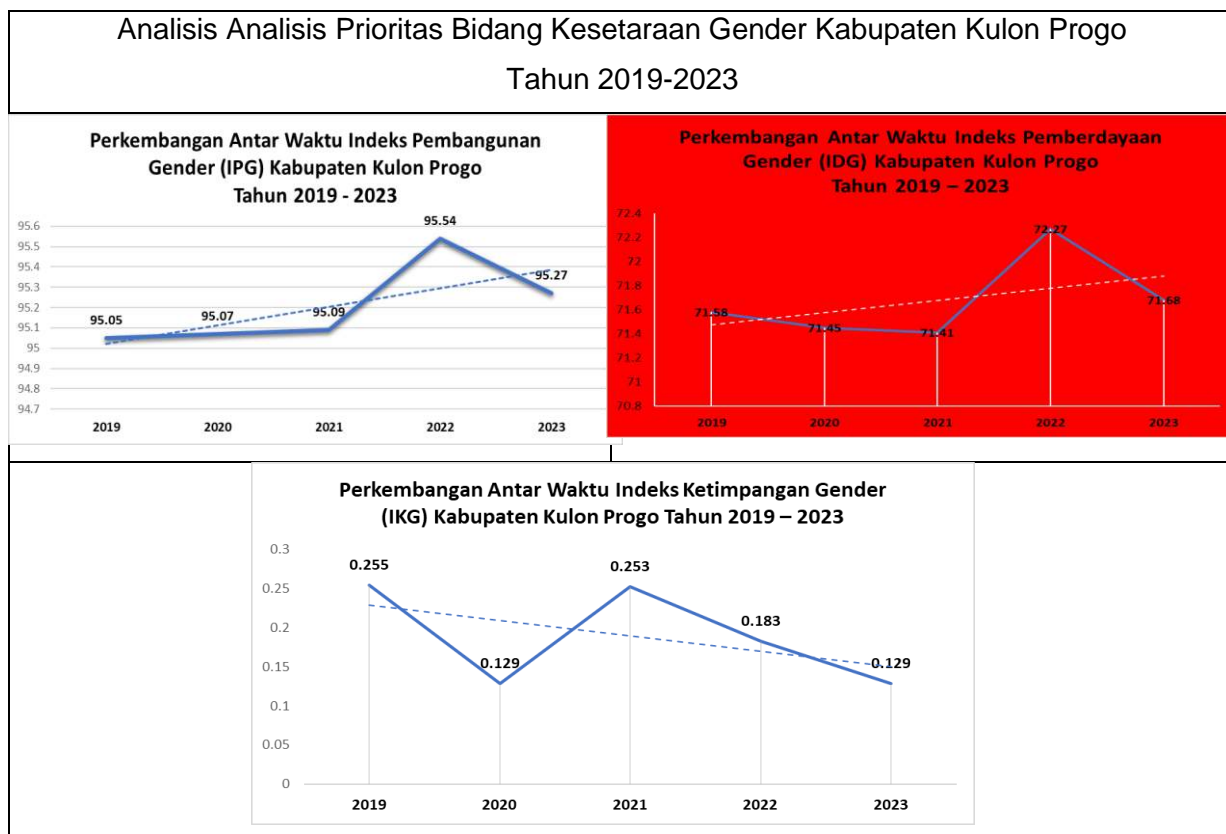


Matriks identifikasi masalah IDG di atas, secara tren nilai Kabupaten Kulon Progo cenderung meningkat dari tahun ke tahun, namun masih di bawah rata-rata Provinsi DIY dan nasional. Berdasarkan pendekatan posisi relative, jika dibandingkan dengan daerah lain, Kabupaten Kulon Progo memiliki nilai IDG yang lebih rendah dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota lain di DIY seperti Sleman, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta. Melalui pendekatan antar waktu, Kabupaten Kulon Progo di tahun 2019 sampai 2021 mengalami penurunan IDG. Sedangkan di tahun 2022, IDG mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dari 71.41 menjadi 72.27 poin, nilai tersebut ialah nilai tertinggi selama periode lima tahun.

Kemudian di tahun 2023 IDG kembali menurun di angka 71.68 poin. Kemudian dari pendekatan efektivitas, meskipun terjadi fluktuasi, data tersebut menunjukkan bahwa program dan kebijakan pemerintah telah berjalan cukup efektif. Berdasarkan hasil analisis relevansi, meskipun ada tren peningkatan, nilai IDG di ketiga wilayah juga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Nilai IDG di Kabupaten Kulon Progo selama tahun 2019 hingga 2023 secara konsisten berada di bawah nilai IDG nasional dan Provinsi DIY. Ini

mengindikasikan bahwa Pemberdayaan perempuan di Kabupaten Kulon Progo masih menghadapi tantangan yang lebih besar, jika dibandingkan dengan nasional dan Provinsi DIY.

Grafik 4.11. Casual Attribution Bidang Kesetaraan Gender



Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai Indeks Pemberdayaan Gender pada komponen kesetaraan ekonomi perempuan, diantaranya:

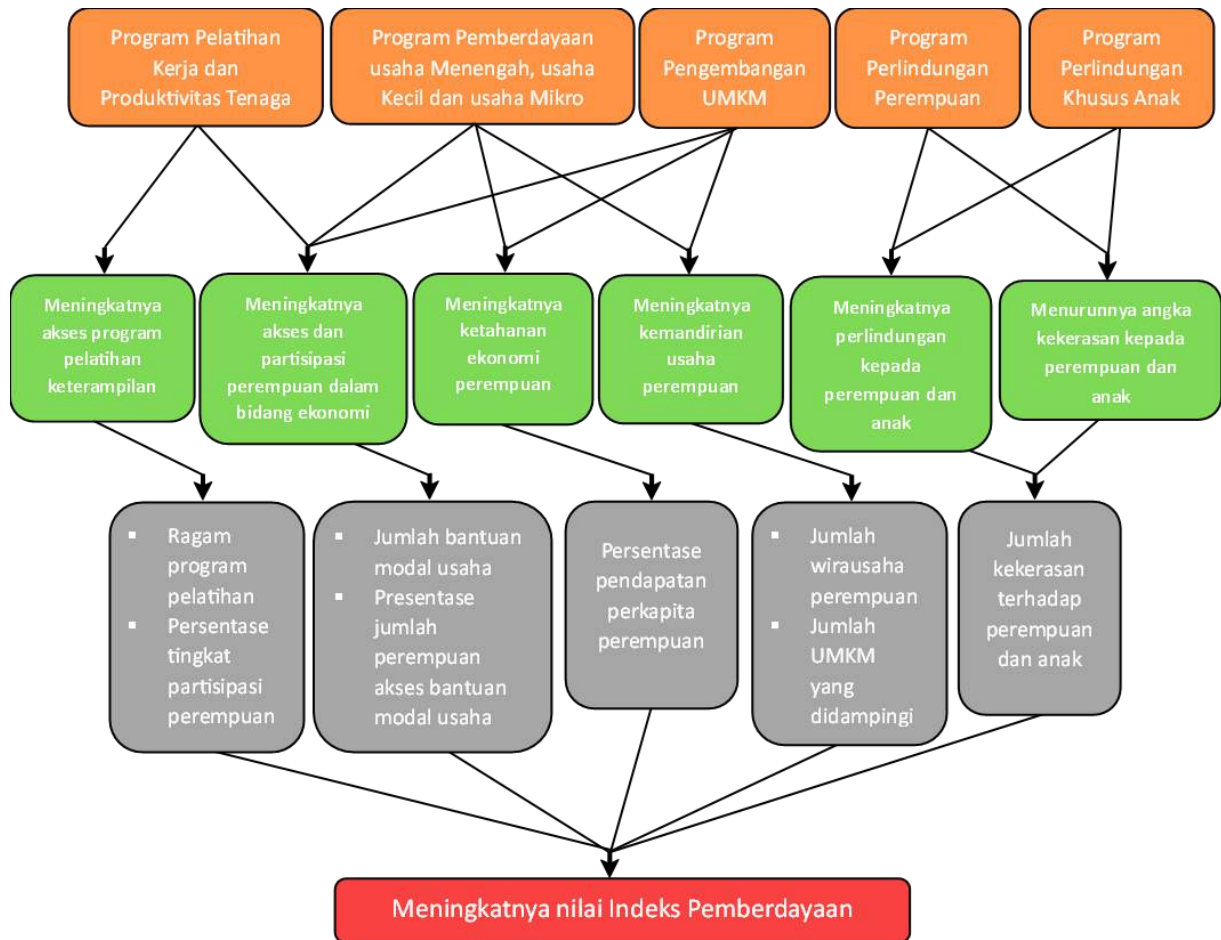
- 1) Meningkatnya akses dan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi
- 2) Meningkatnya akses program pelatihan keterampilan
- 3) Meningkatnya kemandirian usaha perempuan
- 4) Meningkatnya ketahanan ekonomi perempuan
- 5) Menurunnya angka kekerasan kepada perempuan dan anak
- 6) Meningkatnya perlindungan kepada perempuan dan anak

Beberapa program yang dapat dilakukan untuk mencapai sasaran jangka menengah terhadap upaya peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender, antara lain:

- 1) Program pengembangan UMKM
- 2) Program Pemberdayaan usaha Menengah, usaha Kecil dan usaha Mikro (UMKM)
- 3) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 4) Program Perlindungan Perempuan

5) Program Perlindungan Khusus Anak

Gambar 4.5. Teori Perubahan (ToC) Bidang Kesetaraan Gender



4.1.6. Prioritas Intervensi Bidang Kesejahteraan Sosial

Identifikasi masalah kemiskinan bidang sosial pada Bab III menggunakan pendekatan analisis posisi relatif, perkembangan antar waktu, efektivitas dan relevansi terhadap empat indikator yaitu jumlah penduduk disabilitas, jumlah penduduk lansia terlantar, perempuan rawan sosial ekonomi dan jumlah anak terlantar.

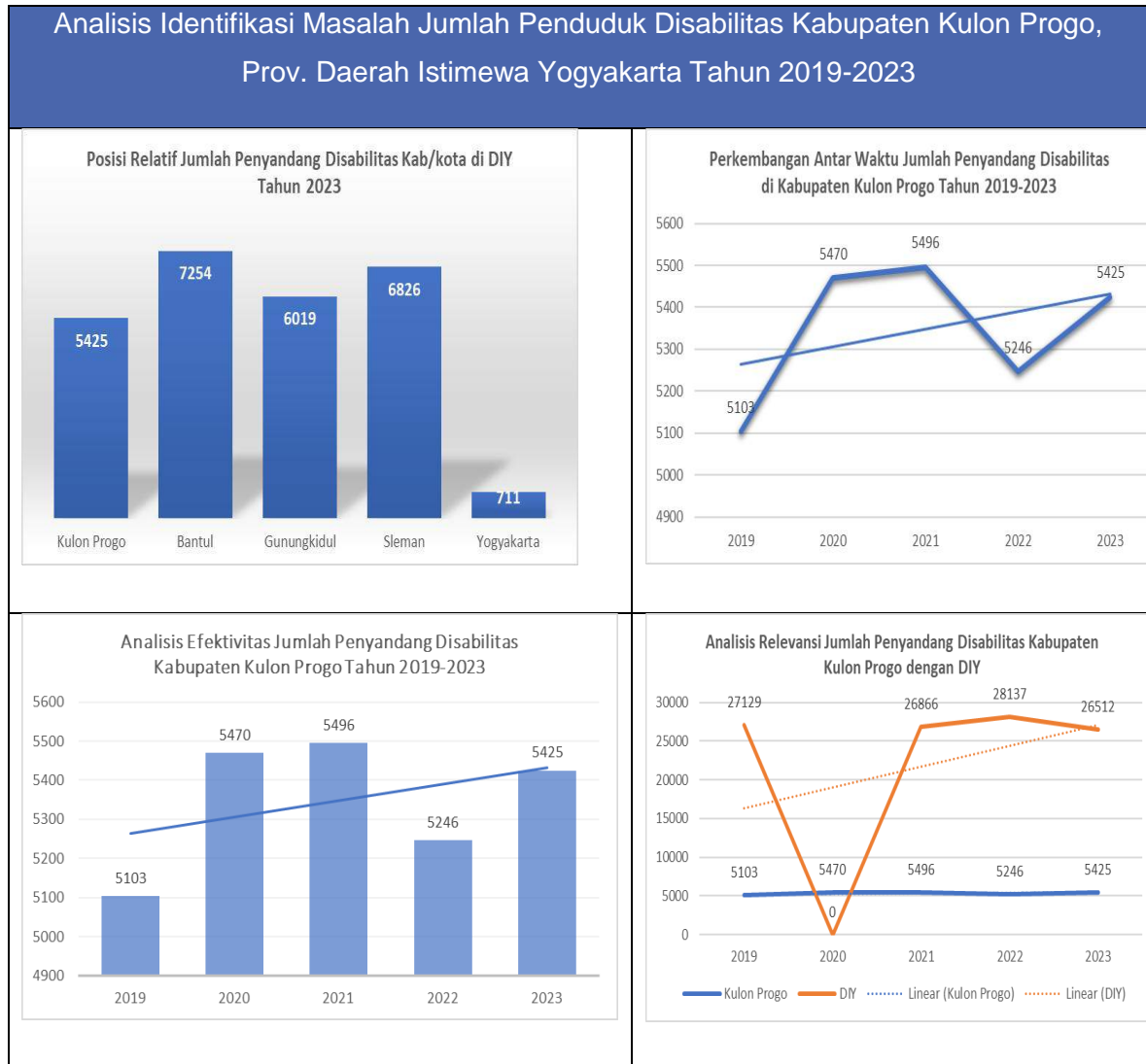
Tabel 4.12. Masalah Bidang Sosial

No	Indikator Utama	Aspek yang dianalisis			
		Posisi relatif	Perkembangan antar waktu	Efektivitas	Relevansi
1	Jumlah penduduk disabilitas	Kedua terendah se-DIY	Cenderung meningkat	Kurang efektif	Relevan
2	Jumlah penduduk lansia terlantar	Ketiga se-DIY	Cenderung menurun	Efektif	Relevan
3	Perempuan rawan sosial ekonomi	Terendah kedua se-DIY	Cenderung menurun	Efektif	Kurang relevan
4	Jumlah anak terlantar	Tertinggi kedua terbanyak se-DIY	Cenderung menurun	Efektif	Relevan

Dua indikator utama yaitu jumlah penduduk disabilitas dan jumlah anak terlantar perlu mendapatkan perhatian serius untuk perbaikan yaitu

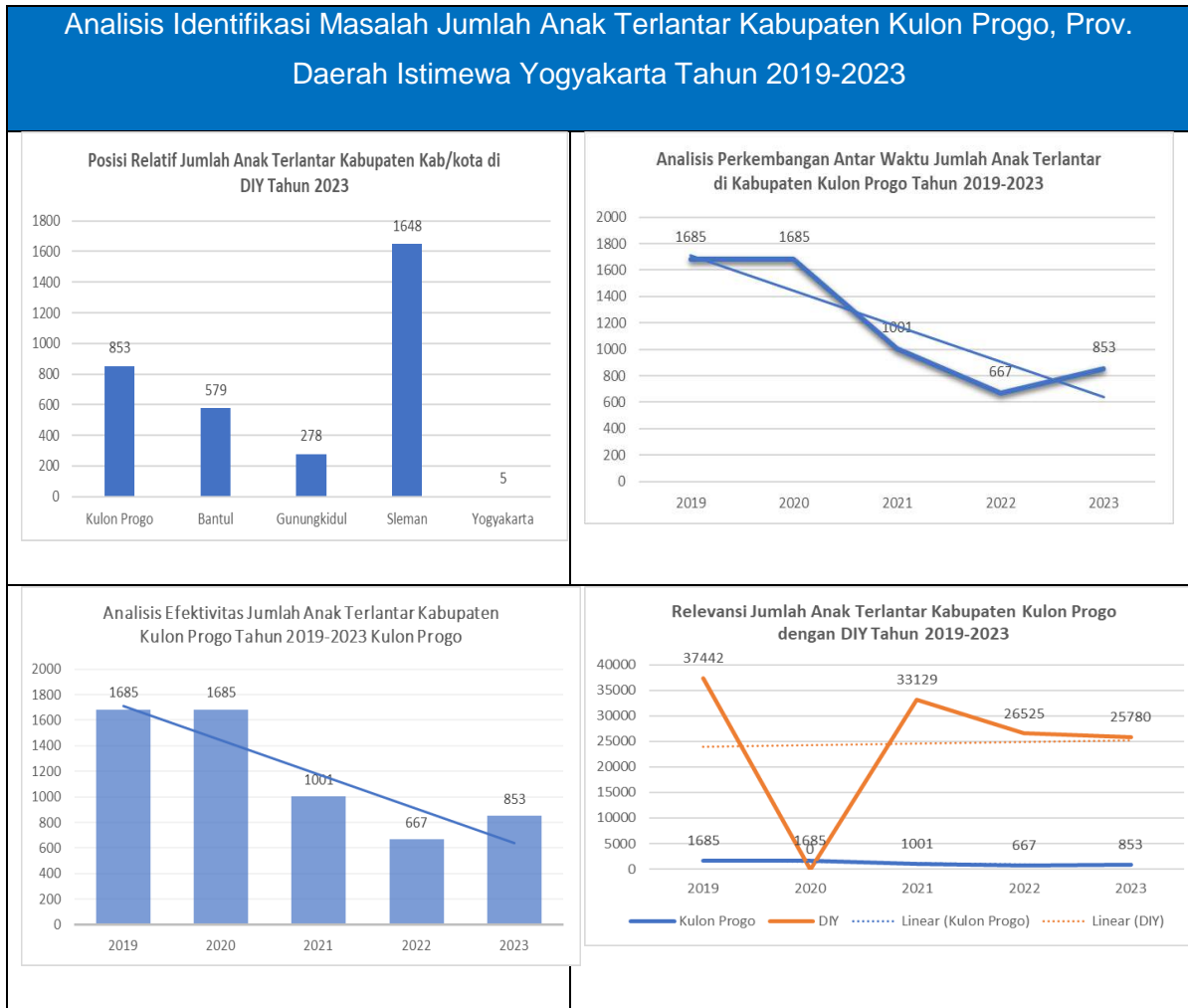
1. Memperbaiki tren jumlah penduduk disabilitas tahunan yang cenderung meningkat
2. Mengevaluasi efektivitas intervensi program bagi penyandang disabilitas
3. Memperbaiki posisi relative jumlah anak terlantar dari kabupaten/kota lainnya

Grafik 4.12. Analisis Masalah Jumlah Penduduk Disabilitas



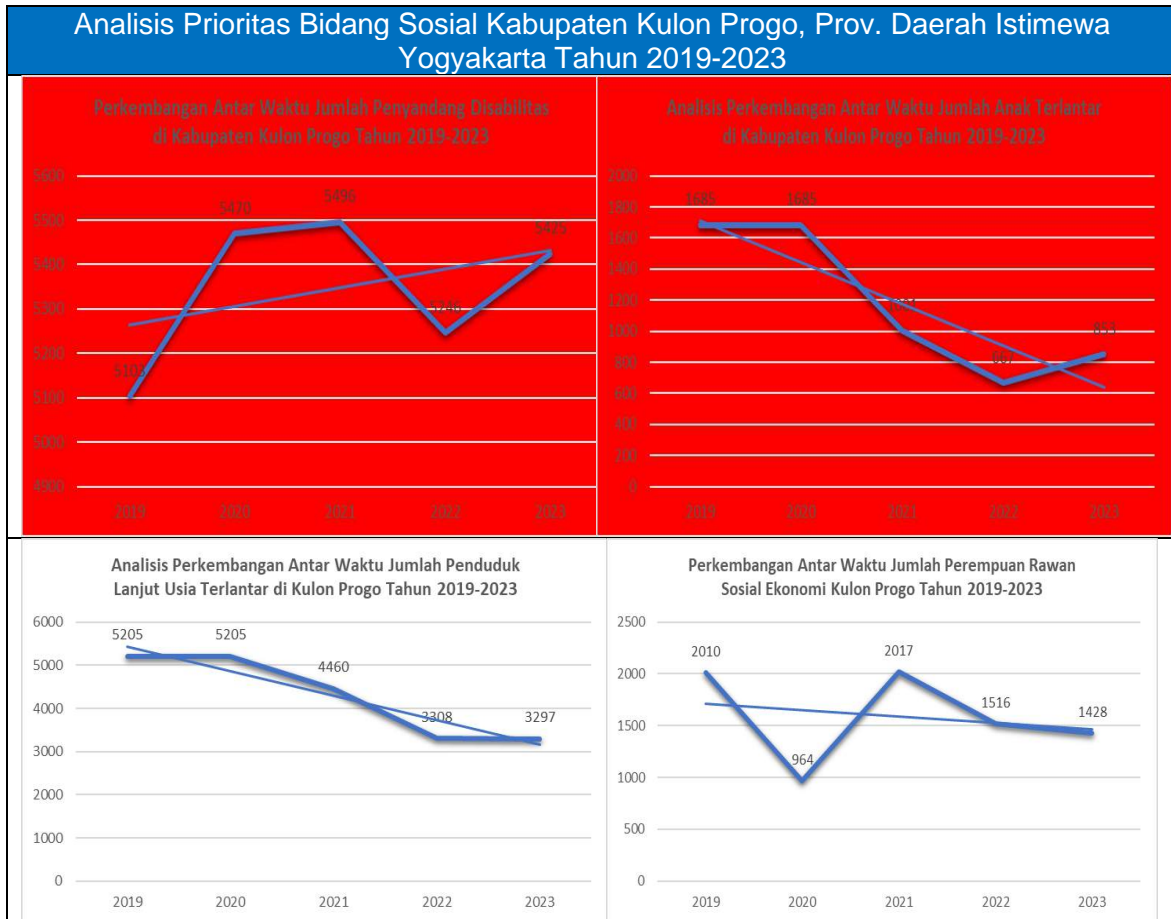
Jumlah penduduk disabilitas berdasarkan posisi relatif menunjukkan bahwa jumlah penduduk disabilitas pada tahun 2023 menempati urutan ke 2 paling sedikit dibanding 5 kabupaten/kota lainnya, namun jumlahnya masih terlalu banyak yaitu 5.425 jiwa dengan selisih yang cukup signifikan dengan Kota Yogyakarta yang berada pada posisi paling sedikit jumlah penduduk disabilitasnya yaitu 711 jiwa. Berdasarkan pendekatan perkembangan antar waktu jumlah penduduk disabilitas menunjukkan kecenderungan meningkat atau bertambah selama kurun waktu 2019-2023. Meningkat atau bertambahnya jumlah penduduk disabilitas akan menambah kerentanan atau penduduk yang rawan miskin.

Grafik 4.13. Analisis Masalah Jumlah Anak Terlantar



Jumlah anak terlantar dari posisi relatif menempatkan Kulon Progo di urutan kedua dengan jumlah anak terlantar terbanyak yaitu 853 anak setelah Kabupaten Gunungkidul yang berjumlah 1.648 anak. Sesuai grafik perkembangan antar waktu menunjukkan kecenderungan menurun jumlah anak terlantarnya dalam kurun 2019-2022 namun Kembali naik pada tahun 2023

Grafik 4.14. Casual Attribution Bidang Sosial



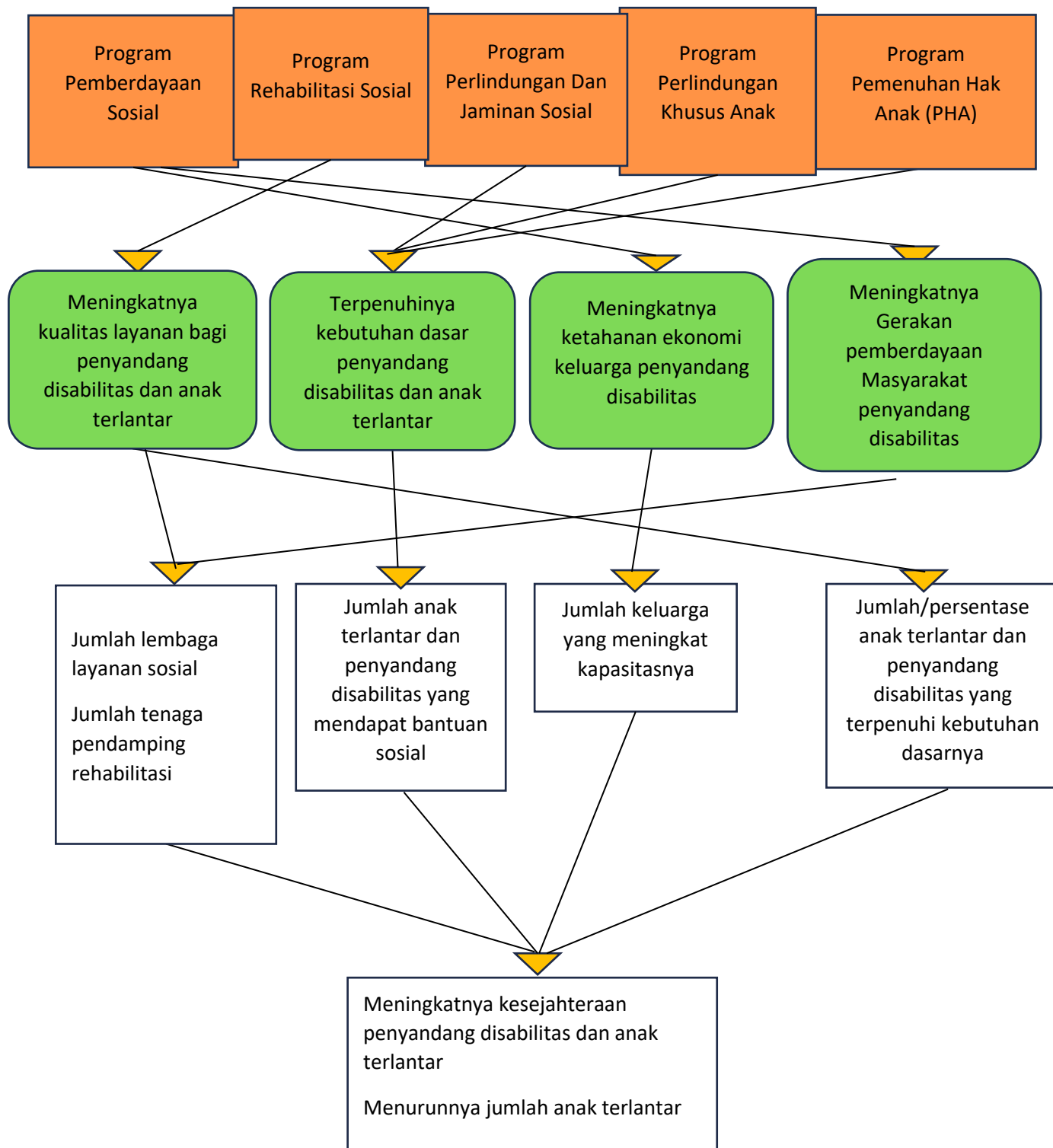
Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi jumlah penduduk disabilitas dan jumlah anak terlantar untuk sasaran jangka menengah antara lain

- Meningkatnya kualitas layanan bagi penyandang disabilitas
- Meningkatnya gerakan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas
- Meningkatnya ketahanan ekonomi keluarga penyandang disabilitas
- Terpenuhinya kebutuhan dasar anak yang terlantar
- Meningkatnya kualitas pelayanan dan pendampingan oleh pendamping rehabilitasi

Beberapa program yang dapat dilakukan untuk mencapai sasaran jangka menengah terhadap penyandang disabilitas dan anak terlantar antara lain:

1. Program pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Perlindungan Khusus Anak
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Gambar 4.6. Teori Perubahan (ToC) Bidang Sosial



Tabel 4.13. Identifikasi Modus Intervensi Bidang Sosial

Sasaran	Prioritas Intervensi	Program Kegiatan
Meningkatnya kualitas layanan bagi penyandang disabilitas dan anak terlantar	Penyelenggara rehabilitasi sosial	Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas dan anak terlantar	Penyelenggara program perlindungan dan jaminan sosial Penyelenggara perlindungan khusus Penyelenggara pemenuhan Hak Anak	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Program Perlindungan Khusus Anak <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten / Kota Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak (PKHA)
Meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga	Penyelenggara pemberdayaan sosial	Program Pemberdayaan Sosial <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya gerakan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas	Penyelenggara pemberdayaan sosial	Program Pemberdayaan Sosial <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

4.1.7. Prioritas Intervensi Bidang Infrastruktur Dasar

Tabel 4.14. Masalah Bidang Infrastruktur

No	Indikator Utama	Aspek yang dianalisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
1	Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi layak	Lebih rendah dari nasional dan Provinsi. Memiliki kesenjangan yang Signifikan dengan Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta.	Cenderung Naik	Tidak Efektif	Relevan dengan Provinsi dan Nasional
2	Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak	Lebih rendah dari nasional, provinsi dan seluruh Kab/Kota di DIY.	Cenderung Naik	Tidak Efektif	Relevan dengan Provinsi dan Nasional
3	Proporsi rumah tangga dengan akses listrik	Lebih tinggi dari nasional, dan provinsi serta relatif sama dengan kabupaten/kota lainnya.	Cenderung sama	Efektif	Relevan dengan Provinsi dan Nasional

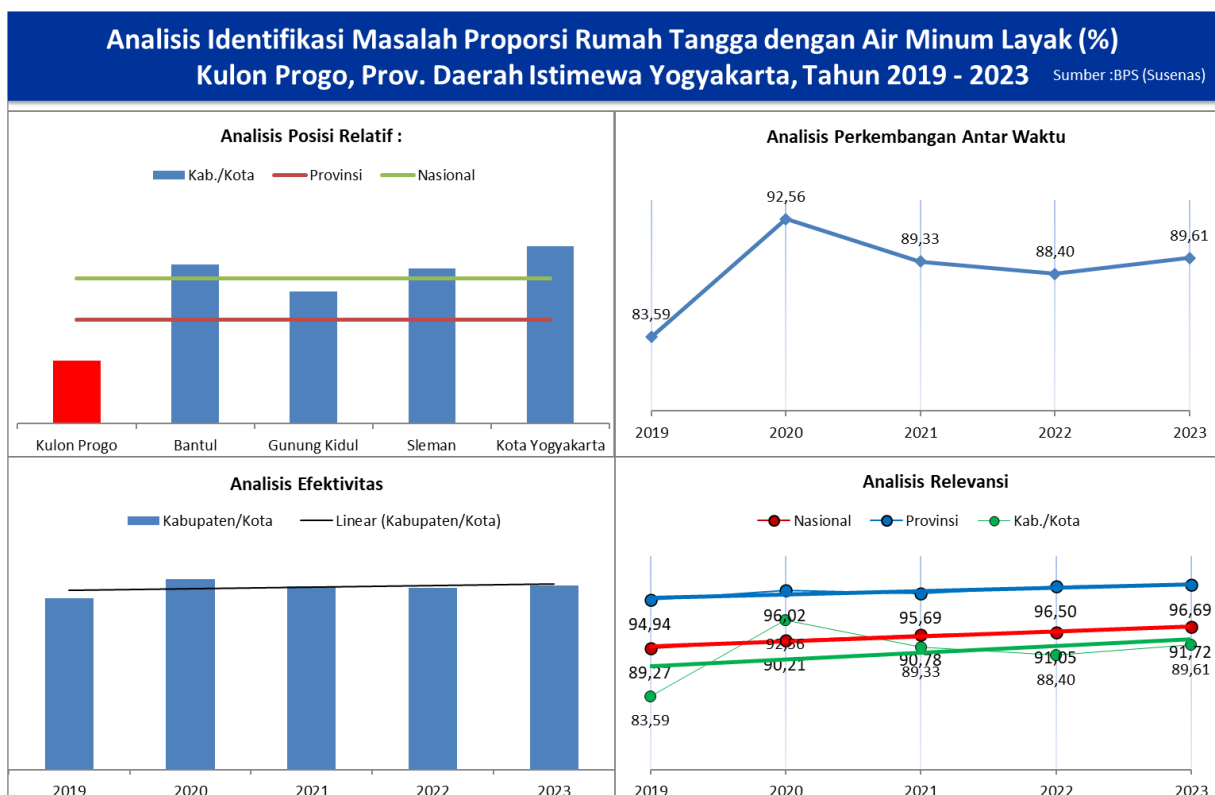
Berdasarkan data yang disajikan dalam Analisis Infrastruktur Dasar pada bab sebelumnya, terdapat dua variabel utama yang menjadi fokus analisis, yaitu proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak dan proporsi rumah tangga dengan air minum yang layak di Kabupaten Kulon Progo.

Dalam hal proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak, Kabupaten Kulon Progo mencatatkan angka sebesar 83,59%, yang lebih rendah dibandingkan dengan proporsi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencapai 94,67%. Angka tersebut masih di bawah proporsi nasional yang mencapai 82,36%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun

terdapat peningkatan akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Kulon Progo dibandingkan dengan provinsi, masih terdapat peluang untuk perbaikan agar dapat mencapai standar nasional. Sementara itu, untuk proporsi rumah tangga dengan air minum layak, Kabupaten Kulon Progo juga masih berada di bawah rata-rata nasional dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai isu yang akan dianalisis dalam Bab IV, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Kulon Progo menghadapi tantangan dalam mencapai proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak dan air minum layak yang sesuai dengan standar nasional. Oleh karena itu, analisis lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya proporsi tersebut serta merumuskan strategi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan akses sanitasi dan air minum yang layak bagi rumah tangga di Kabupaten Kulon Progo.

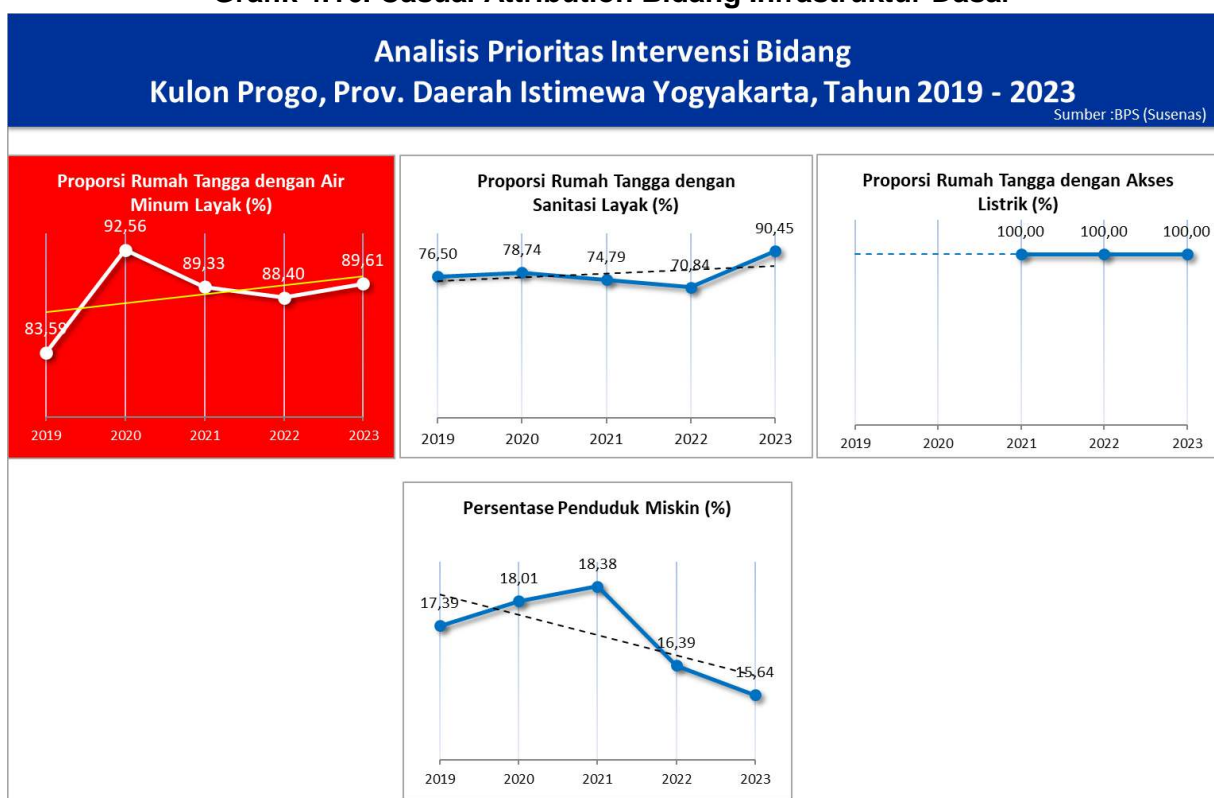
Grafik 4.15. Analisis Identifikasi Masalah Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 - 2023



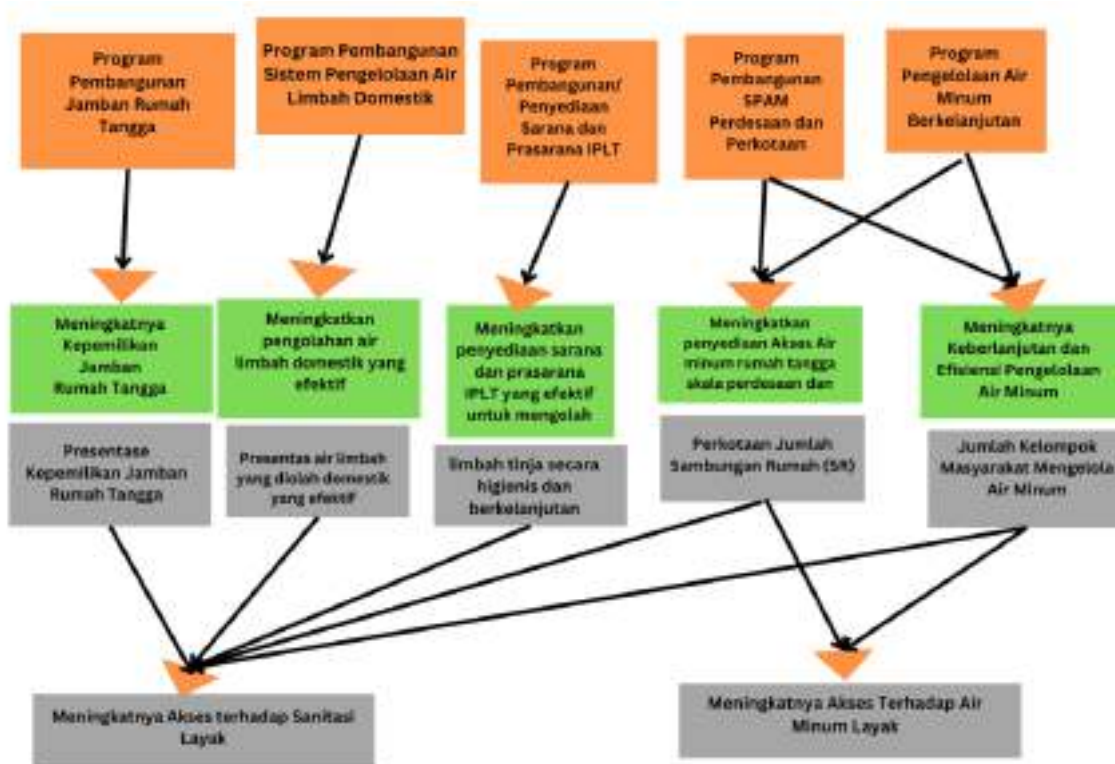
Analisis Intervensi Bidang Infrastruktur Dasar

Terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam upaya mencapai 100% akses terhadap sanitasi yang layak dan air minum yang aman di Kabupaten Kulon Progo. Isu ini menjadi perhatian utama karena dampaknya yang signifikan terhadap kesehatan, kesejahteraan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Beberapa faktor yang berkontribusi antara lain kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sanitasi yang memadai serta akses terhadap air minum yang aman. Ketidaktahuan tentang praktik sanitasi yang baik, ditambah dengan kebiasaan yang sulit diubah, dapat menghambat pencapaian akses yang memadai. Selain itu, kemampuan masyarakat dalam menyediakan akses sanitasi yang layak juga menjadi salah satu persoalan yang perlu diatasi.

Grafik 4.16. Casual Attribution Bidang Infrastruktur Dasar



Gambar 4.7. Teori Perubahan (TOC) Bidang Infrastruktur Dasar



Tabel 4.15. Identifikasi Modus Intervensi Bidang Infrastruktur Dasar

Sasaran	Prioritas Intervensi	Program Kegiatan
Meningkatnya Kepemilikan Jamban Rumah Tangga	Penyelenggaraan jamban keluarga untuk warga miskin di pedesaan	Program Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Meningkatkan pengolahan air limbah domestik yang efektif	Penyelenggara sanitasi layak dan rumah layak huni	Program pembangunan instalasi limbah rumah tangga
Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana IPLT yang efektif untuk mengolah	Penyelenggaraan sarana dan prasarana IPLT bagi warga miskin di pedesaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatkan penyediaan Akses Air minum rumah tangga skala pedesaan dan	Penyelenggara SPAM bagi Masyarakat miskin dan rentan	Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya Keberlanjutan dan Efisiensi Pengelolaan Air Minum	Penyelenggaraan penyediaan air minum warga miskin di pedesaan	Program peningkatan air minum berkelanjutan

4.2. Analisis Kondisi Fiskal

Kemampuan fiskal daerah memiliki peranan penting dalam menjalankan program/kegiatan yang terkait pelayanan dasar, khususnya penanggulangan kemiskinan. Kemampuan pengelolaan fiskal juga berimplikasi terhadap kesehatan keuangan daerah. Melalui analisis ini, kita dapat mengukur kemampuan pemerintah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran, serta mengatur proporsi untuk belanja pada urusan-urusan yang bersifat strategis atau prioritas.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 memberikan pedoman yang komprehensif mengenai pengelolaan keuangan daerah, termasuk di dalamnya struktur dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dokumen ini merinci secara rinci seluruh pendapatan yang diharapkan diterima dan seluruh pengeluaran yang direncanakan dalam satu tahun anggaran. Dengan kata lain, APBD adalah "buku kas" pemerintah daerah yang menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Secara umum, struktur APBD menurut PP No. 12 tahun 2019, terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Ketiga komponen tersebut memiliki sumber, alokasi dan peruntukannya masing-masing. Hal tersebut dapat diamati sebagai berikut.

4.2.1. Pendapatan Daerah

Menurut PP 12 tahun 2019, Pendapatan Daerah didefinisikan sebagai semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Adapun sumber dari pendapatan daerah didapat dari 3 sumber berikut,

- **Pendapatan Asli Daerah (PAD):** Pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain.
- **Dana Perimbangan:** Dana yang diterima dari pemerintah pusat sebagai bagian dari sistem bagi hasil. Dana ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bagi Hasil Pajak.
- **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:** Pendapatan yang diperoleh dari sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

4.2.2. Belanja Daerah

Belanja daerah menurut PP 12 tahun 2019, belanja daerah didefinisikan sebagai semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tahun berkenaan. Adapun belanja daerah dapat dialokasikan untuk kebutuhan sebagai berikut

- **Belanja Operasi:** Belanja untuk kegiatan rutin sehari-hari, seperti gaji pegawai, pemeliharaan aset, dan belanja barang dan jasa.
- **Belanja Modal:** Belanja untuk menambah aset tetap, seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan peralatan, dan investasi.

Selain belanja operasi dan belanja modal, pemerintah daerah juga dapat mengalokasikan anggaran untuk belanja barang/jasa dan belanja lainnya.

4.2.3. Pembiayaan Daerah

Sementara pembiayaan daerah menurut PP 12 tahun 2019 adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh dana tambahan di luar pendapatan daerah yang bersumber dari pajak, retribusi, dan lain-lain. Dana tambahan ini digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan atau menutup defisit anggaran. Komponen pembiayaan dibagi menjadi dua sebagai berikut.

- **Penerimaan Pembiayaan:** Penerimaan dari pinjaman, penyertaan modal, dan lain-lain.
- **Pengeluaran Pembiayaan:** Pengeluaran untuk melunasi pinjaman dan penyertaan modal.

Untuk mengetahui kondisi APBD Kabupaten Kulon Progo selama 5 tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.16. APBD Kulon Progo Tahun 2019-2023

No	APBD	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendapatan Daerah	1.674,62 M	1.770,88 M	1.561,08 M	1.208,44 M	1.602,78 M
2	Belanja Daerah	1.711,75 M	1.766,78 M	1.543,64 M	1.214,55 M	1.623,40 M
3	Pembiayaan Daerah	37,13 M	-4,10 M	-17,44 M	6,12 M	20,61 M

Sumber: Kemenkeu (Diolah).

Tabel trend APBD tersebut menunjukkan bahwa gambaran umum keuangan daerah Kabupaten Kulon Progo selama periode 2019-2023. Selama periode tersebut, terlihat bahwa keuangan Kabupaten Kulon Progo cukup dinamis. Pada komponen pendapatan daerah, terlihat bahwa trendnya mengalami fluktuasi cukup signifikan dari tahun ke tahun. Setelah terjadi peningkatan pada tahun 2019 ke tahun 2020, pada periode tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup drastis dan kembali naik pada tahun 2023.

Pada komponen belanja daerah, kondisi yang muncul ialah adanya tren Menurun. Secara umum, belanja daerah cenderung menurun dari tahun 2019 hingga 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Sementara pada komponen pembiayaan, terlihat adanya inkonsistensi atau fluktuatif. Hal tersebut terlihat dari Tahun 2019-2021 yang mengalami defisit, sedangkan tahun 2022 dan 2023 mengalami surplus.

Untuk melihat lebih dalam alokasi anggaran belanja, kita perlu melihat proporsinya selama 5 tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

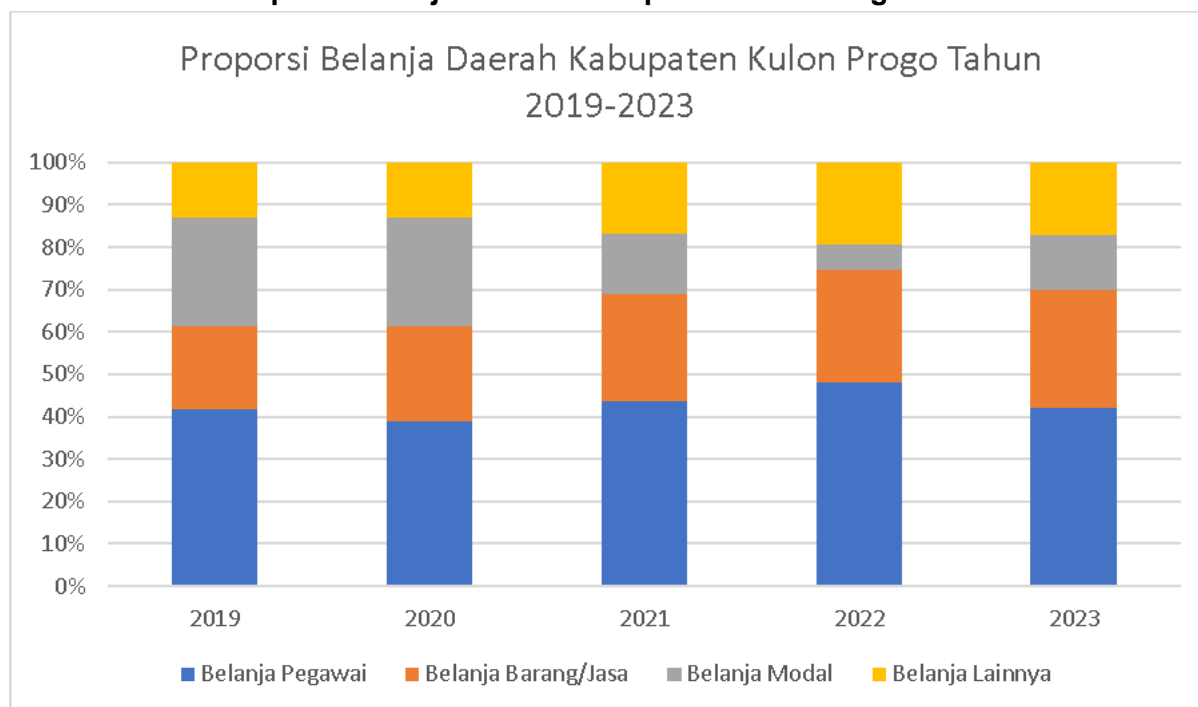
Tabel 4.17. Belanja Daerah pada APBD Kulon Progo tahun 2019-2023

No	APBD	2019	2020	2021	2022	2023
1	Belanja Pegawai	713,25 M	685,86 M	676,15 M	583,84 M	681,78 M
2	Belanja Barang/Jasa	338,62 M	399,70 M	387,53 M	324,10 M	453,38 M
3	Belanja Modal	437,49 M	450,57 M	221,96 M	71,26 M	208,80 M
4	Belanja Lainnya	222,39 M	230,64 M	258,00 M	235,35 M	279,44 M

Sumber: Kemenkeu (Diolah)

Jika dilihat proporsinya, dapat terlihat pada grafik berikut

Grafik 4.17. Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 - 2023



Sumber: Kemenkeu (Diolah)

Tabel dan grafik di atas menunjukkan proporsi belanja daerah Kabupaten Kulon Progo pada periode tahun 2019-2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja pegawai selalu menjadi komponen dengan porsi anggaran terbesar setiap tahunnya. Nilainya jauh di atas kategori lain, seperti pada 2019 (Rp 713,25 M) dibandingkan dengan belanja modal (Rp 437,49 M) atau belanja barang/jasa (Rp 338,62 M). Begitupun pada tahun 2023, hasil analisis menunjukkan bahwa belanja pegawai 1,5 kali lebih besar dari belanja barang/jasa (Rp 453,38 M), 3,2 kali lebih besar dari belanja modal (Rp 208,80 M) dan 2,4 kali lebih besar dari belanja lainnya (Rp 279,44 M). Pada periode tahun 2020-2022, belanja pegawai memang sempat menurun signifikan dibandingkan barang/jasa, tetapi tetap, proporsinya masih lebih besar.

Pada periode tersebut, terlihat adanya fluktuasi terjadi sepanjang 2019-2023, puncaknya pada 2019 dengan Rp 713,25 M. Kemudian terjadi penurunan signifikan pada 2022 hingga Rp 583,84 M dan pulih kembali ke Rp 681,78 M pada 2023. Penurunan drastis pada tahun 2022 besar kemungkinan terkait kebijakan efisiensi anggaran atau pergeseran prioritas sebab realokasi anggaran pada masa pandemi Covid-19.

Tren belanja barang/jasa menunjukkan kecenderungan meningkat. Hal tersebut terlihat dari Rp 338,62 M pada 2019 menjadi Rp 453,38 M pada 2023. Penurunan hanya terjadi pada 2022 dengan Rp 324,10 M. Kenaikan konsisten merupakan bagian dari pergeseran prioritas pemerintah terhadap kebutuhan operasional atau pengadaan barang/jasa.

Pada belanja modal, terlihat ada penurunan drastis yang terjadi dari 2020 ke 2022. Dari Rp 450,57 M pada tahun 2020 menjadi Rp 71,26 M pada tahun 2022, meskipun pada tahun 2023 terlihat kembali mengalami sedikit pemulihan menjadi Rp 208,80 M. Penurunan tajam belanja modal pada 2021-2022 dapat dikaitkan dengan dampak pandemi COVID-19, yang mungkin menyebabkan fokus pada belanja rutin dibandingkan pembangunan fisik. Sementara pada belanja lainnya terlihat mengalami kenaikan yang konsisten selama periode tersebut, hal tersebut terlihat dari Rp 222,39 M pada tahun 2019 menjadi Rp 279,44 M pada tahun 2023.

Secara umum, kondisi belanja Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2019-2023 menunjukkan dampak pandemi yang signifikan terhadap penurunan anggaran, terutama belanja modal dan belanja pegawai. Namun, Kulon Progo berhasil bangkit pada tahun 2023 dengan naiknya komponen belanja yang sempat menurun seperti belanja modal dan belanja pegawai. Sementara, pada komponen belanja barang/jasa dan belanja lainnya mengalami peningkatan konsisten, menunjukkan fokus pada kebutuhan rutin dan operasional pemerintahan.

4.3. Kemandirian Fiskal

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengalihan urusan pemerintahan konkuren kepada daerah menjadi dasar dalam penerapan otonomi daerah. Otonomi daerah mengacu pada hak, kewenangan, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengelola serta mengatur urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utamanya adalah mewujudkan desentralisasi di seluruh wilayah. Desentralisasi sendiri didefinisikan sebagai pelimpahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan prinsip otonomi. Dengan demikian, daerah diharapkan mampu menjalankan fungsi pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara mandiri.

Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, diperlukan adanya indikator yang dapat mengukur tingkat kemandirian fiskal setiap daerah. Indikator ini bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan, memetakan kondisi, serta memberikan gambaran tentang

tingkat kemandirian suatu wilayah. Semakin tinggi rasio kemandirian fiskal, semakin besar kemampuan daerah tersebut untuk berdiri sendiri dalam mengelola sumber daya dan kebutuhan lokalnya.

Untuk melihat sejauh mana rasio pendapatan daerah Kulon Progo, baik Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah dan Dana Kalurahan (TKDD), dan Pendapatan Lainnya, dapat diamati pada tabel di bawah ini.

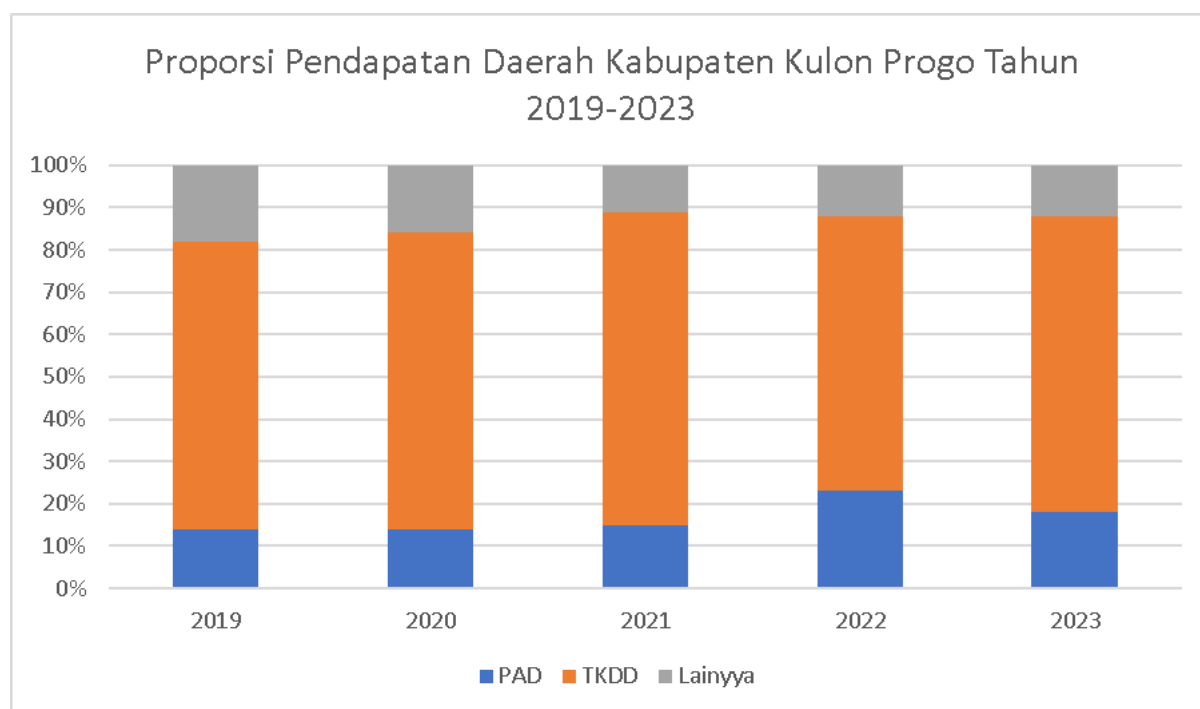
Tabel 4.18. Pendapatan Daerah Kabupaten Kulon Progo 2019-2023

APBD	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Daerah	1.674.620.000.000	1.770.880.000.000	1.561.080.000.000	1.208.440.000.000	1.602.780.000.000
PAD	226.190.000.000	247.920.000.000	235.570.000.000	275.080.000.000	281.330.000.000
TKDD	1.134.900.000.000	1.233.460.000.000	1.158.230.000.000	779.700.000.000	1.129.440.000.000
Lainnya	313.520.000.000	289.500.000.000	167.280.000.000	153.660.000.000	192.010.000.000

Sumber: Kemenkeu (Diolah)

Jika dilihat proporsi dalam bentuk grafik, dapat terlihat sebagai berikut

Grafik 4.18. Proporsi Pendapatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 – 2023



Sumber: Kemenkeu (Diolah)

Dari persentase dan proporsi di atas cukup jelas terlihat bahwa rasio antara PAD dan TKDD memiliki gap yang cukup besar. Selama lima tahun terakhir, pendapatan daerah Kabupaten Kulon Progo sangat bergantung ke pemerintah pusat. Kulon Progo secara konsisten mendapatkan rata-rata 70% sumber pendapatan daerahnya dari TKDD. Tingginya ketergantungan terhadap TKDD tersebut tentu berpengaruh terhadap kapasitas fiskal Kabupaten Kulon Progo.

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Rumus untuk menghitung kapasitas fiskal daerah (KFD) kabupaten/kota adalah: $KFD \text{ kabupaten/kota-}i = [\text{pendapatan} + \text{penerimaan pembiayaan tertentu}] - [\text{pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{belanja tertentu} + \text{pengeluaran pembiayaan tertentu}]$. Untuk melihat KFD Kabupaten Kulon Progo, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.19. Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2019-2023

IKFD Kabupaten Kulon Progo		
Tahun	Indeks KFD	Kategori Kapasitas Fiskal Kabupaten
2019	1,003	Sedang
2020	0,070	Rendah
2021	0,913	Sedang
2022	1,492	Rendah
2023	1,174	Rendah

Sumber: PMK, Peta Kapasitas Fiskal Daerah 2019-2023 (Diolah).

Berdasarkan tabel IKFD di atas, terlihat bahwa selama lima tahun terakhir, kapasitas fiskal Kulon Progo hanya berada pada kategori "**Sedang**" sebanyak **dua kali** (2019 dan 2021). **Tiga tahun lainnya** (2020, 2022, 2023) masuk kategori **Rendah**. Hal tersebut menunjukkan ketergantungan Kulon Progo pada transfer pusat dan kelemahan dalam optimalisasi PAD. Meski dari sisi angka, trend IKFD Kulon Progo cenderung meningkat, namun karena Standar IKDF yang diperbarui melalui PMK tiap tahunnya juga meningkat, dan IKDF Kulon Progo

berada di bawah rentang nasional, IKDF pada tahun 2022 dan 2023 tetap dikategorikan rendah.

4.4. Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat

Dalam implementasi program, pemerintah daerah seringkali mengalami berbagai peluang dan tantangan. Situasi ini wajar terjadi, karena faktor-faktor seperti pendorong dan penghambat merupakan bagian yang melekat dalam implementasi program. Penyebabnya beragam, ada yang karena pengaruh internal, pun ada juga yang disebabkan karena faktor eksternal. Sebagai contoh, pada faktor pendorong, hampir seluruh pemerintah memiliki sensitifitas dan komitmen untuk menanggulangi kemiskinan karena menjadi bagian dari mandat dan standar pelayanan minimal. Kemudian contoh untuk faktor penghambat, saat pandemi Covid-19 pada tahun 2021-2022, hampir seluruh pemerintah daerah mengalami tantangan dan hambatan pengelolaan anggaran daerah untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi.

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, sebagaimana analisis yang sudah dilakukan, baik pada kemiskinan konsumsi maupun non konsumsi, pemerintah daerah juga mengalami faktor pendorong dan penghambat. Setelah dilakukan analisis faktor pendorong dan penghambat pada berbagai bidang urusan, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, kesetaraan gender, dan infrastruktur dasar, tiap bidang memiliki faktor pendorong seperti dukungan regulasi, komitmen kepala daerah, hingga alokasi anggaran, serta faktor penghambat seperti keterbatasan data, anggaran rendah, atau kendala geografis dan berbagai penghambat lain yang mempengaruhi capaian kinerja.

Berikut adalah tabel faktor pendorong dan penghambat yang dielaborasi dari Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) tahun 2023, RPJMD Teknokratik Kulon Progo tahun 2025-2029, dan sumber lain seperti data BPS dan data lokal di tiap-tiap organisasi perangkat daerah Kulon Progo.

Tabel 4.20. Faktor Pendorong dan Penghambat Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo

Bidang Urusan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
---------------	------------------	-------------------

<p>Bidang Kemiskinan Konsumsi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen kepala daerah melalui perda atau perbup terkait penanggulangan kemiskinan dan bantuan sosial. 2. Adanya regulasi yang menjamin implementasi program penanggulangan kemiskinan. 3. Menjadi indikator kinerja utama di kabupaten. 4. Adanya dukungan dana keistimewaan untuk penanggulangan kemiskinan 5. Adanya alokasi program dan anggaran terkait kebutuhan dasar dari organisasi perangkat daerah seperti dinas sosial, pertanian dan dinas lain yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat. 6. Tersedianya basis data untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan (Regsosek, P3KE). 7. Adanya alokasi program dan anggaran dari dana Kalurahan untuk penanggulangan kemiskinan. 8. Adanya kolaborasi untuk alokasi bantuan dari sektor swasta dan filantropi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Basis data untuk pensasaran program belum praktis digunakan, karena harus melalui proses pemadanan antar basis data yang tersedia, seperti P3KE dengan DTKS. 2. Potensi inclusion dan exclusion eror penerima manfaat program masih terjadi. 3. Tingginya jumlah penduduk miskin. 4. Tingkat konsumsi masyarakat Kulon Progo terhadap makanan jadi masih menjadi yang tertinggi. 5. Kolaborasi dengan sektor swasta belum semua dilakukan di daerah yang menjadi lokasi prioritas. 6. Kemampuan anggaran yang rendah untuk mencakup bantuan seluruh keluarga di bawah garis kemiskinan dan rentan miskin, sehingga sirkulasi penurunan dan kenaikan seringkali beriringan.
<p>Bidang Pendidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi bagian dari urusan wajib dalam standar pelayanan minimal (SPM) daerah. 2. Adanya alokasi program dan anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya sekolah yang memiliki rasio siswa rendah.. 2. Masih adanya kendala

	<p>untuk penyediaan beasiswa dan perbaikan sarana-prasarana pendidikan maupun BOS.</p> <p>3. Adanya potensi dukungan dana keistimewaan untuk pendidikan melalui urusan kebudayaan.</p>	<p>aksesibilitas lokasi dari rumah ke sekolah di kawasan yang berada di sekitar menoreh.</p> <p>3. Belum meratanya ketersediaan sekolah inklusi.</p> <p>4. Kualitas tenaga pengajar sekolah inklusi belum tersedia secara memadai di tiap sekolah.</p> <p>5. Kemampuan anggaran yang rendah untuk penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang setara antar sekolah.</p> <p>6. Tenaga pengajar belum sepenuhnya tersertifikasi.</p>
Kesehatan	<p>1. Adanya komitmen pemerintah untuk pelayanan dasar kesehatan dan penanganan stunting.</p> <p>2. Menjadi bagian dari urusan wajib dalam standar pelayanan minimal (SPM) daerah.</p> <p>3. Adanya alokasi program dan anggaran untuk pelayanan kesehatan dasar masyarakat.</p> <p>4. Adanya dukungan pemberian PMT dari desa, termasuk program dapur sehat atasi stunting,</p> <p>5. Adanya 87 kampung KB di 12 Kapanewon dan tim penanganan stunting di 12 Kalurahan lokus, serta optimalisasi peran posyandu dan PAUD.</p> <p>6. Terdapat 21 layanan puskesmas yang tersebar di seluruh Kapanewon, dan</p>	<p>1. Perilaku masyarakat yang belum sehat dan ramah lingkungan;</p> <p>2. Prevalensi stunting masih tinggi.</p> <p>3. Kemampuan anggaran yang rendah untuk mensubsidi PMT harian, terutama bagi keluarga kurang mampu.</p> <p>4. Pola asuh dari anak stunting yang orang tuanya bekerja penuh masih lemah.</p> <p>5. Gizi harian yang belum tercukupi bagi anak yang hidup di keluarga kurang mampu.</p>

	<p>beberapa puskesmas pembantu di beberapa wilayah dengan aksesibilitas kurang memadai.</p> <p>7. Terdapat 8 rumah sakit rujukan, baik RSUD maupun Swasta.</p>	
Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kawasan investasi dan penyerapan tenaga kerja di kawasan bandara NYIA. 2. Munculnya peluang investasi dan industri baru di kawasan Kapanewon Sentolo dan kawasan pelabuhan Tanjung Adikarto Wates. 3. Munculnya peluang investasi di kawasan yang menjadi rencana exit tol seperti exit tol Sentolo dan Pengasih serta JJLS pantai selatan Kulon Progo. 4. Beragamnya potensi pariwisata, baik di kawasan pantai maupun pegunungan yang berpotensi menumbuhkan potensi investasi dan industri pariwisata, serta potensi penyerapan tenaga kerja. 5. Dukungan dan Inovasi program bela-beli yang turut berkontribusi mengelola perputaran ekonomi di sektor UMKM. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya produktifitas tenaga kerja, terutama pada sektor primer dan sekunder 2. Tingginya angkatan kerja tidak diiringi dengan keterampilan dan adaptasi terhadap pasar kerja industri. 3. Masih tingginya pekerja di sektor informal, per tahun 2023 tercatat ada 137.395 di Kulon Progo. 4. Belum adanya entitas hukum yang mengelola kawasan industri yang disediakan Pemerintah daerah. 5. Indeks daya saing daerah Kulon Progo masih di bawah rata-rata DIY dan Nasional. 6. Investasi di Kulon Progo masi didominasi oleh investasi dalam negeri dengan penyumbang 92,81%. Sedangkan investasi asing masih rendah. 7. Sektor investasi masih bertumpu ke penyokong industri pariwisata seperti hotel dan restoran.

		8. Belum optimalnya penerapan ekosistem kerja inklusi bagi penyandang disabilitas.
Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan dan komitmen kepala daerah melalui penyediaan layanan UPT-SLRT-PMKS "PEDULI" 2. Adanya dukungan dan komitmen kepala daerah terkait implemetnasi bantuan sosial. 3. Adanya alokasi program dan anggaran untuk program bantuan dan rehabilitasi sosial. 4. Adanya alokasi program dan anggaran untuk penanganan PMKS. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Basis data yang beragam berpotensi meningkatkan inclusion dan exclusion eror. 2. Meningkatnya jumlah PMKS. 3. Ketergantungan penyandang disabilitas terhadap bantuan program pemerintah. 4. Tingginya jumlah penduduk miskin dan rentan miskin. 5. Kemampuan anggaran yang rendah untuk mencover bantuan seluruh keluarga di bawah garis kemiskinan dan rentan miskin, sehingga sirkulasi penurunan dan kenaikan seringkali beriringan.
Kesetaraan gender	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki capaian pembangunan gender yang lebih baik dari DIY dan Nasional 2. Meningkatnya akses perempuan terhadap layanan kesehatan. 3. Adanya organisasi-organisasi pemberdayaan perempuan perempuan yang tersebar di seluruh Kapanewon, baik melalui TP PKK maupun UMKM perempuan. 4. Adanya dukungan terhadap pengarusutamaan gender melalui 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks ketimpangan gender Kulon Progo masih di bawah rata-rata Provinsi dan nasional. 2. Partisipasi politik perempuan di sektor pemerintahan juga masih rendah.

	<p>program KUBE.</p> <p>5. Peluang partisipasi perempuan dalam politik yang semakin terbuka dengan mekanisme seleksi terbuka di organisasi pemerintahan seperti BPD, sekretaris Kalurahan , hingga aparatur sipil negara.</p>	
Infrastruktur Dasar	<p>1. Menjadi bagian dari urusan wajib dalam standar pelayanan minimal (SPM) daerah.</p> <p>2. Adanya alokasi program dan anggaran untuk penyediaan sarana prasarana dasar seperti sanitasi dan air minum layak, hingga RTLH.</p> <p>3. Adanya kolaborasi dengan pihak swasta dan filantropi untuk program RTLH.</p> <p>4. Adanya program strategis nasional yang mendukung konektivitas kawasan seperti jalan nasional, jalan provinsi hingga jalan tol.</p>	<p>1. Sebagian wilayah Kulon Progo berada di kawasan pegunungan dengan topografi miring dan terpencil.</p> <p>2. Masih adanya daerah yang menjadi mengalami kekeringan rutin saat musim kemarau.</p> <p>3. Masih terdapat daerah dengan status kumuh.</p> <p>4. Terbatasnya anggaran untuk pembangunan hunian layak.</p>

4.5. Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan

Strategi dan program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2025-2029 di susun dengan memperhatikan situasi lokal daerah, kondisi sosial ekonomi dan arah kebijakan nasional. Di tingkat nasional, kemiskinan menjadi isu krusial dan masuk dalam misi keenam “Membangun dari Kalurahan dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan” Misi tersebut kemudian diturunkan dalam program prioritas kelima yaitu “Pemberantasan kemiskinan” dengan sasaran utama Pembangunan yaitu kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang dengan strategi penurunan kemiskinan dan peningkatan SDM berkualitas yang dijabarkan berikut ini:

Strategi penurunan kemiskinan

1. Pemberdayaan ekonomi berkelanjutan dan inovatif melalui kartu usaha produktif dan afirmatif

2. Perlindungan sosial yang integratif, adaptif, inklusif melalui kartu kesejahteraan sosial (KIS, PKH, KIP, PBI, subsidi LPG dan Listrik)
3. Peningkatan akses pelayanan dasar (Pendidikan, Kesehatan, transportasi, pangan dan perumahan)
4. Program kewilayahan konektivitas, pasar kerja dan lainnya

Strategi peningkatan SDM berkualitas

1. Peningkatan layanan dasar
 - ✓ Percepatan wajib belajar 13 tahun
 - ✓ Penuntasan Tuberculosis
 - ✓ Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten kota dan pengembangan pelayanan Kesehatan bergerak dan daerah sulit akses
 - ✓ Penyelenggaraan pemeriksaan Kesehatan gratis
 - ✓ Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru, tenaga medis dan tenaga kesehatan
2. Peningkatan modal manusia
 - ✓ Makan bergizi untuk siswa dan ibu hamil (89,9 juta orang tahun 2029)
 - ✓ Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul
 - ✓ Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah
 - ✓ Peningkatan partisipasi Pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas
3. Peningkatan modal sosial budaya
 - ✓ Pendidikan berkarakter, kewargaan, agama dan budaya
 - ✓ Pendidikan keluarga dan pengasuhan

Seiring dengan arah kebijakan dan program nasional, Kabupaten Kulon Progo memiliki visi dan misi yang tertuang dalam dokumen rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029. Kabupaten Kulon Progo berfokus pada peningkatan kualitas dan pemerataan layanan Kesehatan, Pendidikan, percepatan Pembangunan wilayah serta penurunan kemiskinan. Untuk mewujudkan visi Pembangunan tersebut dirancang beberapa misi yaitu:

1. Mewujudkan Manusia Kulon Progo berbudaya, maju, dan Sejahtera
2. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif serta Masyarakat yang Aman dan Demokratis

4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana

Arah kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan masuk dalam misi kesatu RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 yaitu “Mewujudkan Manusia Kulon Progo berbudaya, maju, dan sejahtera”. Strategi penanggulangan kemiskinan melingkupi pemenuhan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Perlindungan sosial mencakup berbagai program yang dirancang untuk mengurangi kerentanan masyarakat, ketidakpastian ekonomi, perlindungan terhadap tenaga kerja dan bantuan sosial kelompok rentan. Sementara itu, penanggulangan kemiskinan melibatkan strategi yang lebih luas termasuk peningkatan akses Pendidikan, peluang kerja, perumahan yang layak serta Pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.

4.6. Strategi dan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE)

Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia sebelumnya diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 mengenai Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang berisi penugasan kepada para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Hingga maret 2024, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia berada pada angka 0,83 persen. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibanding pada maret 2023 yang berada pada angka 1,12 persen. Namun, pada RPJMN 2025-2029, pemerintah kembali menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Berdasarkan RPJM teknokratik, target yang ingin dicapai pemerintah pada periode tersebut ialah *cutt off* kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada tahun 2026.

Jika mengacu pada strategi PPKE dalam inpres 4 tahun 2022, kemiskinan ekstrem memiliki tiga pilar utama, antara lain

1. Komitmen pemerintah.
2. Keterpaduan (konvergensi) program, anggaran, dan sasaran;
3. Pemantauan dan evaluasi.

Sebagai salah satu lokasi prioritas PPKE nasional, Kabupaten Kulo Progo perlu melakukan sinkronisasi komitmen dan strategi, sebagaimana di atur dalam inpres tersebut. Sinkronisasi tersebut dapat dilakukan dengan menyesuaikan program dan kegiatan berdasarkan pilar berikut ini.

Upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem “0%” tahun 2024 dilakukan berdasar pada tiga pilar, yaitu (i) komitmen pemerintah; (ii) konvergensi program, anggaran, dan sasaran; serta (iii) pemantauan dan evaluasi.

1. Pilar I Komitmen Pemerintah

- Program dan kegiatan dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025-2029.
- Penetapan regulasi dan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem.

2. Pilar II Konvergensi Program, Anggaran, dan Sasaran

- Dukungan terhadap program nasional terkait cakupan penerima, ketercukupan manfaat, dan manajemen pelaksanaan.
- Inovasi program komplementer/inisiatif daerah.
- Penguatan kapasitas kelembagaan koordinasi antar sektor terkait.
- Penguatan kemitraan pemerintah daerah dengan sektor bukan pemerintah.

3. Pilar III Pemantauan dan evaluasi

- Penetapan indikator capaian penghapusan kemiskinan ekstrem.
- Penyusunan mekanisme pemantauan yang dilakukan berkala.
- Evaluasi berkala capaian penghapusan kemiskinan ekstrem tingkat kabupaten/kota.

Sementara sinkronisasi strategi PPKE di Kabupaten Kulon Progo dengan nasional dapat dilakukan dengan menjalankan program dan kegiatan berdasarkan 3 strategi PPKE sebagai berikut

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat
2. Peningkatan pendapatan masyarakat
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Adapun ketiga strategi tersebut dapat diselenggarakan melalui program bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan, pemenuhan layanan dasar hingga membangun konektivitas antar wilayah. Strategi dan program yang bisa dilakukan ialah sebagai berikut.

a. Penurunan beban pengeluaran masyarakat

1. Bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako.
2. Bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Kalurahan (BLT DD), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, *Top Up* bansos reguler.
3. Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.

4. Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas.

b. Peningkatan pendapatan masyarakat

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan.
2. Peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan.
3. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan.
4. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro.

c. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan

1. Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak.
2. Peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

BAB V. LOKASI PRIORITAS

5.1. Penentuan Lokasi Kapanewon

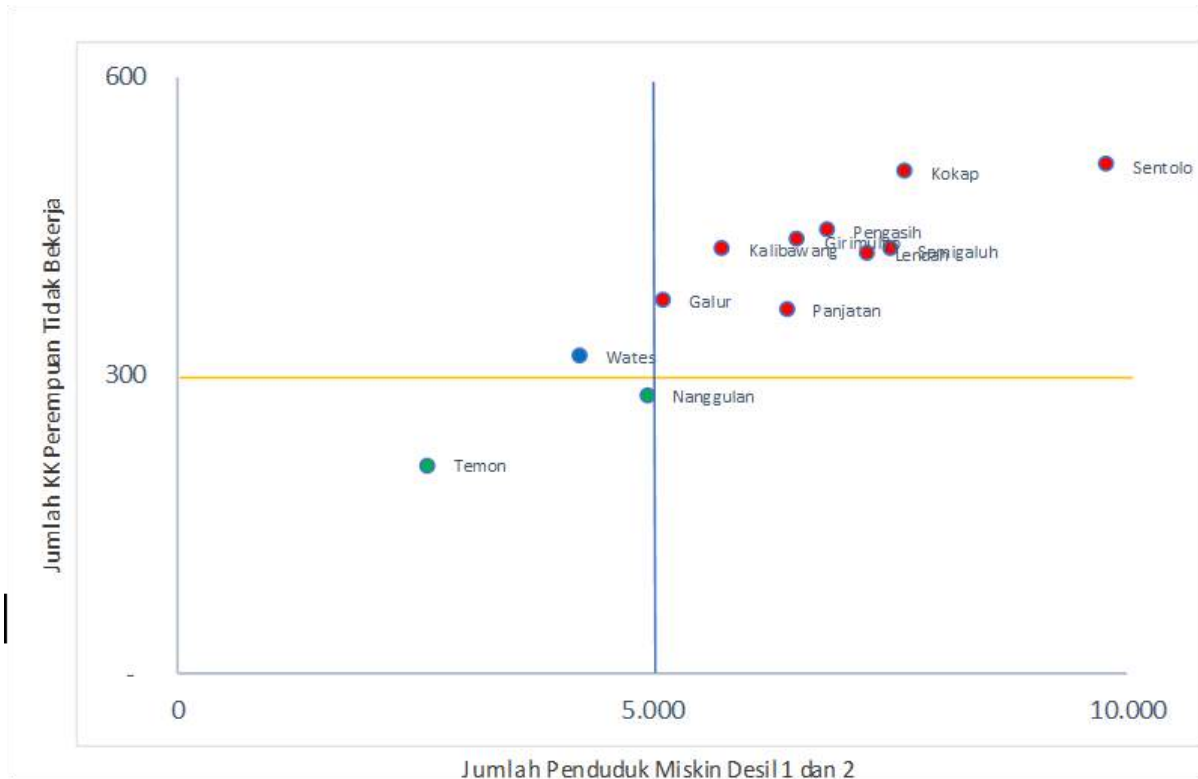
5.1.1. Bidang Kemiskinan Konsumsi

Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama pemerintah Kabupaten Kulon Progo, fokus utamanya adalah menurunkan angka kemiskinan daerah. Hal ini menjadi perhatian karena, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kulon Progo masih berada di posisi atas dengan jumlah kemiskinan yang cukup tinggi.

Program penanggulangan kemiskinan dapat efektif jika program kegiatan didasarkan pada basis data kemiskinan yang akurat dan pemetaan wilayah lokasi program yang tepat. Untuk menentukan lokasi program penanggulangan kemiskinan, Kabupaten Kulon Progo menggunakan basis data regsosek (sepakat). Data ini digunakan untuk *overlay* kuadran

prioritas wilayah penanggulangan kemiskinan konsumsi. Data *overlay* menggunakan data jumlah kemiskinan desil 1 dan 2 dengan jumlah kepala keluarga perempuan tidak bekerja desil 1 dan 2.

Grafik 5. 1 Analisis Kuadran Jumlah Penduduk Miskin Desil 1 dan 2 Terhadap Jumlah Kepala Keluarga Perempuan tidak Bekerja



Sumber: Regsosek, 2024 (Diolah)

Gambar diatas menunjukkan data analisis prioritas wilayah bidang konsumsi Kulon Progo dalam sebuah kuadran. Dalam kuadran tersebut dibagi menjadi empat bagian, dimana setiap bagian mempunyai makna yang berbeda. Pada bagian dengan kode titik warna merah merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin desil 1 dan 2 yang banyak serta di bagian ini juga terdapat jumlah KK perempuan tidak bekerja yang tinggi. Bagian ini menjadi daerah prioritas wilayah I dalam intervensi program penanggulangan kemiskinan. Pada bagian ini terdapat 9 Kapanewon, diantaranya: Kapanewon Sentolo, Kokap, Pengasih, Girimulyo, Samigaluh, Lendah, Kalibawang, Panjatan dan Galur. Dari Kapanewon tersebut, Kapanewon Sentolo dan Kokap menjadi wilayah yang paling tinggi.

Prioritas wilayah II terdapat pada bagian dari kuadran dengan kode warna biru, pada bagian ini, jumlah penduduk miskin desil 1 dan 2 dan jumlah KK perempuan tidak bekerja relatif tinggi. Bagian ini terdapat satu Kapanewon, yaitu Kapanewon Wates.

Prioritas wilayah III terdapat pada bagian dari kuadran dengan kode warna hijau, bagian ini masuk dalam kategori jumlah penduduk miskin desil 1 dan 2 dan jumlah KK perempuan tidak bekerja relatif rendah. Dari hasil analisis kuadran tersebut, berikut adalah daftar Kapanewon berdasarkan kategori prioritas.

Tabel 5.1. lokasi prioritas bidang konsumsi

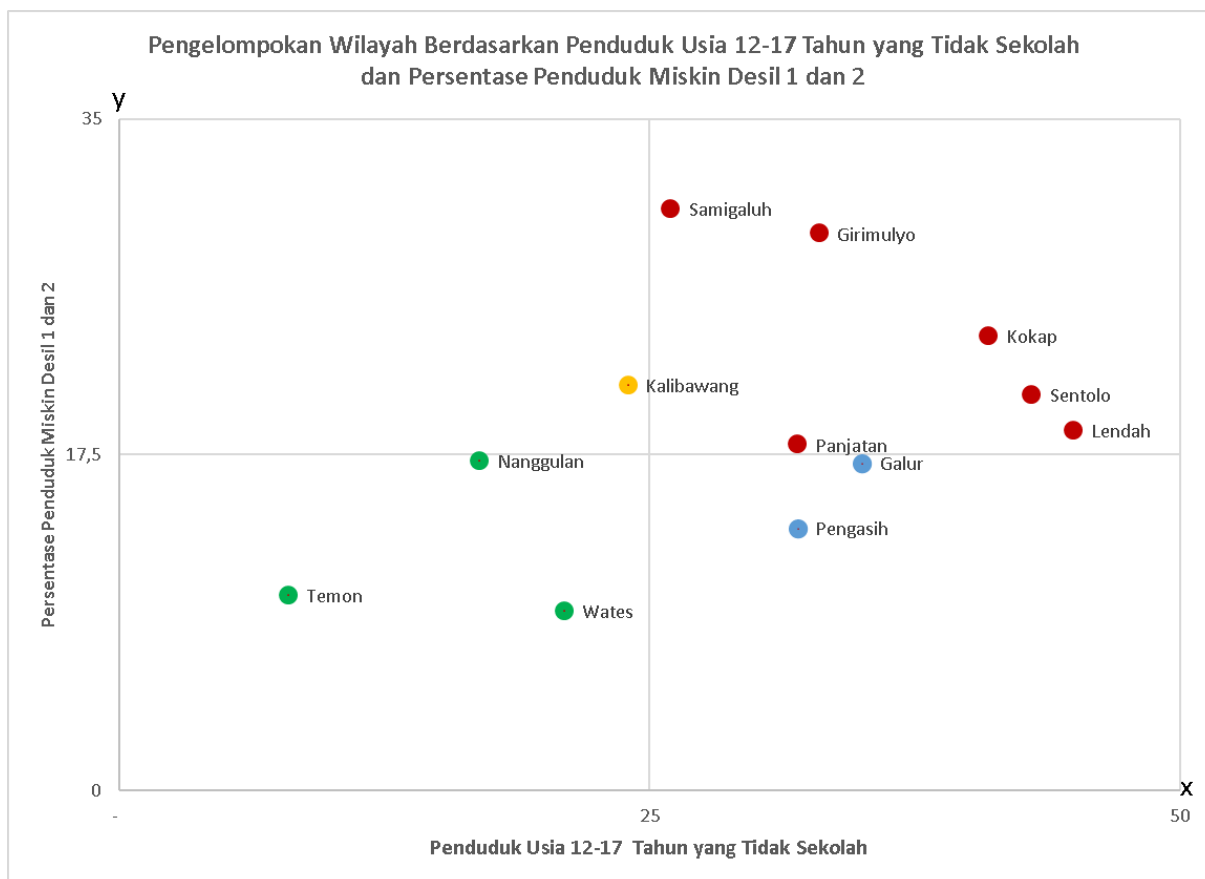
No	Kapanewon	Kategori
1	Sentolo	Prioritas 1
2	Kokap	Prioritas 1
3	Pengasih	Prioritas 1
4	Girimulyo	Prioritas 1
5	Kalibawang	Prioritas 1
6	Samigaluh	Prioritas 1
7	Lendah	Prioritas 1
8	Galur	Prioritas 1
9	Panjatan	Prioritas 1
10	Wates	Prioritas 2
11	Nanggulan	Prioritas 3
12	Termon	Prioritas 3

Sumber: Regsosek, 2024 (Diolah)

Tabel diatas memberikan gambaran bahwa, dari hasil analisis prioritas wilayah bidang konsumsi, dari 12 Kapanewon di Kulon Progo, terdapat 9 Kapanewon masuk kategori prioritas I, 1 Kapanewon masuk dalam kategori prioritas II, dan terdapat 2 Kapanewon masuk dalam kategori prioritas III.

Berdasarkan data diatas, pemerintah kabupaten Kulon Progo dapat menjalankan intervensi program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan prioritas. Lokasi prioritas program penanggulangan kemiskinan kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 5. 1 Peta Lokasi Prioritas Bidang Kemiskinan Konsumsi



Sumber: Regsosek 2024 (Diolah).

Berdasarkan hasil analisis kuadran di atas, terlihat bahwa ada empat kuadran wilayah yang masing-masing menunjukkan tingkat prioritas Kapanewon. Empat kuadran masing-masing memiliki warna. Merah berarti (prioritas 1), Kuning (Prioritas 2), Biru (prioritas 3), dan Hijau (prioritas 4). Jika jumlah sebaran persentase penduduk miskin semakin tinggi menuju ke garis (Y) dan sebaran penduduk usia 12-17 tahun yang tidak sekolah melebar menuju ke garis (X), maka kelompok Kapanewon akan berwarna merah. Sebaliknya, jika sebaran persentase penduduk miskin semakin rendah menjauh dari garis (Y) dan sebaran penduduk usia 12-17 tahun yang tidak sekolah menyempit menjauh dari garis (X), maka Kapanewon akan berwarna hijau.

Dari hasil kuadran tersebut, berikut adalah daftar Kapanewon berdasarkan kategori prioritas.

Tabel 5.2. Lokasi prioritas bidang pendidikan

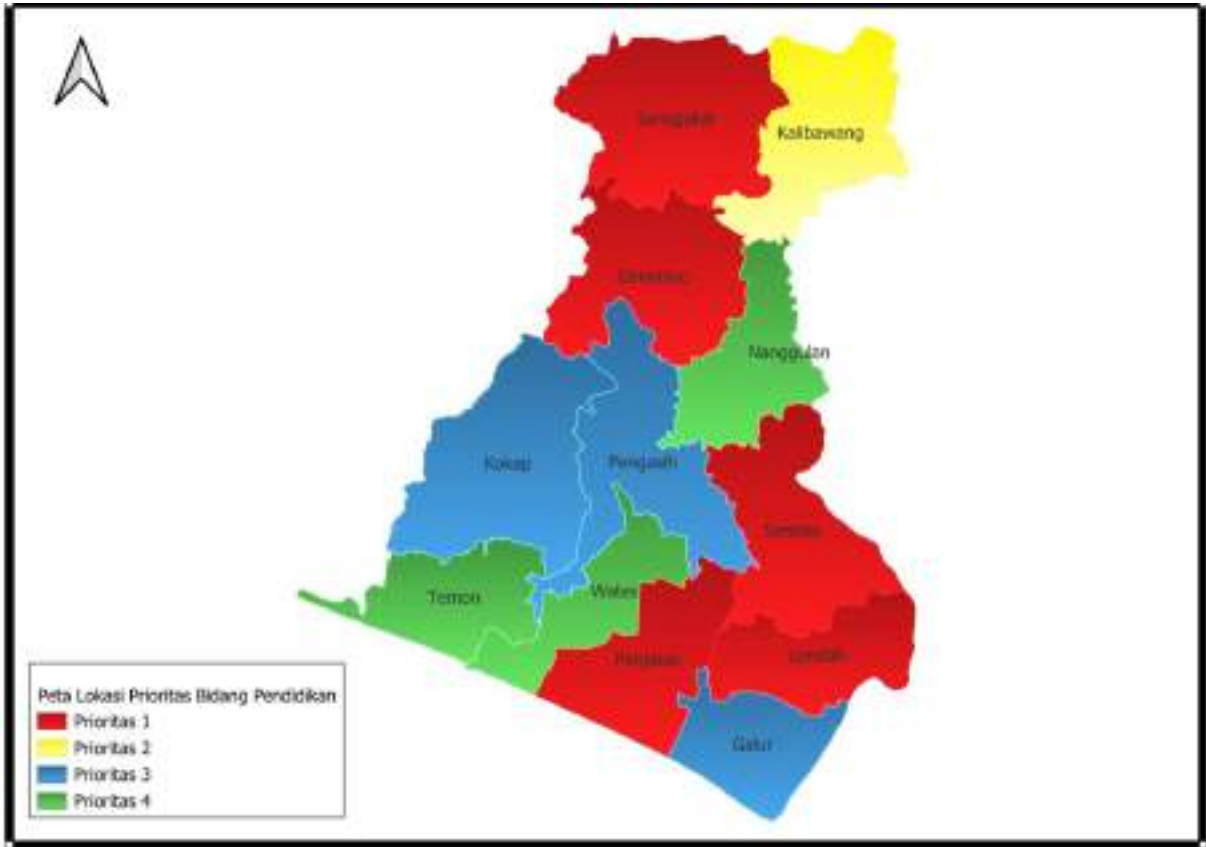
No	Kapanewon	Kategori
1	Lendah	Prioritas 1
2	Sentolo	Prioritas 1
3	Kokap	Prioritas 1

4	Girimulyo	Prioritas 1
5	Panjatan	Prioritas 1
6	Samigaluh	Prioritas 1
7	Kalibawang	Prioritas 2
8	Galur	Prioritas 3
9	Pengasih	Prioritas 3
10	Wates	Prioritas 4
11	Nanggulan	Prioritas 4
12	Termon	Prioritas 4

Sumber: Regsosek, 2024 (Diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada 6 wilayah Kapanewon yang berada di **prioritas 1**. Berdasarkan analisis kuadran, 6 wilayah tersebut memiliki penduduk tidak sekolah usia 12-17 tahun yang tinggi dan persentase penduduk miskin yang tinggi. Kemudian, pada wilayah **prioritas 2** terdapat 1 Kapanewon, yaitu Kalibawang. Artinya di Kapanewon tersebut memiliki persentase penduduk miskin yang tinggi, tetapi jumlah penduduk tidak sekolah lebih rendah. Selanjutnya, pada **prioritas 3**, terdapat 2 Kapanewon, yaitu Kapanewon Galur dan Pengasih. Artinya, di kedua Kapanewon ini memiliki persentase penduduk miskin yang rendah dan jumlah penduduk tidak sekolah yang kecil. Sementara, pada **prioritas 4**, terdapat 3 Kapanewon, yaitu Wates, Naggulan dan Temon. Ini menunjukkan bahwa di ketiga Kapanewon tersebut memiliki persentase penduduk miskin yang rendah dan jumlah penduduk usia 12-17 tahun tidak sekolah yang kecil.

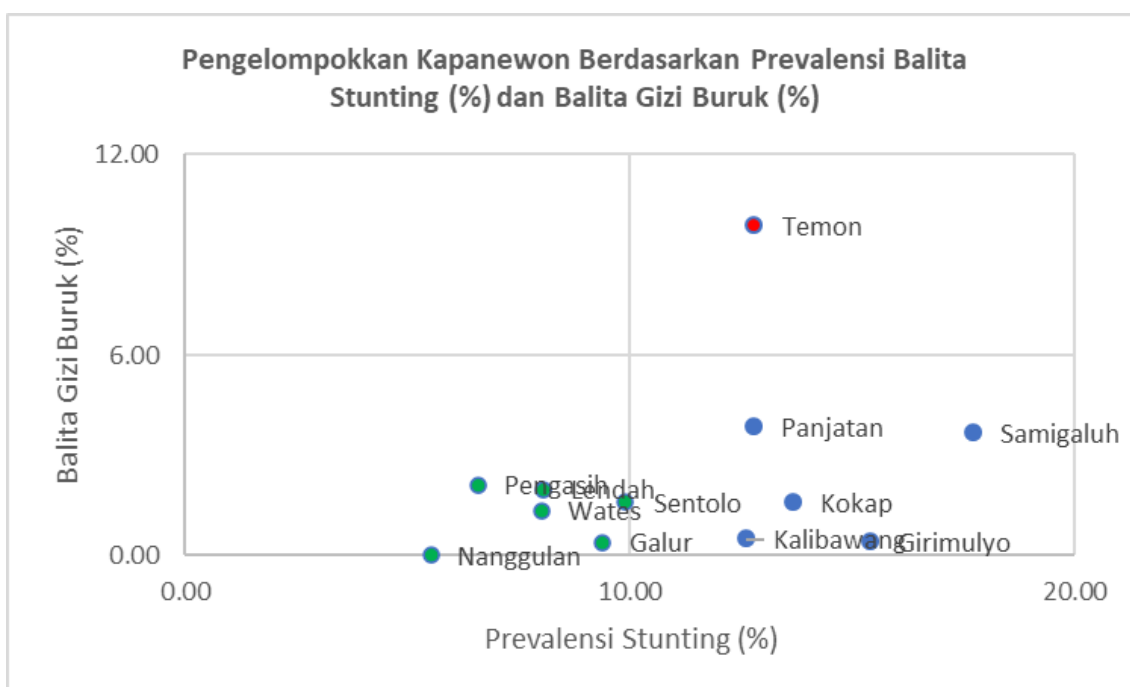
Gambar 5.2. Peta Lokasi prioritas bidang pendidikan



5.1.3. Bidang Kesehatan

Penentuan Lokasi prioritas program bidang kesehatan di Kulon Progo berdasarkan analisis kuadran menggunakan indikator prevalensi stunting (indikator utama) dengan indikator gizi buruk (indikator pendukung). Wilayah prioritas yang dipilih untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan adalah berdasarkan urutan prevalensi stunting dan gizi buruk tertinggi per kapanewon.

Grafik 5.3. Analisis Kuadran Lokasi Prioritas Bidang Kesehatan



Grafik di atas menunjukkan bahwa ada empat kuadran dengan sebaran prevalensi stunting dan gizi buruk yang tersebar pada tiga kuadran yaitu kuadran satu yang ditandai dengan warna titik merah (prioritas 1), kuadran tiga dengan warna titik biru (prioritas 3) dan kuadran empat dengan warna titik hijau (prioritas 4).

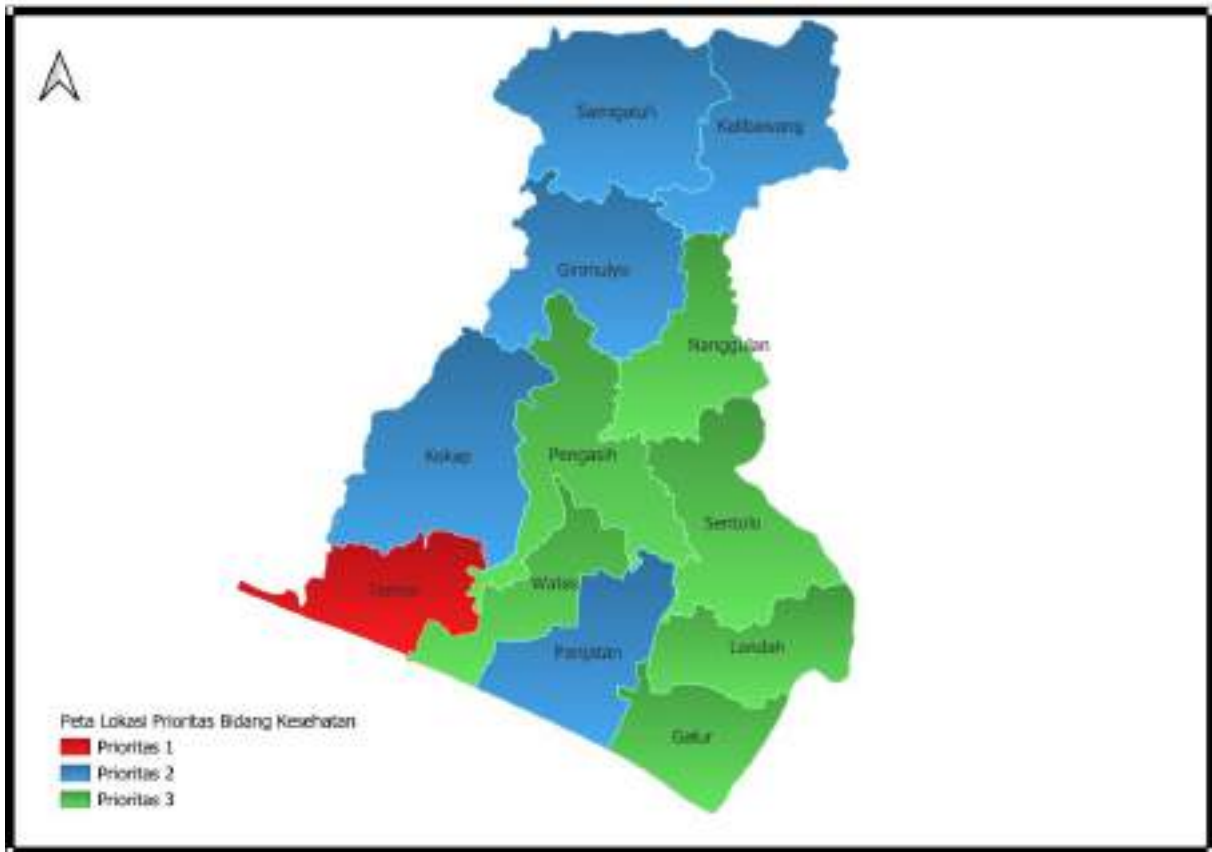
Tabel 5.3. Lokasi prioritas bidang kesehatan

No	Kapanewon	Kategori
1.	Temon	Prioritas 1
2.	Samigaluh	Prioritas 2
3.	Girimulyo	Prioritas 2
4.	Kokap	Prioritas 2

5.	Panjatan	Prioritas 2
6.	Kalibawang	Prioritas 2
7.	Sentolo	Prioritas 3
8.	Galur	Prioritas 3
9.	Lendah	Prioritas 3
10	Wates	Prioritas 3
11	Pengasih	Prioritas 3
12	Nanggulan	Prioritas 3

Berdasarkan tabel di atas, intervensi program penanggulangan kemiskinan Bidang Kesehatan di Kabupaten Kulon Progo terbagi dalam 3 prioritas yaitu **prioritas 1** terdapat 1 kapanewon yaitu Temon. Analisis kuadran menunjukkan prevalensi stunting dan gizi buruk di Kapanewon Temon adalah yang tertinggi dibanding dengan kapanewon lainnya. Selanjutnya pada **prioritas 2** terdapat 5 kapanewon yaitu Kapanewon Samigaluh, Girimulyo, Kokap, Panjatan, Kalibawang. Itu menandakan bahwa prevalensi stunting di 5 kapanewon tersebut tinggi dengan persentase gizi buruk yang lebih rendah. Berikutnya pada **prioritas 3** terdapat 6 kapanewon yaitu Kapanewon Sentolo, Galur, Lendah, Wates, Pengasih dan Nanggulan yang menunjukkan angka prevalensi stunting dan gizi buruk yang lebih rendah dibanding kapanewon yang masuk pada kuadran 1 dan 2.

Gambar 5.3. Peta Lokasi Prioritas Bidang Kesehatan

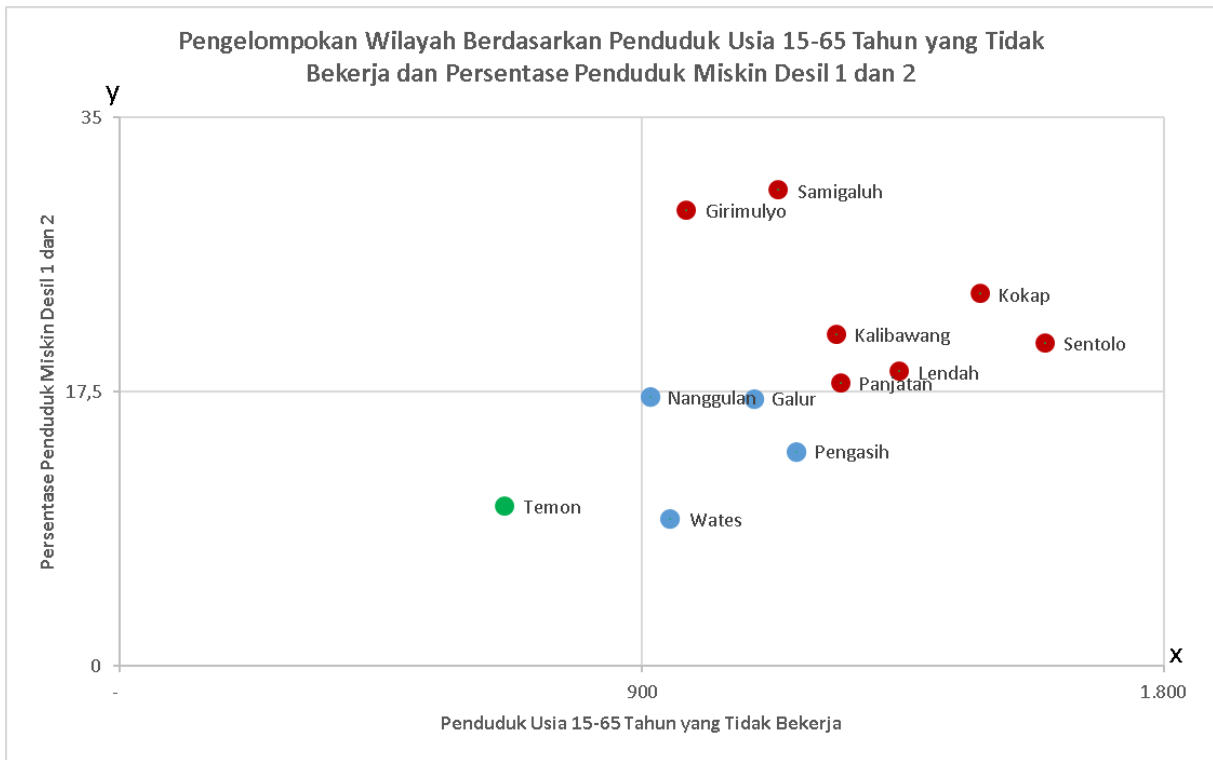


5.1.4. Bidang Ketenagakerjaan

Analisis prioritas lokasi bidang ketenagakerjaan ditentukan berdasarkan sebaran persentase penduduk miskin pada desil 1 dan desil 2 yang tinggi dan sebaran penduduk usia 15-65 tahun tidak bekerja yang tinggi di tiap-tiap Kapanewon. Penduduk usia 15-65 tahun yang tidak sekolah diambil mengingat berdasarkan analisis determinan di bidang ketenagakerjaan, indikator yang perlu dicapai ialah menurunkan Angka Pengangguran Terbuka. Sementara jika mengacu pada kategori usia angkatan kerja nasional, penduduk yang termasuk usia angkatan kerja ialah yang berusia 15-65 tahun.

Berdasarkan analisis kuadran, didapatkan hasil sebagai berikut.

Grafik 5.4. analisis kuadran lokasi prioritas bidang ketenagakerjaan



Sumber: Regsosek 2024 (Diolah).

Berdasarkan hasil analisis kuadran di atas, terlihat bahwa ada 4 kuadran wilayah yang masing-masing menunjukkan tingkat prioritas Kapanewon. Namun, hanya ada tiga dari 4 kuadra yang memiliki warna, sehingga perlu ada penyesuaian tingkat prioritas. Merah berarti (prioritas 1), biru (Prioritas 2), dan Hijau (prioritas 3). Jika jumlah sebaran persentase penduduk miskin semakin tinggi menuju ke garis (Y) dan sebaran penduduk usia 15-65 tahun yang tidak bekerja melebar menuju ke garis (X), maka kelompok Kapanewon akan berwarna merah. Sebaliknya, jika sebaran persentase penduduk miskin semakin rendah menjauh dari garis (Y) dan sebaran penduduk penduduk usia 15-65 tahun yang tidak bekerja menyempit menjauh dari garis (X), maka Kapanewon akan berwarna hijau.

Dari hasil kuadran tersebut, berikut adalah daftar Kapanewon berdasarkan kategori prioritas.

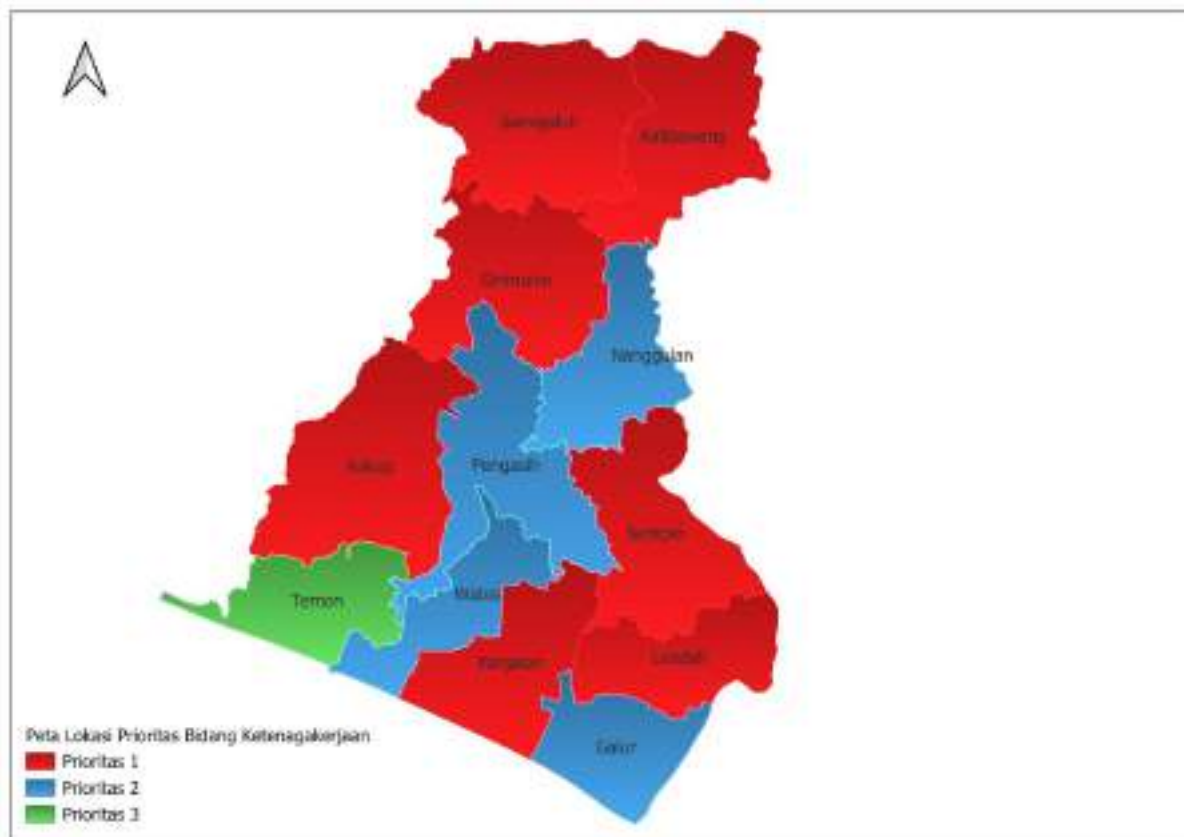
Tabel 5.4. Lokasi prioritas bidang ketenagakerjaan

No	Kapanewon	Kategori
1	Sentolo	Prioritas 1
2	Kokap	Prioritas 1
3	Lendah	Prioritas 1
4	Panjatan	Prioritas 1
5	Kalibawang	Prioritas 1
6	Samigaluh	Prioritas 1
7	Girimulyo	Prioritas 1
8	Pengasih	Prioritas 2
9	Galur	Prioritas 2
10	Wates	Prioritas 2
11	Nanggulan	Prioritas 2
12	Temon	Prioritas 3

Sumber: Regsosek, 2024 (Diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada 7 wilayah Kapanewon yang berada di **prioritas 1**. Berdasarkan analisis kuadran, 7 wilayah tersebut memiliki persentase penduduk miskin yang tinggi dan jumlah penduduk tidak bekerja yang besar. Kemudian, pada wilayah **prioritas 2** terdapat 4 Kapanewon. Artinya di keempat Kapanewon tersebut memiliki persentase penduduk miskin yang rendah, tetapi jumlah penduduk tidak bekerja cukup besar. Sementara, pada **prioritas 3**, hanya terdapat 1 Kapanewon, yaitu Kapanewon Temon. Artinya, Kapanewon ini memiliki persentase penduduk miskin yang rendah dan jumlah penduduk usia 15-65 tahun tidak bekerja yang kecil.

Gambar 5.4. peta lokasi prioritas bidang ketenagakerjaan



5.1.5. Bidang Kesetaraan Gender

Lokasi Prioritas Bidang Kesetaraan Gender

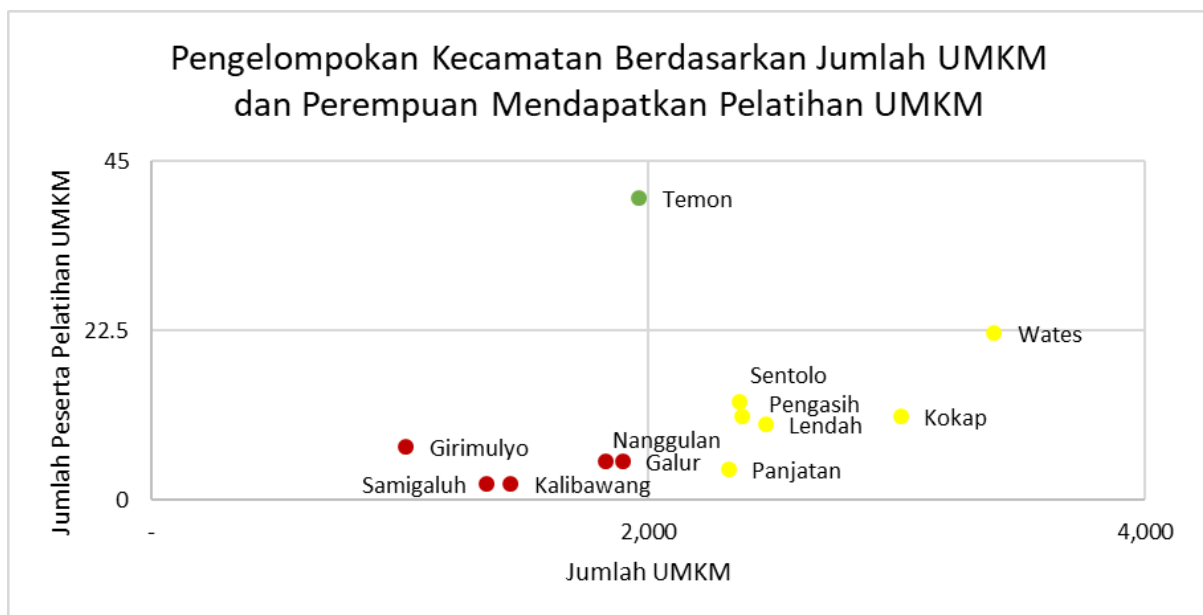
Indeks Pemberdayaan Gender (IDP) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perempuan memiliki akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi dan politik, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, IDG mengukur sejauh mana perempuan diberdayakan dalam berbagai aspek kehidupan. IDG menilai kesetaraan gender berdasarkan beberapa komponen pendukung, diantaranya:

1. Partisipasi politik, sejauh mana perempuan terlibat dalam proses politik, seperti menjadi anggota parlemen atau menduduki posisi kepemimpinan di pemerintahan.
2. Partisipasi ekonomi, seberapa banyak tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi, termasuk diantaranya kepemilikan aset, akses terhadap kredit, dan partisipasi dalam angkatan kerja.
3. Pengambilan keputusan, sejauh mana perempuan memiliki suara dalam pengambilan keputusan di rumah tangga, komunitas, dan tingkat yang lebih luas.
4. Akses terhadap sumber daya, perempuan dapat mengakses, seperti pendidikan, kesehatan, dan informasi.

Kabupaten Kulon Progo dengan nilai IDG yang berada dibawah rata-rata Provinsi DIY dan nasional, serta menduduki peringkat 4 dari wilayah lain di D.I. Yogyakarta, tentu memiliki tantangan tersendiri dalam meningkatkan dan menstabilkan IDG. Persoalan yang sering terjadi di masyarakat, adanya pandangan tentang pembagian peran gender seringkali membatasi ruang gerak perempuan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Kemudian adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap sumber daya, memperlemah posisi mereka dan meningkatkan risiko kekerasan.

Penentuan lokasi prioritas program bidang kesetaraan gender di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan analisis kuadran menggunakan indikator jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak (indicator utama) dengan indikator jumlah penanganan kasus (indicator pendukung), serta jumlah UMKM yang dikelola perempuan (indicator utama) dengan jumlah perempuan yang mendapatkan pelatihan UMKM (indicator pendukung) disajikan pada gambar berikut ini.

Grafik 5.5. Analisis Kuadran Lokasi Prioritas Bidang Kesetaraan Gender

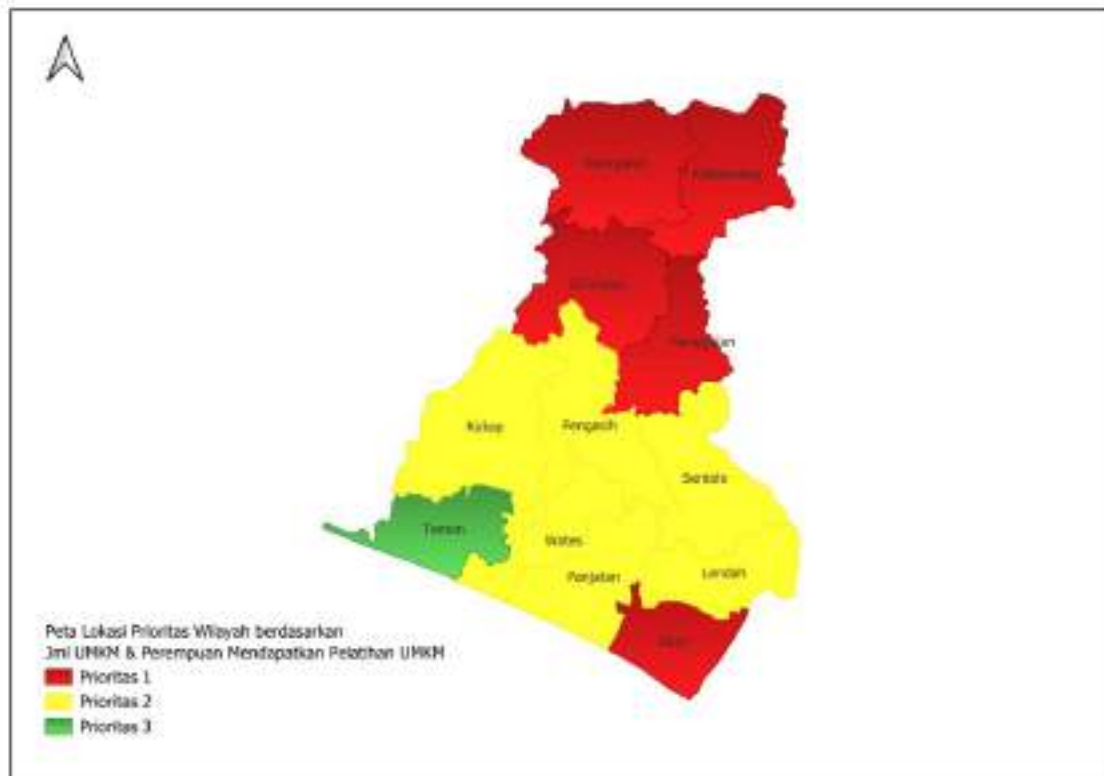


Grafik di atas menunjukkan bahwa ada empat kuadran dengan sebaran jumlah UMKM perempuan dan jumlah peserta pelatihan UMKM yang sebarannya terbagi pada tiga kuadran. Kuadran satu ditandai dengan warna titik merah (prioritas 1), kuadran dua ditandai dengan warna kuning (prioritas 2), dan kuadran empat ditandai dengan warna hijau (prioritas 3)

Tabel 5.5. Lokasi Prioritas Bidang Kesetaraan Gender

No	Kapanewon	Program Prioritas
1.	Galur	Prioritas 1
2.	Nanggulan	Prioritas 1
3.	Kalibawang	Prioritas 1
4.	Samigaluh	Prioritas 1
5.	Girimulyo	Prioritas 1
6.	Panjatan	Prioritas 2
7.	Sentolo	Prioritas 2
8.	Pengasih	Prioritas 2
9.	Lendah	Prioritas 2
10.	Kokap	Prioritas 2
11.	Wates	Prioritas 2
12.	Temon	Prioritas 3

Gambar 5.5. peta lokasi prioritas bidang kesetaraan gender



Berdasarkan tabel di atas, intervensi untuk program penanggulangan kemiskinan bidang kesetaraan gender di Kabupaten Kulon Progo terbagi menjadi tiga prioritas. **Prioritas 1** terdapat lima Kapanewon, diantaranya Galur, Nanggulan, Kalibawang, Samigaluh, dan Girimulyo. Analisis kuadran tersebut menunjukkan jumlah UMKM yang dibina perempuan dan jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan UMKM masih rendah jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Selanjutnya, **prioritas 2** terdapat enam Kapanewon, yaitu Panjatan, Sentolo, Pengasih, Lendah, Kokap, dan Wates. Analisis tersebut menandakan jumlah UMKM yang dibina oleh perempuan sudah banyak, jumlahnya sudah lebih dari 2.000 UMKM, namun jumlah penerima program pelatihan UMKM di masing-masing Kapanewon hanya mencapai 11 hingga 12 orang. Kemudian **prioritas 3**, terdapat satu Kapanewon yaitu Temon. Hasil analisis menunjukkan jumlah peserta perempuan yang mengikuti pelatihan UMKM terbanyak di antara wilayah lainnya, yaitu mencapai 40 orang.

Grafik 5.6. Analisis Kuadran Lokasi Prioritas Bidang Kesetaraan Gender



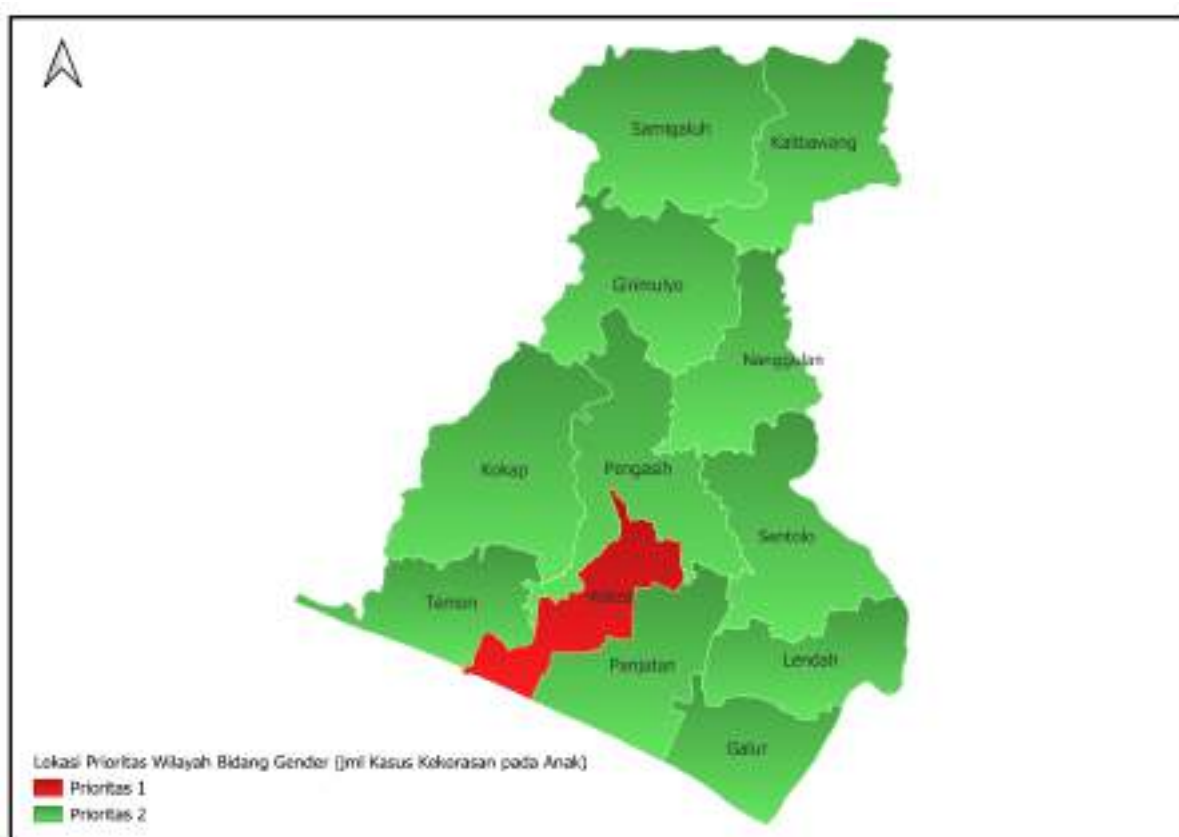
Grafik di atas menunjukkan bahwa ada empat kuadran dengan sebaran jumlah dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang sebarannya terbagi pada dua kuadran. Kuadran satu ditandai dengan warna titik merah (prioritas 1) dan kuadran dua ditandai dengan warna hijau (prioritas 2).

Tabel 5.6. Lokasi Prioritas bidang kesetaraan gender

No	Kapanewon	Program Prioritas
1.	Wates	Prioritas 1
2.	Pengasih	Prioritas 2
3.	Kokap	Prioritas 2

4.	Sentolo	Prioritas 2
5.	Kalibawang	Prioritas 2
6.	Lendah	Prioritas 2
7.	Samigaluh	Prioritas 2
8.	Panjatan	Prioritas 2
9.	Girimulyo	Prioritas 2
10.	Temon	Prioritas 2
11.	Galur	Prioritas 2
12.	Nanggulang	Prioritas 2

Gambar 5.6. peta lokasi prioritas bidang kesetaraan gender



Berdasarkan tabel di atas, intervensi untuk program penanggulangan kemiskinan bidang kesetaraan gender di Kabupaten Kulon Progo terbagi menjadi dua prioritas. **Prioritas 1** terdapat di Kapanewon Wates, kuadran tersebut menyajikan data tingginya akan kekerasan yang terjadi pada anak, mencapai 10 kasus di tahun 2023. Selanjutnya **prioritas 2**, terdapat di sebelas Kapanewon, diantaranya: Pengasih dan Kokap dengan 5 kasus kekerasan; Sentolo dan Kalibawang dengan 4 kasus; Lendah dengan 3 kasus; Samigaluh dan Panjatan

dengan 2 kasus kekerasan; Girimulyo, Temon dan Galur dengan 1 kasus; dan Nanggulan tidak ada kasus kekerasan terhadap anak.

Dari dua belas Kapanewon hanya satu Kapanewon yaitu Nanggulan yang tidak ada kasus kekerasan terhadap anak. Data tersebut mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap anak memang masih marak terjadi. Faktor-faktor seperti perubahan struktur keluarga, masalah ekonomi, masalah sosial, dan kurangnya pengawasan dapat menjadi penyebab meningkatnya angka kekerasan.

Grafik 5.7. Analisis Kuadran Lokasi Prioritas Bidang Kesetaraan Gender



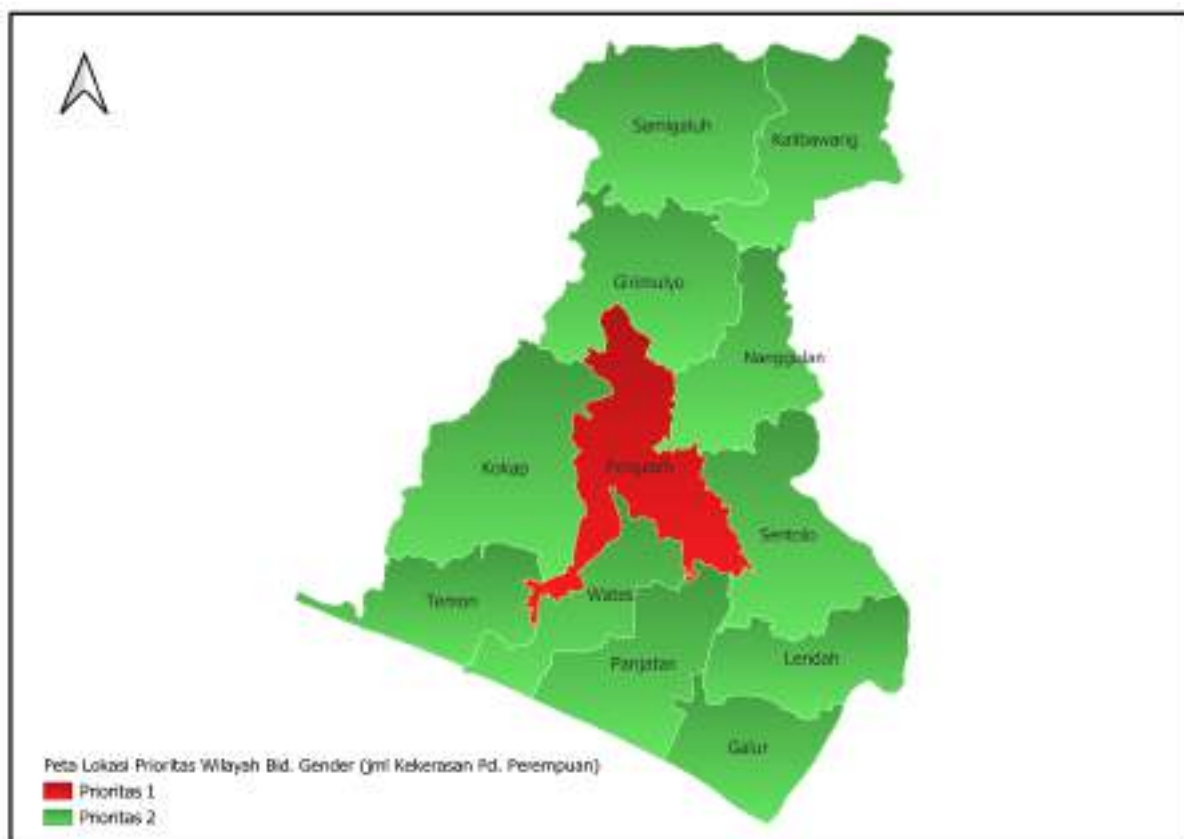
Grafik di atas menunjukkan bahwa ada empat kuadran dengan sebaran jumlah dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang sebarannya terbagi pada dua kuadran. Kuadran satu ditandai dengan warna titik merah (prioritas 1) dan kuadran dua ditandai dengan warna hijau (prioritas 2).

Tabel 5.7. Lokasi Prioritas bidang kesetaraan gender

No	Kapanewon	Program Prioritas
1.	Pengasih	Prioritas 1
2.	Lendah	Prioritas 2
3.	Wates	Prioritas 2
4.	Temon	Prioritas 2
5.	Panjatan	Prioritas 2
6.	Kokap	Prioritas 2
7.	Sentolo	Prioritas 2

8.	Galur	Prioritas 2
9.	Girimulyo	Prioritas 2
10.	Samigaluh	Prioritas 2
11.	Kalibawang	Prioritas 2
12.	Nanggulan	Prioritas 2

Gambar 5.7. peta lokasi prioritas bidang kesetaraan gender

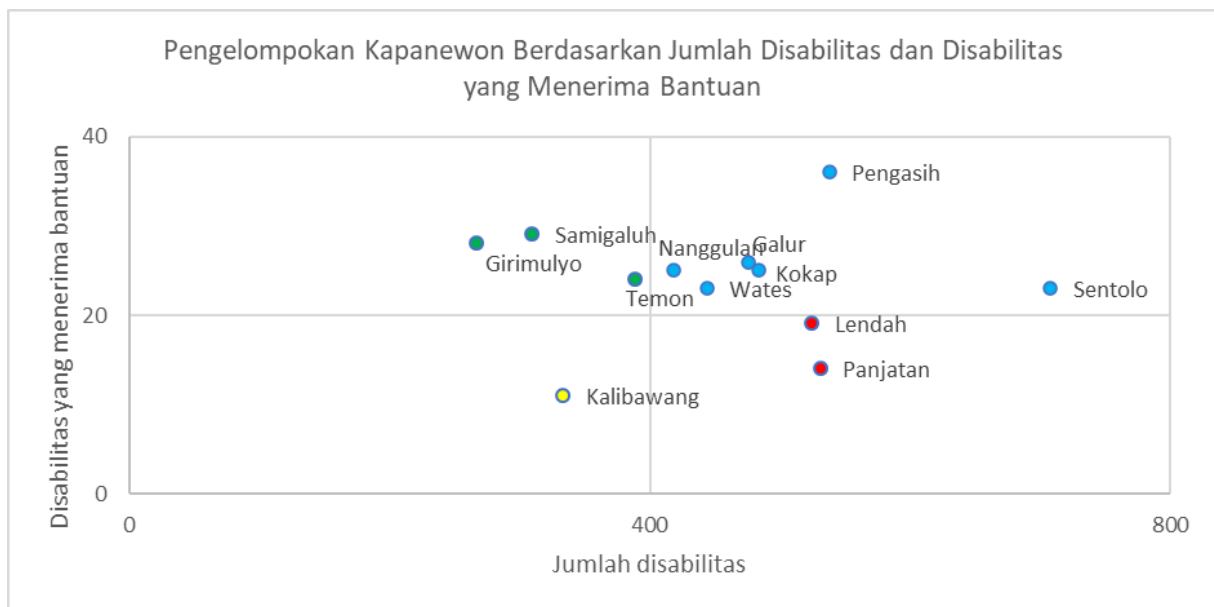


Berdasarkan tabel di atas, intervensi untuk program penanggulangan kemiskinan bidang kesetaraan gender di Kabupaten Kulon Progo terbagi menjadi dua prioritas. **Prioritas 1** terdapat di Kapanewon Pengasih, kuadran tersebut menyajikan data tingginya akan kekerasan yang terjadi pada perempuan, mencapai 8 kasus di tahun 2023. Selanjutnya **prioritas 2**, terdapat di sebelas Kapanewon, diantaranya: Lendah dan Wates dengan 4 kasus kekerasan; Temon dan Panjatan dengan 3 kasus; Kokap, Sentolo, Galur, Girimulyo, Samigaluh, dan Kalibawang dengan 2 kasus kekerasan; Nanggulan hanya terjadi 1 kasus kekerasan terhadap perempuan.

5.1.6. Bidang Sosial

Penentuan lokasi prioritas bidang sosial Kabupaten Kulon Progo dengan analisis kuadran menggunakan indikator jumlah disabilitas (indikator utama) disandingkan dengan jumlah disabilitas yang telah menerima bantuan (indikator pendukung) dan jumlah penduduk miskin desil 1-2 (indikator pendukung) disajikan sebagai berikut.

**Grafik 5.8. Analisis Kuadran Lokasi Prioritas Bidang Sosial
(Indikator Jumlah Disabilitas)**



Berdasarkan grafik analisis kuadran 5... di atas, sebaran Kapanewon dengan jumlah disabilitas dan jumlah disabilitas yang telah menerima bantuan menyebar di 4 kuadran. Kuadran 1 ditandai dengan warna titik merah (prioritas 1), kuadran dua warna titik kuning (prioritas 2), kuadran 3 warna titik biru (prioritas 3) dan kuadran 4 warna titik hijau (prioritas 4).

Selanjutnya, prioritas Kapanewon penanggulangan kemiskinan bidang sosial dengan indikator jumlah disabilitas yang akan diintervensi terbagi dalam 4 prioritas. Prioritas 1 terdapat 2 Kapanewon yaitu Kapanewon Panjatan dan Lendah. Analisis kuadran pada prioritas 1 menunjukkan bahwa jumlah disabilitas di Kapanewon Panjatan dan Lendah sangat tinggi dengan disabilitas yang seluruhnya belum menerima bantuan. Sementara itu, ada 1 Kapanewon yang masuk dalam prioritas 2 yaitu Kapanewon Kalibawang dengan jumlah disabilitas tinggi dengan jumlah disabilitas yang menerima bantuan sedikit. Berikutnya, prioritas 3 terdapat 6 Kapanewon yaitu Kapanewon Sentolo, Pengasih, Kokap,

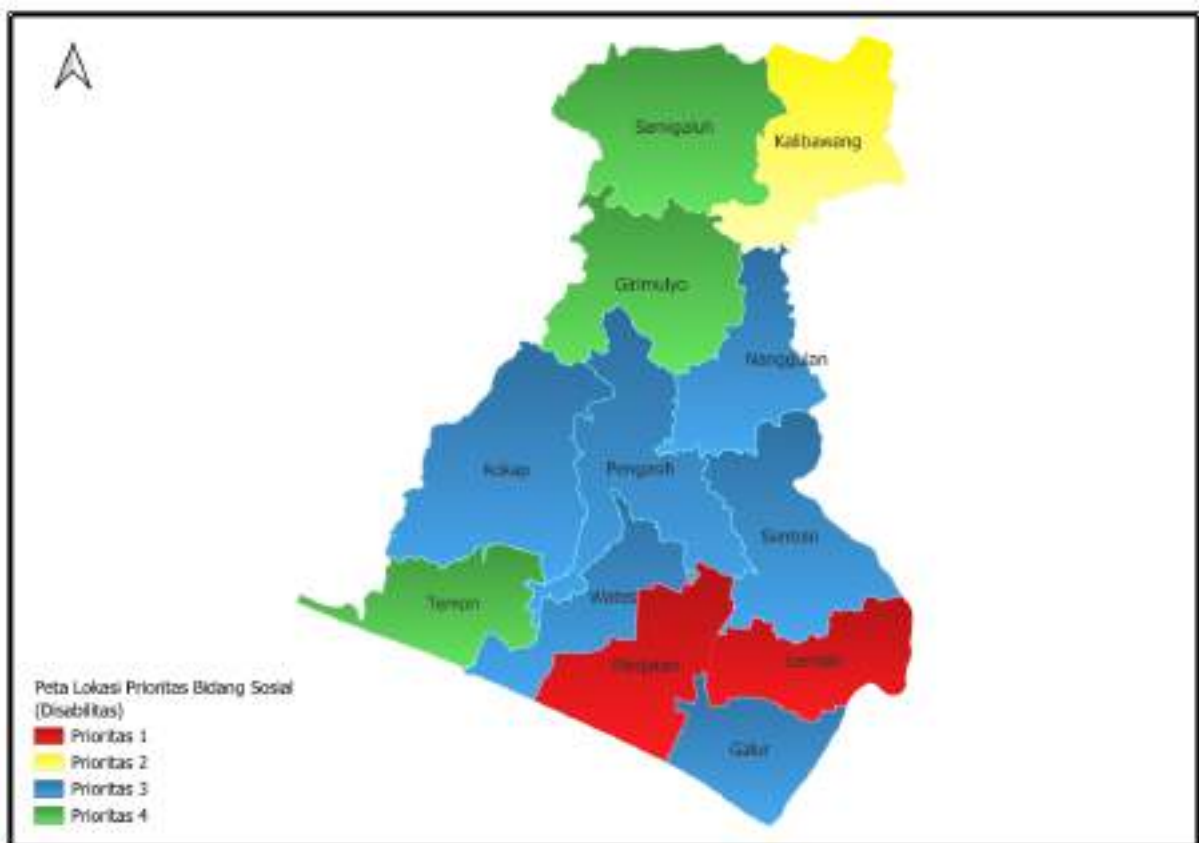
Galur, Wates, dan Nanggulan. Analisis kuadran pada prioritas 3 menunjukkan jumlah disabilitas banyak dengan jumlah disabilitas yang menerima bantuan lebih banyak dibanding dengan Kapanewon yang ada di prioritas 2. Selanjutnya prioritas 4 terdiri dari 3 wilayah yaitu Kapanewon Temon, Samigaluh dan Girimulyo.

Tabel 5.8. Lokasi Prioritas Bidang Kesejahteraan Sosial

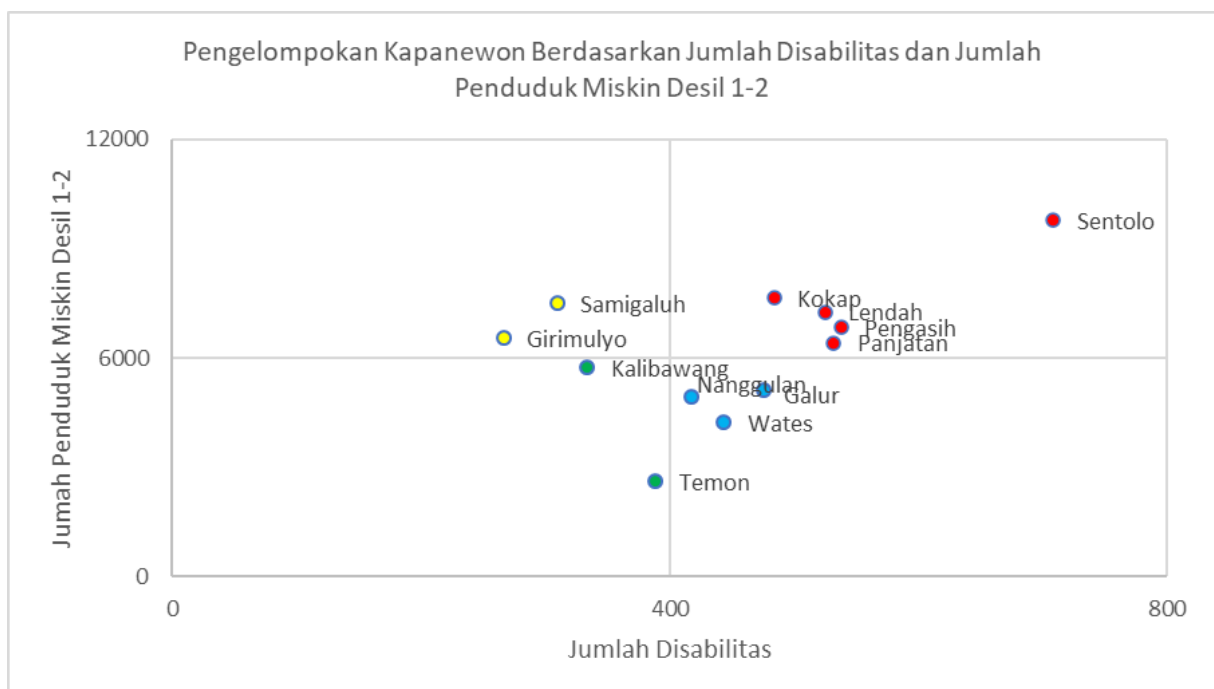
No.	Kapanewon	Kategori
1.	Panjatan	Prioritas 1
2.	Lendah	Prioritas 1
3.	Kalibawang	Prioritas 2
4.	Sentolo	Prioritas 3
5.	Pengasih	Prioritas 3
6.	Kokap	Prioritas 3
7.	Galur	Prioritas 3
8.	Wates	Prioritas 3
9.	Nanggulan	Prioritas 3
10.	Temon	Prioritas 4
11.	Samigaluh	Prioritas 4
12.	Girimulyo	Prioritas 4

Berdasarkan analisa perbandingan indikator bidang sosial pada tabel di atas, maka skala prioritas Kapanewon yang akan dilakukan untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan dengan indikator jumlah disabilitas secara berurutan yaitu Kapanewon Panjatan, Lendah, Kalibawang, Sentolo, Pengasih, Kokap, Galur, Wates, Nanggulan, Temon, Samigaluh, dan Girimulyo.

Gambar 5.8. Peta Lokasi Prioritas Bidang Sosial (Jumlah Disabilitas)



Grafik 5.9. Analisis Kuadran Lokasi Prioritas Bidang Sosial (Indikator Jumlah Disabilitas dengan Jumlah Jumlah Penduduk Miskin Desil 1-2)



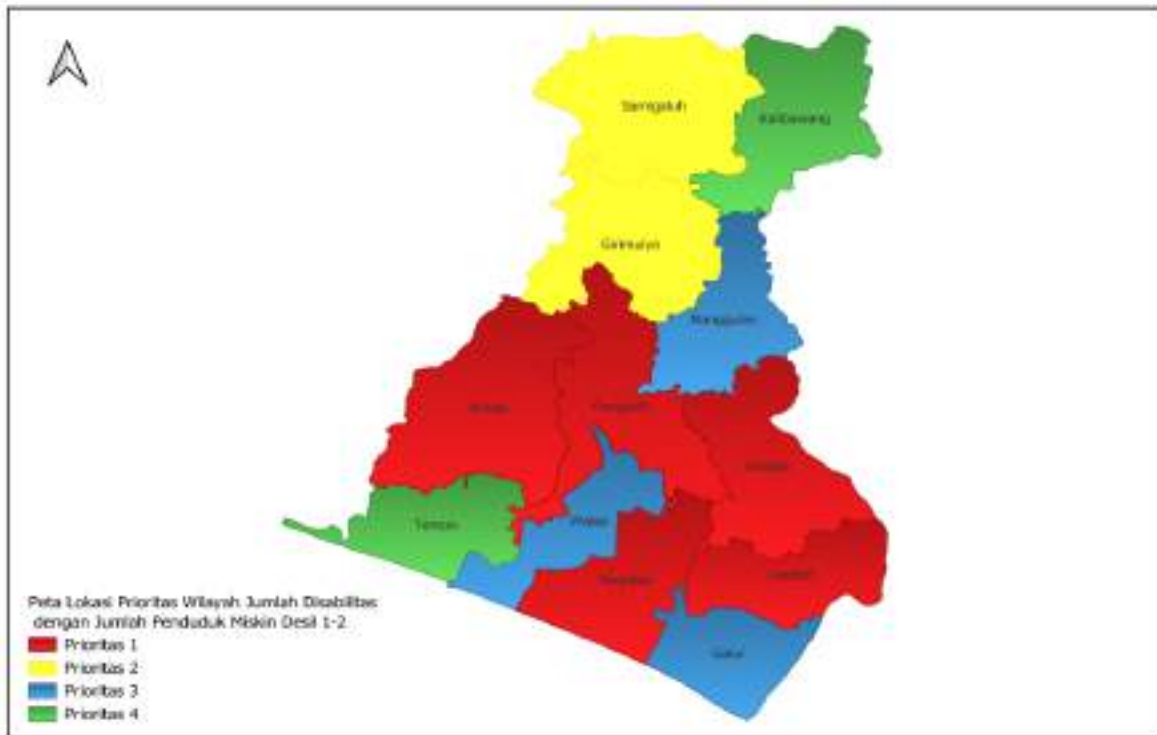
Pada analisis kuadran yang menggunakan indikator jumlah disabilitas dan disandingkan dengan jumlah penduduk miskin desil 1-2 menunjukkan pada **prioritas 1** terdapat 5 kapanewon yaitu Sentolo, Pengasih, Panjatan, Lendah dan Kokap. Pada **prioritas 2** terdapat kapanewon yaitu Samigaluh dan Girimulyo, **prioritas 3** terdapat 3 kapanewon yaitu Galur, Wates dan Nanggulan, **prioritas 4** terdapat 2 kapanewon yaitu Temon dan Kalibawang.

Tabel 5.9. Lokasi Prioritas Bidang Kesejahteraan Sosial

No.	Kapanewon	Kategori
1.	Panjatan	Prioritas 1
2.	Lendah	Prioritas 1
3.	Sentolo	Prioritas 1
4.	Pengasih	Prioritas 1
5.	Kokap	Prioritas 1
6.	Samigaluh	Prioritas 2
7.	Girimulyo	Prioritas 2
8.	Galur	Prioritas 3
9.	Wates	Prioritas 3
10.	Nanggulan	Prioritas 3
11.	Temon	Prioritas 4
12.	Kalibawang	Prioritas 4

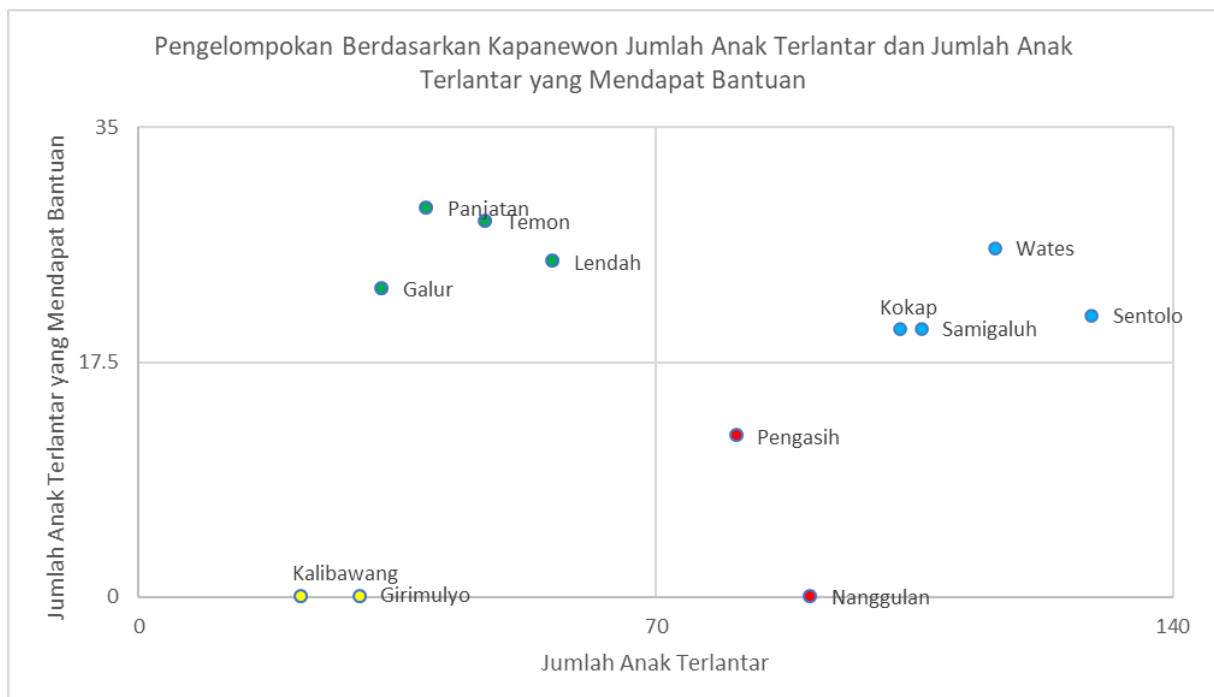
Berdasarkan tabel hasil analisis kuadran dengan indikator jumlah disabilitas dan jumlah penduduk miskin desil 1-2 Bidang Sosial dapat diurutkan sesuai prioritas yang dimulai dari Kapanewon Panjatan, Lendah, Sentolo, Pengasih, Kokap, Samigaluh, Girimulyo, Galur, Wates, Nanggulan, Temon dan Kalibawang.

Gambar 5.9. Peta Lokasi Prioritas



Penentuan lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan bidang sosial dengan indikator jumlah anak terlantar di Kulon progo disajikan pada grafik berikut ini.

Grafik 5.10. Analisis Kuadran Lokasi Prioritas Bidang Sosial (Indikator Jumlah Anak Terlantar)



Berdasarkan grafik analisis kuadran dengan indikator jumlah anak terlantar di atas menunjukkan bahwa sebaran kapanewon dengan jumlah anak terlantar dan jumlah anak terlantar yang menerima bantuan tersebar di 4 kuadran. Kuadran 1 ditandai dengan titik warna merah (prioritas 1), kuadran 2 ditandai dengan titik warna kuning (prioritas 2), kuadran 3 ditandai dengan titik warna biru (prioritas 3) dan kuadran 4 dengan titik warna hijau (prioritas 4)

Grafik di atas juga menunjukkan bahwa **prioritas 1** terdiri dari dua kapanewon yaitu Kapanewon Nanggulan dan Pengasih. Kedua kapanewon tersebut memiliki jumlah anak terlantar paling banyak dengan jumlah anak terlantar yang menerima bantuan paling sedikit. **Prioritas 2** terdapat 2 kapanewon yaitu Kapanewon Kalibawang dan Girimulyo. Analisis kuadran menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar di kapanewon prioritas 2 banyak dan jumlah anak terlantar yang mendapat bantuan lebih banyak dibanding dengan kapanewon di prioritas 1. Kemudian pada wilayah **prioritas 3** terdapat 4 kapanewon yaitu Kapanewon Sentolo, Wates, Samigaluh dan Kokap. Kapanewon dalam prioritas 3 memiliki jumlah anak terlantar yang banyak dan jumlah anak terlantar yang menerima bantuan lebih banyak dibanding dengan prioritas 2. Selanjutnya, ada 4 kapanewon yang masuk dalam **prioritas 4** yaitu Kapanewon Lendah, Temon, Panjatan dan Galur. Analisis kuadran pada prioritas 4 menunjukkan bahwa kapanewon memiliki jumlah anak terlantar paling sedikit dengan jumlah anak terlantar yang menerima bantuan paling banyak.

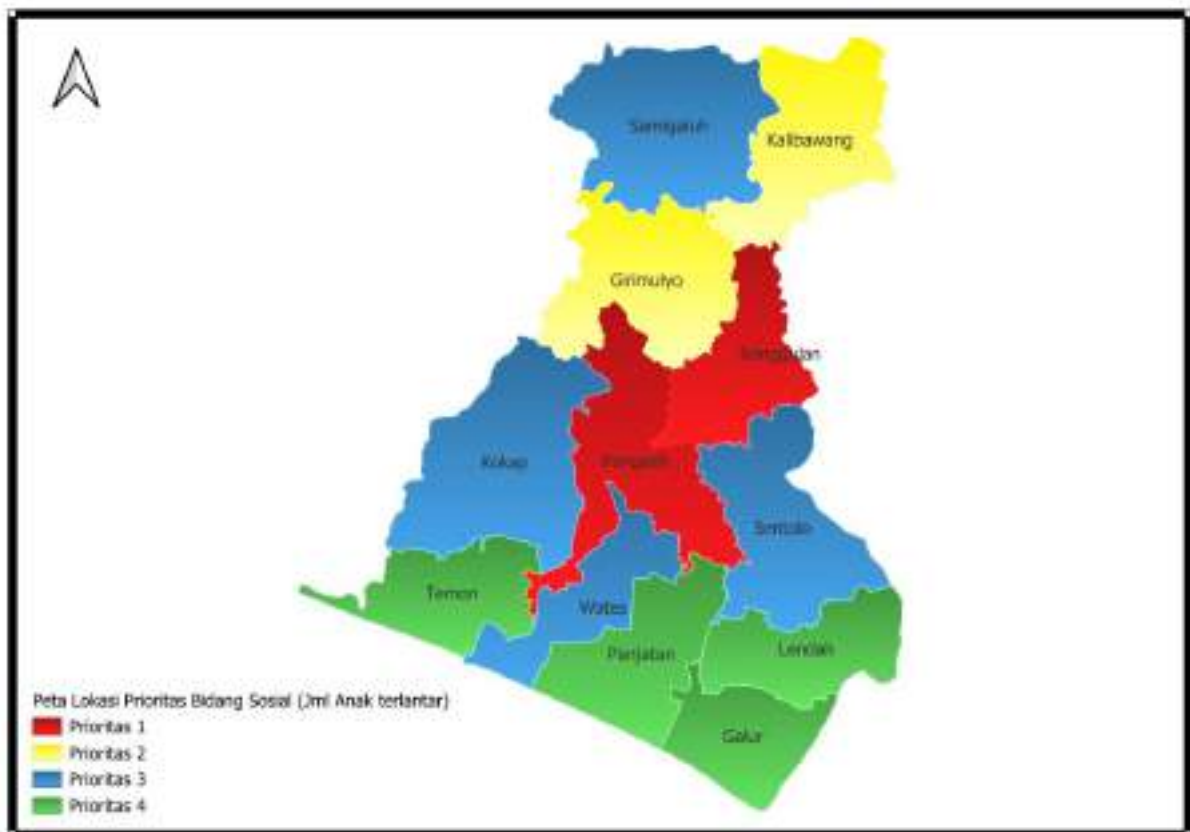
Tabel 5.10. Lokasi Prioritas Bidang Kesejahteraan Sosial

No	Kapanewon	Kategori
1.	Nanggulan	Prioritas 1
2.	Pengasih	Prioritas 1
3.	Kalibawang	Prioritas 2
4.	Girimulyo	Prioritas 2
5.	Sentolo	Prioritas 3
6.	Wates	Prioritas 3
7.	Samigaluh	Prioritas 3
8.	Kokap	Prioritas 3
9.	Lendah	Prioritas 4

10.	Temon	Prioritas 4
11.	Panjatan	Prioritas 4
12.	Galur	Prioritas 4

Berdasarkan hasil analisis kuadran untuk menentukan skala prioritas kapanewon yang akan menjadi lokasi intervensi program penanggulangan kemiskinan Bidang Sosial dengan indikator jumlah anak terlantar dapat diurutkan dari yang paling prioritas yaitu Nanggung, Pengasih, Kalibawang, Girimulyo, Sentolo, Wates, Samigaluh, Kokap, Lendah, Temon, Panjatan dan Galur.

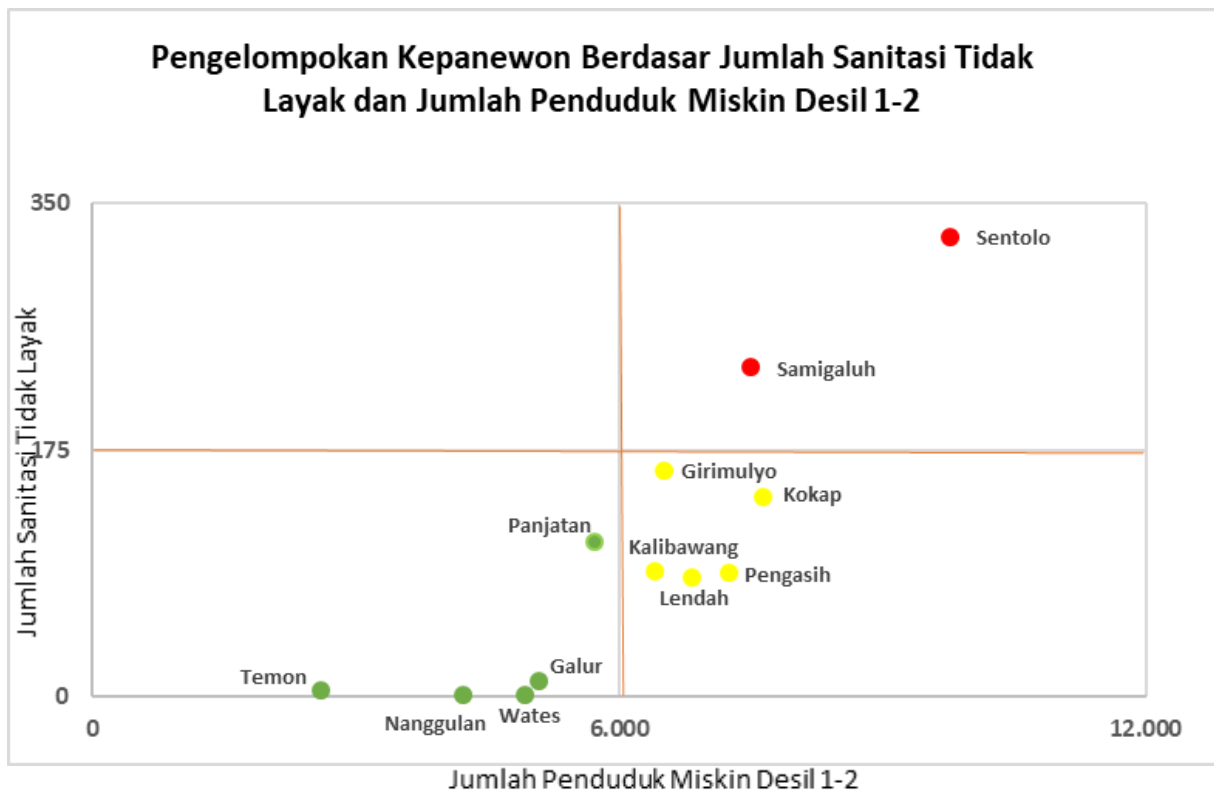
Gambar 5.10. Peta Lokasi Prioritas Bidang Sosial (Jumlah Anak Terlantar)



5.1.7. Bidang Infrastruktur Dasar

Penentuan lokasi prioritas bidang Infrastruktur Dasar Kabupaten Kulon Progo dengan analisis kuadran menggunakan indikator utama jumlah kemiskinan pada desil 1 - 2 disandingkan dengan jumlah akses sanitasi belum layak. Wilayah atau Kapanewon yang akan menjadi prioritas adalah berdasarkan jumlah akses sanitasi paling banyak dengan jumlah jumlah penduduk miskin yang paling banyak. Grafik analisis kuadran disajikan dalam grafik di bawah ini:

Grafik 5.11. Analisis Kuadran Lokasi Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar



Berdasarkan grafik prioritas kapanewon penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur dasar dengan indikator jumlah sanitasi tidak layak yang akan diintervensi terbagi dalam 3 prioritas. **Prioritas 1** terdapat 2 Kapanewon yaitu Kapanewon Sentolo dan Kapanewon Samigaluh. Analisis kuadran pada prioritas 1 menunjukkan bahwa jumlah akses sanitasi tidak layak di Kapanewon Sentolo dan Samigaluh sangat tinggi dengan jumlah penduduk miskin yang relatif cukup banyak. Sementara itu, kapanewon yang masuk dalam **prioritas 2** yaitu Kapanewon Girimulyo, Kokap, Kalibawang, Lendah, Pengasih dengan dengan jumlah sanitasi tidak layak masih relatif tinggi. Berikutnya, **prioritas 3** terdapat 5 Kapanewon yaitu Panjatan, Galur, Temon, Wates dan Nanggulan.

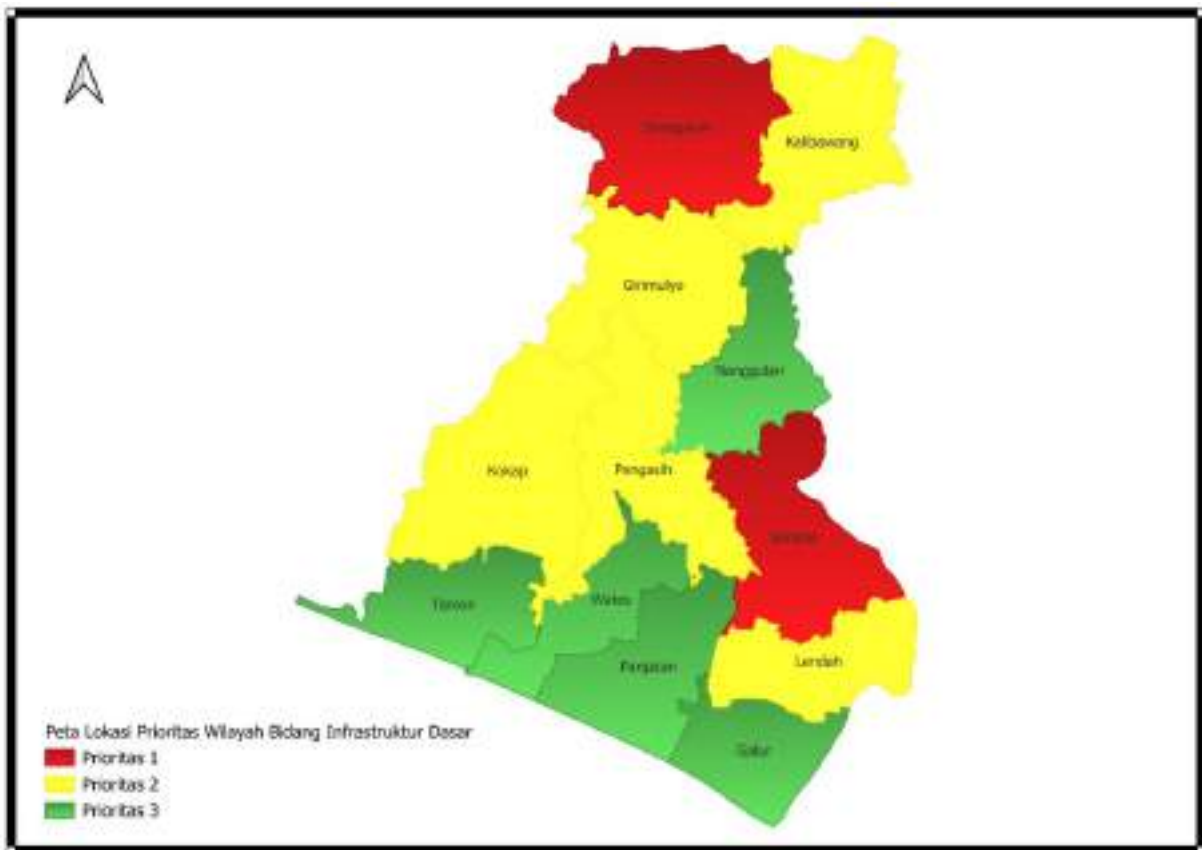
Dari hasil kuadran tersebut, berikut adalah daftar kepanewon berdasarkan kategori prioritas.

Tabel 5.11. Lokasi Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar

No	Kepanewon	Kategori
1	Sentolo	Prioritas 1
2	Samigaluh	Prioritas 1
3	Girimulyo	Prioritas 2
4	Kokap	Prioritas 2
5	Kalibawang	Prioritas 2
6	Lendah	Prioritas 2
7	Pengasih	Prioritas 2
8	Panjatan	Prioritas 3
9	Galur	Prioritas 3
10	Temon	Prioritas 3
11	Wates	Prioritas 3
12	Nanggulan	Prioritas 3

Sumber: Regsosek, 2024 (Diolah)

Gambar 5.11. Peta Lokasi Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar



Lokus Kapanewon

Berdasarkan hasil analisis lokasi prioritas kapanewon per bidang, baik konsumsi maupun non konsumsi, dapat terlihat bahwa terdapat beberapa Kapanewon yang memiliki prioritas di berbagai bidang. Untuk mengetahui lokus kapanewon, maka dilakukan analisis komposit dari seluruh bidang. Metode yang digunakan ialah skoring dengan mengkategorisasi level prioritas menjadi empat, yaitu sangat tinggi (merah) dengan skor 12, tinggi (kuning) dengan skor 9, sedang (biru) dengan skor 6, dan rendah (hijau) dengan skor 3. Semakin tinggi skor menandakan semakin tinggi pula masalah atau level prioritas di kapanewon tersebut. Berikut adalah hasil skoring pada kategori lokus Kapanewon.

Tabel 5.12. Komposit Penentuan Prioritas Kapanewon

No	Kecamatan	Pendidikan	Infrastruktur	Ketenagakerjaan	Kesehatan	Konsumsi	Sosial	Gender	Skor
1	Samigaluh	Red	Red	Red	Blue	Red	Blue	Green	90
2	Girimulyo	Red	Yellow	Red	Blue	Red	Yellow	Green	90
3	Lendah	Red	Yellow	Red	Green	Red	Red	Green	90
4	Panjatan	Red	Blue	Red	Blue	Red	Red	Green	90
5	Sentolo	Red	Red	Red	Green	Red	Blue	Green	90
6	Kokap	Red	Yellow	Red	Blue	Red	Blue	Green	90
7	Pengasih	Blue	Yellow	Blue	Green	Red	Blue	Green	90
8	Kalibawang	Yellow	Yellow	Red	Blue	Red	Yellow	Green	87
9	Galur	Blue	Blue	Blue	Green	Red	Blue	Green	66
10	Wates	Green	Green	Blue	Green	Blue	Blue	Green	63
11	Nanggulan	Green	Green	Blue	Green	Green	Red	Green	60
12	Termon	Green	Green	Green	Red	Green	Blue	Green	45

Metode Skoring	
Kategori Prioritas	Skor
Sangat Tinggi	12
Tinggi	9
Sedang	6
Rendah	3

Dari hasil skoring terhadap komposit bidang, kapanewon yang dapat menjadi prioritas untuk diintervensi terdiri dari 8 Kapanewon, antara lain Samigaluh, Girimulyo, Lendah, Panjatan, Sentolo, Kokap, Pengasih dan Kalibawang. Kedelapan Kapanewon tersebut memiliki skor yang sangat tinggi dengan skor merah yang dominan pada tiap bidang. Selain itu, di kedelapan kapanewon tersebut, juga memiliki persentase kemiskinan yang tinggi berdasarkan hasil pengolahan terhadap data regsosok dan P3KE.

**Tabel 5.13. Daftar Lokasi Prioritas Kalurahan Bidang Konsumsi,
Kabupaten Kulon Progo**

No	Kalurahan	Kapanewon	Prioritas
1	Banjararum	Kalibawang	Prioritas 1
2	Giripurwo	Girimulyo	Prioritas 1
3	Hargomulyo	Kokap	Prioritas 1
4	Banjarharjo	Kalibawang	Prioritas 1
5	Hargotirto	Kokap	Prioritas 1
6	Jatimulyo	Girimulyo	Prioritas 1
7	Sidorejo	Lendah	Prioritas 1
8	Kalirejo	Kokap	Prioritas 1
9	Bumirejo	Lendah	Prioritas 1
10	Pendoworejo	Girimulyo	Prioritas 1
11	Karangsari	Pengasih	Prioritas 2
12	Purwosari	Girimulyo	Prioritas 2
13	Banjaroya	Kalibawang	Prioritas 2
14	Sendangsari	Pengasih	Prioritas 2
15	Tuksono	Sentolo	Prioritas 2
16	Sukoreno	Sentolo	Prioritas 2
17	Hargorejo	Kokap	Prioritas 2
18	Pagerharjo	Samigaluh	Prioritas 2
19	Purwoharjo	Samigaluh	Prioritas 2
20	Banjarasri	Kalibawang	Prioritas 3
21	Srikayangan	Sentolo	Prioritas 3
22	Kaliagung	Sentolo	Prioritas 3
23	Sidomulyo	Pengasih	Prioritas 3
24	Hargowilis	Kokap	Prioritas 3
25	Banjarsari	Samigaluh	Prioritas 3
26	Sidoharjo	Samigaluh	Prioritas 3
27	Gulurejo	Lendah	Prioritas 3
28	Jatirejo	Lendah	Prioritas 3
29	Ngentakrejo	Lendah	Prioritas 3
30	Kedungsari	Pengasih	Prioritas 3
31	Gerbosari	Samigaluh	Prioritas 3
32	Pengasih	Pengasih	Prioritas 3
33	Demangrejo	Sentolo	Prioritas 3
34	Salamrejo	Sentolo	Prioritas 3
35	Krembangan	Panjatan	Prioritas 3
36	Bugel	Panjatan	Prioritas 3
37	Sentolo	Sentolo	Prioritas 3
38	Banguncipto	Sentolo	Prioritas 3
39	Cerme	Panjatan	Prioritas 3
40	Bojong	Panjatan	Prioritas 3
41	Pleret	Panjatan	Prioritas 3

42	Tawang Sari	Pengasih	Prioritas 3
43	Ngargosari	Samigaluh	Prioritas 3
44	Margosari	Pengasih	Prioritas 3
45	Gotakan	Panjatan	Prioritas 3
46	Kebonharjo	Samigaluh	Prioritas 3
47	Depok	Panjatan	Prioritas 3
48	Garongan	Panjatan	Prioritas 3
49	Tayuban	Panjatan	Prioritas 3
50	Kanoman	Panjatan	Prioritas 3
51	Wahyuharjo	Lendah	Prioritas 3
52	Panjatan	Panjatan	Prioritas 3

Sumber: Regsosek 2024 (diolah)

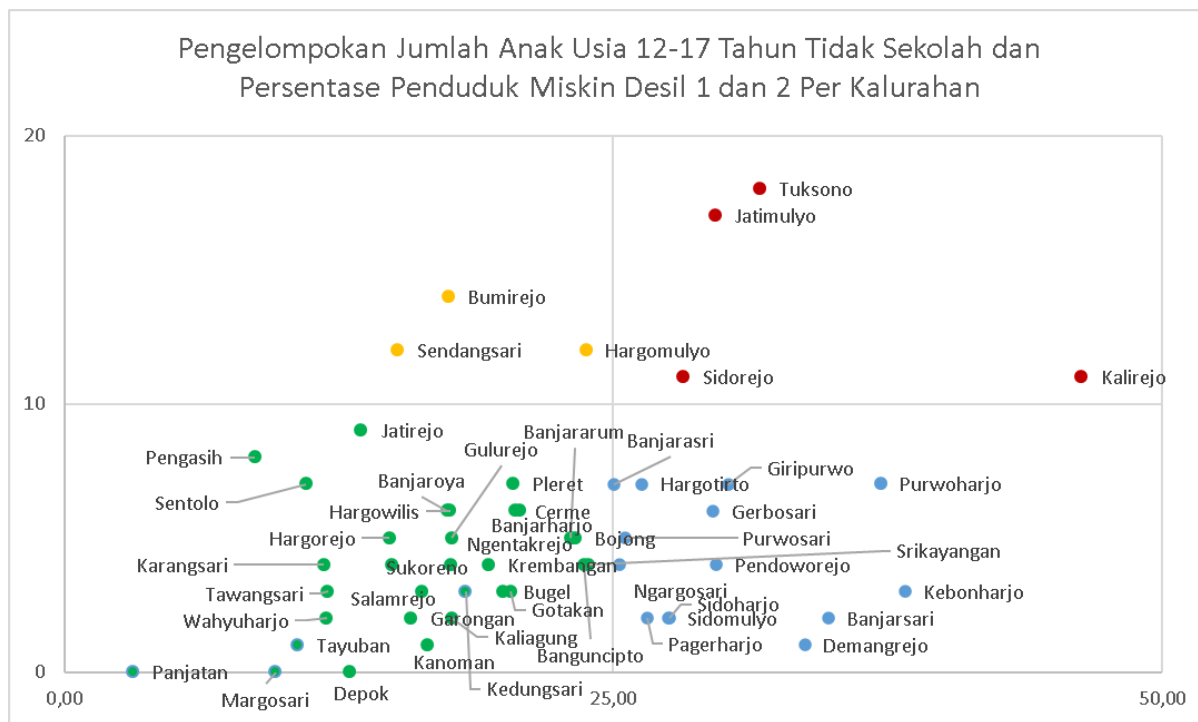
Tabel diatas menunjukkan data lokasi prioritas bidang konsumsi per Kalurahan Kabbupaten Kulon Progo. Dari hasil analisis, terdapat tiga prioritas wilayah, prioritas 1 ditunjukkan dengan kode warna merah, pada prioritas ini terdapat 10 Kalurahan , diantaranya Kalurahan Banjararum, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Banjarharjo, Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Sidorejo, Kalurahan Kalirejo, Kalurahan Bumirejo dan Kalurahan Pendoworejo.

Prioritas 2 ditunjukkan dengan kode warna kuning, pada prioritas ini terdapat 9 Kalurahan , diantaranya: Kalurahan Karang Sari, Kalurahan Purwosari, Kalurahan Banjaroya, Kalurahan Sendangsari, Kalurahan Tuksono, Kalurahan Sukoreno, Kalurahan Hargorejo, Kalurahan Pagerharjo, dan Kalurahan Purwoharjo.

Prioritas 3 ditunjukkan dengan kode warna hijau, pada prioritas ini terdapat 33 Kalurahan , dimana sejumlah 33 Kalurahan tersebut menjadi prioritas ketiga dalam intervensi program penanggulangan kemiskinan.

5.2.2. Bidang Pendidikan

Grafik 5.13 Kuadran Jumlah Pengelompokan Jumlah Anak Usia 12 - 17 Tahun Tidak Sekolah dan Persentase Penduduk Miskin Desil 1 dan 2 per Kalurahan, Kabupaten Kulon Progo



Sumber: Regsosek (Diolah)

Berdasarkan hasil analisis kuadran di atas, terlihat bahwa ada empat kuadran wilayah yang masing-masing menunjukkan tingkat prioritas Kalurahan. Empat kuadran masing-masing memiliki warna. Merah berarti (prioritas 1), Kuning (Prioritas 2), Biru (prioritas 3), dan Hijau (prioritas 4). Jika jumlah sebaran persentase penduduk miskin semakin tinggi dan sebaran penduduk usia 12-17 tahun yang tidak sekolah juga tinggi, maka kelompok Kalurahan akan berwarna merah. Sebaliknya, jika sebaran persentase penduduk miskin semakin rendah dan sebaran penduduk usia 12-17 tahun yang tidak sekolah juga rendah, maka Kalurahan akan berwarna hijau.

Dari hasil kuadran tersebut, berikut adalah daftar Kalurahan berdasarkan kategori prioritas.

Tabel 5.14 Daftar Lokasi Prioritas Kalurahan Bidang Pendidikan, Kabupaten Kulon Progo

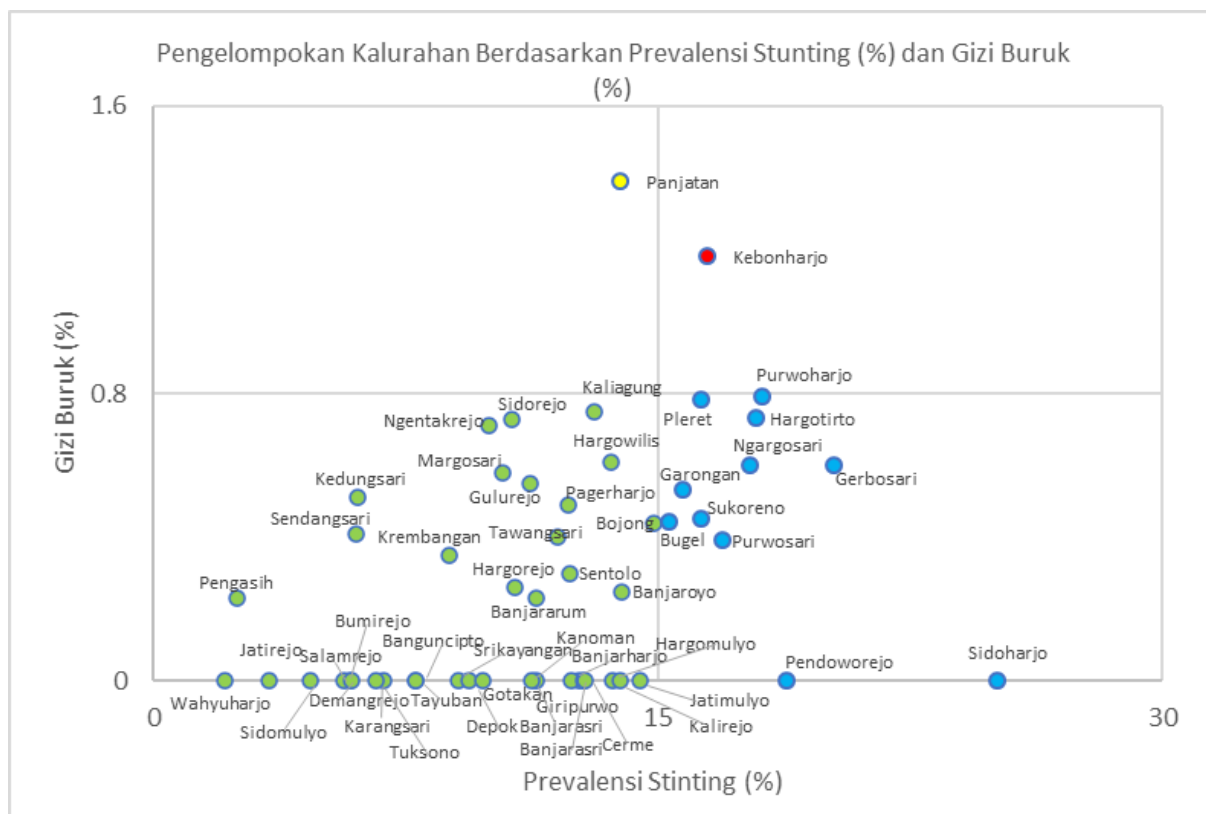
No	Kalurahan	Kapanewon	Kategori
1	Tuksono	Sentolo	Prioritas 1
2	Jatimulyo	Girimulyo	Prioritas 1
3	Kalirejo	Kokap	Prioritas 1
4	Sidorejo	Lendah	Prioritas 1

5	Bumirejo	Lendah	Prioritas 2
6	Hargomulyo	Kokap	Prioritas 2
7	Sendangsari	Samigaluh	Prioritas 2
8	Purwoharjo	Samigaluh	Prioritas 3
9	Giripurwo	Girimulyo	Prioritas 3
10	Hargotirto	Kokap	Prioritas 3
11	Banjarasri	Kalibawang	Prioritas 3
12	Gerbosari	Samigaluh	Prioritas 3
13	Purwosari	Girimulyo	Prioritas 3
14	Pendoworejo	Girimulyo	Prioritas 3
15	Srikayangan	Sentolo	Prioritas 3
16	Kebonharjo	Samigaluh	Prioritas 3
17	Banjarsari	Samigaluh	Prioritas 3
18	Sidomulyo	Pengasih	Prioritas 3
19	Sidoharjo	Samigaluh	Prioritas 3
20	Ngargosari	Samigaluh	Prioritas 3
21	Pagerjarjo	Samigaluh	Prioritas 3
22	Demangrejo	Sentolo	Prioritas 3
23	Pleret	Panjatan	Prioritas 4
24	Banjaroya	Kalibawang	Prioritas 4
25	Hargowilis	Kokap	Prioritas 4
26	Jatirejo	Lendah	Prioritas 4
27	Pengasih	Pengasih	Prioritas 4
28	Sentolo	Sentolo	Prioritas 4
29	Ceme	Panjatan	Prioritas 4
30	Banjarharjo	Kalibawang	Prioritas 4
31	Bojong	Panjatan	Prioritas 4
32	Banjararum	Kalibawang	Prioritas 4
33	Ngentakrejo	Lendah	Prioritas 4
34	Gulurejo	Lendah	Prioritas 4
35	Hargorejo	Kokap	Prioritas 4
36	Banguncipto	Sentolo	Prioritas 4
37	Krembangan	Panjatan	Prioritas 4
38	Sukoreno	Sentolo	Prioritas 4
39	Karangsari	Pengasih	Prioritas 4

40	Bugel	Panjatan	Prioritas 4
41	Gotakan	Panjatan	Prioritas 4
42	Kedungsari	Pengasih	Prioritas 4
43	Salamrejo	Sentolo	Prioritas 4
44	Tawang Sari	Pengasih	Prioritas 4
45	Garongan	Panjatan	Prioritas 4
46	Wahyuharjo	Lendah	Prioritas 4
47	Kaliagung	Sentolo	Prioritas 4
48	Kanoman	Panjatan	Prioritas 4
49	Tayuban	Panjatan	Prioritas 4
50	Depok	Panjatan	Prioritas 4
51	Margosari	Pengasih	Prioritas 4
52	Panjatan	Panjatan	Prioritas 4

5.2.3. Bidang Kesehatan

Grafik 5.14 Kuadran Prevalensi Stunting Desil 1-2 dan Gizi Buruk Desil 1-2 per Kalurahan Kabupaten Kulon Progo



Sumber: Dinas Kesehatan Kulon Progo

Grafik kuadran di atas menyajikan prioritas Kalurahan berdasarkan prevalensi stunting desil 1-2 dan gizi buruk desil 1-2 di 8 Kapanewon. Sebaran Kalurahan berada di 4 kuadran yang dibagi menjadi 4 prioritas. Prioritas 1 terdapat 1 Kalurahan yaitu Kebonharjo yang ditandai dengan titik warna merah, prioritas 2 terdapat 1 Kalurahan yaitu Panjatan yang ditandai dengan titik warna kuning, prioritas 3 terdapat 11 Kalurahan yang ditandai dengan titik warna biru dan prioritas 4 ditandai dengan titik warna hijau. Prioritas Kalurahan berdasarkan prioritas disajikan dalam tabel di bawah ini.

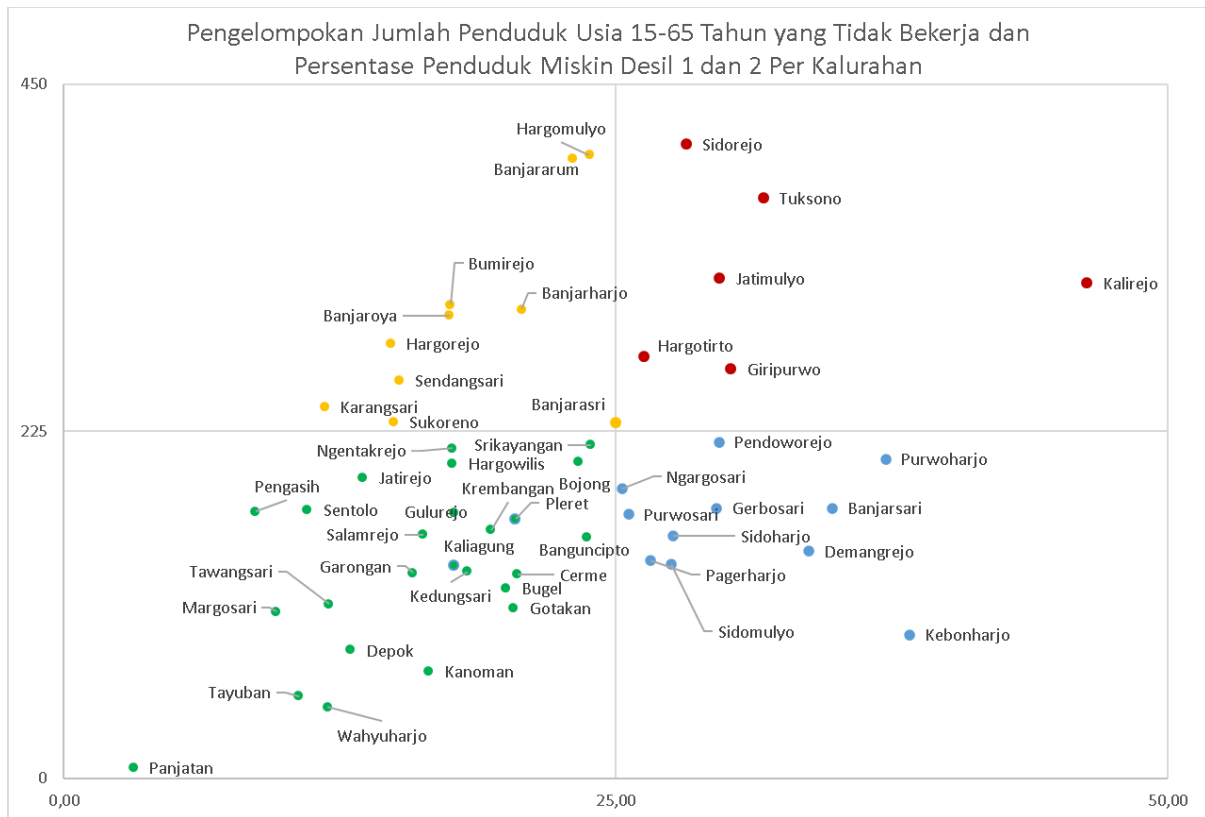
Tabel 5.15 Daftar Lokasi Prioritas Kalurahan Bidang Kesehatan, Kabupaten Kulon Progo

No	Kalurahan	Kapanewon	Prioritas
1	Kebonharjo	Samigaluh	Prioritas 1
2	Panjatan	Panjatan	Prioritas 2
3	Sidoharjo	Samigaluh	Prioritas 3
4	Gerboari	Samigaluh	Prioritas 3
5	Pendoworejo	Girimulyo	Prioritas 3
6	Purwoharjo	Samigaluh	Prioritas 3
7	Hargotirto	Kokap	Prioritas 3
8	Ngargosari	Samigaluh	Prioritas 3
9	Purwosari	Girimulyo	Prioritas 3
10	Pleret	Panjatan	Prioritas 3
11	Garongan	Panjatan	Prioritas 3
12	Sukoreno	Sentolo	Prioritas 3
13	Bojong	Panjatan	Prioritas 3
14	Jatimulyo	Girimulyo	Prioritas 4
15	Bugel	Panjatan	Prioritas 4
16	Kaliagung	Sentolo	Prioritas 4
17	Hargowilis	Kokap	Prioritas 4
18	Banjaroyo	Kalibawang	Prioritas 4
19	Kalirejo	Kokap	Prioritas 4
20	Hargomulyo	Kokap	Prioritas 4
21	Sentolo	Sentolo	Prioritas 4
22	Tawang Sari	Pengasih	Prioritas 4
23	Pagerharjo	Samigaluh	Prioritas 4
24	Cerme	Panjatan	Prioritas 4
25	Banjarharjo	Kalibawang	Prioritas 4

26	Giripurwo	Girimulyo	Prioritas 4
27	Banjarsari	Samigaluh	Prioritas 4
28	Banjararum	Kalibawang	Prioritas 4
29	Gulurejo	Lendah	Prioritas 4
30	Banjarsari	Samigaluh	Prioritas 4
31	Kanoman	Panjatan	Prioritas 4
32	Sidorejo	Lendah	Prioritas 4
33	Hargorejo	Kokap	Prioritas 4
34	Margosari	Pengasih	Prioritas 4
35	Ngentakrejo	Lendah	Prioritas 4
36	Depok	Panjatan	Prioritas 4
37	Gotakan	Panjatan	Prioritas 4
38	Srikayangan	Sentolo	Prioritas 4
39	Krembangan	Panjatan	Prioritas 4
40	Banguncipto	Sentolo	Prioritas 4
41	Tayuban	Panjatan	Prioritas 4
42	Kedungsari	Pengasih	Prioritas 4
43	Sendangsari	Pengasih	Prioritas 4
44	Tuksono	Sentolo	Prioritas 4
45	Karangsari	Pengasih	Prioritas 4
46	Bumrejo	Lendah	Prioritas 4
47	Demangrejo	Sentolo	Prioritas 4
48	Salamrejo	Sentolo	Prioritas 4
49	Sidomulyo	Pengasih	Prioritas 4
50	Jatirejo	Lendah	Prioritas 4
51	Pengasih	Pengasih	Prioritas 4
52	Wahyurejo	Lendah	Prioritas 4

5.2.4. Bidang Ketenagakerjaan

Grafik 5.15 Kuadran Pengelompokan Jumlah Usia 15 - 65 Tahun yang Tidak Bekerja dan Persentase Penduduk Miskin Desil 1-2 per Kalurahan, Kabupaten Kulon Progo



Sumber: Regsosek, 2023 (Diolah)

Berdasarkan hasil analisis kuadran di atas, terlihat bahwa ada empat kuadran wilayah yang masing-masing menunjukkan tingkat prioritas Kalurahan. Empat kuadran masing-masing memiliki warna. Merah berarti (prioritas 1), Kuning (Prioritas 2), Biru (prioritas 3), dan Hijau (prioritas 4). Jika jumlah sebaran persentase penduduk miskin semakin tinggi dan sebaran penduduk usia 15-65 tahun yang tidak bekerja juga tinggi, maka kelompok Kalurahan akan berwarna merah. Sebaliknya, jika sebaran persentase penduduk miskin semakin rendah dan sebaran penduduk usia 12-17 tahun yang tidak sekolah juga rendah, maka Kalurahan akan berwarna hijau.

Dari hasil kuadran tersebut, berikut adalah daftar Kalurahan berdasarkan kategori prioritas.

Tabel 5.16 Daftar Lokasi Prioritas Kalurahan Bidang Ketenagakerjaan, Kabupaten Kulon Progo

No	Kalurahan	Kapanewon	Kategori
1	Sidorejo	Lendah	Prioritas 1

2	Tuksono	Sentolo	Prioritas 1
3	Kalirejo	Kokap	Prioritas 1
4	Jatimulyo	Girimulyo	Prioritas 1
5	Hargotirto	Kokap	Prioritas 1
6	Giripurwo	Girimulyo	Prioritas 1
7	Hargomulyo	Kokap	Prioritas 2
8	Banjararum	Kalibawang	Prioritas 2
9	Bumirejo	Lendah	Prioritas 2
10	Banjarharjo	Kalibawang	Prioritas 2
11	Banjaroya	Kalibawang	Prioritas 2
12	Hargorejo	Kokap	Prioritas 2
13	Sendangsari	Pengasih	Prioritas 2
14	Karangsari	Pengasih	Prioritas 2
15	Banjarasri	Kalibawang	Prioritas 2
16	Sukoreno	Sentolo	Prioritas 2
17	Pendoworejo	Girimulyo	Prioritas 3
18	Purwoharjo	Samigaluh	Prioritas 3
19	Ngargosari	Samigaluh	Prioritas 3
20	Gerbosari	Samigaluh	Prioritas 3
21	Banjarsari	Samigaluh	Prioritas 3
22	Purwosari	Girimulyo	Prioritas 3
23	Sidoharjo	Samigaluh	Prioritas 3
24	Demangrejo	Sentolo	Prioritas 3
25	Pagerharjo	Samigaluh	Prioritas 3
26	Sidomulyo	Pengasih	Prioritas 3
27	Kebonharjo	Samigaluh	Prioritas 3
28	Ngentakrejo	Lendah	Prioritas 4
29	Srikayangan	Sentolo	Prioritas 4
30	Hargowilis	Kokap	Prioritas 4
31	Jatirejo	Lendah	Prioritas 4
32	Bojong	Panjatan	Prioritas 4
33	Pengasih	Pengasih	Prioritas 4
34	Sentolo	Sentolo	Prioritas 4
35	Pleret	Panjatan	Prioritas 4
36	Gulurejo	Lendah	Prioritas 4

Dari hasil kuadran tersebut, berikut adalah daftar Kalurahan berdasarkan kategori prioritas.

Tabel 5.17 Daftar Lokasi Prioritas Kalurahan Bidang Infrastruktur Dasar, Kabupaten Kulon Progo

Kalurahan	Kepanewon	Prioritas
Pendoworejo	Girimulyo	Prioritas 1
Banjararum	Kalibawang	Prioritas 1
Ngargosari	Samigaluh	Prioritas 2
Sidorejo	Lendah	Prioritas 3
Tuksono	Sentolo	Prioritas 3
Hargomulyo	Kokap	Prioritas 3
Kalirejo	Kokap	Prioritas 3
Hargotirto	Kokap	Prioritas 3
Jatimulyo	Girimulyo	Prioritas 3
Giripurwo	Girimulyo	Prioritas 3
Garongan	Panjatan	Prioritas 4
Pleret	Panjatan	Prioritas 4
Bugel	Panjatan	Prioritas 4
Bojong	Panjatan	Prioritas 4
Gulurejo	Lendah	Prioritas 4
Ngentakrejo	Lendah	Prioritas 4
Demangrejo	Sentolo	Prioritas 4
Srikayangan	Sentolo	Prioritas 4
Salamrejo	Sentolo	Prioritas 4
Sukoreno	Sentolo	Prioritas 4
Kaliagung	Sentolo	Prioritas 4

Sentolo	Sentolo	Prioritas 4
Banguncipto	Sentolo	Prioritas 4
Tawang Sari	Pengasih	Prioritas 4
Kedungsari	Pengasih	Prioritas 4
Margosari	Pengasih	Prioritas 4
Pengasih	Pengasih	Prioritas 4
Sendangsari	Pengasih	Prioritas 4
Sidomulyo	Pengasih	Prioritas 4
Hargorejo	Kokap	Prioritas 4
Hargowilis	Kokap	Prioritas 4
Purwosari	Girimulyo	Prioritas 4
Banjarasri	Kalibawang	Prioritas 4
Banjarharjo	Kalibawang	Prioritas 4
Banjaroya	Kalibawang	Prioritas 4
Kebonharjo	Samigaluh	Prioritas 4
Banjarsari	Samigaluh	Prioritas 4
Purwoharjo	Samigaluh	Prioritas 4
Sidoharjo	Samigaluh	Prioritas 4
Gerbosari	Samigaluh	Prioritas 4
Pagerharjo	Samigaluh	Prioritas 4

Lokus Kalurahan

Berdasarkan hasil analisis lokasi prioritas Kalurahan per bidang, baik konsumsi maupun non konsumsi, dapat terlihat bahwa terdapat beberapa Kalurahan yang memiliki prioritas di berbagai bidang. Untuk mengetahui lokus Kalurahan, maka dilakukan analisis komposit dari seluruh bidang. Metode yang digunakan ialah skoring dengan mengkategorisasi level prioritas menjadi empat, yaitu sangat tinggi (merah) dengan skor 12, tinggi (kuning) dengan

skor 9, sedang (biru) dengan skor 6, dan rendah (hijau) dengan skor 3. Semakin tinggi skor menandakan semakin tinggi pula masalah atau level prioritas di Kalurahan tersebut. Berikut adalah hasil skoring pada kategori lokus Kalurahan .

Tabel 5.18 Komposit Penentuan Prioritas Kalurahan

No	Kalurahan	Pendidikan	Infrastruktur	Ketenagakerjaan	Kesehatan	Konsumsi	Skor
1	Jabimulyo	Red	Blue	Red	Green	Red	45
2	Kalirejo	Red	Blue	Red	Green	Red	45
3	Sidorejo	Red	Blue	Red	Green	Red	45
4	Tuksono	Red	Blue	Red	Green	Yellow	42
5	Hargatirto	Blue	Red	Red	Blue	Red	42
6	Pendowoharjo	Blue	Red	Blue	Blue	Red	42
7	Hargomulyo	Yellow	Blue	Yellow	Green	Red	39
8	Giripunwo	Blue	Red	Red	Green	Red	39
9	Banjarum	Green	Red	Yellow	Green	Red	39
10	Bumirejo	Yellow	Green	Yellow	Green	Red	36
11	Sendangsari	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	33
12	Purwoharjo	Blue	Green	Blue	Blue	Yellow	30
13	Purwosari	Blue	Green	Blue	Blue	Yellow	30
14	Kebonharjo	Blue	Green	Blue	Red	Green	30
15	Ngangosari	Blue	Yellow	Blue	Blue	Green	30
16	Banjarharjo	Green	Green	Yellow	Green	Red	30
17	Sukareno	Blue	Green	Blue	Blue	Yellow	30
18	Pagerharjo	Blue	Green	Blue	Blue	Yellow	27
19	Banjaroya	Green	Green	Yellow	Green	Yellow	27
20	Hargorejo	Green	Green	Yellow	Green	Yellow	27
21	Karangsari	Green	Green	Yellow	Green	Yellow	27
22	Banjarsari	Blue	Green	Blue	Blue	Green	24
23	Gerbosari	Blue	Green	Blue	Blue	Green	24
24	Banjarsari	Blue	Green	Yellow	Green	Green	24
25	Sidomulyo	Blue	Green	Blue	Blue	Green	21
26	Sidoharjo	Blue	Green	Blue	Blue	Green	21
27	Demangrejo	Blue	Green	Blue	Blue	Green	21
28	Panjatan	Green	Green	Blue	Yellow	Green	21
29	Srikayangan	Blue	Green	Blue	Blue	Green	18
30	Pleret	Green	Green	Blue	Blue	Green	18
31	Bojong	Green	Green	Blue	Blue	Green	18
32	Garongan	Green	Green	Blue	Blue	Green	18
33	Hargowilis	Green	Green	Blue	Blue	Green	15
34	Jabirejo	Green	Green	Blue	Blue	Green	15
35	Pengasih	Green	Green	Blue	Blue	Green	15
36	Sentolo	Green	Green	Blue	Blue	Green	15
37	Ceme	Green	Green	Blue	Blue	Green	15
38	Ngentakrejo	Green	Green	Blue	Blue	Green	15
39	Gulurejo	Green	Green	Blue	Blue	Green	15
40	Banguncipto	Green	Green	Blue	Blue	Green	15
41	Kremlangan	Green	Green	Blue	Blue	Green	15
42	Bugel	Green	Green	Blue	Blue	Green	15
43	Gotakan	Green	Green	Blue	Blue	Green	15
44	Kedungsari	Green	Green	Blue	Blue	Green	15
45	Salamrejo	Green	Green	Blue	Blue	Green	15
46	Tawang Sari	Green	Green	Blue	Blue	Green	15
47	Wahyuharjo	Green	Green	Blue	Blue	Green	15
48	Kaliagung	Green	Green	Blue	Blue	Green	15
49	Kanoman	Green	Green	Blue	Blue	Green	15
50	Tayuban	Green	Green	Blue	Blue	Green	15
51	Depok	Green	Green	Blue	Blue	Green	15
52	Mangosari	Green	Green	Blue	Blue	Green	15

Metode Skoring	
Kategori Prioritas	Skor
Sangat Tinggi	12
Tinggi	9
Sedang	6
Rendah	3

Dari hasil skoring terhadap komposit bidang, Kalurahan yang dapat menjadi prioritas untuk diintervensi terdiri dari 10 Kalurahan, antara lain Jatimulyo, Kalirejo, Sidorejo, Tuksono, Hargotirto, Pendowoharjo, Hargomulyo, Giripurwo, Banjararum, Bumirejo. Kesepuluh Kalurahan tersebut memiliki skor yang sangat tinggi dibanding Kalurahan yang lain. Selain itu, di kedelapan kapanewon tersebut, juga memiliki persentase kemiskinan yang tinggi berdasarkan hasil pengolahan terhadap data regsosek desil 1 dan 2.

5.3. Rekomendasi

Tabel 5.19 Rekomendasi untuk faktor permasalahan tiap bidang

No	Bidang Urusan	Rekomendasi
1	Bidang Kemiskinan Konsumsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat satu data kemiskinan dengan memadupadankan basis data yang tersedia seperti DTKS, P3KE dan Regsosek 2. Meminimalisir munculnya inclusion dan exclusion eror dengan melakukan verifikasi dan validasi berkala melalui sistem informasi yang terintegrasi antara pemerintah kabupaten dan Kalurahan . 3. Melakukan kolaborasi multipihak dengan sektor swasta, filantropi, perguruan tinggi hingga lembaga swadaya masyarakat.melalui intervensi pensasaran yang ditetapkan
2	Bidang Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabungkan sekolah dengan rasio siswa rendah di lokasi yang berdekatan untuk meningkatkan efisiensi. 2. Menyediakan fasilitas transportasi umum atau tunjangan bagi siswa-siswa di kawasan yang secara aksesbilias sangat terpencil/terisolir 3. Memberikan peningkatan kapasitas kepada tenaga pengajar di tiap-tiap sekolah terkait pendidikan inklusi 4. Mendorong tenaga pengajar untuk mengikuti sertifikasi dengan memberikan kenaikan tunjangan setelah lulus.
3	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan makanan tambahan bergizi di Posyandu dan sekolah untuk anak-anak, khususnya bagi yang teridentifikasi memiliki tinggi dan berat badan di bawah standar. 2. Memberikan edukasi mengenai pola makan bergizi yang terjangkau, termasuk pemanfaatan bahan pangan lokal.
4	Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelatihan keterampilan teknis di sektor primer (pertanian/perikanan) dan sekunder (manufaktur) yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Membangun kerjasama dengan perusahaan atau badan usaha termasuk perguruan tinggi untuk <i>link and match</i> kurikulum dan lulusan sekolah SMK dengan pasar kerja. 3. Membuat platform digital yang menghubungkan angkatan kerja dengan pelatihan dan lowongan kerja sesuai keahlian. 4. Mendorong legalisasi usaha kecil melalui penyederhanaan prosedur izin usaha mikro (UMKM). 5. Menyediakan inkubator bisnis untuk membantu usaha sektor informal berkembang menjadi formal. 6. Mempermudah akses kredit usaha dengan bunga rendah untuk pekerja sektor informal. 7. Mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola kawasan industri secara terpusat. 8. Membuat strategi branding untuk mempromosikan Kulon Progo sebagai destinasi investasi yang kompetitif. 9. Bekerjasama dengan Provinsi atau pemerintah daerah lain untuk mengadakan forum investasi internasional untuk memamerkan peluang investasi di Kulon Progo. 10. Menetapkan aturan yang mewajibkan perusahaan besar menerima tenaga kerja penyandang disabilitas dengan kuota tertentu. 11. Mengadakan pelatihan keterampilan kerja khusus untuk penyandang disabilitas agar siap masuk ke pasar kerja.
5	Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat satu data kemiskinan dengan memadupadankan basis data yang tersedia seperti DTKS, P3KE dan Regsosek, termasuk di dalamnya data pilah PMKS 2. Menyediakan program pelatihan kerja inklusif dan akses modal usaha bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. 3. Memasstikan program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan bantuan layanan dasar mencakup semua kelompok rentan.
6	Kesetaraan gender	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong perempuan untuk mengenyam pendidikan tinggi melalui program beasiswa khusus dan pelatihan keterampilan. 2. Menyediakan akses permodalan bagi perempuan untuk memulai usaha mikro melalui program UMKM ramah gender. 3. Mengadakan kampanye di tingkat Kalurahan hingga kabupaten tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan,

		<p>pekerjaan, dan kehidupan sosial.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Menyelenggarakan pelatihan tentang kepemimpinan, public speaking, dan kebijakan publik untuk mendorong perempuan terjun ke politik melalui kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat, partai politik hingga pusat studi wanita di perguruan tinggi. 5. Membangun kelompok pendukung perempuan yang ingin masuk dunia politik, misalnya melalui mentoring dengan tokoh perempuan sukses.
7	Infrastruktur Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperluas jaringan internet dan telekomunikasi di wilayah terpencil untuk mendukung akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 2. Memediasi transportasi umum atau kendaraan komunitas yang sesuai dengan medan untuk mempermudah mobilitas penduduk, termasuk untuk mendekati ke layanan dasar seperti sekolah dan layanan kesehatan. 3. Menerapkan teknologi irigasi hemat air seperti irigasi tetes (drip irrigation) untuk kebutuhan pertanian. 4. Membuat program peremajaan lingkungan seperti bedah rumah, pembuatan sistem sanitasi, dan pengelolaan limbah. 5. Berkolaborasi dengan sektor swasta untuk mendukung program CSR dan filantropi berupa renovasi rumah atau penyediaan fasilitas dasar di kawasan kumuh.

5.4. Target Penurunan kemiskinan

Tabel 5.20. Target Penurunan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo 2025-2029

Tingkat Kemiskinan (%)					
Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
15,62%	14,12% -15,12%	13,80% - 14,80%	13,50% - 14,50%	13,00% - 14,00%	12,40% - 13,40%

Grafik 5.17. Target Penurunan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo 2025-2029



Diolah dari target RPJMD Teknoratik tahun 2025-2029 dan dianalisis berdasarkan trend rata-rata penurunan kemiskinan Kabupaten Kulon Progo selama 5 tahun terkakhir.

BAB VI. PENUTUP

Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 ini disusun sebagai bentuk komitmen dan upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Dengan merujuk pada ketentuan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah, dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan.

Pencapaian tujuan dari rencana ini memerlukan kolaborasi aktif dari berbagai pihak, termasuk perangkat daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga lainnya. Dengan sinergi yang baik, tantangan penanggulangan kemiskinan dapat diatasi untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing.

Matriks prioritas program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dijabarkan dalam tabel berikut :

6.1. Matriks Prioritas Bidang Pendidikan

Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Program Nomenklatur	Kegiatan Nomenklatur	Subkegiatan Nomenklatur	Satuan	Tahun ke-1 (2025)		Tahun ke-2 (2026)		Tahun ke-3 (2027)		Tahun ke-4 (2028)		Tahun ke-5 (2029)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Strategi Tagiing
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Sarana, Prasarana dan utilitas sekolah	unit	7	5.882.014.300	7	5.999.654.586	7	611.9647.678	7	6.242.040.631	7	6.366.881.444	Dinas pendidikan	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta didik	- PBP SD Swasta dan MI Negeri-Swasta 93 sekolah - PBP SD Negeri 273 sekolah - Bantuan siswa miskin 550 siswa	3.259.583.000	PBP SD Swasta dan MI Negeri-Swasta 93 sekolah - PBP SD Negeri 273 sekolah - Bantuan siswa miskin 550 siswa	3.324.774.660	PBP SD Swasta dan MI Negeri-Swasta 93 sekolah - PBP SD Negeri 273 sekolah - Bantuan siswa miskin 550 siswa	3.391.270.153	PBP SD Swasta dan MI Negeri-Swasta 93 sekolah - PBP SD Negeri 273 sekolah - Bantuan siswa miskin 550 siswa	3.459.095.556	PBP SD Swasta dan MI Negeri-Swasta 93 sekolah - PBP SD Negeri 273 sekolah - Bantuan siswa miskin 550 siswa	3.528.277.467	Dinas pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran
	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan pendidikan	335	32.668.800.000	335	33.322.176.000	335	33.988.619.520	335	34.668.391.910	335	35.361.759.749	Dinas pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta didik	35.000	3.146.220.000	35.200	3.146.500.000	35.200	3.250.000.000	35.200	3.324.430.000	35.200	3.402.880.000	Dinas pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran

	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi Sedang/Berat			Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Unit	7	3.030.303.905	7	3.090.909.983	7	3.152.728.183	7	3.215.782.746	7	3.280.098.401	Dinas pendidikan	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Unit	2	1.902.230.144	2	1.940.274.747	2	1.979.080.242	2	2.018.661.847	2	2.059.035.084	Dinas pendidikan	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik SD	Peserta didik	335 sekolah	687,717,700	335 sekolah	701.472.054	335 sekolah	715.501.495	335 sekolah	729.811.525	335 sekolah	744.407.755	Dinas pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran
	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	36 sekolah	2.620.298.500	36 sekolah	2.672.704.470	36 sekolah	2.726.158.559	36 sekolah	2.780.681.731	36 sekolah	2.836.295.365	Dinas Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			Pengembangan Sarana, Prasarana dan utilitas sekolah	Unit	2	5.383.174.400	2	5.490.837.888	2	5.600.654.646	2	5.712.667.739	2	5.826.921.093	Dinas Pendidikan	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan
	Jumlah ruang kelas yang telah direhabilitasi sedang/berat			Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Ruang	1	630.000.000	1	642.600.000	1	655.452.000	1	668.561.040	N/A	681.932.260	Dinas pendidikan	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan
	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat			Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Unit	2	1.526.024.400	2	1.556.544.888	2	1.587.675.786	2	16.194.29.301	2	1.651.817.888	Dinas pendidikan	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan
	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	67	19,401,190,000	67	19.789.213.800	67	20.184.998.076	67	20.588.698.038	67	21.000.471.998	Dinas pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran

	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	paket	1	253.000.000	1	258.060.000	1	265.000.000	1	271.070.000	1	277.47.000	Dinas pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik SMP	Peserta didik	36 sekolah	301,884,400	36 sekolah	307.922.088	36 sekolah	314.080.529	36 sekolah	320.362.140	36 sekolah	326.769.383	Dinas pendidikan	Meningkatkan Pendapatan
	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik	Peserta didik di 12 sekolah	50,350,000	Peserta didik di 12 sekolah	51.357.000	Peserta didik di 12 sekolah	52.384.140	Peserta didik di 12 sekolah	53.431.822,8	Peserta didik di 12 sekolah	54.500.459,26	Dinas pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran
	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP			Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan pendidikan	812	10,491,660,000	812	10.701.493.200	812	10.915.523.064	812	11.133.833.525	812	11.356.510.196	Dinas pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik PAUD	Peserta didik	2700	460,345,700	2700	469.552.614	2700	478.943.666	2700	488.522.539	2700	498.292.990	Dinas Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran
	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik NonFormal/Kesetaraan	Satuan pendidikan	11	474,220,000	11	483.704.400	11	493.378.488	11	503.246.057,8	11	513.310.978,9	Dinas pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Kesetaraan	Peserta didik	12 PKBM	62,357,700	12 PKBM	63.604.854	12 PKBM	64.876.951	12 PKBM	66.174.490	12 PKBM	67.497.979	Dinas pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran

	rakan Proses Belajar																
	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Satuan pendidikan	11	474,220,000	11	483.704.400	11	4.933.784.88	11	503.246.057	11	513.310.978	Dinas pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran

6.2. Matriks Prioritas Bidang Ketenagakerjaan

Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Program Nomenklatur	Kegiatan Nomenklatur	Subkegiatan Nomenklatur	Satuan	Tahun ke-1 (2025)		Tahun ke-2 (2026)		Tahun ke-3 (2027)		Tahun ke-4 (2028)		Tahun ke-5 (2029)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Strategi Tagging
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	3	132.209.074	2	161.964.012	2	165.679.154	3	169.685.985	2	172.574.293	Disnakertrans	Meningkatkan Pendapatan
	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro			Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Orang	5	8.162.048	5	9.998.997	5	10.228.354	5	10.475.720	5	10.654.032	Disnakertrans	Meningkatkan Pendapatan
	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	orang	190	754.482.339	144	924.285.931	160	924.285.876	176	968.353.194	192	984.836.004	Disnakertrans	Meningkatkan Pendapatan

Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Lembaga	2	8.069.098	2	9.885.127	2	9.885.126	2	10.356.421	2	10.532.703	Disnakertrans	Meningkatkan Pendapatan
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Unit	5	43.380.228	2	53.143.368	7	55.667.092	9	56.624.799	9	261.968.859	Disnakertrans	Meningkatkan Pendapatan
Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	orang	185	785.260.300	190	800.965.506	195	816.984.816	195	833.324.512	200	849.991.003	Disnakertrans	Meningkatkan Pendapatan
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Lembaga	1	142.740.500	1	145.595.310	1	148.507.216	1	151.477.361	1	154.506.908	Disnakertrans	Meningkatkan Pendapatan
Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja	Orang	2.705	2.796.018.478	2.750	3.425.289.643	2.805	3.503.859.160	2.860	3.588.597.481	2.925	3.649.680.745	Disnakertrans	Meningkatkan Pendapatan	
Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Orang	1.920	109.078.800	1.955	111.260.376	1.990	113.485.583,5	2.025	115.755.295,2	2.070	118.070.401,1	Disnakertrans	Meningkatkan Pendapatan	

	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja			Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	785	3.193.949.400	795	3.257.828.388	815	3.322.984.956	835	3.389.444.655	855	3.457.233.548	Disnakertrans	Meningkatkan Pendapatan
	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Orang	2813	90.191.300	2838	91.995.126	2863	93.835.028,52	2888	95.711.729.09	2913	97.625.963,67	Disnakertrans	Meningkatkan Pendapatan
	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Aduan	4	22.790.526	6	27.919.755	8	28.560.180	2	29.250.888	2	29.748.782	Disnakertrans	Meningkatkan Pendapatan
	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	kasus	2	22.790.526	2	27.919.755	2	28.560.180	2	29.250.888	2	29.748.782	Disnakertrans	Meningkatkan Pendapatan
	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	PROGRAM PEMBANGUN ANKAWASAN TRANSMIGRASI	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kepala keluarga	12 KK	135,460,400	12 KK	138.169.608	12 KK	140.933.000	12 KK	143.751.660	12 KK	146.626.693	Disnakertrans	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan

6.3. Matriks Prioritas Bidang Kesejahteraan Sosial

Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Program Nomenklatur	Kegiatan Nomenklatur	Subkegiatan Nomenklatur	Satuan	Tahun ke-1 (2025)		Tahun ke-2 (2026)		Tahun ke-3 (2027)		Tahun ke-4 (2028)		Tahun ke-5 (2029)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Strategi Tagiing
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	PSM	45	12,101,000	45	12,343,020	45	12,589,880	45	12,841,678	45	13,098,512	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan pendapatan
	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penerima manfaat langsung: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	7	63,170,800	7	64,434,216	7	65,722,900	7	65,854,346	7	67,171,433	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan pendapatan
	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Penerima manfaat langsung & akhir: RT miskin dalam kelompok desil 1 & 2	26	17.110.000	36	12.900.000	45	19.310.000	53	20.200.000	61	21.790.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan pendapatan
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanaan	Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi	462	429,135,000	462	437,717,700	462	446,472,054	462	455,401,495	462	464,509,525	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Mengurangi beban pengeluaran

	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan	30	29,626,000	30	30,218,520	30	30,822,890	30	31,439,348	30	32,068,135	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Mengurangi beban pengeluaran
	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	250	26,101,400	250	26,623,428	260	27,155,897	265	27,699,014	270	28,252,995	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan pendapatan
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	125	12,000,000	125	12,240,000	125	12,484,800	125	12,734,496	125	12,989,186	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Mengurangi beban pengeluaran
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Program Rehabilitasi Sosial	Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	300	36,796,300	300	37,532,226	300	38,282,871	300	39,048,528	300	39,829,498	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Mengurangi beban pengeluaran
	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin	10.000	72.770.000	10.000	10.000	275.110.000	10.000	387.200.000	10.000	656.360.000	656.360.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Mengurangi beban pengeluaran
	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.071	13.455.450.000	2.071	11.861.150.000	2.071	14.102.590.000	2.071	14.214.690.000	2.071	14.039.040.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Mengurangi beban pengeluaran

6.4. Matriks Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar

Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Program Nomenklatur	Kegiatan Nomenklatur	Subkegiatan Nomenklatur	Satuan	Tahun ke-1 (2025)		Tahun ke-2 (2026)		Tahun ke-3 (2027)		Tahun ke-4 (2028)		Tahun ke-5 (2029)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Strategi Tagling
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	1 unit	170.000.000,00	1 unit	170.000.000,00	1 unit	170.000.000,00	1 unit	170.000.000,00	1 unit	170.000.000,00	DPU-PKP	Pengurangan kantong-kantong kemiskinan
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan			Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	79 Rumah tangga	526.695.859,40	73 Rumah Tangga	511.402.922,40	278 Rumah Tangga	1.862.078.546,56	278 Rumah Tangga	1.862.078.546,56	274 Rumah Tangga	1.933.136.035,15	DPU-PKP	Pengurangan kantong-kantong kemiskinan
				Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kapasitas IPLT Terbangun (DAK)	692 Rumah Tangga	4.583.362.200	725 Rumah Tangga	5.041.698.500	760 Rumah Tangga	5.545.868.300	760 Rumah Tangga	5.545.868.300	796 Rumah Tangga	6.100.455.100	DPU-PKP	Pengurangan kantong-kantong kemiskinan
	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan	6 6SR	435.000.440	66 SR	443.878.000	83 SR	600.286.192	349 SR	2.630.589.127	344 SR	2.722.575.265	DPU-PKP	Meningkatkan pendapatan
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan (DAK)	294 SR	2.058.000.000	294 SR	2.100.000.000	4581 SR	2.100.000.000	293 SR	2.205.000.000	293 SR	4.710.109.900	DPU-PKP	Pengurangan kantong-kantong kemiskinan

	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perdesaan SPAM (DAK)	6 liter/detik	1.543.500.000,00	6 liter/detik	1.575.000.000	6 liter/detik	1.575.000.000	6 liter/detik	1.653.750.000	6 liter/detik	2.315.250.00		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah/Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	62.350.530	1 Dokumen	68.585.583	1 Dokumen	75.444.141	1 Dokumen	82.988.555	1 Dokumen	91.287.411	Dinkes	Pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan derajat kesehatan
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	72.050.000	1 Dokumen	79.255.000	1 Dokumen	87.180.500	1 Dokumen	95.898.550	1 dokumen	105.488.405	Dinkes	Meningkatkan kesehatan masyarakat
	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara 5 unit, Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Lembaga	304 Lembaga	338.053.000	303 Lembaga	344.814.060	303 Lembaga	351.710.341	303 Lembaga	358.744.548	303 Lembaga	365.919.439	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengurangan kantong-kantong kemiskinan
	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara 5 unit, Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	304 Lembaga	359.738.000	304 Lembaga	366.932.760	304 Lembaga	374.271.415	304 Lembaga	381.756.844	304 Lembaga	389.391.980	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengurangan kantong-kantong kemiskinan

	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rumah Tangga	172 Rumah Tangga, Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 Unit	281.403.800	172 Rumah Tangga	287.031.876	172 Rumah Tangga	292.772.514	172 Rumah Tangga	298.627.964	172 Rumah Tangga	304.600.523	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengurangan kantong-kantong kemiskinan
	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar			Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	172 Rumah Tangga, Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 Unit	1.846.266.600	172 Rumah Tangga	1.883.191.932	172 Rumah Tangga	1.920.855.771	172 Rumah Tangga	1.959.272.886	172 Rumah Tangga	1.998.458.344	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengurangan kantong-kantong kemiskinan
	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Rumah	3 unit rumah	169.736.800	3 Unit	173.131.536	3 Unit	176.594.167	3 Unit	180.126.050	3 Unit	183.728.571	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengurangan kantong-kantong kemiskinan
	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	3 Dokumen	1.191.599.800	3 Dokumen	1.215.431.796	3 Dokumen	1.239.740.432	3 Dokumen	1.264.535.241	3 Dokumen	1.289.825.945	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengurangan kantong-kantong kemiskinan
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit Rumah	175 unit	3.737.810.000	175	3.812.566.200	175	3.888.817.524	175	3.966.593.874	175	4.045.925.752	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengurangan kantong-kantong kemiskinan

	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	67 Lokasi	16.265.399.600	67	16.590.707.592	67	16.922.521.744	67	17.260.972.179	67	17.606.191.622	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengurangan kantong-kantong kemiskinan
	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang 67 Lokasi			Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Lokasi	67	99.836.000	67	101.832.720	67	103.869.374	67	105.946.762	67	108.065.697	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengurangan kantong-kantong kemiskinan

6.5. Matriks Prioritas Bidang Kesetaraan Gender

Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Program Nomenklatur	Kegiatan Nomenklatur	Subkegiatan Nomenklatur	Satuan	Tahun ke 1 (2025)		Tahun ke 2 (2026)		Tahun ke-3 (2027)		Tahun ke 4 (2028)		Tahun ke-5 (2029)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Strategi Tagging
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro dari desil I-IV	Program Pemberdayaan usaha Menengah, usaha Kecil dan usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	946	1.766.257.40	976	1.839.557.082	30	21.028.000	30	21.900.662	30	22.809.539	Dinas Koperasi UMKM	Meningkatkan Pendapatan
	Jumlah Unit Usaha yang Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha	Program Pemberdayaan usaha Menengah, usaha Kecil dan usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Unit Usaha	55	210.725.500	60	219.470.608	60	228.578.638	60	238.064.6	60	247.944.3350	Dinas Koperasi UMKM	Meningkatkan Pendapatan

	Mikro yang melibatkan masyarakat dari desil I dan IV		Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan										52				
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi yang melibatkan usaha mikro dari desil I-IV	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Pelaku UMKM	100	468.633.040	120	488.081.311	120	77.566.061	120	80.785.052	120	84.137.632	Dinas Koperasi UMKM	Meningkatkan Pendapatan
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Program Perlindungan Perempuan	Penguatan & Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten	Penyediaan Kebutuhan Spesifik Bagi Perempuan Dalam Situasi Darurat & Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten	Orang	54	119.490.000	54	94.800.000	54	135.310.000	54	140.360.000	54	138.860.000	Dinas Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten / Kota	Penyediaan layanan Pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	lembaga	5	25.890.000	5	24.890.000	5	27.890.000	5	29.390.000	5	31.800.000	Dinas Sosial	Meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan anak
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak (PKHA)	Penyediaan layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	lembaga	10	106.300.000	10	93.470.000	10	114.510.000	10	117.140.000	10	119.970.000	Dinas Sosial	Meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan hak anak

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Jumlah penduduk kelompok desil I dan II yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada Tahun	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Orang	176	857.971.300	190	754.482.339	144	924.285.931	160	924.285.876	176	968.353.194	Dinas Tenaga Kerja	Meningkatkan Pendapatan
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja dari desil I, II, III dan IV (pekerja Rentan)	Program Hubungan Industrial		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5	59.351.400	5	52.192.402	5	63.938.810	5	65.405.44	5	66.987.22	Dinas Tenaga Kerja	Meningkatkan kualitas data HI
Urusan Bidang Kesehatan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	3.420	41.193.900	3.349	45.313.290	3.268	49.844.619	3.192	54.829.081	3.158	60.311.989	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	3.408	1.009.702 ⁶	3.329	7.110.672 ⁶	3.122	73.821.739	3.170	81.203.913	3.095	24.304 ^{89.3}	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran

	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	19.711	7.510.580	19.210	8.261.638	19.016	9.087.802	18.824	9.996.582	18.643	10.996.240	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran
	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Orang	74.000	23.133.770	81.400	25.447.147	89.540	27.991.862	98.494	30.791.048	108.343	33.870.153	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran

6.6. Matriks Prioritas Bidang Kesehatan

Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Program Nomenklatur	Kegiatan Nomenklatur	Subkegiatan Nomenklatur	Satuan	Tahun ke-1 (2025)		Tahun ke-2 (2026)		Tahun ke-3 (2027)		Tahun ke-4 (2028)		Tahun ke-5 (2029)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Strategi Tagiing
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ibu Hamil	3.381	50.890.400	3.381	51.890.400	3.381	52.928.564	3.381	53.987.135	3.381	105.526.333,44	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran
	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu Bersalin	3.937	25,035,000	3.937	25.535.700	3.937	26.046.414	3.937	26.046.414	3.937	51.912.576	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Bayi Baru Lahir	3.891	20,478,000	3.891	20,887,560	3.891	21,305,311	3.891	21,731,417	3.891	22,166,046	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran

	Standar		Kabupaten/Kota														
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Balita	19.194	16,418,900	19.194	16,747,278	19.194	17,082,224	19.194	17,423,868	19.194	17,772,345	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Anak Usia Pendidikan Dasar	47.643	113,550,000	47.643	115,821,000	47.643	118,137,420	47.643	120,500,168	47.643	122,910,172	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran
	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Penduduk Usia Produktif	66964	15,610,400	66964	15,922,608	66964	16,241,060	66964	16,565,881	66964	16,897,199	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Penduduk Usia Lanjut	50049	173,228,000	50049	176,692,560	50049	180,226,411	50049	183,830,939	50049	187,507,558	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran
	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penderita Hipertensi	10447	16,180,000	10447	16,503,600	10447	16,833,672	10447	17,170,345	10447	17,513,752	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran
	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Penderita Diabetes Melitus	3934	187,647,800	3934	191,400,756	3934	195,228,771	3934	199,133,347	3934	203,116,013	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1410	9,445,000	1410	9,633,900	1410	9,826,578	1410	10,023,110	1410	10,223,572	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran

Standar																	
Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang Terduga Menderita Tuberkulosis	4877	74,355,000	4877	75,842,100	4877	77,358,942	4877	78,906,121	4877	80,484,243	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang Terduga Menderita HIV	4877	136,800,000	4877	139,536,000	4877	142,326,720	4877	145,173,254	4877	148,076,719	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	554,025,500	1	152,730,618	1	155,785,230	1	158,900,935	1	162,078,954		Mengurangi Beban Pengeluaran	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	1	6.039.000	1	6.642.900	1	7.307.190	1	8.037.909	1	8.841.700	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	71,725,000	1	73,159,500	1	74,622,690	1	76,115,144	1	77,637,447	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	

Standar																
Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang Terduga Menderita Tuberkulosis	4877	74,355,000	4877	75,842,100	4877	77,358,942	4877	78,906,121	4877	80,484,243	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang Terduga Menderita HIV	4877	136,800,000	4877	139,536,000	4877	142,326,720	4877	145,173,254	4877	148,076,719	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	554,025,500	1	152,730,618	1	155,785,230	1	158,900,935	1	162,078,954		Mengurangi Beban Pengeluaran
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	1	6.039.000	1	6.642.900	1	7.307.190	1	8.037.909	1	8.841.700	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	71,725,000	1	73,159,500	1	74,622,690	1	76,115,144	1	77,637,447	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran

Wates, 8 Juli 2025
BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN